



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

BAB I PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 sebagai implementasi dari pertanggungjawaban keuangan daerah, yang digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan menggunakan basis akrual yang diharapkan dapat memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah dan menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Balangan juga menetapkan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu Peraturan Bupati Balangan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
3. Neraca, adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO), adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan Arus Kas (LAK), adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang diperlukan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar, oleh karena itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran ringkas pencapaian kebijakan keuangan dan target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 dan menjadi pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Kabupaten Balangan adalah daerah otonom di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Proses berdirinya Kabupaten Balangan memiliki sejarah yang panjang dengan Resolusi I tanggal 13 Desember 1963 Panitia Pembentukan Kabupaten Balangan (PPKB) menuntut agar Kewedanaan Balangan dijadikan Kabupaten Balangan. Tahun 1968 disampaikan lagi Resolusi II kepada Presiden RI dan disetiap kesempatan melakukan desakan kepada Bupati Kepala Dati II dan DPRD Dati II Hulu Sungai Utara (HSU) guna menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat. Sejak tahun 1970 usaha untuk menjadikan Balangan sebagai kabupaten sendiri terhenti karena pemerintah pusat pada masa itu belum mengijinkan. Setelah era Orde Baru yang digantikan oleh pemerintahan di era



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

reformasi yang melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka muncul kembali keinginan masyarakat Kabupaten Balangan untuk membentuk Kabupaten Balangan. Pada tanggal 13 Mei 1999 dibentuk (disegarkan) kembali. Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan (PPKB) yang diketuai oleh H. Syahrani Ahing. Sejak itu PPKB memulai aktivitasnya dengan melaksanakan rapat secara maraton dari tanggal 14, 15 dan 16 Mei 1999 guna menyiapkan berkas dan konsep resolusi ke DPRD HSU. Pada tanggal 17 Mei 1999 bertepatan dengan HUT Proklamasi Tentara ALRI Divisi Kalimantan, PPKB beserta tokoh Balangan menyampaikan Resolusi III ke DPRD HSU (DPRD masa transisi) yaitu Resolusi Masyarakat Balangan yang berisikan tuntutan pendirian Kabupaten Balangan. Untuk menanggapi hal tersebut maka DPRD HSU membentuk Tim Khusus. DPRD HSU menerbitkan Surat Keputusan Nomor 27 Tahun 2000 tanggal 6 Juli 2000 tentang Persetujuan Menyalurkan dan Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Balangan untuk mendirikan Kabupaten tersendiri. Atas dasar itu Bupati Hulu Sungai Utara mengeluarkan Rekomendasi Nomor 125/0889/Pem, tanggal 7 Juli 2000 sebagai bentuk dukungan. Pada tanggal 11 Februari 2002 terbit Surat Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Balangan yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 4 April 2002 terbit SK Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0110 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pemekaran Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diketuai oleh Drs. H. M. Arsyad dan diiringi pula dengan terbitnya SK DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Pembentukan Kabupaten Balangan. Pada tanggal 27 Januari 2003 dilangsungkan Sidang Paripurna DPR-RI yang membahas pembentukan dan pemekaran Kabupaten sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Februari 2003. Kemudian pada tanggal 8 April 2003 dilaksanakan pelantikan Pj. Bupati Balangan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada tahun 2023 Kabupaten Balangan sudah 20 Tahun berdiri dengan pergantian kepemimpinan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1 Pergantian Kepemimpinan Kabupaten Balangan Tahun 2003 - 2023

No.	Periode Jabatan	Bupati	Wakil Bupati	Ket.
1.	08 April 2003 s.d 16 April 2004	Drs. H. M. Arsyad	-	Penjabat
2.	16 April 2004 s.d 13 Maret 2005	Ir. H. Sefek Effendie, ME	-	Penjabat
3.	13 Maret 2005 s.d 13 Agustus 2005	Ir. H. Johanes Sriyono	-	Penjabat



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Periode Jabatan	Bupati	Wakil Bupati	Ket.
4.	13 Agustus 2005 s.d 13 Agustus 2010	Ir. H. Sefek Effendie, ME	Drs. H. Ansharuddin, M.Si	Definitif
5.	13 Agustus 2010 s.d 13 Maret 2015	Ir. H. Sefek Effendie, ME	Drs. H. Ansharuddin, M.Si	Definitif
6.	13 Maret 2015 s.d 17 Februari 2016	Drs. H. M. Hawari	-	Penjabat
7.	17 Februari 2016 s.d 26 September 2020	Drs. H. Ansharuddin, M.Si	H. Syaifullah	Definitif
8.	26 September 2020 s.d 17 Februari 2021	H. Syaifullah	-	Pelaksana Tugas Bupati selama Bupati Cuti Pilkada
9.	17 Februari 2021 s.d 04 Agustus 2022	H. Abdul Hadi, S.Ag., M.I. Kom.	H. Supiani, S.Sos, M.Si	(Wakil Bupati Meninggal dunia pada 04/08/2022)
10.	04 Agustus 2022 s.d sekarang	H. Abdul Hadi, S.Ag., M.I. Kom.	-	Definitif

Secara geografis, Kabupaten Balangan merupakan dataran dengan ketinggian antara 25 – 100 meter diatas permukaan laut, yang terletak pada posisi 2°01'37" Lintang Utara dan 02°35'58" Lintang Selatan, serta 114°50' dan 115°50' Bujur Timur. Kabupaten Balangan dengan luas sebesar 1.878,30 km², merupakan 5 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Paser
Provinsi Kalimantan Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Sebelah Timur : Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Paser
Provinsi Kalimantan Timur

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.63 – 372 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63 – 322 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 Tentang pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Selatan. Terhitung sejak ditetapkan pelantikan oleh Pj. Gubernur an. Mendagri tanggal 26 Februari 2021 hari Jum'at bertempat di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin yang dilantik sebanyak 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tanah Bumbu. Kabupaten Balangan dipimpin oleh H. Abdul Hadi, S.Ag, M.I.Kom sebagai Bupati dan untuk Wakil Bupati sudah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2022.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau entitas akuntansi sebanyak 30 (tiga puluh) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan;
9. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan;
15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja;
16. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman;
17. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
18. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
19. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah;
20. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Kecamatan Paringin;
24. Kecamatan Paringin Selatan;
25. Kecamatan Batumandi;
26. Kecamatan Lampihong;
27. Kecamatan Juai;
28. Kecamatan Halong;



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

29. Kecamatan Awayan;

30. Kecamatan Tebing Tinggi.

SKPD bertugas membantu Kepala Daerah dan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah yang diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah yang paling sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian. Bersamaan dalam menjalankan tugasnya, jumlah pegawai pada Pemerintah Kabupaten Balangan sampai dengan Desember 2023 sebanyak 3.279 orang yang terdiri dari 2.796 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 483 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2023. Adapun komposisi pegawai pada bulan Desember 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2 Komposisi Pegawai Per Desember 2023

No.	SKPD	Jumlah Pegawai (Orang)
ASN		
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan	88
2	Sekretariat DPRD	22
3	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24
5	Inspektorat	45
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	33
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	22
8	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	484
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	64
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	28
11	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	56
12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.292
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	105
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	56
15	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	44
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18
17	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Naker dan Transmigrasi	41
18	Dinas Perhubungan	30
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	29
20	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	39
21	Kecamatan Lampihong	24



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Jumlah Pegawai (Orang)
22	Kecamatan Awayan	20
23	Kecamatan Batumandi	23
24	Kecamatan Halong	21
25	Kecamatan Juai	18
26	Kecamatan Paringin	31
27	Kecamatan Paringin Selatan	25
28	Kecamatan Tebing Tinggi	14
29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	37
30	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	26
	Jumlah	2.796
PPPK		
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	412
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	24
	Jumlah	483
	Jumlah Total	3.279

Berdasarkan proyeksi hasil SP2020, jumlah penduduk Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah 136.120 jiwa. Pada tahun 2022, penyebaran penduduk Balangan bervariasi antar kecamatan dari yang terendah berjumlah 7.338 jiwa atau sebesar 5,46% di Kecamatan Tebing Tinggi yang luasnya 13,70% dari luas seluruh Balangan, hingga yang tertinggi berjumlah 20.850 jiwa atau sebesar 15,50% di Kecamatan Halong yang menguasai 5,33% wilayah Balangan. Kecamatan Paringin menjadi kecamatan kedua terbesar distribusi penduduknya dengan populasi 19.993 jiwa (15,02%). Dengan luas wilayah 100,04 km² atau hanya 5,33%, Kecamatan Paringin yang merupakan ibukota Kabupaten Balangan memiliki kepadatan 233 jiwa/km², sehingga menjadikan Paringin sebagai kecamatan terpadat di Kabupaten Balangan. Kecamatan terpadat selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Paringin Selatan (180 jiwa/km²) dan Lampihong (174 jiwa/km²) di posisi kedua dan ketiga.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini secara umum adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan. Sedangkan maksud dan tujuan secara khusus penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
 - c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas;
 - f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 No 09);
 - p. Peraturan Bupati Balangan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 130);
 - q. Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang atau Barang/Jasa/Surat Berharga yang Diterima Oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 17);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 02, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);
 - s. Peraturan Bupati Balangan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 131).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Agar laporan keuangan dapat dipahami oleh para *Stake Holder* secara luas, tidak terbatas pada kepentingan tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan serta menghindari kesalahpahaman dan multitafsir dalam memahami laporan maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai pengungkapan hal-hal penting yang diperlukan dalam penyajian Laporan Keuangan, dimana secara umum bertujuan untuk:

- a. Laporan keuangan mudah dipahami;
- b. Menghindari kesalahpahaman;
- c. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting;
- d. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas;
- e. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*).

Untuk lebih mudah memahami Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023, maka CaLK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- Bab II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Pencapaian Target Kinerja APBD, menjelaskan asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran, kebijakan keuangan yang ditetapkan, dan keberhasilan pencapaian target APBD.
- Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program.
- Bab IV : Kebijakan Akuntansi, menjelaskan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
- Bab V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, menjelaskan rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan.
- Bab VI : Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya.
- Bab VII : Penutup.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1 Ekonomi Makro

Struktur ekonomi suatu wilayah adalah gambaran bagaimana sektor-sektor perekonomian yang ada di wilayah tersebut dalam membentuk kekuatan yang mendorong laju perekonomian. Kontribusi yang terbentuk dari setiap sektor dalam pembentukan nilai tambah akan membentuk struktur ekonomi, sehingga dari komposisi itu akan diketahui potensi, dominasi, andalan, serta hasil pembangunan maupun perubahan yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah. Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan salah satunya di bidang ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peran sumber daya alam dalam menciptakan kenaikan pendapatan yang terakumulasi pada kategori-kategori lapangan usaha ekonomi, dan tercermin pada besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi per tahun. Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini sangat tergantung PAD kemampuan daerah dalam memberdayakan sumber alam dan manusia di daerah.

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023, menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan (dari data terakhir), yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 sebesar 5,22%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 sebesar 2,70%;
- c. Gini Ratio tahun 2023 sebesar 0,258 Poin;
- d. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 sebesar 72,97 poin;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2023 sebesar 4,17%;
- f. Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 sebesar 2,43%;
- g. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2023 sebesar Rp20.876,19 Miliar.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin kabupaten periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Berikut adalah tabel persentase penduduk miskin se-Kalimantan Selatan:

Tabel 3 Persentase Penduduk Miskin Se-Kalimantan Selatan

Uraian	Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2021	Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2022	Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2023	+ / (-) Tahun 2023 – 2022
Provinsi Kalimantan Selatan	4,83	4,49	4,29	(0,20)
1. Kabupaten Tanah Laut	4,57	3,86	3,73	(0,13)
2. Kabupaten Kotabaru	4,86	4,30	4,32	(0,02)
3. Kabupaten Banjar	3,04	2,79	2,44	(0,35)
4. Kabupaten Barito Kuala	5,11	4,75	4,60	(0,15)
5. Kabupaten Tapin	3,60	3,60	3,19	(0,41)
6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan	4,84	4,54	4,01	(0,53)
7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah	6,18	5,92	5,84	(0,08)
8. Kabupaten Hulu Sungai Utara	6,83	6,49	6,25	(0,24)
9. Kabupaten Tabalong	6,27	5,87	5,77	(0,10)
10. Kabupaten Tanah Bumbu	4,82	4,26	4,12	(0,14)
11. Kabupaten Balangan	6,07	5,83	5,22	(0,61)
12. Kota Banjarmasin	4,89	4,74	4,63	(0,11)
13. Kota Banjarbaru	4,40	4,17	3,92	(0,25)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS); Susenas, Modul Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 4 Jumlah Penduduk Miskin Se-Kalimantan Selatan

Uraian	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Tahun 2021	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Tahun 2022	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Tahun 2023	+ / (-) Tahun 2023 – 2022
Provinsi Kalimantan Selatan	208.108	195.702	188.928	(6.774)
1. Kabupaten Tanah Laut	15.862	13.541	13.222	(319)
2. Kabupaten Kotabaru	16.834	15.065	15.322	257
3. Kabupaten Banjar	18.067	16.711	14.773	(1.938)
4. Kabupaten Barito Kuala	16.099	15.055	14.707	(348)
5. Kabupaten Tapin	6.925	6.982	6.224	(758)
6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan	11.466	10.804	9.607	(1.197)
7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah	16.770	16.144	16.008	(136)
8. Kabupaten Hulu Sungai Utara	16.186	15.497	15.018	(479)
9. Kabupaten Tabalong	16.128	15.243	15.153	(90)
10. Kabupaten Tanah Bumbu	18.919	17.216	17.172	(44)
11. Kabupaten Balangan	8.062	7.825	7.074	(751)
12. Kota Banjarmasin	34.839	34.009	33.467	(542)
13. Kota Banjarbaru	11.951	11.610	11.181	(429)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS); Susenas, Modul Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2023

Dari tabel yang disajikan tersebut persentase penduduk miskin selama 3 tahun terakhir (2021 sampai 2023) cenderung fluktuatif. Jika dilihat dari angka provinsi, fluktuasi persentase penduduk miskin Kalimantan Selatan mengalami pergerakan yang sama seperti periode Semester 1 nasional untuk setiap tahunnya, baik tahun 2022 maupun 2023. Penurunan persentase penduduk miskin Kalimantan Selatan terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,20%. Secara spesifik, persentase penduduk miskin di Kabupaten Balangan pada tahun 2022 juga mengalami penurunan menjadi 5,83%, lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi 5,22%. Untuk provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga menjadi 195.702 jiwa. Pola yang sama juga terjadi pada jumlah penduduk miskin di Kabupaten Balangan, yaitu mengalami penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2022. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 menjadi 7.074 jiwa atau mengalami penurunan sebanyak 751 jiwa dibandingkan tahun 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5 Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-) Tahun 2023 – 2022
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan (Poin)	0,67	0,63	0,61	(0,02)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Balangan (Poin)	0,79	0,67	0,55	(0,12)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2023

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Balangan tahun 2023 sebesar 0,55 poin atau mengalami penurunan sebesar 0,12 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,67 poin. Hal ini sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 yang sebesar 0,61 poin atau mengalami penurunan sebesar 0,02 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,63 poin.

Tabel 6 Tingkat Keparahannya Kemiskinan (P2)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-) Tahun 2023 – 2022
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan (Poin)	0,13	0,13	0,16	0,03
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Balangan (Poin)	0,19	0,12	0,13	0,01

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2023

Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Balangan tahun 2022 sebesar 0,13 poin mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,12 poin. Artinya, terjadi kecenderungan pengeluaran penduduk miskin, sehingga ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin bertambah. Hal ini sejalan dengan indeks keparahannya kemiskinan provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 yang sebesar 0,16 dan mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,13 poin.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-) Tahun 2023 – 2022
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan (%)	Februari: 4,33	Februari: 4,20	Februari: 3,95	Februari: (0,25)
		Agustus: 4,95	Agustus: 4,74	Agustus: 4,31	Agustus: (0,43)
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan (%)	2,44	3,98	2,70	(1,28)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Balangan tahun 2023 sebesar 2,70 persen, mengalami penurunan 1,28 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,98 persen. Kemudian, TPT Provinsi Kalimantan Selatan periode Februari 2023 sebesar 3,95 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,25 persen dan periode Agustus 2022 mencapai 4,31 persen atau mengalami penurunan juga sebesar 0,43 persen dibandingkan tahun 2022 untuk periode yang saling bersesuaian.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk, nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Tabel 8 Indeks Gini (Gini Ratio)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-) Tahun 2023 – 2022
1	Provinsi Kalimantan Selatan (Poin)	0,33	0,32	0,31	(0,01)
2	Kabupaten Balangan (Poin)	0,28	0,27	0,26	(0,01)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2023

Indeks Ratio Gini Kabupaten Balangan tahun 2023 sebesar 0,26 poin atau mengalami penurunan 0,01 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,27 poin. Penurunan Indeks Ratio Gini Kabupaten Balangan sejalan dengan penurunan Indeks Ratio Gini Kalimantan Selatan tahun 2023 yang menjadi 0,31 atau mengalami penurunan 0,01 poin dibandingkan tahun 2022.

Indeks Gini Ratio indikator menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna atau satu.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80)

Tabel 9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-) Tahun 2023 – 2022
1	Provinsi Kalimantan Selatan (Poin)	71,28	71,84	72,50	0,66
2	Kabupaten Balangan (Poin)	71,58	72,20	72,97	0,77

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2023

Selama tahun 2021 hingga 2023, nilai IPM baik secara lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, maupun Kabupaten Balangan menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2023, IPM untuk level Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 72,50 poin, dan Kabupaten Balangan mencapai 72,97 poin. Dengan kata lain, IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Balangan tahun 2023 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,66 poin dan 0,77 poin jika dibandingkan dengan IPM tahun 2022.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi total menggambarkan peningkatan atau penambahan output suatu daerah secara total dalam kurun waktu tertentu. Nilai pertumbuhan ekonomi total tahun t dapat diperoleh melalui perhitungan selisih output yang dapat didekati dengan cara mengurangkan nilai PDRB ADHK total tahun t dengan nilai PDRB ADHK total tahun $t-1$.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan perekonomian di suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi tahun t menunjukkan persentase besarnya pertumbuhan ekonomi tahun t . Namun ada juga yang menyebutkan istilah “pertumbuhan ekonomi” tersebut langsung merujuk pada laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Laju pertumbuhan ekonomi dan/atau angka pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif maupun negatif. Nilai positif diperoleh ketika nilai PDRB ADHK tahun t lebih besar daripada nilai PDRB ADHK total tahun $t-1$ dan menunjukkan terjadinya peningkatan output perekonomian. Sedangkan nilai negatif diperoleh ketika nilai PDRB ADHK tahun t lebih kecil daripada nilai PDRB ADHK total tahun $t-1$ dan menunjukkan terjadinya penurunan output perekonomian. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa perekonomian suatu daerah semakin baik atau meningkat outputnya.

Hal yang perlu diingat yaitu ketika laju pertumbuhan ekonomi tahun t lebih kecil dari pada tahun $t-1$ namun masih bertanda positif, artinya perekonomian pada tahun t tetap mengalami pertumbuhan (bukan penurunan) dan hanya menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Sedangkan ketika laju pertumbuhan ekonomi tahun t bertanda negatif, artinya perekonomian pada tahun t mengalami penurunan pertumbuhan. Data yang digunakan untuk memperoleh Laju Pertumbuhan Ekonomi yaitu data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010).

Tabel 10 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Balangan (Persen)

No	Uraian	Kabupaten Balangan			
		Tahun 2021	Tahun 2022*	Tahun 2023**	+ / (-) Tahun 2023 – 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,54	0,35	3,99	3,64
2	Pertambangan dan Penggalan	3,84	6,19	3,62	(2,57)
3	Industri Pengolahan	4,26	4,57	3,54	(1,03)
4	Pengadaan Listrik, Gas	4,05	7,68	8,19	0,51
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,53	3,05	2,94	(0,11)
6	Konstruksi	0,74	4,25	7,33	3,08



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Kabupaten Balangan			
		Tahun 2021	Tahun 2022*	Tahun 2023**	+ / (-) Tahun 2023 – 2022
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,23	5,53	6,67	1,14
8	Transportasi dan Pergudangan	1,54	6,08	6,50	0,42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,34	5,45	9,11	3,66
10	Informasi dan Komunikasi	5,20	5,44	5,71	0,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	(3,99)	1,59	6,38	4,79
12	Real Estate	3,39	3,69	5,54	1,86
13	Jasa Perusahaan	4,34	7,28	8,59	1,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(2,44)	2,90	5,48	2,58
15	Jasa Pendidikan	2,15	5,48	4,79	(0,69)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,88	6,42	6,12	(0,3)
17	Jasa Lainnya	1,04	6,26	6,20	(0,06)
18	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3,27	5,24	4,17	(1,07)

Keterangan:

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

Selama PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan capaian perekonomian suatu daerah yang dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah dilihat dari kondisi perekonomiannya. Nilai PDRB merupakan agregasi dari seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

dalam kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan PDRB menunjukkan adanya kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu daerah yang secara langsung maupun tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Secara umum, tahun 2022 merupakan tahun kebangkitan kegiatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia, tanpa terkecuali Kabupaten Balangan. Perekonomian Kabupaten Balangan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang signifikan, setelah di tahun 2021 mengalami kontraksi yang membuat pertumbuhan ekonominya negatif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut salah satunya disebabkan meningkatnya permintaan ekspor batubara dunia. Selain itu, berbagai lapangan usaha juga sudah kembali dapat melakukan kegiatannya secara lebih leluasa. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan tahun 2023 hanya mencapai 4,17% kembali mengalami penurunan sebesar 1,07%.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori, yang meliputi:

- a. Inflasi ringan (*creeping inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- b. Inflasi Sedang (*Gallop ing Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- c. Inflasi Berat (*High Inflation*). Kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- d. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 11 Tingkat Inflasi

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik / (Turun)
1	Inflasi Kalimantan Selatan	2,55	6,99	2,43	(4,56)
2	Inflasi Kotabaru	2,68	8,65	3,81	(4,84)
3	Inflasi Tanjung	2,43	5,01	2,39	(2,62)
4	Inflasi Kota Banjarmasin	2,54	6,98	2,28	(4,70)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah), Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2023

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Balangan

Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier. Data PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang diperoleh dari data ini antara lain:

- a. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- b. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- c. Distribusi PDRB harga berlaku menurut kategori lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori lapangan usaha dalam suatu wilayah. Kategori-kategori lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
- d. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar daerah.
- e. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
- f. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan baik berupa ekspor maupun impor.
- g. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- h. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Tabel 12 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
Se Kalimantan Selatan (Miliar Rupiah) 2021 – 2023

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022*	Tahun 2023**	+ / - Tahun 2023 – 2022
1	Tanah Laut	15.332,87	19.022,37	20.165,71	1.143,34
2	Kotabaru	26.492,46	33.266,25	34.946,17	1.679,92
3	Banjar	17.934,87	21.071,22	22.634,50	1.563,28
4	Barito Kuala	9.174,92	9.867,87	10.567,48	699,61
5	Tapin	9.387,41	12.771,26	13.694,18	922,92
6	Hulu Sungai Selatan	7.125,71	8.442,00	9.165,46	723,46
7	Hulu Sungai Tengah	7.393,45	7.947,59	8.594,03	646,44
8	Hulu Sungai Utara	5.253,45	5.670,77	6.111,83	441,06
9	Tabalong	19.939,94	29.172,29	31.015,26	1.842,97
10	Tanah Bumbu	22.664,05	31.609,99	33.661,40	2.051,41
11	Balangan	12.361,06	19.847,84	20.876,19	1.028,35
12	Kota Banjarmasin	34.596,06	38.498,37	42.049,12	3.550,75
13	Kota Banjarbaru	10.003,08	11.786,38	13.328,09	1.541,71

Keterangan:

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (diolah)

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Proyeksi pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada potensi yang ada dengan memperhitungkan realisasi tahun sebelumnya serta penetapan besaran transfer ke daerah oleh Pemerintah Pusat. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terdapat peningkatan realisasi pendapatan yang sangat signifikan terutama pada pendapatan dana bagi hasil Dana Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi/Royalty Minerba. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	1.176.246.834.358,00	1.171.170.991.467,81	99,57%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	66.465.200.245,00	86.176.610.153,81	129,66%
Pendapatan Pajak Daerah	11.745.022.948,00	13.378.574.067,00	113,91%
Pendapatan Retribusi Daerah	1.656.949.000,00	1.675.985.562,00	101,15%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.848.192.278,00	9.827.731.257,00	99,79%
Lain - lain PAD yang sah	43.215.036.019,00	61.294.319.267,81	141,84%
PENDAPATAN TRANSFER	1.079.407.882.271,00	1.048.781.967.969,00	97,16%
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.007.619.445.049,00	988.875.135.528,00	98,14%
Dana Bagi Hasil	340.495.985.049,00	329.189.779.940,00	96,68%
Dana Alokasi Umum (DAU)	354.448.216.000,00	352.411.306.000,00	99,43%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	130.714.692.000,00	126.354.368.088,00	96,66%
Dana Penyesuaian	181.960.552.000,00	180.919.681.500,00	99,43%
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	71.788.437.222,00	59.906.832.441,00	83,45%
Pendapatan Bagi Hasil	71.788.437.222,00	59.906.832.441,00	83,45%
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.373.751.842,00	36.212.413.345,00	119,22%
Pendapatan Hibah	18.383.700.000,00	18.000.810.000,00	97,92%
Pendapatan Lainnya	11.990.051.842,00	18.211.603.345,00	151,89%



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	1.178.100.512.378,44	1.085.377.648.228,71	92,13%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	106.610.048.997,44	130.505.127.359,71	122,41%
Pendapatan Pajak Daerah	11.229.936.328,00	11.417.071.564,50	101,67%
Pendapatan Retribusi Daerah	1.940.788.660,00	1.890.123.555,00	97,39%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.222.655.481,44	12.391.951.413,00	81,40%
Lain - lain PAD yang sah	78.216.668.528,00	104.805.980.827,21	133,99%
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	960.515.215.000,00	869.042.358.904,00	90,48%
Dana Bagi Hasil	326.634.976.000,00	257.465.532.658,00	78,82%
Dana Alokasi Umum	346.527.140.000,00	346.527.140.000,00	100,00%
Dana Alokasi Khusus - Fisik	59.117.607.000,00	53.985.284.454,00	91,32%
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	74.434.091.000,00	59.779.051.872,00	80,31%
Dana Insentif Daerah	34.187.576.000,00	34.187.576.000,00	100,00%
Dana Desa	119.613.825.000,00	117.097.773.920,00	97,90%
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	75.220.000.000,00	59.172.919.137,00	78,67%
Pendapatan Bagi Hasil	75.220.000.000,00	59.172.919.137,00	78,67%
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35.755.248.381,00	26.657.242.828,00	74,55%
Pendapatan Hibah	16.500.000.000,00	6.776.710.373,00	41,07%
Pendapatan Lainnya	19.255.248.381,00	19.880.532.455,00	103,25%

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	1.776.547.267.309,00	1.785.363.522.998,54	100,50%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	75.756.717.222,00	92.767.033.520,54	122,45%
Pendapatan Pajak Daerah	11.768.350.048,00	12.308.860.393,50	104,59%
Pendapatan Retribusi Daerah	1.629.254.000,00	1.908.662.405,00	117,15%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.573.275.479,00	13.573.275.479,00	100,00%
Lain - lain PAD yang sah	48.785.837.695,00	64.976.235.243,04	133,19%
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.601.474.727.263,00	1.583.753.808.032,00	98,89%
Dana Bagi Hasil	985.472.014.600,00	994.362.274.685,00	100,90%
Dana Alokasi Umum	346.527.140.000,00	345.185.535.241,00	99,61%
Dana Alokasi Khusus - Fisik	57.597.485.000,00	52.704.154.259,00	91,50%
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	89.764.709.663,00	70.332.537.607,00	78,35%



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dana Insentif Daerah	13.333.129.000,00	13.333.129.000,00	100,00%
Dana Desa	108.780.249.000,00	107.836.177.240,00	99,13%
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	93.136.777.251,00	102.303.271.167,00	109,84%
Pendapatan Bagi Hasil	93.136.777.251,00	102.303.271.167,00	109,84%
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.179.045.573,00	6.539.410.279,00	105,83%
Pendapatan Hibah	6.176.710.373,00	6.537.075.079,00	105,83%
Pendapatan Lainnya	2.335.200,00	2.335.200,00	100,00%

Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	2.384.594.925.767,05	2.760.543.725.654,01	115,77%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	104.521.373.930,49	137.007.405.232,01	131,08%
Pendapatan Pajak Daerah	12.444.000.000,00	13.907.676.851,00	111,76%
Pendapatan Retribusi Daerah	2.161.698.666,00	2.366.139.331,00	109,46%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.874.367.772,00	14.874.367.772,00	100,00%
Lain - lain PAD yang sah	75.041.307.492,49	105.859.221.278,01	141,07%
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.178.018.839.712,00	2.509.925.057.280,00	115,24%
Dana Bagi Hasil	1.555.562.368.000,00	1.899.001.975.914,00	122,08%
Dana Alokasi Umum	361.852.722.000,00	361.821.744.450,00	99,99%
Dana Alokasi Khusus - Fisik	48.528.228.000,00	46.040.531.309,00	94,87%
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	88.323.365.712,00	73.995.919.307,00	83,78%
Dana Insentif Daerah	10.447.499.000,00	16.166.958.000,00	154,74%
Dana Desa	113.304.657.000,00	112.897.928.300,00	99,64%
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	95.878.001.751,56	113.011.263.142,00	117,87%
Pendapatan Bagi Hasil	95.878.001.751,56	113.011.263.142,00	117,87%
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.176.710.373,00	600.000.000,00	9,71%
Pendapatan Hibah	6.176.710.373,00	600.000.000,00	9,71%

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat peningkatan pendapatan yang sangat signifikan dari pada tiap tahunnya, sebagaimana tergambar pada grafik dibawah ini:

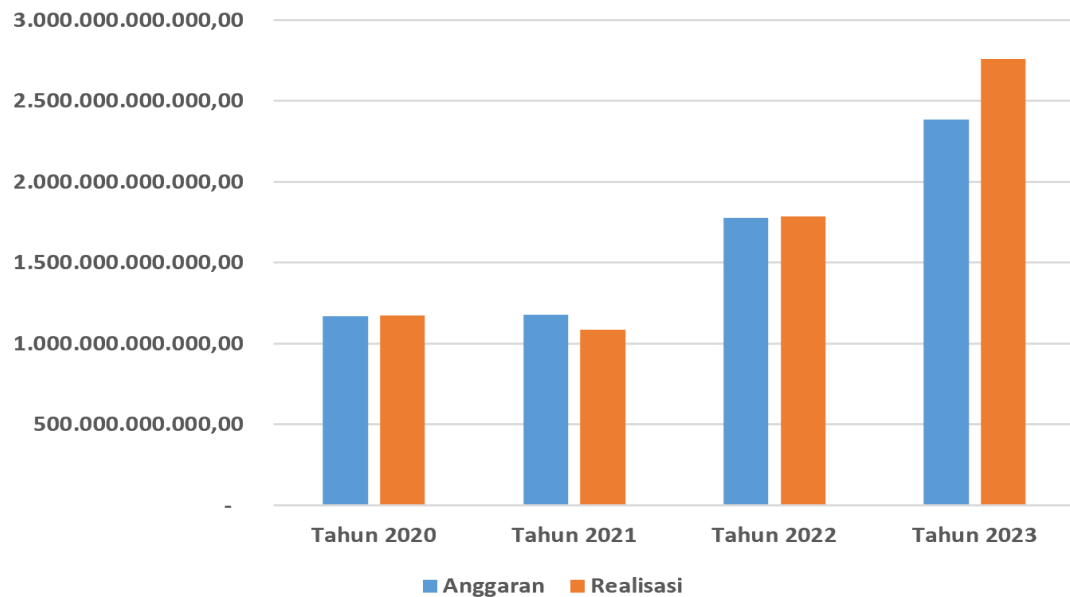


PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Grafik 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 s.d Tahun 2023



2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

2.2.1.1.1 Kebijakan Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah hingga Tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2023.
- Melakukan kegiatan pengumpulan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- d. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Balangan akan terus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan terus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
- f. Pendapatan Pajak Hotel diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2013.
- g. Pendapatan Pajak Restoran dan Katering diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2012.
- h. Pendapatan Pajak Hiburan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2012.
- i. Pendapatan Pajak Reklame diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2012.
- j. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2011.
- k. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2009.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- l. Pendapatan Pajak Parkir diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2011.
- m. Pendapatan Pajak Air Tanah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2013.
- n. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013.
- o. Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2011.
- p. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2014.
- q. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2011.
- r. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2009 Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah,



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- s. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012.
- t. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2012.
- u. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2018.
- v. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2013.
- w. Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2012.
- x. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2013.
- y. Pendapatan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2013.
- z. Pendapatan Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2011.
- aa. Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2013.
- bb. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2018.
- cc. Pendapatan Retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2018.
- dd. Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2016.
- ee. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012.
- ff. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan jenis retribusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- gg. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- hh. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2.1.1.2 Kebijakan Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

2.2.1.1.3 Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. Hasil kerja sama daerah;
- d. Jasa giro;
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. Pendapatan bunga;
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah;
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. Pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan dari BLUD; dan
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa sedangkan Transfer Pemerintah Daerah lainnya merupakan Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

2.2.1.2.1 Kebijakan Transfer Pemerintah Pusat

- a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Lainnya, sedangkan adanya perubahan atas peraturan diatas yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam LRA.

- b. Penganggaran Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH)

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Lainnya serta perhitungan lainnya dengan memperhitungkan kurang dan lebih salur tahun sebelumnya sedangkan adanya perubahan atas peraturan diatas yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam LRA.

- c. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Lainnya sedangkan adanya perubahan atas peraturan diatas yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam LRA.

- d. Penganggaran Dana Transfer Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Kabupaten Balangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Lainnya sedangkan adanya perubahan atas peraturan diatas yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam LRA.

e. Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID):

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Lainnya sedangkan adanya perubahan atas peraturan diatas yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam LRA.

f. Penganggaran Dana Desa:

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Lainnya sedangkan adanya perubahan atas peraturan diatas yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam LRA.

2.2.1.2.2 Transfer Antar Daerah

Pendapatan Antar Daerah merupakan Pendapatan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Balangan berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan untuk Pemerintah Kabupaten Balangan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

2.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

2.2.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2.2.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan pemerintah kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

belanja daerah. Secara khusus dengan kurang stabilnya ekonomi dunia Pemerintah mengeluarkan kebijakan belanja daerah dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adapun beberapa point pokok dari peraturan ini adalah:

- a. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- b. Belanja wajib dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022 Belanja wajib sebagaimana dimaksud tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

2.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

2.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

honorarium. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas,



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN sesuai dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

- 6) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- 8) Kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN tidak diperkenankan/ditidak diperbolehkan.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

2.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- d. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- e. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- f. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- g. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - 1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- h. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- i. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Peraturan.
- j. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- l. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- m. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang besarnya ditetapkan dalam Perkada. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- n. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah, Pimpinan dan anggota DPRD dan Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- p. Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

2.2.2.1.3 Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum. Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

2.2.2.1.4 Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

2.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 5) Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- e. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- f. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

2.2.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

2.2.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

- a. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2021, maka disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Balangan. Pemerintah daerah menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu, pemerintah daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah daerah menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja bantuan keuangan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sama seperti pendapatan dan belanja, pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali. Besaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 besarnya belum diproyeksikan, jika terdapat penghematan anggaran maka akan digunakan untuk menutupi kekurangan pendanaan pembangunan Tahun Anggaran 2023.

2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali. Diperkirakan akan dianggarkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah dialokasikan untuk penyertaan modal ke Bank Kalsel, Perusahaan Daerah dan Bank BPR.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Balangan selama Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.3.1 Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp2.384.594.925.767,05 dan terealisasi sebesar Rp2.760.543.725.654,01 atau mencapai 115,77% melampaui dari target anggaran Pendapatan yang ditentukan sebesar Rp375.948.799.886,96 atau 15,77% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp104.521.373.930,49 dan terealisasi sebesar Rp137.007.405.232,01 atau mencapai 131,08%, sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah melebihi target sebesar Rp32.486.031.301,52 atau 31,08% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

2.3.1.2 Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Balangan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.273.896.841.463,56 dan terealisasi sebesar Rp2.622.936.320.422,00 atau mencapai 115,35%, sehingga melebihi target sebesar Rp349.039.478.958,44 atau 15,35% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Pendapatan transfer pemerintah pusat – dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Pendapatan Bagi Hasil Dari Pemerintah Provinsi.

2.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Balangan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.176.710.373,00 dan terealisasi sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Rp600.000.000,00 atau 9,71%, sehingga target tidak tercapai sebesar Rp5.576.710.373,00 atau 90,29% target realisasi tidak dapat dicapai. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

2.3.2 Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp2.557.167.298.075,00 dan terealisasi sebesar Rp2.292.344.562.265,65 atau hanya mencapai 89,64%, sehingga anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp264.822.735.809,35 atau 10,36%. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

2.3.2.1 Belanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp1.578.337.781.963,00 dan terealisasi sebesar Rp1.403.981.021.061,62 atau hanya mencapai 88,95%, sehingga anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp174.356.760.901,38 atau 11,05%.

2.3.2.2 Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp666.352.162.737,00 dan terealisasi sebesar Rp580.674.088.157,03 atau hanya mencapai 87,14%, sehingga anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp85.678.074.579,97 atau 12,86%.

2.3.2.3 Belanja Tak Terduga

Anggaran Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp5.603.265.908,00 dan terealisasi sebesar Rp1.602.500.000,00 atau hanya mencapai 28,60%, sehingga anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp4.000.765.908,00 atau 71,40%.

2.3.2.4 Belanja Transfer

Anggaran Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp306.874.087.467,00 dan terealisasi sebesar Rp306.086.953.047,00 atau mencapai 99,74%, sehingga anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp787.134.420,00 atau 0,26%.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, komponennya meliputi: (a) asas umum pengelolaan keuangan daerah; (b) pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; (e) penyusunan dan penetapan APBD; (f) pelaksanaan dan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (i) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; (j) pengelolaan kas umum daerah; (k) pengelolaan piutang daerah; (l) pengelolaan investasi daerah; (m) pengelolaan barang milik daerah; (n) pengelolaan dana cadangan; (o) pengelolaan utang daerah; (p) Pembinaan dan pengawasan, pengelolaan keuangan daerah; (q) penyelesaian kerugian daerah; (r) pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; (s) pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Balangan pada Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tahapan dan proses perencanaan sampai dengan penganggaran mulai dari APBD Murni sampai dengan Perubahan APBD termasuk di dalamnya proses pergeseran Pergeseran APBD menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD menggunakan Aplikasi *Financial Management Information System (FMIS)* atau disebut juga dengan *Simda Next Generation (Simda-NG)* merupakan hasil pengembangan aplikasi SIMDA yang dikelola oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2023 menetapkan tema Pembangunan daerah adalah **“Peningkatan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Potensi Daerah Untuk Memajukan Perekonomian Berkelanjutan”** yang dituangkan dijabarkan dalam 6 (Enam) prioritas utama dan 47 (Empat puluh tujuh) sub prioritas sebagai target kinerja dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- a. Prioritas 1: Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah, dengan sasaran sebagai berikut:
- 1) Pembangunan jembatan duplikat dan jalan kembar Kota Paringin
 - 2) Peningkatan dan perbaikan ruas jalan dan jembatan lingkup kabupaten
 - 3) Peningkatan akses air bersih dan Sanitasi
 - 4) Rehabilitasi saluran irigasi
 - 5) Revitalisasi Taman Sanggam (lanjutan)
 - 6) Pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi darat (Pemasangan *traffic light* dan PJU)
 - 7) Peningkatan ketersediaan rumah layak huni
 - 8) Pembangunan asrama putera istana anak yatim
 - 9) Pemenuhan DED Penataan Kota Paringin
- b. Prioritas 2: Pemulihan Ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *corona virus disease* 2019 dan Transformasi Struktural Dalam Perekonomian, dengan sasaran sebagai berikut:
- 1) Penyaluran sarana produksi pertanian, pupuk dan obat-obatan
 - 2) Pembangunan kampung perikanan/ *restocking* budidaya ikan
 - 3) Penyediaan cadangan pangan masyarakat
 - 4) Pembangunan UPPB dan Peremajaan tanaman perkebunan (karet)
 - 5) Rehabilitasi kolam BBI Gunung Manau
 - 6) Swasembada daging
 - 7) Meningkatkan daya saing UMKM (Pelatihan pemasaran, pengemasan; Fasilitas kemitraan; Pengawasan koperasi, Pelatihan desain sasirangan, pelatihan kualitas untuk ekspor; Fasilitas jaminan halal)
 - 8) Meningkatkan sarana prasarana perdagangan (Revitalisasi pasar)
 - 9) Mall Pelayanan Publik, Kemudahan berinvestasi
 - 10) Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Desa; Pelatihan operator alat berat
 - 11) Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Batarius
 - 12) Pengembangan Obyek Wisata Maranting
 - 13) Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Tayak
- c. Prioritas 3: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran sebagai berikut:
- 1) Pengembangan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - 2) Pembangunan TPS3R dan Pengelolaan Sampah
- d. Prioritas 4: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 1) Bantuan beasiswa kepada murid tidak mampu dan berprestasi
 - 2) Insentif untuk guru dan tenaga kependidikan
 - 3) Pembangunan kelas untuk paket A/B/C
 - 4) Insentif pondok pesantren
 - 5) Pelatihan muatan lokal guru SD dan SMP
 - 6) Kerjasama dengan BPJS untuk jaminan kesehatan seluruh penduduk Balangan
 - 7) Peningkatan SDM kesehatan
 - Penambahan tenaga kesehatan khususnya bidan (daerah terpencil)
 - Penambahan dokter anestesi di RSUD
 - Peningkatan kompetensi bidan
 - 8) Penambahan sarana dan prasarana (penambahan poskesdes dan rehab poskesdes)
 - 9) Penanganan stunting (PMT untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), ibu hamil anemia, balita kurus, dan kelas *parenting*)
 - 10) Peningkatan upaya promosi kesehatan tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
 - 11) Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Balangan
- e. Prioritas 5: Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan *Monitoring Center for Prevention* (Pusat Pemantauan Pencegahan) atau MCP KPK sebagai upaya mewujudkan daerah zero tindak pidana korupsi.
 - 2) Optimalisasi Pelayanan Publik
 - 3) Meningkatkan Penggunaan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pemerintahan
- f. Prioritas 6: Peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan, dengan sasaran sebagai berikut:
1. Pemberian bantuan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (fakir miskin, orang jompo, disabilitas, orang terlantar dsb)
 2. Peningkatan pembinaan organisasi masyarakat yang aktif
 3. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
 4. Penerapan Kebijakan Kabupaten Layak Anak
 5. Penurunan Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 6. Bantuan untuk Rumah Ibadah
 7. Revitalisasi, pengembangan dan pembinaan kebudayaan dan adat istiadat, kesenian lokal
 8. Pelaksanaan acara kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala
 9. Pelestarian cagar budaya



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

3.1.1 Tahap Perencanaan dan Penganggaran

Tahapan perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan dan penetapan perencanaan dan penganggaran yang digunakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.
2. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Peraturan terkait tahapan perencanaan dan penjelasan mengenai tahapan dari penganggaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan

- 1) Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 06 Juli 2022.
- 2) Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2023.

b. Tahapan Penganggaran

- 1) APBD Murni Tahun 2023
 - a) Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 disepakati dengan persetujuan bersama antara tanggal 08 Agustus 2022 dengan nomor kesepakatan 130.13/010/PEM/2022 dan 188.4/09/DPRD-BLG/Tahun 2022.
 - b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 disepakati dengan persetujuan bersama antara tanggal 08 Agustus 2022 dengan nomor kesepakatan 130.13/010.1/PEM/2022 dan 188.4/010/DPRD-BLG/Tahun 2022.
 - c) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui Bersama pada tanggal 17 November 2022 dengan nomor kesepakatan 130.5/019/PEM/2022 dan 188.342/15/DPRD-BLG/Tahun 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- d) Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0855/KUM/2022 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Balangan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada 12 Desember 2022.
- e) Keputusan DPRD Nomor 188.342/33/DPRD-BLG Tahun 2022 tentang Penetapan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- f) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ditetapkan tanggal 28 Desember 2022.
- g) Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ditetapkan tanggal 28 Desember 2022.

Tabel 17 Komposisi APBD Murni Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran
Pendapatan	1.947.568.265.686,00
Pendapatan Asli Daerah	75.226.258.220,00
Pendapatan Pajak Daerah	12.194.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah	1.801.329.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.237.460.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	45.993.469.220,00
Pendapatan Transfer	1.866.165.297.093,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.777.838.301.015,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	88.326.996.078,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.176.710.373,00
Pendapatan Hibah	6.176.710.373,00
Belanja	2.067.568.265.686,00
Belanja Operasi	1.317.146.042.475,00
Belanja Pegawai	536.426.431.110,00
Belanja Barang Dan Jasa	666.140.508.118,00
Belanja Hibah	110.235.077.510,00
Belanja Bantuan Sosial	4.344.025.737,00
Belanja Modal	448.851.411.561,00
Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	54.643.235.911,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	97.322.974.300,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	290.500.672.250,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.577.408.400,00
Belanja Modal Aset Lainnya	807.120.700,00
Belanja Tak Terduga	26.386.663.150,00
Belanja Tak Terduga	26.386.663.150,00
Belanja Transfer	275.184.148.500,00
Belanja Bagi Hasil	1.766.884.500,00
Belanja Bantuan Keuangan	273.417.264.000,00
Surplus / (Defisit)	(120.000.000.000,00)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	170.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	170.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	50.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	120.000.000.000,00

2) Pergeseran Anggaran Pertama

Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan untuk penyesuaian penambahan anggaran DAK yaitu pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, serta Dinas Kesehatan. Penyesuaian objek belanja pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Serta RSUD Balangan. Kemudian ada Penyesuaian penambahan anggaran dana insentif fiskal pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Mekanisme dan kriteria pergeseran APBD Murni mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pergeseran anggaran ditetapkan pada tanggal 3 April 2023 dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Nomor 106 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan komposisi APBD sebagai berikut:

Tabel 18 Komposisi APBD Tahun Anggaran 2023 Pada Pergeseran Anggaran Pertama

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Pergeseran	Bertambah / (Berkurang)
Pendapatan	1.947.568.265.686,00	2.024.176.435.686,00	76.608.170.000,00
Pendapatan Asli Daerah	75.226.258.220,00	75.226.258.220,00	-
Pendapatan Pajak Daerah	12.194.000.000,00	12.194.000.000,00	-
Hasil Retribusi Daerah	1.801.329.000,00	1.801.329.000,00	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.237.460.000,00	15.237.460.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.993.469.220,00	45.993.469.220,00	-
Pendapatan Transfer	1.866.165.297.093,00	1.942.773.467.093,00	76.608.170.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.777.838.301.015,00	1.854.446.471.015,00	76.608.170.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	88.326.996.078,00	88.326.996.078,00	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.176.710.373,00	6.176.710.373,00	-
Pendapatan Hibah	6.176.710.373,00	6.176.710.373,00	-
Belanja	2.067.568.265.686,00	2.144.176.435.686,00	76.608.170.000,00
Belanja Operasi	1.317.146.042.475,00	1.358.596.335.675,00	41.450.293.200,00
Belanja Pegawai	536.426.431.110,00	536.426.431.110,00	-
Belanja Barang dan Jasa	666.140.508.118,00	706.580.760.018,00	40.440.251.900,00
Belanja Hibah	110.235.077.510,00	111.245.118.810,00	1.010.041.300,00
Belanja Bantuan Sosial	4.344.025.737,00	4.344.025.737,00	-
Belanja Modal	448.851.411.561,00	484.009.288.361,00	35.157.876.800,00
Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.643.235.911,00	65.557.204.211,00	10.913.968.300,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.322.974.300,00	103.145.993.800,00	5.823.019.500,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	290.500.672.250,00	308.921.561.250,00	18.420.889.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.577.408.400,00	4.577.408.400,00	-
Belanja Modal Aset Lainnya	807.120.700,00	807.120.700,00	-
Belanja Tak Terduga	26.386.663.150,00	26.386.663.150,00	-
Belanja Tak Terduga	26.386.663.150,00	26.386.663.150,00	-
BELANJA TRANSFER	275.184.148.500,00	275.184.148.500,00	-
Belanja Bagi Hasil	1.766.884.500,00	1.766.884.500,00	-
Belanja Bantuan Keuangan	273.417.264.000,00	273.417.264.000,00	-
Surplus / (Defisit)	(120.000.000.000,00)	(120.000.000.000,00)	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	170.000.000.000,00	170.000.000.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Pergeseran	Bertambah / (Berkurang)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	170.000.000.000,00	170.000.000.000,00	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
Pembiayaan Netto	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00	-

3) Pergeseran Anggaran Kedua

Perubahan Kedua Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan untuk penyesuaian penambahan kembali anggaran DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Insentif Daerah (DID) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemudian adanya penyesuaian uraian sub rincian objek pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta adanya penyesuaian anggaran pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Kecamatan Lampihong, Kecamatan Halong, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Daerah. Mekanisme dan kriteria pergeseran mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pergeseran anggaran ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2023 dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan komposisi APBD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 19 Komposisi APBD Tahun Anggaran 2023 Pada Pergeseran Anggaran Kedua

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Pergeseran	Bertambah / (Berkurang)
Pendapatan	1.947.568.265.686,00	2.024.176.435.686,00	76.608.170.000,00
Pendapatan Asli Daerah	75.226.258.220,00	75.226.258.220,00	-
Pendapatan Pajak Daerah	12.194.000.000,00	12.194.000.000,00	-
Hasil Retribusi Daerah	1.801.329.000,00	1.801.329.000,00	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.237.460.000,00	15.237.460.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.993.469.220,00	45.993.469.220,00	-
Pendapatan Transfer	1.866.165.297.093,00	1.942.773.467.093,00	76.608.170.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.777.838.301.015,00	1.854.446.471.015,00	76.608.170.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	88.326.996.078,00	88.326.996.078,00	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.176.710.373,00	6.176.710.373,00	-
Pendapatan Hibah	6.176.710.373,00	6.176.710.373,00	-
Belanja	2.067.568.265.686,00	2.144.176.435.686,00	76.608.170.000,00
Belanja Operasi	1.317.146.042.475,00	1.358.781.609.675,00	41.635.567.200,00
Belanja Pegawai	536.426.431.110,00	536.426.431.110,00	-
Belanja Barang dan Jasa	666.140.508.118,00	706.766.034.018,00	40.625.525.900,00
Belanja Hibah	110.235.077.510,00	111.245.118.810,00	1.010.041.300,00
Belanja Bantuan Sosial	4.344.025.737,00	4.344.025.737,00	-
Belanja Modal	448.851.411.561,00	485.263.200.361,00	36.411.788.800,00
Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.643.235.911,00	65.557.204.211,00	10.913.968.300,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.322.974.300,00	103.159.993.800,00	5.837.019.500,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	290.500.672.250,00	310.161.473.250,00	19.660.801.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.577.408.400,00	4.577.408.400,00	-
Belanja Modal Aset Lainnya	807.120.700,00	807.120.700,00	-
Belanja Tak Terduga	26.386.663.150,00	24.947.477.150,00	(1.439.186.000,00)
Belanja Tak Terduga	26.386.663.150,00	24.947.477.150,00	(1.439.186.000,00)
Belanja Transfer	275.184.148.500,00	275.184.148.500,00	-
Belanja Bagi Hasil	1.766.884.500,00	1.766.884.500,00	-
Belanja Bantuan Keuangan	273.417.264.000,00	273.417.264.000,00	-
Surplus / (Defisit)	(120.000.000.000,00)	(120.000.000.000,00)	-
Penerimaan Pembiayaan Daerah	170.000.000.000,00	170.000.000.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Pergeseran	Bertambah / (Berkurang)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	170.000.000.000,00	170.000.000.000,00	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
Pembiayaan Netto	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00	-

4) Pergeseran Anggaran Ketiga

Perubahan Ketiga Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan untuk penyesuaian anggaran belanja pegawai yaitu gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Awayan, serta adanya penyesuaian anggaran pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mekanisme dan kriteria pergeseran mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pergeseran ketiga ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2023 dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan komposisi anggaran sebagai berikut:

Tabel 20 Komposisi APBD Tahun Anggaran 2023 Pada Pergeseran Anggaran Ketiga

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Pergeseran	Bertambah / (Berkurang)
Pendapatan	1.947.568.265.686,00	2.024.176.435.686,00	76.608.170.000,00
Pendapatan Asli Daerah	75.226.258.220,00	75.226.258.220,00	-
Pendapatan Pajak Daerah	12.194.000.000,00	12.194.000.000,00	-
Hasil Retribusi Daerah	1.801.329.000,00	1.801.329.000,00	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.237.460.000,00	15.237.460.000,00	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	45.993.469.220,00	45.993.469.220,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Pergeseran	Bertambah / (Berkurang)
Pendapatan Transfer	1.866.165.297.093,00	1.942.773.467.093,00	76.608.170.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.777.838.301.015,00	1.854.446.471.015,00	76.608.170.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	88.326.996.078,00	88.326.996.078,00	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.176.710.373,00	6.176.710.373,00	-
Pendapatan Hibah	6.176.710.373,00	6.176.710.373,00	-
Belanja	2.067.568.265.686,00	2.144.176.435.686,00	76.608.170.000,00
Belanja Operasi	1.317.146.042.475,00	1.358.781.609.675,00	41.635.567.200,00
Belanja Pegawai	536.426.431.110,00	536.426.431.110,00	-
Belanja Barang Dan Jasa	666.140.508.118,00	706.766.034.018,00	40.625.525.900,00
Belanja Hibah	110.235.077.510,00	111.245.118.810,00	1.010.041.300,00
Belanja Bantuan Sosial	4.344.025.737,00	4.344.025.737,00	-
Belanja Modal	448.851.411.561,00	485.263.200.361,00	36.411.788.800,00
Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	54.643.235.911,00	65.557.204.211,00	10.913.968.300,00
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	97.322.974.300,00	103.159.993.800,00	5.837.019.500,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	290.500.672.250,00	310.161.473.250,00	19.660.801.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.577.408.400,00	4.577.408.400,00	-
Belanja Modal Aset Lainnya	807.120.700,00	807.120.700,00	-
Belanja Tak Terduga	26.386.663.150,00	24.947.477.150,00	(1.439.186.000,00)
Belanja Tak Terduga	26.386.663.150,00	24.947.477.150,00	(1.439.186.000,00)
Belanja Transfer	275.184.148.500,00	275.184.148.500,00	-
Belanja Bagi Hasil	1.766.884.500,00	1.766.884.500,00	-
Belanja Bantuan Keuangan	273.417.264.000,00	273.417.264.000,00	-
Surplus / (Defisit)	(120.000.000.000,00)	(120.000.000.000,00)	-
Penerimaan Pembiayaan Daerah	170.000.000.000,00	170.000.000.000,00	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	170.000.000.000,00	170.000.000.000,00	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
Pembiayaan Netto	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 5) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
- a) Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2023 disepakati dengan persetujuan bersama antara tanggal 08 Agustus 2023 dengan nomor kesepakatan 130.5/009/PEM/2023 dan 188.342/4/DPRD-BLG/2023.
 - b) Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 disepakati dengan persetujuan bersama antara tanggal 08 Agustus 2023 dengan nomor kesepakatan 130.5/010/PEM/2023 dan 188.342/5/DPRD-BLG/2023.
 - c) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui Bersama pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan nomor kesepakatan 130.5/013/PEM/2023 dan 188.342/8/DPRD-BLG/2023.
 - d) Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0810/KUM/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada 19 September 2023.
 - e) Persetujuan Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 nomor kesepakatan 188.342/24/DPRD-BLG/2023.
 - f) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ditetapkan tanggal 02 Oktober 2023.
 - g) Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ditetapkan tanggal 02 Oktober 2023.

Tabel 21 Komposisi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
Pendapatan	1.947.568.265.686,00	2.384.594.925.767,05	437.026.660.081,05
Pendapatan Asli Daerah	75.226.258.220,00	104.521.373.930,49	29.295.115.710,49
Pendapatan Pajak Daerah	12.194.000.000,00	12.444.000.000,00	250.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah	1.801.329.000,00	2.161.698.666,00	360.369.666,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.237.460.000,00	14.874.367.772,00	(363.092.228,00)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	45.993.469.220,00	75.041.307.492,49	29.047.838.272,49
Pendapatan Transfer	1.866.165.297.093,00	2.273.896.841.463,56	407.731.544.370,56
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.777.838.301.015,00	2.178.018.839.712,00	400.180.538.697,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	88.326.996.078,00	95.878.001.751,56	7.551.005.673,56
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.176.710.373,00	6.176.710.373,00	-
Pendapatan Hibah	6.176.710.373,00	6.176.710.373,00	-
Belanja	2.067.568.265.686,00	2.557.167.298.075,00	489.599.032.389,00
Belanja Operasi	1.317.146.042.475,00	1.578.337.781.963,00	261.191.739.488,00
Belanja Pegawai	536.426.431.110,00	502.425.067.881,00	(34.001.363.229,00)
Belanja Barang Dan Jasa	666.140.508.118,00	889.889.966.575,00	223.749.458.457,00
Belanja Hibah	110.235.077.510,00	180.582.121.770,00	70.347.044.260,00
Belanja Bantuan Sosial	4.344.025.737,00	5.440.625.737,00	1.096.600.000,00
Belanja Modal	448.851.411.561,00	666.352.162.737,00	217.500.751.176,00
Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	1.035.250.000,00	35.250.000,00
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	54.643.235.911,00	173.356.943.387,00	118.713.707.476,00
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	97.322.974.300,00	116.951.551.100,00	19.628.576.800,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	290.500.672.250,00	368.065.180.950,00	77.564.508.700,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.577.408.400,00	5.874.358.400,00	1.296.950.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	807.120.700,00	1.068.878.900,00	261.758.200,00
Belanja Tak Terduga	26.386.663.150,00	5.603.265.908,00	(20.783.397.242,00)
Belanja Tak Terduga	26.386.663.150,00	5.603.265.908,00	(20.783.397.242,00)
Belanja Transfer	275.184.148.500,00	306.874.087.467,00	31.689.938.967,00
Belanja Bagi Hasil	1.766.884.500,00	1.827.921.467,00	61.036.967,00
Belanja Bantuan Keuangan	273.417.264.000,00	305.046.166.000,00	31.628.902.000,00
Surplus / (Defisit)	(120.000.000.000,00)	(172.572.372.307,95)	(52.572.372.307,95)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	170.000.000.000,00	222.572.372.307,95	52.572.372.307,95
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	170.000.000.000,00	222.572.372.307,95	52.572.372.307,95
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
Pembiayaan Netto	120.000.000.000,00	172.572.372.307,95	52.572.372.307,95

6) Pergeseran Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan untuk penyesuaian anggaran belanja pegawai yaitu gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat DPRD, serta adanya penambahan belanja pada Puskesmas Paringin, Puskesmas Paringin Selatan, Puskesmas Lampihong dan Puskesmas Halong. Perubahan Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2023 dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 86 Tahun 2023 Tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penetapan peraturan ini sebagai dasar pengakuan realisasi anggaran pada LRA Tahun Anggaran 2023 sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Tabel 22 Komposisi Pergeseran Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Perubahan	Anggaran Pergeseran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
PENDAPATAN	2.384.594.925.767,05	2.384.626.523.617,05	31.597.850,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	104.521.373.930,49	104.552.971.780,49	31.597.850,00
Pendapatan Pajak Daerah	12.444.000.000,00	12.444.000.000,00	-
Hasil Retribusi Daerah	2.161.698.666,00	2.161.698.666,00	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.874.367.772,00	14.874.367.772,00	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.041.307.492,49	75.072.905.342,49	31.597.850,00
PENDAPATAN TRANSFER	2.273.896.841.463,56	2.273.896.841.463,56	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.178.018.839.712,00	2.178.018.839.712,00	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.878.001.751,56	95.878.001.751,56	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Perubahan	Anggaran Pergeseran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.176.710.373,00	6.176.710.373,00	-
Pendapatan Hibah	6.176.710.373,00	6.176.710.373,00	-
BELANJA	2.557.167.298.075,00	2.557.198.895.925,00	31.597.850,00
BELANJA OPERASI	1.578.337.781.963,00	1.578.369.379.813,00	31.597.850,00
Belanja Pegawai	502.425.067.881,00	502.425.067.881,00	-
Belanja Barang dan Jasa	889.889.966.575,00	889.921.564.425,00	31.597.850,00
Belanja Hibah	180.582.121.770,00	180.582.121.770,00	-
Belanja Bantuan Sosial	5.440.625.737,00	5.440.625.737,00	-
BELANJA MODAL	666.352.162.737,00	666.352.162.737,00	-
Belanja Modal Tanah	1.035.250.000,00	1.035.250.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.356.943.387,00	173.356.943.387,00	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.951.551.100,00	116.951.551.100,00	-
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	368.065.180.950,00	368.065.180.950,00	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.874.358.400,00	5.874.358.400,00	-
Belanja Modal Aset Lainnya	1.068.878.900,00	1.068.878.900,00	-
BELANJA TAK TERDUGA	5.603.265.908,00	5.603.265.908,00	-
Belanja Tak Terduga	5.603.265.908,00	5.603.265.908,00	-
BELANJA TRANSFER	306.874.087.467,00	306.874.087.467,00	-
Belanja Bagi Hasil	1.827.921.467,00	1.827.921.467,00	-
Belanja Bantuan Keuangan	305.046.166.000,00	273.417.264.000,00	-
SURPLUS / (DEFISIT)	(172.572.372.307,95)	(172.572.372.307,95)	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	222.572.372.307,95	222.572.372.307,95	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	222.572.372.307,95	222.572.372.307,95	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
PEMBIAYAAN NETTO	172.572.372.307,95	172.572.372.307,95	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

3.1.2 Gambaran Umum Realisasi Anggaran

Kinerja Keuangan Daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2023 dari sisi pendapatan sebesar 115,77% sedangkan dari sisi belanja sebesar 89,64% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 23 Realisasi Anggaran Tahun 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
PENDAPATAN DAERAH	2.384.594.925.767,05	2.760.543.725.654,01	115,77
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	104.521.373.930,49	137.007.405.232,01	131,08
Pendapatan Pajak Daerah	12.444.000.000,00	13.907.676.851,00	111,76
Pendapatan Retribusi Daerah	2.161.698.666,00	2.366.139.331,00	109,46
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.874.367.772,00	14.874.367.772,00	100,00
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	75.041.307.492,49	105.859.221.278,01	141,07
PENDAPATAN TRANSFER	2.273.896.841.463,56	2.622.936.320.422,00	115,35
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.178.018.839.712,00	2.509.925.057.280,00	115,54
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.555.562.368.000,00	1.899.001.975.914,00	122,08
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	361.852.722.000,00	361.821.744.450,00	99,99
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	48.528.228.000,00	46.040.531.309,00	94,87
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	88.323.365.712,00	73.995.919.307,00	83,78
Dana Insentif Daerah	10.447.499.000,00	16.166.958.000,00	154,74
Dana Desa	113.304.657.000,00	112.897.928.300,00	99,64
Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.878.001.751,56	113.011.263.142,00	117,87
Pendapatan Bagi Hasil	95.878.001.751,56	113.011.263.142,00	117,87
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.176.710.373,00	600.000.000,00	9,71
Pendapatan Hibah	6.176.710.373,00	600.000.000,00	9,71
BELANJA DAERAH	2.557.167.298.075,00	2.292.344.562.265,65	89,64
BELANJA OPERASI	1.578.337.781.963,00	1.403.981.021.061,62	88,95



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	502.425.067.881,00	437.938.657.742,00	87,16
Belanja Barang dan Jasa	889.889.966.575,00	795.194.098.965,62	89,36
Belanja Hibah	180.582.121.770,00	165.622.074.354,00	91,72
Belanja Bantuan Sosial	5.440.625.737,00	5.226.190.000,00	96,06
BELANJA MODAL	666.352.162.737,00	580.674.088.157,03	87,14
Belanja Modal Tanah	1.035.250.000,00	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.356.943.387,00	161.050.737.928,00	92,90
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.951.551.100,00	99.741.722.125,39	85,28
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	368.065.180.950,00	313.533.424.903,64	85,18
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.874.358.400,00	5.354.696.000,00	91,15
Belanja Modal Aset Lainnya	1.068.878.900,00	993.507.200,00	92,95
BELANJA TAK TERDUGA	5.603.265.908,00	1.602.500.000,00	28,60
Belanja Tak Terduga	5.603.265.908,00	1.602.500.000,00	28,60
BELANJA TRANSFER	306.874.087.467,00	306.086.953.047,00	99,74
Belanja Bantuan Keuangan	306.874.087.467,00	306.086.953.047,00	99,74
PEMBIAYAAN NETTO	172.572.372.307,95	172.572.372.613,97	100,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	222.572.372.307,95	222.572.372.613,97	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	222.572.372.307,95	222.572.372.613,97	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Balangan dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Balangan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 24 Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli Daerah	104.521.373.930,49	137.007.405.232,01	131,08	92.767.033.520,54
Pendapatan Transfer	2.273.896.841.463,56	2.622.936.320.422,00	115,35	1.686.057.079.199,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.176.710.373,00	600.000.000,00	9,71	6.539.410.279,00
Jumlah	2.384.594.925.767,05	2.760.543.725.654,01	115,77	1.785.363.522.998,54

Berdasarkan tabel diatas Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp2.384.594.925.767,00 dan terealisasi sebesar Rp2.760.543.725.654,01 atau 115,77%, sehingga melebihi dari target anggaran Pendapatan sebesar Rp375.948.799.886,01 atau 15,77%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp975.180.202.655,47 atau naik sebesar 54,62%.

Tabel 25 Rincian Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	104.521.373.930,49	137.007.405.232,01	131,08	92.767.033.520,54
Pendapatan Pajak Daerah	12.444.000.000,00	13.907.676.851,00	111,76	12.308.860.393,50
Pendapatan Retribusi Daerah	2.161.698.666,00	2.366.139.331,00	109,46	1.908.662.405,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.874.367.772,00	14.874.367.772,00	100,00	13.573.275.479,00
Lain - lain PAD yang sah	75.041.307.492,49	105.859.221.278,01	141,07	64.976.235.243,04
PENDAPATAN TRANSFER	2.273.896.841.463,56	2.622.936.320.422,00	115,35	1.686.057.079.199,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.178.018.839.712,00	2.509.925.057.280,00	115,54	1.583.753.808.032,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.555.562.368.000,00	1.899.001.975.914,00	122,08	994.362.274.685,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	361.852.722.000,00	361.821.744.450,00	99,99	345.185.535.241,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	48.528.228.000,00	46.040.531.309,00	94,87	52.704.154.259,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi		
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	88.323.365.712,00	73.995.919.307,00	83,78	70.332.537.607,00
Dana Insentif Daerah	10.447.499.000,00	16.166.958.000,00	154,74	13.333.129.000,00
Dana Desa	113.304.657.000,00	112.897.928.300,00	99,64	107.836.177.240,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.878.001.751,56	113.011.263.142,00	117,87	102.303.271.167,00
Pendapatan Bagi Hasil	95.878.001.751,56	113.011.263.142,00	117,87	102.303.271.167,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.176.710.373,00	600.000.000,00	9,71	6.539.410.279,00
Pendapatan Hibah	6.176.710.373,00	600.000.000,00	9,71	6.537.075.079,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	2.335.200,00
Jumlah	2.384.594.925.767,05	2.760.543.725.654,01	115,77	1.785.363.522.998,54

b. Belanja

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah Belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 26 Pengelompokkan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	1.578.337.781.963,00	1.403.981.021.061,62	88,95	1.009.312.423.852,08
Belanja Modal	666.352.162.737,00	580.674.088.157,03	87,14	391.771.955.326,03
Belanja Tak Terduga	5.603.265.908,00	1.602.500.000,00	28,60	1.203.971.500,00
Belanja Transfer	306.874.087.467,00	306.086.953.047,00	99,74	242.402.786.355,00
Jumlah	2.557.167.298.075,00	2.292.344.562.265,65	89,64	1.644.691.137.033,11



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Berdasarkan tabel di atas Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp2.557.167.298.075,00 terealisasi sebesar Rp2.292.344.562.265,65 atau 89,64%, sehingga tidak terealisasi sebesar Rp264.822.735.809,35 atau 10,36%, lebih rinci anggaran dan realisasi belanja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023		Persentase	Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi		
BELANJA OPERASI	1.578.337.781.963,00	1.403.981.021.061,62	88,95	1.009.312.423.852,08
Belanja Pegawai	502.425.067.881,00	437.938.657.742,00	87,16	386.952.974.398,00
Belanja Barang dan Jasa	889.889.966.575,00	795.194.098.965,62	89,36	570.184.530.893,23
Belanja Hibah	180.582.121.770,00	165.622.074.354,00	91,72	47.703.693.560,85
Belanja Bantuan Sosial	5.440.625.737,00	5.226.190.000,00	96,06	4.471.225.000,00
BELANJA MODAL	666.352.162.737,00	580.674.088.157,03	87,14	391.771.955.326,03
Belanja Modal Tanah	1.035.250.000,00	-	-	5.115.127.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.356.943.387,00	161.050.737.928,00	92,90	94.619.742.724,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.951.551.100,00	99.741.722.125,39	85,28	47.238.414.493,82
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	368.065.180.950,00	313.533.424.903,64	85,18	244.145.726.258,21
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.874.358.400,00	5.354.696.000,00	91,15	652.944.850,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.068.878.900,00	993.507.200,00	92,95	-
BELANJA TAK TERDUGA	5.603.265.908,00	1.602.500.000,00	28,60	1.203.971.500,00
Belanja Tak Terduga	5.603.265.908,00	1.602.500.000,00	28,60	1.203.971.500,00
BELANJA TRANSFER	306.874.087.467,00	306.086.953.047,00	99,74	242.402.786.355,00
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	1.366.693.655,00
Belanja Bantuan Keuangan	306.874.087.467,00	306.086.953.047,00	99,74	241.036.092.700,00
Jumlah	2.557.167.298.075,00	2.292.344.562.265,65	89,64	1.644.691.137.033,11



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Identifikasi mengenai faktor yang menjadi pendukung serta kendala dan hambatan menjadi sangat penting dalam rangka memetakan potensi serta kekurangan yang dimiliki sehingga dapat menjadi perhatian dan penentu kebijakan oleh Pemerintah Daerah.

3.2.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung pencapaian kinerja diantaranya adalah:

- a. Secara umum manajemen pembangunan di Pemerintah Kabupaten Balangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan dengan cukup baik dan dapat dikatakan bersinergi.
- b. Pembinaan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan secara baik dan berjenjang.
- c. Tahapan pembangunan dari sisi perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
- d. Pelaporan dan kinerja Pemerintah Daerah maupun pada level Perangkat Daerah telah disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas serta dalam rangka pengukuran kinerja instansi yang memadai.

3.2.2 Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi kendala dan penghambat dalam pencapaian kinerja Pemerintahan yang telah ditetapkan diantaranya adalah:

- a. Masih minimnya koordinasi intern antara pelaksana kegiatan dengan pengelola keuangan serta pengelola barang di masing-masing serta antar Perangkat Daerah.
- b. Adanya keterbatasan tenaga teknis dari sisi kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.
- c. Adanya perubahan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan yaitu dengan melakukan penggabungan beberapa SOPD sehingga SOPD yang baru bergabung harus melakukan penataan ulang kesiapan dan manajemen SDM untuk melaksanakan tugas.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sehingga entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan berjumlah 30 (tiga puluh) unit organisasi, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 5 Badan, 14 Dinas dan 8 Kecamatan. Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai entitas akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Dalam hal penyajian Laporan Keuangan, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Sedangkan Laporan Pelaksanaan Anggaran menggunakan basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer serta Pembiayaan.

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pokok adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen Laporan Keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Daerah. Periode pelaporan yaitu Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat dibandingkan.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan;
- b. Belanja;
- c. Surplus/(Defisit);
- d. Pembiayaan; dan
- e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

4.2.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL Tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

4.2.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas;
- b. Investasi Jangka Pendek;
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak;
- d. Persediaan;
- e. Investasi Jangka Panjang;
- f. Aset Tetap;
- g. Kewajiban Jangka Pendek;
- h. Kewajiban Jangka Panjang; dan
- i. Ekuitas.

4.2.4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

periode sebelumnya. Laporan Operasional menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan;
- b. Beban;
- c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d. Pos Luar Biasa; dan
- e. Surplus/Defisit-LO.

4.2.5. Laporan Arus Kas (LAK)

Tujuan kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian Laporan Arus Kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan Kas dan Setara Kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran selama satu periode akuntansi. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama suatu periode akuntansi dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

4.2.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir.

4.2.7. Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan kebijakan ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan untuk tujuan umum. Penyusunan laporan keuangan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah namun demikian hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan tersebut



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

tetap mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010.

4.3 Basis Pengukuran Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.

4.3.1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

4.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup Kas dan Setara Kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan. Aset Lancar diakui sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3. Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai Piutang dengan Penyisihan Piutang;
4. Persediaan dicatat sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang berdasarkan umur Piutang. Penyisihan Piutang yang kemungkinan tak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo Piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan Piutang tak Tertagih dilakukan berdasarkan umur Piutang, jenis Piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut:

a. Piutang Pajak

Tabel 28 Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang

Jenis	Umur/Usia	Persentase
Lancar	1 Tahun ($X \leq 1$)	0,50%
Kurang Lancar	1 - 2 Tahun ($1 < X \leq 2$)	10%
Diragukan	di atas 2-5 Tahun ($2 < X \leq 5$)	50%
Macet	di atas 5 Tahun ($X > 5$)	100%

b. Piutang Retribusi

Tabel 29 Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Retribusi Berdasarkan Umur Piutang

Jenis	Umur/Usia	Persentase
Lancar	0 - 1 bulan ($X \leq 1$)	0,50%
Kurang Lancar	1 - 3 Bulan ($1 < X \leq 3$)	10%
Diragukan	3 - 12 bulan ($3 < X \leq 12$)	50%
Macet	di atas 12 bulan ($X > 12$).	100%



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

c. Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi

Tabel 30 Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi Berdasarkan Umur Piutang

Jenis	Umur/Usia	Persentase
Lancar	Belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan	0,50%
Kurang Lancar	1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

4.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang berdasarkan sifat penanaman investasinya terdiri atas (1) Investasi Permanen; dan (2) Investasi Non Permanen.

a. Investasi Permanen

Pengakuan

Suatu pengeluaran Kas atau Aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Penilaian

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan

usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini diterapkan untuk kepemilikan kurang dari 20%.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini diterapkan untuk: (1) kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas dan (2) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini diterapkan untuk investasi bersifat non permanen.

b. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen pada Kabupaten Balangan berupa pengelolaan dana bergulir untuk kelompok masyarakat.

Penilaian

Investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah saldo investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat setelah dikurangi penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih.

Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih dihitung berdasarkan persentase tertentu dari saldo dana bergulir yang telah diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan dana bergulir, sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 1) Lancar, yaitu apabila penerima dana bergulir membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Lancar sebesar 5%;
- 2) Kurang Lancar, yaitu apabila penerima dana bergulir membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui tanggal jatuh tempo seharusnya angsuran dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 10%;
- 3) Diragukan, yaitu apabila penerima dana bergulir tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 9 (sembilan) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 50%;
- 4) Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 90%; dan
- 5) Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi bermasalah setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 100%.

4.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh Aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu Tahun. Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Pemerintah Kabupaten Balangan telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, renovasi dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap diatur sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok Peralatan dan Mesin dan barang-barang alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan/Irigasi/Jaringan dan Aset Tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai Aset Tetap.

4.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang dan Aset Tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4.3.3. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan Pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.3.4. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan, yaitu:

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung), Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

2) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal antara lain Belanja untuk pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya.

3) Belanja Tak Terduga

Belanja Lain-lain/Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

4.3.5. Pengukuran Pembiayaan

- a. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
- b. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.
- c. Pengukuran Pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

4.3.6. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (Piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.
 - 1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

imbalan yaitu setelah diserahterimakannya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perizinan seperti IMB.

- 2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.

b. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

(1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

(2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perizinan tertentu, antara lain Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Izin Trayek.

Pendapatan Retribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan. Pendapatan Retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Pendapatan Dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-lain Pendapatan yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya.

Pendapatan Hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas Pendapatan Hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Pendapatan Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4.3.7. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

4.3.7.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan Pengembalian

Koreksi Beban Pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi Beban Pegawai dibukukan dalam Pendapatan Lain-Lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun Ekuitas.

4.3.7.2 Beban Barang

a. Beban Persediaan

Beban Persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

1) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban

Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset

Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan, pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

b. Beban Jasa, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas

Beban Jasa, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali Beban Jasa, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali Beban Jasa, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-Lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.

4.3.7.3 Beban Hibah

Pengukuran

Beban Hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban Hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang Beban Hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali Beban Hibah dibukukan dalam Pendapatan Lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun Ekuitas.

4.3.7.4 Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban Bantuan Sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang Beban Bantuan Sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali Beban Bantuan Sosial dibukukan dalam Pendapatan Lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun Ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4.3.7.5 Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi

Pengakuan

Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai Beban Penyusutan/Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan Aset Tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

4.3.7.6 Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan dengan metode penyisihan Piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya Piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

4.3.7.7 Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi Beban Transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang Beban Transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali Beban Transfer dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun Ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4.3.7.8 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Beban Lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1. Pengakuan Pendapatan-LRA

Sehubungan dengan belum diaturnya pengakuan pendapatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk “Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.”

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan, Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah, sedangkan pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah, tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4.4.2. Pengakuan Belanja

Sehubungan dengan belum diaturnya pengakuan belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka yang berkaitan dengan pengakuan belanja dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

Paragraf 31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Paragraf 32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraf 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

- a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Sedangkan pada akhir Tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir Tahun.
- b. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.
- c. Khusus untuk RSUD Balangan yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan Badan Layanan Umum (BLU), pengesahan belanja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Balangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4.4.3. Metode Penilaian Investasi

Sehubungan dengan belum diaturnya Metode Penilaian Investasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka yang berkaitan dengan Metode Penilaian Investasi PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraf 36 dan 37 mengatur metode penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yakni (a) investasi pemerintah dengan kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan menggunakan metode biaya; (b) investasi pemerintah dengan kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetap memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; dan (c) investasi pemerintah dengan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan Metode Ekuitas. Untuk memenuhi standar sebagaimana tersebut di atas, pada laporan keuangan Tahun 2018 investasi pada PDAM Kabupaten Balangan, PD. BPR Paringin disajikan berdasarkan Metode Ekuitas sedangkan investasi pada Bank Kalsel disajikan berdasarkan Metode Biaya.

Dalam penerapan metode ekuitas tersebut, digunakan pendekatan konservatif dan netto. Konservatif, artinya kenaikan nilai investasi didasarkan pada ekuitas perusahaan yang dapat dipastikan menambah ekuitas Pemerintah Kabupaten Balangan. Netto, artinya Pemerintah Kabupaten Balangan tidak mencatat setiap mutasi yang menyangkut ekuitas perusahaan yang berpengaruh terhadap catatan nilai investasi pada pembukuan Pemerintah Kabupaten Balangan. Pembukuan pada Pemerintah Kabupaten Balangan hanya mencatat kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi pada masing-masing perusahaan.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

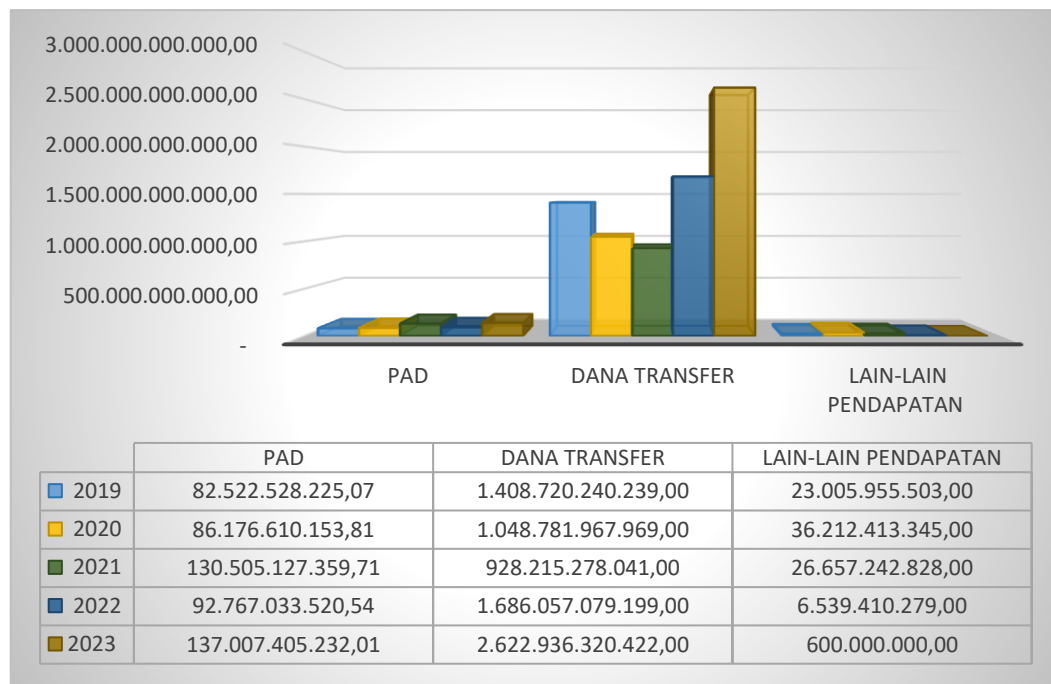
5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Penjelasan mengenai berbagai komponen Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.760.543.725.654,01 atau mencapai 115,77% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp2.384.594.925.767,05. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp975.180.202.655,47 atau 54,62% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.785.363.522.998,54.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp137.007.405.232,01, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.622.936.320.422,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp600.000.000,00. Perkembangan realisasi Pendapatan dari Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 terlihat pada grafik berikut:

**Grafik 2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2019 s.d. 2023**



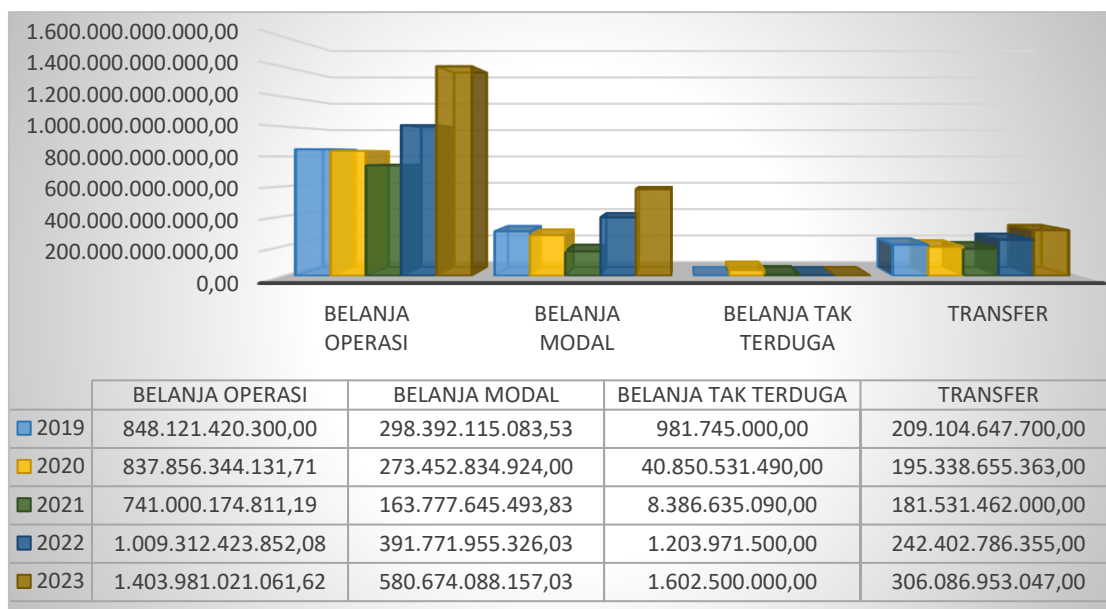


PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.292.344.562.265,65 atau 89,64% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan Rp2.557.167.298.075,00. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp647.653.425.232,54 atau 39,38% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.644.691.137.033,11. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp1.403.981.021.061,62, Belanja Modal sebesar Rp580.674.088.157,03, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.602.500.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp306.086.953.047,00. Perkembangan realisasi Belanja dari Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 terlihat pada grafik berikut:

**Grafik 3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2019 s.d. 2023**



Berdasarkan Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.760.543.725.654,01 dan Realisasi Belanja sebesar Rp2.292.344.562.265,65, maka terdapat surplus anggaran pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp468.199.163.388,36. Sedangkan realisasi Pembiayaan (*Netto*) pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp172.572.372.613,97 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp222.572.372.613,97 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00. Surplus Anggaran dan Realisasi Pembiayaan *Netto* menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar 640.771.536.002,33. Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan SKPD disajikan pada **Lampiran 1**. Uraian selengkapnya masing-masing akun dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.1. Pendapatan	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	2.384.594.925.767,05	2.760.543.725.654,01	1.785.363.522.998,54

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.760.543.725.654,01 atau mencapai 115,77% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp2.384.594.925.767,05. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp975.180.202.655,47 atau 54,62% jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.785.363.522.998,54. Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 31 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023
serta Realisasi Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	104.521.373.930,49	137.007.405.232,01	131,08	92.767.033.520,54
2	Pendapatan Transfer	2.273.896.841.463,56	2.622.936.320.422,00	115,35	1.686.057.079.199,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.176.710.373,00	600.000.000,00	9,71	6.539.410.279,00
Jumlah		2.384.594.925.767,05	2.760.543.725.654,01	115,77	1.785.363.522.998,54

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	104.521.373.930,49	137.007.405.232,01	92.767.033.520,54

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 sebesar 137.007.405.232,01 atau mencapai 131,08% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp104.521.373.930,49. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp44.240.371.711,47 atau 47,69% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp92.767.033.520,54. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 disajikan tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 32 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	12.444.000.000,00	13.907.676.851,00	111,76	12.308.860.393,50
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.161.698.666,00	2.366.139.331,00	109,46	1.908.662.405,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.874.367.772,00	14.874.367.772,00	100,00	13.573.275.479,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.041.307.492,49	105.859.221.278,01	141,07	64.976.235.243,04
Jumlah		104.521.373.930,49	137.007.405.232,01	131,08	92.767.033.520,54

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	12.444.000.000,00	13.907.676.851,00	12.308.860.393,50

Pendapatan Pajak Daerah adalah pajak daerah yang telah dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan. Sesuai Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/40/kum Tahun 2017 tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan untuk melakukan Pemungutan, Penyetoran dan Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33 Dasar Hukum Pendapatan Pajak Daerah berdasarkan Jenis Pajak

No.	Jenis Pajak	Dasar Hukum
1	Pajak Penerangan Jalan	Perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2011
2	Pajak Hiburan	Perda Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2012
3	Pajak Reklame	Perda Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2012
4	Pajak Restoran	Perda Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2012
5	Pajak Air Tanah	Perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2013
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2013
7	Pajak Hotel	Perda Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2013
8	Pajak Sarang Burung Walet	Perda Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2013
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Pajak	Dasar Hukum
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2011

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.907.676.851,00 atau mencapai 111,76% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp12.444.000.000,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.598.816.457,50 atau 12,99% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.308.860.393,50. Perbandingan anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 34 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	13.500.000,00	10.955.453,00	81,15	12.252.950,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	200.000.000,00	298.975.249,00	149,49	219.134.220,00
3	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.500.000.000,00	4.920.045.421,00	109,33	3.640.871.163,50
4	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	1.000.000,00	-	-	-
5	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.000.000,00	785.000,00	26,17	645.000,00
6	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	75.000.000,00	93.736.503,00	124,98	67.817.004,00
7	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3.750.000.000,00	4.738.862.179,00	126,37	4.348.303.424,00
8	Pajak Parkir	20.500.000,00	12.801.000,00	62,44	14.298.680,00
9	Pajak Air Tanah	6.000.000,00	2.818.600,00	46,98	2.374.400,00
10	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	2.066.400,00	8,27	850.000,00
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.700.000.000,00	1.722.133.575,00	101,30	2.082.725.784,00
12	PBBP2	650.000.000,00	513.271.821,00	78,96	652.815.868,00
13	BPHTB-Pemindahan Hak	1.300.000.000,00	1.591.225.650,00	122,40	1.266.771.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
14	BPHTB-Pemberian Hak Baru	200.000.000,00	-	-	-
Jumlah		12.444.000.000,00	13.907.676.851,00	111,76	12.308.860.393,50

Berikut adalah penjelasan atas Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023:

1. Realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.955.453,00 atau mencapai 81,15% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp13.500.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.252.950,00, maka realisasi Pajak Hotel mengalami penurunan sebesar Rp1.297.497,00 atau 10,59%. Rendahnya target penerimaan Pajak Hotel sangat dipengaruhi dengan tingkat keberadaan Hotel di Kabupaten Balangan. Belum adanya hotel berbintang atau hotel yang bisa memfasilitasi pelaksanaan kegiatan/pertemuan dan sejenisnya, masih rendahnya tingkat kunjungan masyarakat dari luar daerah yang memanfaatkan fasilitas hotel/penginapan sehingga adanya peningkatan atau penurunan yang tidak signifikan masih cenderung dipengaruhi penggunaan fasilitas disekitar Kabupaten Balangan walaupun daerah kunjungannya adalah Kabupaten Balangan serta belum adanya objek wisata yang bisa menarik masyarakat untuk berkunjung ke Kabupaten Balangan dan juga belum adanya hotel yang representatif, jadi untuk saat ini penerimaan Pajak Hotel masih turun naik.
2. Realisasi Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp298.975.249,00 atau mencapai 149,49% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp200.000.000,00. Realisasi Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp79.841.029,00 atau 36,43% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp219.134.220,00. Peningkatan ini secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi setelah pemasangan *Tapping Box* di sebagian Rumah Makan, yaitu alat untuk mencatat transaksi dan memastikan Pajak rumah Makan tertagih tanpa penyelewengan.
3. Realisasi Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.920.045.421,00 atau mencapai 109,33% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp4.500.000.000,00. Realisasi Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

sebesar Rp1.279.174.257,50 atau 35,13% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.640.871.163,50. Peningkatan ini bersumber dari peningkatan nilai transaksi dari perusahaan penyedia jasa katering untuk perusahaan pertambangan dan jasa katering untuk perkantoran serta penerimaan katering rumahan juga meningkat.

4. Realisasi Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp1.000.000,00. Tidak adanya realisasi dikarenakan tidak ada penyelenggaraan Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana di Kabupaten Balangan pada tahun 2023.
5. Realisasi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp785.000,00 atau hanya mencapai 26,17% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp3.000.000,00. Realisasi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp140.000,00 atau 21,71% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp645.000,00. Kenaikan tersebut disebabkan karena realisasi hanya bersumber dari Pusat Kebugaran (Fitness Center) dan tergantung kebutuhan dan minat dari masyarakat.
6. Realisasi Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp93.736.503,00 atau mencapai 124,98% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp75.000.000,00. Realisasi Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp25.919.499,00 atau 38,22% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp67.817.004,00. Peningkatan ini disebabkan karena Objek Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron yang ditetapkan pada tahun 2022 terealisasi pada tahun 2023 ditambah dengan realisasi tahun berjalan serta adanya penambahan Objek Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron yang ditetapkan pada tahun 2023.
7. Realisasi Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.738.862.179,00 atau mencapai 126,37% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp3.750.000.000,00. Realisasi Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp390.558.755,00 atau 8,98% jika dibandingkan dengan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.348.303.424,00. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan daya serta penambahan instalasi baru dari pengembang perumahan.

8. Realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.801.000,00 atau hanya mencapai 62,44% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp20.500.000,00. Realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.497.680,00 atau 10,47% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.298.680,00. Penurunan ini disebabkan karena penurunan penerimaan yang bersumber dari parkir Rumah Makan Ar Raudah.
9. Realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.818.600,00 atau hanya mencapai 46,98% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp6.000.000,00. Realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp444.200,00 atau 18,71% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.374.400,00. Peningkatan ini disebabkan karena penggunaan air tanah dari PT. Paramitha Cipta Sarana meningkat.
10. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.066.400,00 atau hanya mencapai 8,27% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp25.000.000,00. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.216.400,00 atau 143,11% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp850.000,00. Peningkatan ini karena pada pemungutan tahun kedua, tingkat kesadaran Wajib Pajak Sarang Burung Walet dalam melaporkan kewajibannya mulai bertambah walaupun secara realisasi masih sangat rendah ini dikarenakan masih banyak wajib pajak sarang burung walet yang belum melaporkan kewajibannya.
11. Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.722.133.575,00 atau mencapai 101,30% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp1.700.000.000,00. Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp360.592.209,00 atau 17,31% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.082.725.784,00. Penurunan ini disebabkan karena kegiatan pengambilan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

dan pemakaian bahan mineral bukan logam dan batuan lainnya sedikit menurun dari tahun sebelumnya berdasarkan laporan yang disampaikan.

12. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp513.271.821,00 atau mencapai 78,96% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp650.000.000,00. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp139.544.047,00 atau 21,38% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp652.815.868,00. Penurunan disebabkan karena adanya penambahan ketetapan PBB sedangkan penerimaan dari realisasi ketetapan tahun berjalan yaitu tahun 2023 masih belum maksimal ini juga dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam membayar PBB-P2.
13. Realisasi BPHTB-Pemindahan Hak Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.591.225.650,00 atau mencapai 122,40% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp1.300.000.000,00. Realisasi BPHTB-Pemindahan Hak Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp324.453.750,00 atau 25,61% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.266.771.900,00. Kenaikan ini disebabkan karena semakin bertambahnya kompleks perumahan baru yang ada di Kabupaten Balangan maka semakin meningkat pemindahan hak dari pengembang perumahan.
14. Realisasi BPHTB-Pemberian Hak Baru Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp200.000.000,00. Tidak adanya realisasi disebabkan karena Realisasi BPHTB Pemberian Hak Baru hanya bersumber dari Kelanjutan Pelepasan Hak dan di luar Pelepasan Hak, selama Tahun 2023 transaksi BPHTB Pemberian Hak Baru tidak ada.

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	2.161.698.666,00	2.366.139.331,00	1.908.662.405,00

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Balangan. Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD pemungut dengan dasar hukum sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 35 Dasar Hukum Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan Jenis Retribusi

No.	Jenis Retribusi	Dasar Hukum
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas	- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 - Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 - Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2012 - Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2018 - Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019
4	Retribusi Pelayanan Pasar	- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2013 - Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2012 - Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2019
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	- Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2013 - Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 - Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Nomor 10 Tahun 2013 - Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2013 - Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 - Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2013 - Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021
10	Retribusi Terminal	- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2011 - Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2022
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2013 - Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 - Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022
12	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.366.139.331,00 atau mencapai 109,46% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp2.161.698.666,00. Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp457.476.926,00 atau 23,97% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.908.662.405,00. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Persetujuan Bangunan Gedung. Perbandingan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

**Tabel 36 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	220.000.000,00	421.656.000,00	191,66	285.062.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	252.960.000,00	259.703.000,00	102,67	258.530.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000,00	78.400.000,00	112,00	75.500.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	61.750.000,00	66.191.000,00	107,19	65.800.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	68.955.000,00	86,19	116.035.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	6.000.000,00	7.534.600,00	125,58	6.834.100,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	60.000.000,00	118.704.665,00	197,84	42.757.220,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	275.058.666,00	396.961.966,00	144,32	417.778.166,00
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	192.050.000,00	233.645.000,00	121,66	203.405.000,00
10	Retribusi Terminal	43.880.000,00	56.480.000,00	128,71	48.800.000,00
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	200.000.000,00	88.754.000,00	44,38	74.465.250,00
12	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	700.000.000,00	569.154.100,00	81,31	313.695.169,00
Jumlah		2.161.698.666,00	2.366.139.331,00	109,46	1.908.662.405,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Berikut adalah penjelasan atas Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023:

1. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp421.656.000,00 atau mencapai 191,66% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp220.000.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp136.593.500,00 atau 47,92% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp285.062.500,00. Kenaikan disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah pasien umum untuk berobat ke Puskesmas, seiring dengan adanya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan gizi, usulan pembuatan KIR kesehatan beserta tindakan Laboratorium Sederhana (GDS dan Kolesterol) dalam rangka melengkapi syarat sebagai petugas KPPS, PTPS, PPS dan PKD pada pelaksanaan Pemilu serta tes urin sebagai syarat perpanjangan untuk tenaga honor/tenaga kontrak yang bekerja di lingkup Pemerintahan Kabupaten Balangan.
2. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp259.703.000,00 atau mencapai 102,67% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp252.960.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2023 hanya mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp1.173.000,00 atau 0,45% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp258.530.000,00. Kenaikan terjadi seiring dengan semakin membaiknya kondisi daya beli masyarakat toko-toko banyak yang kembali buka, sehingga berimbas pada penarikan karcis di lapangan.
3. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp78.400.000,00 atau mencapai 112,00% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp70.000.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2022 hanya mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp2.900.000,00 atau 3,84% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp75.500.000,00. Selain dari peningkatan masyarakat berkunjung ke pasar-pasar dalam melakukan transaksi jual beli yang berpengaruh pada penarikan karcis parkir di lapangan juga karena adanya penambahan titik lokasi baru parkir tepatnya di Pasar Halong dan juga Pasar S Lewan Paringin.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp66.191.000,00 atau mencapai 107,19% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp61.750.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2023 hanya mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp391.000,00 atau 0,59% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp65.800.000,00. Kenaikan terjadi dikarenakan peningkatan transaksi jual beli masyarakat yang berpengaruh menarik minat dari para pedagang-pedagang dalam menggelar lapak di lingkungan pasar yang berimbas pada penarikan karcis pasar di lapangan.
5. Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp68.955.000,00 atau sebesar 86,19% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp80.000.000,00. Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp47.080.000,00 atau 40,57% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp116.035.000,00. Penurunan disebabkan oleh berkurangnya melakukan pengujian kendaraan bermotor ke UPUPK Balangan dikarenakan sudah beroperasinya unit Pengujian Kendaraan Bermotor di kabupaten yang berdekatan dengan Kabupaten Balangan dan juga terkait aturan tentang *Over Deminsi* dimana tidak diperbolehkannya melakukan pengujian terhadap mobil barang yang melakukan pelanggaran muatan lebih, sedangkan kondisi lapangan rata-rata mobil barang jenis dumptruck dan kayu banyak yang tidak sesuai ketentuan tersebut.
6. Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.534.600,00 atau mencapai 125,58% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp6.000.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2023 hanya mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp700.500,00 atau 10,25% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.834.100,00. Kenaikan terjadi dikarenakan adanya peningkatan intensitas dan pengawasan di lapangan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kepada toko-toko yang memiliki alat ukur dan timbang.
7. Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp118.704.665,00 atau mencapai 197,84% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp60.000.000,00. Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp75.947.445,00 atau 177,62% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp42.757.220,00. Kenaikan yang cukup signifikan ini dikarenakan banyaknya Perusahaan Telekomunikasi dalam melakukan pemenuhan pembayaran kewajiban pokok tahun 2023 maupun tunggakan pembayaran piutang retribusi pengendalian Menara sampai dengan tahun 2022.

8. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp396.961.966,00 atau mencapai 144,32% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp275.058.666,00. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp20.816.200,00 atau 4,98% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp417.778.166,00. Penurunan terjadi akibat adanya salah satu Bank BUMN tidak lagi melakukan penyewaan terhadap bangunan milik pemerintah daerah Kabupaten Balangan dikarenakan sudah memiliki bangunan tersendiri.
9. Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp233.645.000,00 atau mencapai 121,66% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp192.050.000,00. Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp30.240.000,00 atau 14,87% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp203.405.000,00. Kenaikan disebabkan lebih kepada peningkatan pengawasan dan intensitas pemungutan dilapangan berimbas kepada kesadaran para pedagang dalam memenuhi kewajiban pembayaran sewa toko/grosir dan juga adanya pembayaran tunggakan piutang sewa toko/grosir di tahun 2022.
10. Realisasi Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp56.480.000,00 atau mencapai 128,71% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp43.880.000,00. Realisasi Retribusi Terminal terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp52.600.000,00 atau mencapai 131,5% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp40.000.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha mengalami kenaikan sebesar Rp10.550.000,00 atau 25,09% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Rp42.050.000,00. Kenaikan terjadi dikarenakan semakin membaiknya kondisi ekonomi masyarakat khususnya di wilayah Kota Paringin yang berpengaruh kepada peningkatan daya beli masyarakat dengan kondisi tersebut berimbas pada banyaknya para pedagang menggelar lapak-lapak di Pasar Paringin yang secara langsung bertambahnya wajib retribusi.

- b. Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.880.000,00 atau mencapai 100% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp3.880.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal mengalami penurunan sebesar Rp2.870.000,00 atau 42,52% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.750.000,00. Penurunan disebabkan karena adanya pembongkaran terminal Paringin dalam rangka pengerjaan jembatan kembar dan juga perluasan jalan berakibatnya pada penarikan karcis dilapangan yang dimulai bulan Agustus Tahun 2023.
11. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp88.754.000,00 atau mencapai 44,38% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp200.000.000,00. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp14.288.750,00 atau 19,19% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp74.465.250,00. Kenaikan penerimaan terjadi dikarenakan banyaknya permintaan pasar berupa benih ikan dibarengi dengan kondisi cuaca yang memungkinkan dalam proses reproduksi tersebut serta adanya peningkatan hasil produksi kebun karet milik pemerintah daerah sebagai penerimaan retribusi usaha milik daerah sektor Perkebunan.
12. Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp569.154.100,00 atau mencapai 81,31% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp700.000.000,00. Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp255.458.931,00 atau 81,44% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp313.695.169,00. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi dikarenakan adanya kesadaran masyarakat dalam upaya pembuatan izin bangunan dan juga banyaknya di Tahun 2023 ini



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

permohonan izin pembuatan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dari sektor bangunan Menara telekomunikasi yang nilai retribusinya sangat besar.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	14.874.367.772,00	14.874.367.772,00	13.573.275.479,00

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Balangan berupa bagian laba dari Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.874.367.772,00 atau mencapai 100% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp14.874.367.772,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.301.092.293,00 atau 9,59% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.573.275.479,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat berdasarkan basis kas, yakni diakui seluruhnya sebagai pendapatan atas semua penerimaan ke Kas Daerah pada Tahun Anggaran 2023. Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp14.874.367.772,00 berasal dari penerimaan dividen Bank Kalsel sebesar Rp14.530.914.973,00 dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp343.452.799,00.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	75.041.307.492,49	105.859.221.278,01	64.976.235.243,04

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp105.859.221.278,01 atau mencapai 141,07% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp75.041.307.492,49. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp40.882.986.034,97 atau 62,92% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp64.976.235.243,04. Perbandingan antara



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	324.485.000,00		-
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-		1.056.563.400,00
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	-		41.050.000,00
4	Hasil Sewa BMD	5.000.000,00	-		18.080.000,00
5	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.124.071.525,64	18.619.506.109,86	304,04	7.341.097.669,17
6	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00	21.918.082,25	43,84	36.831.372,66
7	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	22.402.283.091,00	7.707.534.246,59	34,41	-
8	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	-	-		413.165.423,10
9	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	-		339.208.033,82
10	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	-	77.953,00		-
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	382.673.768,86	1.529.167.680,42	399,6	2.400.035.894,95
12	Pendapatan Denda Pajak Restoran	8.548.558,18	38.831.946,18	454,25	26.920.809,00
13	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.100,00	1.500,00	136,36	-
14	Pendapatan Denda Pajak Reklame	86.505,00	86.505,00	100	-
15	Pendapatan Denda Pajak Parkir	145.000,00	154.276,00	106,4	-
16	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	48.384,00	-	-
17	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	142.984,68	19.567.949,68	13.685,35	-
18	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.528.780,00	19.984.175,00	209,72	32.650.867,00
19	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	40.000,00	80.000,00	200	40.000,00
20	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	-	1.360.477.067,00	-	758.137.000,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	2.221.782.475,07	-	-	-
22	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	11.451.788,00	30.166.358,00	263,42	20.042.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	427.630.000,00	886.359.200,00	207,27	752.637.800,00
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	-	22.938.417,00	-	-
25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	664.452.696,06	474.455.766,00	71,41	-
26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	1.000.000,00	-	-
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung kantor	0,00	32.970.922,52	-	-
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0,00	197.628.653,74	-	-
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	23.648.100,00	-	-
30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	2.748.162.678,37	-	-
31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya	0,00	61.053.968,85	-	-
32	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	7.509.790,00	-	-
33	Pendapatan BLUD	35.600.000.000,00	48.679.897.247,55	136,74	45.440.514.910,49
34	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.133.469.220,00	7.280.885.312,00	102,07	6.054.549.989,00
35	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	-	244.710.073,85



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
36	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	-	15.770.623.989,00	-	-
Jumlah		75.041.307.492,49	105.859.221.278,01	141,07	64.976.235.243,04

Berikut adalah penjelasan mengenai Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023:

1. Realisasi Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp324.485.000,00 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp0,00. Realisasi Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 merupakan pendapatan Hasil Penjualan Hewan berupa lelang/penjualan sapi sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor yang ditenakkan pada UPTD Sentra Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
2. Realisasi Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp0,00. Tidak adanya realisasi disebabkan karena tidak adanya lelang/penjualan peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2023 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 terdapat realisasi dari hasil lelang sebesar Rp1.056.563.400,00 yang merupakan lelang/penjualan peralatan dan mesin.
3. Realisasi Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp0,00. Tidak adanya realisasi disebabkan karena tidak adanya penjualan gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2023 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 terdapat realisasi dari hasil Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp41.050.000,00 yang merupakan lelang/penjualan sisa bongkaran Gedung dan Bangunan.
4. Realisasi Hasil Sewa BMD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp5.000.000,00, sehingga realisasi pada tahun 2023 turun sebesar Rp18.080.000,00 jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Tidak adanya realisasi disebabkan objek dari Sewa BMD yaitu Videotron yang diakui sebagai Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron.
5. Realisasi Jasa Giro pada Kas Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.619.506.109,86 atau mencapai 304,04% dari anggaran yang ditetapkan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

pada APBD perubahan sebesar Rp6.124.071.525,64. Realisasi Jasa Giro pada Kas Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.278.408.440,69 atau 153,63% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.341.097.669,17. Kenaikan ini disebabkan saldo pada Kas Daerah yang cukup tinggi selama Tahun Anggaran 2023.

6. Realisasi Jasa Giro pada Kas di Bendahara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.918.082,25 atau mencapai 43,84% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp50.000.000,00. Realisasi Jasa Giro pada Kas di Bendahara Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp14.913.290,41 atau 40,49% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp36.831.372,66. Penurunan disebabkan menurunnya Uang Persediaan yang mengendap di rekening Bendahara Pengeluaran.
7. Realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.707.534.246,59 atau hanya terealisasi 34,41% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp22.402.283.091,00. Adanya perbedaan selisih antara penganggaran dan realisasi disebabkan target awal memperhitungkan remunerasi TDF sedangkan realisasi untuk TDF dicatat tersendiri. Pendapatan ini merupakan pendapatan bunga deposito pada Bank Kalsel selama 6 bulan pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Realisasi Bunga Deposito Tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bunga Deposito Periode 5 Juni 2023 s.d 4 Juli 2023	1.232.876.712,33
2	Bunga Deposito Periode 5 Juli 2023 s.d 4 Agustus 2023	1.273.972.602,74
3	Bunga Deposito Periode 5 Agustus 2023 s.d 4 September 2023	1.273.972.602,74
4	Bunga Deposito Periode 5 September 2023 s.d 4 Oktober 2023	1.294.520.547,95
5	Bunga Deposito Periode 5 Oktober 2023 s.d 4 November 2023	1.337.671.232,88
6	Bunga Deposito Periode 5 November 2023 s.d 4 Desember 2023	1.294.520.547,95
Jumlah		7.707.534.246,59

8. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara Tahun Anggaran 2023 merupakan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Ketiga tidak ada realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

karena temuan finansial/kerugian keuangan daerah dari hasil Pemeriksaan Kinerja Kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 dan 2023 telah disetor sebelum laporan hasil pemeriksaan ditetapkan yaitu pada tanggal 22 Desember 2023 dengan LHP Nomor 24/LHP/XIX.BJM/12/2023 sedangkan sisanya masih belum disetor sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 hal ini berbeda dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat realisasi sebesar Rp413.165.423,10.

9. Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp0,00. Tidak adanya realisasi disebabkan karena tidak adanya kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil.
10. Realisasi Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp77.953,00 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp0,00. Merupakan pendapatan yang bersumber dari kelebihan penyetoran SiLPA dana BOS tahun sebelumnya sebesar Rp41.558,00 dan pendapatan yang tidak dapat ditelusuri bukti penerimaannya sebesar Rp36.395,00 pada tanggal 06 Desember 2023 dengan kode setoran “Transfer In
BANK KALSEL On Us Transfer via Channel
From Acc.No. - 3201885646
 Pengirim: HASANUDIN
On Us Transfer via Channel” sedangkan rincian kelebihan penyetoran SiLPA dana BOS tahun sebelumnya tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 39 Kelebihan Penyetoran SiLPA Dana BOS Tahun Sebelumnya

No.	Nama Sekolah	Nilai (Rp)
1	SDN Mihu 1	2.226,00
2	SDN Binjai Punggal 1	333,00
3	SDN Bungur	1.684,00
4	SDN Tampang	30.000,00
5	SDN Sumpung	2.002,00
6	SDN Telaga Purun	252,00
7	SDN Pematang	36,00
8	SDN Pimping	2.000,00
9	SDN Ambakiang Hulu	95,00
10	SMPN 3 Batumandi	880,00
11	SDK Mapat	1.393,00
12	SDN Tarangan	657,00
Jumlah		41.558,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

11. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 dikenakan pada 45 (empat puluh lima) paket pekerjaan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.529.167.680,42 atau mencapai 399,6% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp382.673.768,86. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp870.868.214,53 atau 36,29% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.400.035.894,95. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan atau meningkatnya komitmen Pihak Ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Adapun rincian realisasi Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 40 Rincian Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Keterangan	Nama Rekanan	Nilai (Rp)
1	Denda keterlambatan pekerjaan peningkatan Jalan Liyu - Upau (APBD) Tahun Anggaran 2021	CV. Karya Gemilang Bersaudara	337.103.250,00
2	Denda keterlambatan pekerjaan peningkatan Jalan Awaysan-Pematang (APBD) Tahun Anggaran 2021	CV. A. Yani Pura	31.146.108,00
3	Denda keterlambatan pekerjaan pembangunan jembatan gantung Desa Sungai Awang (APBD) Tahun Anggaran 2022	CV. Yudha Dharma Mandiri	11.594.594,59
4	Kekurangan Pembayaran Denda keterlambatan pekerjaan pembangunan peningkatan jalan Tampang - Batu Merah (APBD) Tahun Anggaran 2022	CV. Prestasi Utama	2.459.880,27
5	Denda keterlambatan pekerjaan pengadaan dan pemasangan PJU (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Arum Sejahtera	17.880.100,00
6	Denda keterlambatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Anak Muda Banua	31.262.000,00
7	Denda keterlambatan pekerjaan pembangunan Box Culfert Desa Lingsir RT.02 Kec. Parsel (APBD) Tahun Anggaran 2023	PT. Arta Anugrah Adhi Perkasa	598.752,43
8	Denda keterlambatan pekerjaan pembangunan bangunan pintu air Desa Hilir Pasar RT.01 Kecamatan Lampihong (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Citra Gemilang	6.082.450,00
9	Denda keterlambatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Sawang Desa Mamigang Kecamatan Halong (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Putra Balangan Jaya	5.925.710,70
10	Denda keterlambatan pekerjaan peningkatan jalan Halong - Gunung Riut Tahun Anggaran 2023	CV. Mitra Abadi	10.926.926,66



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	Keterangan	Nama Rekanan	Nilai (Rp)
11	Denda keterlambatan pekerjaan peningkatan jalan Uren-Mauya Tahun Anggaran 2023	CV. Global Mitra Karya	50.831.699,00
12	Denda keterlambatan pekerjaan peningkatan jalan Tundakan - Bayur (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. ADR Adzikra	13.155.998,89
13	Denda keterlambatan pekerjaan peningkatan jalan Muara Ninian - Wangkili (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Putra Dewilla	15.992.857,54
14	Denda keterlambatan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya SMPN 3 Halong (APBD) Tahun Anggaran 2024	CV. Mamigang Sejahtera	3.425.557,00
15	Denda keterlambatan pekerjaan peningkatan jalan Tabuan -Mantuyan (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Mamigang Sejahtera	31.617.066,18
16	Denda keterlambatan pekerjaan peningkatan jalan Mauya - Binuang Santang Tahun Anggaran 2023	CV. Sera Mandiri	12.692.115,00
17	Denda keterlambatan Rehabilitasi dan Tambah Ruang Poskesdes Lokbatung (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Alizka Jaya Nusantara	990.360,00
18	Denda keterlambatan Rehabilitasi Poskesdes Buntu Karau (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Sandi Borneo	1.786.347,00
19	Denda keterlambatan Rehabilitasi dan Tambah Ruang Poskesdes Lokbatung (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Alizka Jaya Nusantara	5.000,00
20	Denda keterlambatan Rehabilitasi Poskesdes Halubau Utara (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. AFMI Bersaudara	352.108,00
21	Denda keterlambatan pekerjaan Pelaksanaan Rehabilitas Poskesdes Bungur Tahun Anggaran 2023	CV. Elang Bangun Semesta	4.808.310,00
22	Denda keterlambatan Rehabilitasi Poskesdes Juuh (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Segawian Berkah Mandiri	1.882.740,00
23	Denda Keterlambatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Borneo Mantuil Construction	597.171,00
24	Denda keterlambatan Pembangunan Pagar Puskesmas Lokbatu (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Tata Laksana Konstruksi	704.048,00
25	Denda keterlambatan pekerjaan Pelaksanaan Rehabilitas Poskesdes Juuh Tahun Anggaran 2023	CV. Segawan Berkah Mandiri	1.395.639,00
26	Denda keterlambatan pekerjaan Pelaksanaan Rehabilitas Poskesdes Juuh Tahun Anggaran 2023	CV. Tata laksana Kontruksi	1.051.896,00
27	Denda keterlambatan pekerjaan Pelaksanaan Rehabilitas Poskesdes Juuh Tahun Anggaran 2023	CV. Mandiri Sukses Abadi	2.182.730,00
28	Denda keterlambatan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Longsor Desa Tarangan Tahun Anggaran 2023	CV. Dwi Karya Bersama	52.252.252,00
29	Denda keterlambatan pekerjaan peningkatan Jalan Halong - Tabuan (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Murakata Anugerah Bersama	17.792.810,81
30	Denda keterlambatan pekerjaan Pembangunan Sarana Olah Raga Garuda Maharam Tahun Anggaran 2023	CV. Ajlea	2.621.908,40



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	Keterangan	Nama Rekanan	Nilai (Rp)
31	Denda keterlambatan pekerjaan Rehabilitasi Taman Monumen Perjuangan dan Taman PPKB Kab. Balangan Tahun Anggaran 2023	CV. Al Qaws	8.030.733,09
32	Denda Keterlambatan pekerjaan Rehabilitasi RTH Taman Banua Sanggam Lanjutan Tahun Anggaran 2023	CV. Bersama Kita Jaya Makmur	19.654.605,49
33	Denda keterlambatan Rehabilitasi Poskesdes Juai (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Bangkit Jaya Banua	1.203.600,00
34	Denda keterlambatan Rehabilitasi Poskesdes Murung Ilung (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Afmi Bersaudara	2.120.000,00
35	Denda keterlambatan Rehabilitasi Poskesdes Juai (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. An Nur	864.819,00
36	Denda keterlambatan Rehabilitasi Poskesdes Simpang Tiga (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Dita Al Barr	2.443.518,00
37	Denda keterlambatan Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Simpang Nadong (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. HWK Tiga Bintang Construction	2.347.128,00
38	Denda keterlambatan rekonstruksi jalan longsor Desa Bramban (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Bintang Jaya Group	39.639.639,64
39	Denda keterlambatan pembangunan Jembatan Sei Awang (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Mandiri Sukses Abadi	98.172.123,60
40	Denda keterlambatan pembangunan Pekerjaan Kontruksi Jalan Longosr Desa Baruh Bahinu dalam (APBD) Tahun Anggaran 2024	CV. Rezky Karya Muda	71.540.295,50
41	Denda keterlambatan pekerjaan peningkatan jalan Mungkur Uyam - Baruh Panyambaran (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Rindang Bersama	43.859.342,17
42	Denda keterlambatan pekerjaan pembangunan jembatan Iyungan Desa Mantuyan (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Rezky Karya Muda	42.720.224,32
43	Denda keterlambatan pekerjaan pembangunan long segment jalan Liyu – Upau (APBD) Tahun Anggaran 2023	PT. Dutra Anugerah Sukses	397.874.111,71
44	Denda keterlambatan pekerjaan pembangunan jalan kembar bundaran Paringin (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Mandiri	92.346.540,33
45	Denda keterlambatan pemeliharaan jembatan Desa Mungkur Uyam (APBD) Tahun Anggaran 2023	CV. Virgo	35.232.613,10
Jumlah			1.529.167.680,42

12. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.831.946,18 atau 454,25% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp8.548.558,18. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Restoran Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.911.137,18 atau



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

44,25% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp26.920.809,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebesar Rp1.264.533,98 dan Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp37.567.412,20.

13. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.500,00 atau 136,36% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp1.100,00. Penerimaan ini merupakan pendapatan denda keterlambatan pembayaran pusat kebugaran.
14. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp86.505,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp86.505,00. Pendapatan Denda Pajak Reklame merupakan denda dari keterlambatan pembayaran pajak penggunaan baliho.
15. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Parkir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp154.276,00 atau 106,40% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp145.000,00, merupakan penerimaan dari denda keterlambatan pembayaran pajak parkir yang dikelola oleh pihak swasta.
16. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp48.384,00 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp0,00, merupakan penerimaan dari denda keterlambatan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet oleh dua wajib pajak.
17. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.567.949,68 atau 13.685,35% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp142.984,68. merupakan penerimaan dari denda keterlambatan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh Rekanan yang melaksanakan pekerjaan fisik di wilayah Kabupaten Balangan.
18. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.984.175,00 atau mencapai 209,72% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp9.528.780,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp12.666.692,00 atau 38,79% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp32.650.867,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

19. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp80.000,00 atau mencapai 200% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp40.000,00. Realisasi Denda Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp40.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.000,00. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum merupakan penerimaan dari Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Balangan.
20. Realisasi Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp1.360.477.067,00 merupakan pendapatan atas pencairan klaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka atas pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp783.529.787,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp576.947.280,00 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp0,00. Realisasi Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp602.340.067,00 atau menurun 79,45%, dengan rincian sebai berikut:

Tabel 41 Pencairan Klaim Jaminan Pelaksanaan Dan Jaminan Uang Muka Atas Pekerjaan Yang Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2022

No.	Keterangan	SKPD	Rekanan	Nilai (Rp)
1	Pencairan klaim jaminan pelaksanaan atas pekerjaan pembangunan jembatan gantung Desa Sungai Awang	Dinas PUPR & Perkim	CV. Yudha Darma Mandiri	214.500.000,00
2	Pencairan klaim jaminan uang muka atas pekerjaan pembangunan jembatan gantung Desa Sungai Awang	Dinas PUPR & Perkim	CV. Yudha Darma Mandiri	317.691.892,00
3	Pencairan klaim jaminan pelaksanaan atas pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan gedung perpustakaan menjadi istana anak yatim Kabupaten Balangan	Dinas PUPR & Perkim	CV. Rajawali	116.862.000,00
4	Pencairan klaim jaminan pelaksanaan atas pekerjaan pembangunan Musholla Kantor Bupati Balangan	Dinas PUPR & Perkim	CV. Odayas Nusantara	37.213.550,00
5	Pencairan klaim jaminan pelaksanaan atas pekerjaan peningkatan jalan Kebun Raya Balangan	Dinas PUPR & Perkim	CV. Dian Abadi	73.517.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Keterangan	SKPD	Rekanan	Nilai (Rp)
6	Pencairan klaim jaminan pelaksanaan atas pekerjaan peningkatan jalan Komplek Cahaya Muhibbin	Dinas PUPR & Perkim	CV. Lentera Bumi Sanggam	23.744.445,00
Jumlah				783.529.787,00

Tabel 42 Pencairan Klaim Jaminan Pelaksanaan Dan Jaminan Uang Muka Atas Pekerjaan Yang Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	SKPD	Rekanan	Nilai (Rp)
1	Pencairan klaim jaminan pelaksanaan atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Komp. Islamic Centre Kabupaten Balangan	Dinas PUPR & Perkim	CV. Abha Pazindo	447.487.805,00
2	Pencairan klaim jaminan pelaksanaan atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Tinggar Desa Marajai Kecamatan Halong Kabupaten Balangan	Dinas PUPR & Perkim	CV. Tiga Sumber Rezeki	97.236.682,00
3	Pencairan klaim jaminan pelaksanaan atas pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga Kel. Batu Piring Lapangan Futsal Tahap III	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	CV. Nugraha Amanah	32.222.793,00
Jumlah				576.947.280,00

21. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada realisasi walaupun telah dianggarkan sebesar Rp2.221.782.475,07, dasar penganggaran pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 guna menampung semua pengembalian belanja yang masih belum bisa ditentukan penempatan atau pengelompokan jenis pendapatannya.

22. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.166.358,00 atau 263,42% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp11.451.788,00. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.124.358,00 atau 50,52% jika dibandingkan dengan realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.042.000,00. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pada Tahun Anggaran 2023 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 43 Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kelebihan Pembayaran gaji ASN Disporapar an. Pakhruddin	500.000,00
2	Kelebihan Pembayaran gaji ASN Disporapar an. Pakhruddin	500.000,00
3	Kelebihan Pembayaran gaji ASN Disporapar an. Pakhruddin	500.000,00
4	Kelebihan Pembayaran gaji ASN Kec. Batumandi an. Rohlina Sari	3.057.900,00
5	Kelebihan Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN DSP3APMD an. Hidayati, S.Sos	2.667.600,00
6	Kelebihan Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Disdikbud an. Siti Aminah, S.Sos	1.045.000,00
7	Kelebihan pembayaran gaji ASN DIKESPPKB an. Hasanah dan Aty Mardiaty	530.000,00
8	Kelebihan Pembayara gaji Kec. Batumandi an. Rohlina Sari	250.000,00
9	Kelebihan Pembayaran gaji Kec. Batumandi an. Rohlina Sari sebesar Rp250.000,00 dan Setda an. Rahmadi sebesar Rp1.500.000,00	1.750.000,00
10	Kelebihan Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Diskominfo	3.851.970,00
11	Kelebihan pembayaran tunjangan struktural ASN Kecamatan Juai an. Mili Yusmawati, S. Sos	1.620.000,00
12	Kelebihan pembayaran gaji dan tnjangan ASN Dis. PUPRPERKIM bulan periode April 2022 s.d Mei 2023 an. Muhammad Apipuddin	4.893.888,00
13	Kelebihan Pembayaran gaji ASN Sekretariat Daerah an. Rahmadi	1.500.000,00
14	Kelebihan Pembayaran gaji ASN Sekretariat Daerah an. Rahmadi	1.500.000,00
15	Kelebihan Pembayaran gaji ASN Sekretariat Daerah an. Rahmadi	1.500.000,00
16	Kelebihan Pembayaran gaji ASN Sekretariat Daerah an. Rahmadi	1.500.000,00
17	Kelebihan Pembayaran gaji ASN Sekretariat Daerah an. Rahmadi	1.500.000,00
18	Kelebihan Pembayaran gaji ASN Sekretariat Daerah an. Rahmadi	1.500.000,00
Jumlah		30.166.358,00

23. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp886.359.200,00 atau 207,27% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp427.630.000,00. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp133.721.400,00 atau 17,77% dari Tahun 2022 sebesar Rp752.637.800,00. Pendapatan ini merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran iuran BPJS yang langsung ditransfer oleh BPJS ke rekening Kas Daerah.

24. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp22.938.417,00 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp0,00 yang merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja pada Tahun 2022 yang didasarkan atas hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 44 Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Barang**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengembalian kelebihan pembayaran yang bersumber dari dana JKN sesuai dengan hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2022 pada PKM Paringin	12.084.800,00
2	Pengembalian kelebihan pembayaran yang bersumber dari dana JKN sesuai dengan hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2022 pada PKM Paringin	3.588.187,00
3	Setoran atas kekurangan Volume pada pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sungai Ketapi RT. 01 Tahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang dilaksanakan oleh CV. Adreena Sejahtera	7.265.430,00
Jumlah		22.938.417,00

25. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp474.455.766,00 atau 71,41% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp664.452.696,06. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2023 merupakan pengembalian atas sisa penggunaan dana hibah dan hasil temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalsel pada audit LKPD Tahun 2022, adapun rincian dari Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 45 Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia**

No	Uraian	Nilai
1	Pengembalian dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Balangan Tahun 2022 No surat 428/130/GP-KWARCAB-BLG/2022	3.802.538,00
2	Pengembalian dana Hibah Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Balangan TA 2022 no surat 63.21/071/DSPPPAPMD/BLG/2023	1.800.000,00
3	Pengembalian Pemberian Hibah KONI Kabupaten Balangan Tahap I dan II TA 2022 no surat 426/182/DISPORAPAR-BLG/2023	465.060.728,00
4	Pengembalian Pemberian Hibah KONI Kabupaten Balangan kekurangan setor	3.792.500,00
Jumlah		474.455.766,00

26. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat, Kantor dan Rumah Tangga pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.000.000,00 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp0,00. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat, Kantor dan Rumah Tangga merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran honorarium PPBJ dan KPA pada Pengandaan Mebel Sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan surat pengantar penyetoran ke Kas Daerah Nomor: 420/871/SARPRAS/ DISDIKBUD/2023 dan Nomor: 420/872/SARPRAS/ DISDIKBUD/2023

27. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung kantor pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp32.970.922,52 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp0,00. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung kantor merupakan hasil temuan audit BPK Tahun 2022 dengan rincian tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 46 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja
Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung kantor**

No.	Keterangan	Nama Rekanan	Nilai (Rp)
1	Setoran kelebihan pembayaran pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022	CV. Jaya Mandiri	8.342.520,23



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Keterangan	Nama Rekanan	Nilai (Rp)
2	Setoran kelebihan pembayaran pekerjaan rehabilitasi unit kerja kantor Imigrasi Tahun Anggaran 2022	CV. Pucuk Bunga	14.519.224,45
3	Setoran kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan Makodim Balangan Tahun Anggaran 2022	CV. Yudha Darma Mandiri	3.107.481,00
4	Setoran kelebihan pembayaran pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi Gedung Perpustakaan menjadi Istana Anak Yatim Tahun Anggaran 2022	CV. Raja Wali	7.001.696,84
Jumlah			32.970.922,52

28. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp197.628.653,74 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp0,00. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi merupakan hasil temuan audit BPK Tahun 2022 dengan rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 47 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi

No	Keterangan	Nama Rekanan	Nilai (Rp)
1	Setoran kelebihan pembayaran pekerjaan Penambahan Ruang Puskesmas Awayan DAK Tahun Anggaran 2022	CV. Mandiri Sukses Abadi	172.183.500,00
2	Setoran kelebihan pembayaran pekerjaan Renovasi/ Penambahan Ruang Puskesmas Halong (PONED) DAK Tahun Anggaran 2022	CV. Ajlea	20.903.529,97
3	Setoran kelebihan pembayaran pekerjaan renovasi/penambahan ruang Puskesmas Paringin (DAK) Tahun Anggaran 2022	CV. Sekumpul Indah Makmur	4.541.623,77
Jumlah			197.628.653,74

29. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.648.100,00 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp0,00. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan merupakan hasil temuan audit BPK Tahun 2022 dengan rincian tersaji pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 48 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal
Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pendidikan

No	Keterangan	Nama Rekanan	Nilai (Rp)
1	Setoran kelebihan pembayaran pekerjaan rehabilitasi ruang kelas (beserta perabot) SDN Munjung Kecamatan Batumandi (DAK) Tahun Anggaran 2022	CV. Tata Laksana Konstruksi	3.702.800,00
2	Setoran kelebihan pembayaran pekerjaan rehabilitasi ruang kelas (beserta perabot) SDN Pelajau Kecamatan Batumandi (DAK) Tahun Anggaran 2022	CV. Tata Laksana Konstruksi	12.508.000,00
3	Setoran kelebihan pembayaran pekerjaan rehabilitasi ruang kelas (beserta perabot) SDN Bungur Kecamatan Batumandi (DAK) Tahun Anggaran 2022	CV. Senja Mutiara Selatan	7.434.300,00
4	Setoran kelebihan pembayaran pekerjaan rehabilitasi ruang kelas (beserta Perabotnya) SDN Inan Kec. Paringin Selatan Tahun Anggaran 2022	CV. Ananda Nusantara	3.000,00
Jumlah			23.648.100,00

30. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.748.162.678,37 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp0,00. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan merupakan pengembalian atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 49 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal
Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan

No.	Keterangan	Nama Rekanan	Nilai (Rp)
1	Setoran pengembalian kelebihan uang muka pekerjaan pembangunan jembatan Desa Kambiain Kecamatan Tebing Tinggi	CV. Said Karya Konstruksi	169.945.946,00
2	Kekurangan volume atas pekerjaan pemeliharaan Jalan Komplek Citra SKB Paringin	CV. Asia Bagus	32.413.033,54
3	Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. 4 Gunung Pandau - Haur Batu	CV. Annisa	110.000.000,00
4	Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Gunung Batu - Iyam	CV. Huzaimah Raya Semesta	60.000.000,00
5	Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Sungsum - Kambiyain	CV. Tata Laksana Konstruksi	35.000.000,00
6	Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Tabuan - Uren	CV. Ajlea	83.473.826,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Keterangan	Nama Rekanan	Nilai (Rp)
7	Kekurangan volume atas pekerjaan rehabilitasi Jalan Badalungga - Murung Abuin	CV. Kanca Mulia Abadi	28.071.009,49
8	Kekurangan volume atas pekerjaan pemeliharaan Jalan Paringin Mantimin	CV. Ferina	56.653.439,54
9	Kekurangan volume atas pekerjaan Rekonstruksi /Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mantuyan-Mauya	CV. Titian Rezeki	131.880.734,85
10	Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sumber Agung	CV. Berkah Rizki Pratama	10.000.000,00
11	Kekurangan volume atas pekerjaan Pembangunan Siring Jalan Desa Liyu	CV. Dua Putra Batara	7.906.761,39
12	Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. 4 Muara Pitap - Simp. 4 Gunung Pandau	CV. Sangga Banua	50.000.000,00
13	Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Tampang - Batu Merah	CV. Prestasi Utama	170.161.309,45
14	Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. 4 Muara Pitap - Simp. 4 Gunung Pandau	CV. Sangga Banua	50.000.000,00
15	Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Awayan-Tundakan Hulu	CV. Yudha Darma Mandiri	128.616.522,47
16	Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Sungsum - Kambiyain	CV. Tata Laksana Konstruksi	106.855.101,87
17	Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Gunung Batu - Iyam	CV. Huzaimah Raya Semesta	50.000.000,00
18	Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. 4 Gunung Pandau - Haur Batu	CV. Annisa	100.000.000,00
19	Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. 4 Muara Pitap - Simp. 4 Gunung Pandau	CV. Sangga Banua	100.000.000,00
20	Kekurangan volume atas pekerjaan Rekonstruksi /Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mantuyan-Mauya	CV. Titian Rezeki	150.000.000,00
21	Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Uren - Bentala	CV. Haura Dua Jaya	147.286.011,80
22	Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sumber Agung	CV. Berkah Rizki Pratama	20.000.000,00
23	Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lajar - Mundar	CV. Berkah Rizki Pratama	30.000.000,00
24	Kekurangan volume atas pekerjaan Rekonstruksi /Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mantuyan-Mauya	CV. Titian Rezeki	250.000.000,00
25	Kelebihan pembayaran atas pekerjaan peningkatan jalan Kalahiyang - Haur Batu	CV. Asia Bagus	69.898.981,97
26	Kekurangan volume atas pekerjaan Rekonstruksi /Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mantuyan - Mauya	CV. Titian Rezeki	600.000.000,00
Jumlah			2.748.162.678,37



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

31. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp61.053.968,85 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp0,00. Pendapatan ini merupakan Setoran kelebihan pembayaran pekerjaan Peningkatan Halaman dan Jalan Lingkungan BLK Kabupaten Balangan yang dilaksanakan oleh CV. Analis.
32. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.509.790,00 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp.0,00. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan pengembalian sisa penggunaan Dana BOS (SiLPA) Tahun 2023 oleh Sekolah Swasta yaitu SDIT Darul Fikri.
33. Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 merupakan realisasi pendapatan dari RSUD Datu Kandang Haji sebesar Rp48.679.897.247,55 atau mencapai 136,74% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp35.600.000.000,00. Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.239.382.337,06 atau 7,13% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp45.440.514.910,49.
34. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp7.280.885.312,00 atau mencapai 102,07% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp7.133.469.220,00. Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.226.335.323,00 atau 20,25% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.054.549.989,00. Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP merupakan Penerimaan Kas Puskesmas Tahun Anggaran 2023. Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP disajikan pada tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 50 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP
per Puskesmas Tahun Anggaran 2023**

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Puskesmas Paringin	806.165.027,00
2	Puskesmas Paringin Selatan	683.868.085,00
3	Puskesmas Awayan	865.686.120,00
4	Puskesmas Tebing Tinggi	481.621.321,00
5	Puskesmas Lokbatu	331.011.005,00
6	Puskesmas Batumandi	655.572.414,00
7	Puskesmas Tanah Habang	320.009.276,00
8	Puskesmas Lampihong	745.566.824,00
9	Puskesmas Juai	919.576.542,00
10	Puskesmas Pirsus	145.591.476,00
11	Puskesmas Halong	979.825.625,00
12	Puskesmas Uren	346.391.597,00
Jumlah		7.280.885.312,00

35. Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat penurunan Rp244.710.073,85.

36. Realisasi pendapatan Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp15.770.623.989,00 merupakan realisasi imbalan bunga atas penyimpanan dana milik pemda pada fasilitas TDF Pemerintah Kabupaten Balangan selama tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Penyaluran Remunerasi Tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Remunerasi TDF Triwulan I	7.402.283.091,00
2	Remunerasi TDF Triwulan II	4.204.383.858,00
3	Remunerasi TDF Triwulan III	3.719.262.599,00
4	Remunerasi TDF Triwulan IV	444.694.441,00
Jumlah		15.770.623.989,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.1.2. Pendapatan Transfer	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	2.273.896.841.463,56	2.622.936.320.422,00	1.686.057.079.199,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.622.936.320.422,00 atau mencapai 115,35% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp2.273.896.841.463,56. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp936.879.241.223,00 atau 55,57% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.686.057.079.199,00. Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52 Perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	2.054.266.683.712,00	2.380.860.170.980,00	115,90	1.462.584.501.792,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	123.752.156.000,00	129.064.886.300,00	104,29	121.169.306.240,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.878.001.751,56	113.011.263.142,00	117,87	102.303.271.167,00
Jumlah		2.273.896.841.463,56	2.622.936.320.422,00	115,35	1.686.057.079.199,00

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	2.178.018.839.712,00	2.509.925.057.280,00	1.583.753.808.032,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.509.925.057.280,00 atau mencapai 115,24% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp2.178.018.839.712,00. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp926.171.249.248,00 atau 58,48% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.583.753.808.032,00. Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 53 Perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.555.562.368.000,00	1.899.001.975.914,00	122,08	994.362.274.685,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	361.852.722.000,00	361.821.744.450,00	99,99	345.185.535.241,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	48.528.228.000,00	46.040.531.309,00	94,87	52.704.154.259,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	88.323.365.712,00	73.995.919.307,00	83,78	70.332.537.607,00
5	Dana Insentif Daerah	10.447.499.000,00	16.166.958.000,00	154,74	13.333.129.000,00
6	Dana Desa	113.304.657.000,00	112.897.928.300,00	99,64	107.836.177.240,00
Jumlah		2.178.018.839.712,00	2.509.925.057.280,00	115,24	1.583.753.808.032,00

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	1.555.562.368.000,00	1.899.001.975.914,00	994.362.274.685,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.899.001.975.914,00 atau mencapai 122,08% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.555.562.368.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp904.639.701.229,00 atau 90,98% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp994.362.274.685,00. Realisasi Dana Bagi Hasil disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 54 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	38.031.337.000,00	38.031.337.000,00	100,00	22.432.705.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	7.742.280.663,00	10.508.342.000,00	135,73	9.323.150.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.959.682.337,00	193.621.000,00	6,54	203.440.000,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	65.790,00	-	144.290,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	535.425.000,00	535.425.000,00	100,00	80.905.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	384.112.500,00	544.833.000,00	141,84	2.213.719.000,00
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.504.099.788.500,00	1.841.699.654.124,00	122,45	958.060.765.395,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	401.646.000,00	6.228.757.000,00	1.550,81	89.135.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	148.155.000,00	-	-	-
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.259.941.000,00	1.259.941.000,00	100,00	1.958.311.000,00
Jumlah		1.555.562.368.000,00	1.899.001.975.914,00	122,08	994.362.274.685,00

Alokasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 173/PK/2022 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Dana Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 serta PMK Nomor 19 Tahun 2023 Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. Peningkatan Dana Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat yang sangat signifikan disebabkan peningkatan pendapatan pada Tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp1.841.699.654.124,00 mengalami kenaikan sebesar Rp883.638.888.729,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp958.060.765.395,00. Perbedaan yang sangat signifikan ini juga dipengaruhi karena adanya perubahan pagu Transfer Ke Daerah khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty pada APBN Tahun Anggaran 2023 yang mengalami kenaikan signifikan dari perhitungan atas potensi yang terjadi.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2022 (Rp)
	361.852.722.000,00	361.821.744.450,00	345.185.535.241,00

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Balangan sebesar Rp361.821.744.450,00 atau mencapai 99,99% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp361.852.722.000,00. Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp16.636.209.209,00 atau 4,82% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp345.185.535.241,00.

Untuk Dana Alokasi Umum sejak Tahun Anggaran 2022 sudah dikelompokkan sesuai dengan penggunaannya/bidangnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Realisasi Dana Alokasi Umum Perbidang

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Alokasi DAU Bidang Kesehatan	34.448.060.000,00	34.448.060.000,00	100,00%
2	Alokasi DAU Bidang Pekerjaan Umum	27.241.308.000,00	27.241.308.000,00	100,00%
3	Alokasi DAU Bidang Pendidikan	28.068.021.000,00	28.068.021.000,00	100,00%
4	Alokasi DAU Pendanaan Kelurahan	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00%
5	Alokasi DAU Penggajian Formasi PPPK	18.510.840.000,00	18.510.840.000,00	100,00%
6	Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya	252.984.493.000,00	252.953.515.450,00	99,99%
Jumlah		361.852.722.000,00	361.821.744.450,00	99,99%

Dana Alokasi Umum yang tidak terealisasi 100% adalah Alokasi DAU tidak ditentukan penggunaannya dikarenakan ada pemotongan penyaluran sebesar Rp30.977.550,00 pada penyaluran bulan Oktober. Pemotongan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus - Fisik	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2022 (Rp)
	48.528.228.000,00	46.040.531.309,00	52.704.154.259,00

Dana Alokasi Khusus – Fisik merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Anggaran Dana Alokasi Khusus – Fisik ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.040.531.309,00 atau mencapai 94,87% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp48.528.228.000,00. Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.663.622.950,00 atau 12,64% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp52.704.154.259,00. Rincian Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik berdasarkan alokasi setiap bidang sebagai berikut:

Tabel 56 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	957.781.000,00	944.727.580,00	98,64	1.542.085.400,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.621.649.000,00	3.312.976.217,00	91,48	5.098.133.925,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.465.161.000,00	2.130.433.276,00	86,42	2.072.213.279,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	-	-	-	2.126.149.660,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1.618.450.000,00	1.353.400.000,00	83,62	1.737.233.276,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	-	-	-	277.780.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	-	-	-	854.565.050,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	-	-	-	699.825.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	17.720.889.000,00	-	-	10.782.509.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	-	17.148.568.100,00	-	-
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.383.053.000,00	7.383.053.000,00	100,00	5.271.118.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.625.866.000,00	6.625.866.000,00	100,00	5.083.429.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	776.014.000,00	680.698.300,00	87,72	-
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.050.030.000,00	1.042.600.000,00	99,29	-
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.309.335.000,00	5.418.208.836,00	85,88	17.159.112.669,00
Jumlah		48.528.228.000,00	46.040.531.309,00	94,87	52.704.154.259,00

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	88.323.365.712,00	73.995.919.307,00	70.332.537.607,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus – Non Fisik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp73.995.919.307,00 atau mencapai 83,78% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp88.323.365.712,00. Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Rp3.663.381.700,00 atau 5,21% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp70.332.537.607,00. Rincian Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik berdasarkan alokasi setiap bidang sebagai berikut:

Tabel 57 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bidang Pendidikan		70.690.922.712,00	61.355.593.000,00	86,79	55.694.683.692,00
1	BOS Reguler	13.559.902.712,00	14.551.723.350,00	107,31	12.984.148.432,00
2	BOS Kinerja	895.000.000,00	-	-	800.000.000,00
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	47.021.000.000,00	44.126.929.700,00	93,85	40.899.745.260,00
4	Tunjangan Penghasilan Guru PNSD	1.450.000.000,00	973.499.950,00	67,14	427.500.000,00
5	Tunjangan Khusus Guru PNSD	2.200.000.000,00	699.430.000,00	31,79	-
6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.963.220.000,00	603.010.000,00	15,22	345.090.000,00
7	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.601.800.000,00	401.000.000,00	25,03	238.200.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan KB		17.215.043.000,00	12.397.672.107,00	72,02	13.831.024.515,00
1	Bantuan Operasional Kesehatan	13.485.477.000,00	9.262.416.000,00	68,68	11.216.202.368,00
2	PK2UKM	-	-	-	364.712.500,00
3	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.729.566.000,00	3.135.256.107,00	84,06	2.250.109.647,00
Bidang Penanaman Modal		417.400.000,00	242.654.200,00	58,13	303.079.400,00
1	Fasilitas Penanaman Modal	417.400.000,00	242.654.200,00	58,13	303.079.400,00
Bidang Ketahanan Pangan		-	-	-	503.750.000,00
1	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	-	-	503.750.000,00
Jumlah		88.323.365.712,00	73.995.919.307,00	83,78	70.332.537.607,00

Secara keseluruhan terdapat perbedaan realisasi pendapatan yang dicatat dalam APBD khusus untuk Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Pendapatan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) hal ini sebabkan realisasi yang disalurkan untuk Sekolah Swasta tidak dicatat dalam APBD.

5.1.1.2.1.1. Dana Insentif Daerah (DID)	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	10.447.499.000,00	16.166.958.000,00	13.333.129.000,00

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.166.958.000,00 atau mencapai 154,74% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp10.447.499.000,00. Realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.833.829.000,00 atau 21,25% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.333.129.000,00. Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2023 yang diterima pada Tahun 2023 terdiri dari dua jenis yaitu Alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp10.447.499.000,00 dan Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.719.459.000,00.

5.1.1.2.1.2. Dana Desa	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA. 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	113.304.657.000,00	112.897.928.300,00	107.836.177.240,00

Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp112.897.928.300,00 atau mencapai 99,64% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp113.304.657.000,00. Realisasi Pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.061.751.060,00 atau 4,69% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp107.836.177.240,00. Realisasi pendapatan dana diakui sebesar penyaluran dari KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung) ke Pemerintah Desa, tidak terealisasinya 100% Dana Desa Tahun 2023 disebabkan adanya sanksi untuk Desa Kambiyain Kecamatan Tebing Tinggi berupa penundaan Tahap II dan Tahap III dari anggaran Rp689.041.000,00 dilakukan pemotongan sebesar Rp406.728.700,00 dan disalurkan sebesar Rp282.312.300,00 atau 40,97%, adapun rincian realisasi pendapatan Dana Desa per Kecamatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 58 Realisasi Dana Desa per Kecamatan pada Tahun 2023

No.	Kecamatan	2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Awayan	16.786.067.000,00	16.786.067.000,00	100,00
2	Batumandi	12.555.871.000,00	12.555.871.000,00	100,00
3	Halong	19.599.838.000,00	19.599.838.000,00	100,00
4	Juai	14.890.566.000,00	14.890.566.000,00	100,00
5	Lampihong	20.478.678.000,00	20.478.678.000,00	100,00
6	Paringin	9.929.767.000,00	9.929.767.000,00	100,00
7	Paringin Selatan	10.088.015.000,00	10.088.015.000,00	100,00
8	Tebing Tinggi	8.975.855.000,00	8.569.126.300,00	95,47
Jumlah		113.304.657.000,00	112.897.928.300,00	99,64

5.1.1.3. Pendapatan

Transfer

Antar Daerah

Anggaran TA 2023

(Rp)

95.878.001.751,56

Realisasi TA 2023

(Rp)

113.011.263.142,00

Realisasi TA 2022

(Rp)

102.303.271.167,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp113.011.263.142,00 atau mencapai 117,87% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp95.878.001.751,56. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.707.991.975,00 atau 10,47% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp102.303.271.167,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang perhitungan besarnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

**5.1.1.3.1.1. Pendapatan
Bagi Hasil**

Anggaran TA 2023

(Rp)

95.878.001.751,56

Realisasi TA 2023

(Rp)

113.011.263.142,00

Realisasi TA 2022

(Rp)

102.303.271.167,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp113.011.263.142,00 atau mencapai 117,87% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp95.878.001.751,56. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.707.991.975,00 atau 10,47% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp102.303.271.167,00. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 59 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan	5.835.836.516,04	5.416.906.256,00	92,82	6.275.093.028,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.111.334.646,78	10.447.542.794,78	103,33	9.882.026.791,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	69.180.199.227,50	84.911.918.837,22	122,74	74.586.332.680,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	395.455.811,79	1.020.906.976,00	258,16	425.221.303,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.355.175.549,45	11.213.988.278,00	108,29	11.134.597.365,00
Jumlah		95.878.001.751,56	113.011.263.142,00	117,87	102.303.271.167,00

5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	6.176.710.373,00	600.000.000,00	6.539.410.279,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp600.000.000,00 atau hanya terealisasi 9,71% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp6.176.710.373,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.939.410.279,00 atau 90,82% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.539.410.279,00. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 60 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah	6.176.710.373,00	600.000.000,00	9,71	6.537.075.079,00
2	Pendapatan Lainnya	-	-	-	2.335.200,00
Jumlah		6.176.710.373,00	600.000.000,00	9,71	6.539.410.279,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.1.4.1. Pendapatan Hibah	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	6.176.710.373,00	600.000.000,00	6.537.075.079,00

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 merupakan *Lumpsum Payment* dari aktifitas pertambangan yang ada di Kabupaten Balangan dengan realisasi sebesar Rp600.000.000,00 atau mencapai 9,71% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp6.176.710.373,00. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.937.075.079,00 atau 90,82% jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.537.075.079,00. Realisasi pendapatan ini merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (Hibah Air Limbah Setempat) yang merupakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan investasi terlebih dahulu untuk meningkatkan layanan air limbah setempat, yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis. Secara teknis penggunaannya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman adapun rincian dari Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 61 Rincian Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	600.000.000,00	-	264.000.000,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.176.710.373,00	-	-	6.273.075.079,00
Jumlah		6.176.710.373,00	600.000.000,00	9,71	6.537.075.079,00

5.1.1. Belanja	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	2.557.167.298.075,00	2.292.344.562.265,65	1.644.691.137.033,11

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.292.344.562.265,65 atau 89,64% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp2.557.167.298.075,00. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp647.653.425.232,54 atau 39,38% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.644.691.137.033,11.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja dikelompokkan berdasarkan jenis Belanja yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 62 Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	1.578.337.781.963,00	1.403.981.021.061,62	88,95	1.009.312.423.852,08
2	Belanja Modal	666.352.162.737,00	580.674.088.157,03	87,14	391.771.955.326,03
3	Belanja Tak Terduga	5.603.265.908,00	1.602.500.000,00	28,60	1.203.971.500,00
4	Belanja Transfer	306.874.087.467,00	306.086.953.047,00	99,74	242.402.786.355,00
Jumlah		2.557.167.298.075,00	2.292.344.562.265,65	89,64	1.644.691.137.033,11

5.1.1.1. Belanja Operasi	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2022 (Rp)
	1.578.337.781.963,00	1.403.981.021.061,62	1.009.312.423.852,08

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.403.981.021.061,62 atau 88,95% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.578.337.781.963,00. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp394.668.597.209,54 atau 39,10% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.009.312.423.852,08. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	502.425.067.881,00	437.938.657.742,00	87,16	386.952.974.398,00
2	Belanja Barang dan Jasa	889.889.966.575,00	795.194.098.965,62	89,36	570.184.530.893,23
3	Belanja Hibah	180.582.121.770,00	165.622.074.354,00	91,72	47.703.693.560,85



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	Belanja Bantuan Sosial	5.440.625.737,00	5.226.190.000,00	96,06	4.471.225.000,00
Jumlah		1.578.337.781.963,00	1.403.981.021.061,62	88,95	1.009.312.423.852,08

5.1.1.1.1. Belanja Pegawai	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	502.425.067.881,00	437.938.657.742,00	386.952.974.398,00

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pimpinan/ anggota DPRD, ASN/PNS dan PPPK serta Non ASN yang diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp437.938.657.742,00 atau 87,16% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp502.425.067.881,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp50.985.683.344,00 atau 13,18% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp386.952.974.398,00. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 146 “Daerah wajib mengalokasikan Belanja Pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD” maka Pemerintah Kabupaten Balangan telah melaksanakan amanah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dengan persentase anggaran Belanja Pegawai sesuai dengan perhitungan tersebut sebesar Rp451.741.067.881,00 atau 17,67% dari total APBD Tahun Anggaran 2023. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 64 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 serta 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	240.921.573.793,00	207.600.751.527,00	86,17	203.154.144.376,00
Belanja Gaji Pokok ASN	173.507.784.390,00	153.034.626.993,00	88,20	149.303.386.081,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.279.232.510,00	13.890.782.741,00	80,39	13.614.436.022,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.919.546.128,00	4.142.145.000,00	84,20	4.531.805.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.272.879.910,00	12.065.763.020,00	84,54	10.561.097.410,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.738.563.655,00	1.670.112.000,00	60,98	1.952.787.500,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	11.002.750.235,00	8.828.813.165,00	80,24	8.666.386.796,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	723.481.233,00	462.261.472,00	63,89	370.697.407,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.922.689,00	2.242.418,00	11,26	2.194.360,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.540.102.648,00	12.242.188.241,00	84,20	12.926.709.278,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	477.429.728,00	315.385.475,00	66,06	307.215.365,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.439.880.667,00	946.431.002,00	65,73	917.429.157,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	194.572.320.508,00	169.666.856.186,00	87,20	121.612.369.908,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	102.522.902.633,00	87.475.046.402,00	85,32	63.949.253.366,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	19.160.975.772,00	16.970.082.835,00	88,57	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.565.782.897,00	4.974.746.666,00	75,77	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	66.322.659.206,00	60.246.980.283,00	90,84	57.663.116.542,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.676.200.000,00	45.532.044.000,00	89,85	48.149.763.124,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	514.784.897,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	50.952.488,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	47.021.000.000,00	43.339.164.400,00	92,17	43.580.303.600,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.200.000.000,00	1.142.279.600,00	51,92	886.001.600,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.450.000.000,00	1.049.000.000,00	72,34	914.500.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	1.992.172.539,00
Belanja Honorarium	5.200.000,00	1.600.000,00	30,77	211.048.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.853.543.630,00	13.957.569.852,00	93,97	13.118.015.141,00
Belanja Uang Representasi DPRD	589.025.000,00	553.665.000,00	94,00	556.815.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	103.950.000,00	50.979.600,00	49,04	56.544.600,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	78.259.500,00	60.181.020,00	76,90	59.384.400,00
Belanja Uang Paket DPRD	62.322.400,00	47.502.000,00	76,22	47.659.500,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	820.547.000,00	802.814.250,00	97,84	807.381.750,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	110.930.000,00	75.805.275,00	68,34	76.048.225,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	21.230.370,00	12.058.200,00	56,80	11.631.899,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.139.500.000,00	3.108.000.000,00	99,00	3.320.100.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	777.000.000,00	98,67	766.500.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	42.758.412,00	673.911,00	1,58	626.576,00
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	149.996,00	-	-	-
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.547.867.200,00	4.173.740.596,00	91,77	3.758.323.191,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.530.000.000,00	4.292.000.000,00	94,75	3.657.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	19.503.752,00	3.150.000,00	16,15	-
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	478.981.150,00	264.335.493,00	55,19	164.435.673,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	77.007.000,00	29.400.000,00	38,18	52.800.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.121.000,00	4.116.000,00	45,13	6.456.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	138.614.000,00	52.920.000,00	38,18	95.040.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.575.000,00	4.055.520,00	47,29	5.069.400,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	12.012.000,00	855.204,00	7,12	1.393.773,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.600,00	1.000,00	17,86	1.620,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	11.849.760,00	2.963.520,00	25,01	3.294.720,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	299.520,00	60.480,00	20,19	95.040,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	673.920,00	181.440,00	26,92	285.120,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	170.716.000,00	160.211.450,00	93,85	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	50.107.350,00	9.570.879,00	19,10	-
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	687.280.000,00	687.280.000,00	100,00	600.700.000,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	287.280.000,00	287.280.000,00	100,00	201.600.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	399.100.000,00
Belanja Pegawai BLUD	235.168.800,00	229.820.684,00	97,73	153.546.176,00
Belanja Pegawai BLUD	235.168.800,00	229.820.684,00	97,73	153.546.176,00
Jumlah	502.425.067.881,00	437.938.657.742,00	87,16	386.952.974.398,00

1. Besaran dan komponen dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Adapun rincian dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 65 Rincian Belanja Pegawai ASN Tahun Anggaran 2023

Uraian	PNS (Rp)	PPPK (Rp)	Total (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			
Belanja Gaji Pokok ASN	140.311.114.693,00	12.723.512.300,00	153.034.626.993,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	12.783.190.583,00	1.107.592.158,00	13.890.782.741,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.142.145.000,00	-	4.142.145.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.660.935.020,00	1.404.828.000,00	12.065.763.020,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.666.152.000,00	3.960.000,00	1.670.112.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	7.988.234.225,00	840.578.940,00	8.828.813.165,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	462.261.472,00	-	462.261.472,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.100.383,00	142.035,00	2.242.418,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.542.293.725,00	699.894.516,00	12.242.188.241,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	287.962.765,00	27.422.710,00	315.385.475,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	PNS (Rp)	PPPK (Rp)	Total (Rp)
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	863.972.412,00	82.458.590,00	946.431.002,00
Jumlah	190.710.362.278,00	16.890.389.249,00	207.600.751.527,00

2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dan PPPK yang dikelompokkan dalam Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN besarnya mengacu pada Peraturan Bupati yang ditetapkan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Adapun rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 66 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2023

Uraian	PNS (Rp)	PPPK (Rp)	Total (Rp)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN			
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	77.844.905.797,00	9.630.140.605,00	87.475.046.402,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	16.471.492.243,00	498.590.592,00	16.970.082.835,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.974.746.666,00	-	4.974.746.666,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	59.680.250.716,00	566.729.567,00	60.246.980.283,00
Jumlah	158.971.395.422,00	10.695.460.764,00	169.666.856.186,00

3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru yang alokasi pendapatannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan besarnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 yang mengatur Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru baik ASN, PPPK dan Non ASN.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD merupakan gaji dan tunjangan yang diterima oleh DPRD dengan besaran mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Khusus untuk Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari Tunjangan Perumahan DPRD dan Tunjangan Transportasi besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sedangkan Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD penentuan besarnya sesuai dengan kategori/kelompok kemampuan keuangan daerah dengan tatacara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH merupakan gaji dan tunjangan yang diterima oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan besaran mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, khusus untuk Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH yang terdiri dari Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD besarnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedangkan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, khusus untuk Belanja Insentif bagi KDH/WKDH.
7. Belanja Pegawai BLUD merupakan belanja Honorarium yang diberikan baik kepada ASN maupun Non ASN yang sumber pendanaannya dari pendapatan BLUD dengan rincian tersaji pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 67 Rincian Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan, Pengeluaran dan Petugas Akuntansi(RSB & RBA)	27.000.000,00	24.000.000,00
2	Honorarium Pembantu. Pengurus dan Penyimpan Barang	12.000.000,00	18.000.000,00
3	Honorarium Trainer Refresh BHD dan Aktifasi Code Blue	3.600.000,00	13.800.000,00
4	Honorarium Tim Narasumber Pelatihan Pemasangan Syringe Pump dan Infus Pump	1.200.000,00	2.400.000,00
5	Honorarium Petugas Muadzin	18.000.000,00	4.500.000,00
6	Honorarium Tim Sensus BMD	12.000.000,00	-
7	Honorarium Dewan Pengawas	59.668.800,00	62.146.176,00
8	Honorarium Tim Jaga Posko Kesehatan	-	700.000,00
9	Honorarium Tim Pokja Akreditasi (Pengarah/Pembina)	-	28.000.000,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	96.351.884,00	-
Jumlah		229.820.684,00	153.546.176,00

5.1.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	889.889.966.575,00	795.194.098.965,62	570.184.530.893,23

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp795.194.098.965,62 atau 89,36% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp889.889.966.575,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp225.009.568.072,39 atau 39,46% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp570.184.530.893,23. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 68 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Barang	301.307.808.381,00	268.441.885.586,59	89,09	174.362.582.974,00
Belanja Jasa	340.757.216.294,00	304.271.758.182,26	89,29	201.462.460.751,00
Belanja Pemeliharaan	35.760.601.352,00	32.636.291.919,00	91,26	41.440.478.829,00
Belanja Perjalanan Dinas	131.843.637.450,00	111.217.496.108,00	84,36	75.505.934.127,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.160.070.600,00	13.359.394.600,00	88,12	6.477.068.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	13.037.606.305,00	13.369.072.340,11	102,54	12.416.597.399,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.023.026.193,00	51.898.200.229,66	99,76	58.519.408.813,23
Jumlah	889.889.966.575,00	795.194.098.965,62	89,36	570.184.530.893,23

5.1.1.1.2.1. Belanja Barang	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	301.307.808.381,00	268.441.885.586,59	174.362.582.974,00

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp268.441.885.586,59 atau 89,09% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp301.307.808.381,00. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp94.079.302.612,59 atau 53,96% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp174.362.582.974,00. Rincian dan perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 69 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	297.236.061.881,00	264.455.611.186,59	88,97	172.363.532.548,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	571.477.700,00	528.260.960,00	92,44	263.136.300,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.154.819.400,00	2.950.147.700,00	93,51	8.153.920.304,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.024.155.800,00	7.024.240.668,00	87,54	5.006.736.405,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	-	-	-	198.879.500,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	453.780.400,00	394.372.700,00	86,91	1.484.481.800,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	91.088.500,00	65.719.400,00	72,15	35.560.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	250.342.700,00	240.650.700,00	96,13	384.301.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.095.500.500,00	9.102.042.777,00	90,16	6.167.706.099,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.581.290.100,00	3.296.136.150,00	92,04	2.086.275.933,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	86.000.000,00	79.163.430,00	92,05	-
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	49.800.000,00	44.454.000,00	89,27	41.924.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-	69.443.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	382.754.000,00	245.558.644,00	64,16	21.455.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.021.356.450,00	2.614.883.777,00	86,55	3.356.443.351,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.400.383.300,00	2.317.655.850,00	96,55	13.795.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.279.355.000,00	9.262.603.681,00	90,11	6.289.129.496,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	432.859.000,00	419.893.000,00	97,00	292.702.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.438.500,00	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.001.906.550,00	2.800.001.661,00	93,27	1.788.120.980,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	157.803.100,00	133.838.900,00	84,81	430.518.066,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.421.356.700,00	3.173.105.149,00	92,74	1.656.194.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.170.221.900,00	2.077.029.600,00	95,71	62.785.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	119.919.600,00	119.834.000,00	99,93	42.295.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.610.496.000,00	1.478.295.337,00	91,79	681.571.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	442.622.400,00	425.042.525,00	96,03	127.975.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	1.532.477.257,00	1.168.987.617,00	76,28	1.304.177.671,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	339.060.000,00	326.305.000,00	96,24	292.883.600,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	138.467.634.174,00	129.479.419.959,00	93,51	78.822.453.144,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	42.100.411.950,00	30.747.168.458,59	73,03	17.240.188.570,00
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	20.312.449.000,00	17.689.589.900,00	87,09	11.676.045.240,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.080.041.000,00	4.395.443.678,00	86,52	2.547.944.600,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	621.025.000,00	376.286.750,00	60,59	349.092.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	387.628.600,00	376.737.900,00	97,19	128.590.000,00
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	165.610.000,00	58.110.000,00	35,09	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.272.546.400,00	19.557.802.400,00	87,81	11.510.403.514,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.098.600.000,00	1.081.069.000,00	98,40	957.024.000,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	11.452.500,00	11.267.000,00	98,38	2.240.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.241.300.000,00	1.133.425.000,00	91,31	803.583.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	41.400.000,00	40.000.000,00	96,62	39.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	469.000.000,00	464.485.000,00	99,04	295.810.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.388.640.000,00	2.320.672.000,00	97,15	1.269.429.500,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	1.729.000.000,00	1.729.000.000,00	100,00	1.246.597.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	203.000.000,00	197.720.000,00	97,40	137.066.400,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	234.000.000,00	214.456.000,00	91,65	242.290.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	317.950.000,00	290.555.000,00	91,38	1.073.575.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.205.902.500,00	997.358.435,00	82,71	902.794.000,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	104.000.000,00	100.100.000,00	96,25	231.423.200,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	41.850.000,00	41.850.000,00	100,00	46.700.000,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	47.300.000,00
Belanja Pakaian KORPRI	270.873.500,00	263.335.000,00	97,22	522.560.365,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	209.100.000,00	199.370.000,00	95,35	13.500.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.433.914.400,00	1.307.216.400,00	91,16	1.405.728.160,00
Belanja Pakaian Olahraga	1.118.068.000,00	1.056.550.080,00	94,50	501.524.800,00
Belanja Pakaian Paskibraka	-	-	-	98.260.000,00
Belanja Pakaian Jas/Safari	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	-
Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.071.746.500,00	3.986.274.400,00	97,90	1.999.050.426,00
Belanja Komponen-Komponen Peralatan	-	-	-	13.767.000,00
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	30.000.000,00	29.950.000,00	99,83	-
Belanja Komponen-Komponen Lainnya	3.997.037.500,00	3.911.790.400,00	97,87	1.985.283.426,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	36.756.000,00	36.691.500,00	99,82	-
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	7.953.000,00	7.842.500,00	98,61	-
Jumlah	301.307.808.381,00	268.441.885.586,59	89,09	174.362.582.974,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Barang Pakai Habis tidak semuanya merupakan belanja yang digunakan kegiatan operasional kantor melainkan ada beberapa belanja yang langsung diperuntukan kepada masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp201.349.495.124,00 atau 67,74% dari total belanja barang pakai habis dan terealisasi sebesar Rp178.380.663.317,59 atau 67,45% dari realisasi belanja Barang Pakai Habis.

Tabel 70 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis yang Langsung Diperuntukan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	138.467.634.174,00	129.479.419.959,00	93,51	78.822.453.144,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	42.100.411.950,00	30.747.168.458,59	73,03	17.240.188.570,00
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	20.312.449.000,00	17.689.589.900,00	87,09	11.676.045.240,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	469.000.000,00	464.485.000,00	99,04	295.810.000,00
Jumlah	201.349.495.124,00	178.380.663.317,59	88,59	108.034.496.954,00

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	340.757.216.294,00	304.271.758.182,26	201.462.460.751,00

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp304.271.758.182,26 atau 89,29% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp340.757.216.294,00. Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp102.809.297.431,26 atau 51,03% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp201.462.460.751,00. Rincian dan perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 71 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Jasa Kantor	208.078.200.118,00	181.528.358.184,26	87,24	132.074.562.116,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.125.550.000,00	5.078.853.500,00	71,28	4.676.610.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.721.620.000,00	6.337.937.300,00	82,08	4.970.300.000,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	27.000.000,00	3.610.874,00	13,37	385.300.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	15.104.436.000,00	14.850.281.000,00	98,32	8.635.063.200,00
Honorarium Rohaniwan	3.900.000,00	2.650.000,00	67,95	-
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	2.394.900.000,00	2.370.000.000,00	98,96	297.000.000,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	19.000.000,00	-	-	-
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	17.750.000,00	-	-	-
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	96.000.000,00	82.000.000,00	85,42	57.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	34.231.504.800,00	25.757.950.000,00	75,25	20.050.290.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	26.568.542.949,00	25.361.763.343,00	95,46	23.475.594.901,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	300.750.000,00	268.054.000,00	89,13	252.076.638,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	858.600.000,00	815.700.000,00	95,00	2.272.651.960,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.589.400.000,00	5.427.360.000,00	97,10	3.765.240.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	259.200.000,00	259.200.000,00	100,00	988.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	219.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.022.600.000,00	1.811.400.000,00	89,56	1.188.440.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	258.750.000,00	219.900.000,00	84,99	1.619.340.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	62.400.000,00	62.400.000,00	100,00	762.100.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	151.000.000,00	144.000.000,00	95,36	57.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	37.730.300.000,00	33.701.594.798,00	89,32	14.112.657.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.271.948.000,00	2.141.158.000,00	94,24	1.668.150.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.739.565.000,00	5.002.290.000,00	87,15	6.088.990.480,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.245.910.000,00	4.689.704.700,00	89,40	531.447.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	11.885.820.000,00	11.129.030.000,00	93,63	6.916.415.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.607.590.000,00	5.052.310.000,00	76,46	4.366.540.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	1.035.760.000,00	857.800.000,00	82,82	992.840.000,00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	455.601.250,00	362.909.200,00	79,66	199.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	282.150.000,00	260.991.000,00	92,50	232.850.000,00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0	0	0	15.000.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan	273.450.000,00	268.650.000,00	98,24	211.400.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	109.497.000,00	109.249.000,00	99,77	11.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	670.000.000,00	617.500.000,00	92,16	419.195.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	375.250.000,00	158.834.951,00	42,33	58.369.665,00
Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	98.070.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	619.000.000,00	414.300.000,00	66,93	771.400.000,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	499.780.000,00	397.950.180,00	79,63	-
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.107.324.300,00	2.728.613.994,26	87,81	816.190.500,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	110.000.000,00	90.042.500,00	81,86	65.000.000,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	302.230.000,00	301.146.830,00	99,64	159.503.200,00
Belanja Jasa Kalibrasi	18.370.000,00	17.370.000,00	94,56	10.000.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0	0	0	15.000.000,00
Belanja Jasa Pembersihan,	15.000.000,00	13.092.000,00	87,28	10.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pengendalian Hama dan Fumigasi				
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	50.000.000,00	-	-	-
Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	1.707.350.000,00	1.434.430.451,00	84,02	875.549.500,00
Belanja Tagihan Telepon	205.200.000,00	108.780.277,00	53,01	153.064.236,00
Belanja Tagihan Air	2.157.068.000,00	1.592.446.120,00	73,82	1.147.749.667,00
Belanja Tagihan Listrik	11.667.292.881,00	10.453.149.938,00	89,59	9.023.714.588,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.115.561.388,00	5.984.979.700,00	97,86	4.826.090.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan	4.927.862.550,00	4.192.104.168,00	85,07	4.195.444.751,00
Belanja Paket/Pengiriman	17.600.000,00	13.608.460,00	77,32	557.630,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	790.350.000,00	395.873.900,00	50,09	387.667.200,00
Belanja Pengolahan Air Limbah	10.000.000,00	-	-	-
Belanja Lembur	185.440.000,00	136.478.000,00	73,60	-
Belanja Medical Check Up	1.026.000,00	910.000,00	88,69	22.800.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	28.000.000,00	-	-	-
Belanja luran Jaminan/Asuransi	38.017.523.836,00	36.504.779.460,00	96,02	31.892.975.806,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.591.128.000,00	1.548.414.000,00	97,32	1.402.909.420,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	29.067.500.000,00	28.512.400.000,00	98,09	28.142.275.000,00
Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.867.200.000,00	2.453.550.400,00	85,57	2.156.999.600,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	143.872.500,00	143.576.000,00	99,79	1.414.458,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.636.505.756,00	2.270.632.521,00	86,12	120.289.730,00
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.711.317.580,00	1.576.206.539,00	92,10	69.087.598,00
Belanja Sewa Tanah	6.800.000,00	6.000.000,00	88,24	51.600.000,00
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0	0	0	51.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Sewa Lapangan Lainnya	6.800.000,00	6.000.000,00	88,24	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.551.886.500,00	2.853.457.750,00	80,34	934.263.300,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	5.200.000,00	4.800.000,00	92,31	5.750.000,00
Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	126.900.000,00	29.550.000,00	23,29	-
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	367.450.000,00	256.600.000,00	69,83	115.300.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	67.500.000,00	63.828.800,00	94,56	11.300.000,00
Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	75.877.950,00	73.800.000,00	97,26	60.000.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	277.331.200,00	193.587.600,00	69,80	70.123.000,00
Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	-	-	-	2.520.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	12.645.550,00	4.286.750,00	33,90	58.550.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	150.000.000,00	149.000.000,00	99,33	-
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	36.700.000,00	31.500.000,00	85,83	11.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	1.887.781.800,00	1.516.824.600,00	80,35	403.040.300,00
Belanja Sewa Komputer Jaringan	198.500.000,00	197.180.000,00	99,34	196.680.000,00
Belanja Sewa Peralatan Jaringan	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	-
Belanja Sewa Elektronik/Electric	156.000.000,00	142.500.000,00	91,35	-
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	547.767.200,00	494.960.950,00	90,36	237.450.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	26.248.000,00	16.834.200,00	64,14	1.717.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	6.000.000,00	2.500.000,00	41,67	-
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	344.719.200,00	306.886.210,00	89,02	108.753.000,00
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	4.600.000,00	4.540.540,00	98,71	-
Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	18.000.000,00	16.000.000,00	88,89	-
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	-	1.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	-	-	-	1.000.000,00
Belanja Sewa Asrama	148.200.000,00	148.200.000,00	100,00	124.980.000,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	180.000.000,00
Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	-	-	-	180.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	425.399.400,00	419.389.700,00	98,59	331.900.000,00
Belanja Sewa Alat Musik	21.799.400,00	21.789.700,00	99,96	3.000.000,00
Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	-	-	-	20.000.000,00
Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00	4.000.000,00
Belanja Sewa Tanaman	376.000.000,00	370.000.000,00	98,40	304.900.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.044.735.740,00	7.106.705.386,00	88,34	5.566.457.300,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	653.185.740,00	621.638.560,00	95,17	-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	-	-	-	16.260.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	-	-	-	158.211.750,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.151.950.000,00	2.133.291.276,00	99,13	2.968.243.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.744.360.000,00	2.733.151.000,00	99,59	86.974.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	100.680.000,00	-	-	-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	750.000.000,00	747.058.250,00	99,61	-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	200.000.000,00	199.349.800,00	99,67	395.178.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	437.700.000,00	420.558.750,00	96,08	1.223.435.050,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	18.500.000,00	18.185.250,00	98,30	175.330.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	80.000.000,00	79.642.500,00	99,55	-
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	-	-	-	196.881.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	-	-	-	345.944.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	501.360.000,00	49.830.000,00	9,94	-
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	407.000.000,00	104.000.000,00	25,55	-
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	10.041.810.000,00	9.131.556.645,00	90,94	4.492.086.160,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	305.160.000,00	304.016.400,00	99,63	-
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	-	-	-	59.700.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	-
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	100.000.000,00	99.158.000,00	99,16	-
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	809.600.000,00	796.748.000,00	98,41	879.219.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.239.240.000,00	928.826.000,00	74,95	1.079.570.660,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	7.037.810.000,00	6.502.808.245,00	92,40	2.373.946.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	50.000.000,00	-	-	49.900.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	-	-	-	49.750.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	225.000.000,00	150.000.000,00	66,67	300.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	225.000.000,00	150.000.000,00	66,67	300.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	71.735.093.500,00	66.035.716.107,00	92,05	25.348.220.069,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	24.232.676.500,00	23.621.793.490,00	97,48	11.256.283.000,00
Belanja Sosialisasi	-	-	-	18.000.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	46.333.902.000,00	41.324.757.617,00	89,19	13.231.685.069,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	1.168.515.000,00	1.089.165.000,00	93,21	842.252.000,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	83.000.000,00	40.834.000,00	49,20	52.946.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	83.000.000,00	40.834.000,00	49,20	52.946.000,00
Jumlah	340.757.216.294,00	304.271.758.182,26	89,29	201.462.460.751,00

Dari Belanja Jasa terdapat beberapa belanja dengan nilai yang cukup besar dinilai perlu ditambahkan penjelasan singkat antara lain:

1. Belanja Jasa yang digunakan untuk membayar jasa non ASN dalam rangka menunjang kekurangan tenaga atau formasi ASN dan PPPK dianggarkan sebesar Rp157.996.727.999,00 atau 46,37% dari total Belanja Jasa sedangkan terealisasi sebesar Rp139.237.669.866,00 atau 45,76% dari total realisasi Belanja Jasa. Adapun belanja dimaksud tersaji pada tabel berikut:

Tabel 72 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Penunjang Kekurangan Tenaga atau Formasi ASN dan PPPK Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	15.104.436.000,00	14.850.281.000,00	98,32
Honorarium Rohaniwan	3.900.000,00	2.650.000,00	67,95
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	34.231.504.800,00	25.757.950.000,00	75,25
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	26.568.542.949,00	25.361.763.343,00	95,46
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	300.750.000,00	268.054.000,00	89,13



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	858.600.000,00	815.700.000,00	95,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.589.400.000,00	5.427.360.000,00	97,10
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	259.200.000,00	259.200.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.022.600.000,00	1.811.400.000,00	89,56
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	258.750.000,00	219.900.000,00	84,99
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	62.400.000,00	62.400.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	151.000.000,00	144.000.000,00	95,36
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	37.730.300.000,00	33.701.594.798,00	89,32
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.271.948.000,00	2.141.158.000,00	94,24
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.739.565.000,00	5.002.290.000,00	87,15
Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.245.910.000,00	4.689.704.700,00	89,40
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	11.885.820.000,00	11.129.030.000,00	93,63
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.607.590.000,00	5.052.310.000,00	76,46
Belanja Jasa Tenaga Supir	1.035.760.000,00	857.800.000,00	82,82
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	455.601.250,00	348.333.025,00	76,46
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	282.150.000,00	260.991.000,00	92,50
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	670.000.000,00	617.500.000,00	92,16
Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	619.000.000,00	414.300.000,00	66,93
Jumlah	157.996.727.999,00	139.237.669.866,00	88,13

2. Penyediaan anggaran untuk Jaminan Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan dipertegas dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp38.017.523.836,00 atau 11,16% dari total Belanja Jasa dan terealisasi sebesar Rp36.504.779.460,00 atau 12% dari total realisasi Belanja Jasa dengan rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 73 Anggaran dan Realisasi Belanja Jaminan Kesehatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja luran Jaminan/Asuransi			
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.591.128.000,00	1.548.414.000,00	97,32
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	29.067.500.000,00	28.512.400.000,00	98,09
Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.867.200.000,00	2.453.550.400,00	85,57
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	143.872.500,00	143.576.000,00	99,79
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.636.505.756,00	2.270.632.521,00	86,12
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.711.317.580,00	1.576.206.539,00	92,10
Jumlah	38.017.523.836,00	36.504.779.460,00	96,02

3. Penyediaan anggaran paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total Belanja Daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah. Alokasi anggaran yang dimaksud sebesar Rp71.735.093.500,00 atau 2,81% dari total APBD atau 21,05% dari total Belanja Jasa dan terealisasi sebesar Rp66.035.716.107,00 atau 2,88% dari total APBD atau 21,70% dari total Belanja Jasa. Adapun rincian Belanja dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN tersaji pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 74 Anggaran dan Realisasi Belanja Dalam Rangka Pendidikan
dan Pelatihan Bagi ASN Tahun 2023**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan			
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	24.232.676.500,00	23.621.793.490,00	97,48
Belanja Bimbingan Teknis	46.333.902.000,00	41.324.757.617,00	89,19
Belanja Diklat Kepemimpinan	1.168.515.000,00	1.089.165.000,00	93,21
Jumlah	71.735.093.500,00	66.035.716.107,00	92,05

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	35.760.601.352,00	32.636.291.919,00	41.440.478.829,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp32.636.291.919,00 atau 91,26% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp35.760.601.352,00. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp8.804.186.910,00 atau 21,25% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp41.440.478.829,00. Rincian dan perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 75 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023
serta Realisasi Tahun Anggaran 2022**

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pemeliharaan	35.760.601.352,00	32.636.291.919,00	91,26	41.440.478.829,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	10.000.000,00	-	0,00	1.042.597.000,00
Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	10.000.000,00	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Olahraga	-	-	-	13.800.000,00
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Parkir	-	-	-	1.028.797.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.281.300.252,00	4.067.681.375,00	77,02	3.465.586.869,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	150.000.000,00	22.102.000,00	14,73	3.430.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	8.000.000,00	1.050.000,00	13,13	-
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	353.465.100,00	302.095.100,00	85,47	156.144.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Unit Pemeliharaan Lapangan	16.000.000,00	14.266.000,00	89,16	12.760.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor	-	-	-	198.750.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Perlengkapan Kebakaran Hutan	20.000.000,00	9.561.000,00	47,81	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.818.272.000,00	1.294.802.049,00	71,21	1.009.521.833,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	314.400.000,00	300.577.596,00	95,60	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	14.950.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32.188.000,00	23.726.500,00	73,71	145.955.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-	-	4.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-	-	21.700.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	20.618.000,00	6.700.000,00	32,50	-
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	-	-	-	9.990.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester	-	-	-	99.080.820,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set	100.000.000,00	99.289.500,00	99,29	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	-	-	-	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	-	-	-	28.485.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	2.950.000,00	98,33	35.023.550,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	674.972.000,00	534.227.500,00	79,15	433.236.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	51.390.700,00	31.861.000,00	62,00	167.442.666,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	-	-	-	6.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	97.750.000,00	65.975.000,00	67,49	16.750.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	9.950.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	5.000.000,00	4.975.000,00	99,50	-
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	21.000.000,00	14.844.000,00	70,69	-
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	-	-	-	10.510.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	648.334.852,00	648.331.000,00	100,00	463.946.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-	-	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup- Laboratorium Lingkungan	23.300.000,00	10.126.000,00	43,46	2.750.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi	265.000.000,00	154.093.000,00	58,15	15.196.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik				
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	-	-	-	14.910.750,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	410.175.500,00	333.935.930,00	81,41	225.387.500,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	-	-	75.725.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	39.806.750,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	55.378.400,00	32.516.850,00	58,72	132.984.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	-	-	-	50.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	150.055.700,00	116.696.350,00	77,77	10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	-	-	-	49.250.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	2.000.000,00	1.980.000,00	99,00	1.950.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.719.763.400,00	9.477.924.871,00	97,51	22.210.632.870,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.198.091.400,00	5.077.057.803,00	97,67	16.116.965.170,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	1.671.650.000,00	1.636.774.562,00	97,91	348.020.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	-	-	-	164.240.800,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	-	-	-	156.550.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	761.900.000,00	685.599.500,00	89,99	505.977.900,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat	70.600.000,00	69.900.000,00	99,01	21.250.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	-	-	-	132.400.500,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	-	-	-	99.360.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	517.522.000,00	512.980.000,00	99,12	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	-	18.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	1.500.000.000,00	1.495.613.006,00	99,71	4.647.868.500,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.749.537.700,00	19.090.685.673,00	92,01	14.719.662.090,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	10.096.213.500,00	8.763.045.298,00	86,80	9.865.806.438,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	35.120.000,00	9.893.600,00	28,17	-
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan pada Jalan Kabupaten	-	-	-	1.236.065.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	-	-	-	1.317.744.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	1.155.120.000,00	1.142.748.000,00	98,93	418.376.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	8.240.683.000,00	8.029.558.500,00	97,44	1.096.202.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik	-	-	-	20.060.400,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Kotor Lainnya	-	-	-	34.705.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Transmisi	-	-	-	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.222.401.200,00	1.145.440.275,00	93,70	730.703.252,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	2.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	-	-	-	2.000.000,00
Jumlah	35.760.601.352,00	32.636.291.919,00	91,26	41.440.478.829,00

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi merupakan salah satu Belanja Pemeliharaan pada Tahun 2023 yang menjadi penunjang infrastruktur daerah. Meningkatnya anggaran dan realisasi Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 menunjukkan bahwa adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan dalam upaya peningkatan infrastruktur publik. Adapun rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 76 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2022		Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Jumlah Belanja Pemeliharaan	47.344.940.780,00	41.440.478.829,00	35.760.601.352,00	32.636.291.919,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.437.193.010,00	14.719.662.090,00	20.749.537.700,00	19.090.685.673,00
Persentase Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38,94	35,52	58,02	58,50

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	131.843.637.450,00	111.217.496.108,00	75.505.934.127,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp111.217.496.108,00 atau mencapai 84,36% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp131.843.637.450,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 juga mengalami kenaikan sebesar Rp35.711.561.981,00 atau 47,30% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Anggaran 2022 sebesar Rp75.505.934.127,00. Pada tahun anggaran 2023 terdapat realisasi perjalanan dinas keluar negeri yaitu perjalanan dinas ke Inggris yang diikuti oleh Pejabat Daerah (Bupati, Anggota Dewan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Kabag Tappem, Kabag Umum, Dan 1 orang Pendamping dari Kementerian) yang merupakan program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, secara teknis perjalanan dinas ini dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rincian dan Perbandingan Anggaran dan Realisasi Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 77 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	129.603.637.450,00	110.039.637.692,00	84,90	75.505.934.127,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.930.697.050,00	87.759.343.177,00	86,95	60.718.464.215,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.279.200.400,00	19.521.244.515,00	80,40	14.774.549.912,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	47.950.000,00	35.800.000,00	74,66	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.345.790.000,00	2.723.250.000,00	62,66	12.920.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.240.000.000,00	1.177.858.416,00	52,58	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	2.240.000.000,00	1.177.858.416,00	52,58	-
Jumlah	131.843.637.450,00	111.217.496.108,00	84,36	75.505.934.127,00

5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	15.160.070.600,00	13.359.394.600,00	6.477.068.000,00

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp13.359.394.600,00 atau 88,12% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp15.160.070.600,00. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 mengalami



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

kenaikan sebesar Rp6.882.326.600,00 atau 106,26% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.477.068.000,00. Rincian dan Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 78 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.883.347.300,00	12.278.798.300,00	88,44	6.477.068.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.124.735.300,00	5.999.956.300,00	97,96	730.418.000,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	35.300.000,00	33.850.000,00	95,89	87.000.000,00
Belanja Beasiswa	7.508.500.000,00	6.037.250.000,00	80,41	5.659.650.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	202.500.000,00	200.000.000,00	98,77	-
Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	12.312.000,00	7.742.000,00	62,88	-
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.276.723.300,00	1.080.596.300,00	84,64	-
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.276.723.300,00	1.080.596.300,00	84,64	-
Jumlah	15.160.070.600,00	13.359.394.600,00	88,12	6.477.068.000,00

Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan pada tahun 2023 meningkat sangat signifikan dikarenakan adanya Pemberian Hadiah/Bonus Pelatih dan Atlet NPC, Porprov, POPDA, PON pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata dengan jumlah realisasi sebesar Rp4.871.250.000,00. Selain belanja hadiah tersebut merupakan belanja hadiah yang rutin dianggarkan oleh SKPD diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan hadiah untuk siswa setingkat SD dan SMP yang lulus dengan Peringkat 1 sampai dengan 3 disekolahnya dan hadiah-hadiah untuk perlombaan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Realisasi Belanja Beasiswa terbesar pada Sekretariat Daerah yang merupakan Beasiswa Prestasi Nilai Tertinggi Kelulusan Peringkat 1 sampai dengan 3 Jenjang SMA/SMK/MA Lanjutan Tahun 2020, 2021, 2022 yang melanjutkan kuliah



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

dengan realisasi sebesar Rp3.809.000.000,00, Beasiswa Prestasi Akademik (Non Eksak) sebesar Rp450.000.000,00, dan beasiswa lainnya dengan jumlah sebesar Rp671.500.000,00 sehingga jumlah total belanja hadiah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp4.930.500.000,00. Realisasi terbesar berikutnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.106.750.000,00 yang dipergunakan untuk Pembayaran Beasiswa Kartu Balangan Pintar Jenjang SD/MI se-Kabupaten Balangan Tahun 2023 sebesar Rp563.750.000,00, Pembayaran Beasiswa Bagi Siswa Nilai Tertinggi Kelulusan Peringkat 1 s.d. 3 Jenjang SD/MI di Kabupaten Balangan Tahun 2023 (588 Orang) sebesar Rp294.000.000,00, Pembayaran Beasiswa Kartu Balangan Pintar Jenjang SMP/MTs Se-Kabupaten Balangan Tahun 2023 sebesar Rp152.250.000,00 dan Pembayaran Beasiswa Bagi Siswa Nilai Tertinggi Kelulusan Peringkat 1 s.d. 3 Jenjang SMP/MTs di Kabupaten Balangan Tahun 2023 (129 Orang) sebesar Rp96.750.000,00.

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain dengan realisasi cukup besar Rp1.080.596.300,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. RSUD Kabupaten Balangan terealisasi sebesar Rp369.500.000,00 yang merupakan belanja untuk pembayaran Gaji Dokter Spesialis dan Kunjungan Dokter Spesialis.
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp100.000.000,00 merupakan Biaya Tim Ahli dari LPPM Universitas Lambung Mangkurat untuk penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Balangan dan belanja jasa operator sound system pada kegiatan sosialisasi sebesar Rp223.300,00.
3. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sebesar Rp313.413.000,00 merupakan biaya kegiatan Kunjungan Wawasan Kebangsaan Anggota Paskibraka ke Luar Daerah, sebesar Rp81.000.000,00 biaya jasa untuk pelatih dan peserta Paskibraka tingkat Kabupaten, sebesar Rp59.000.000,00 Pembuatan Buku Profil Pariwisata, dan sebesar Rp5.000.000,00 belanja jasa angkut bahan dan perlengkapan pameran.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan sebesar Rp99.230.000,00 yang dipergunakan Belanja untuk kajian Perancangan kampung Budidaya Perikanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Lambung Mangkurat dan honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp680.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan belanja karangan bunga sebanyak 7 tujuh kali dengan nilai keseluruhan sebesar Rp5.800.000,00 dan belanja jasa lainnya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional sebesar Rp12.750.000,00.
6. Sekretariat Daerah yang merupakan belanja karangan bunga sebanyak 19 tujuh kali dengan nilai keseluruhan sebesar Rp19.000.000,00.
7. Belanja untuk instruktur senam pada Puskesmas Juai selama Tahun 2023 sebesar Rp15.000.000,00

5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOS	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	13.037.606.305,00	13.369.072.340,11	12.416.597.399,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp13.369.072.340,11 atau 102,54% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp13.037.606.305,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp952.474.941,11 atau 7,67% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.416.597.399,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS per sekolah dapat dilihat pada Lampiran 2.

5.1.2.1.2.7 Belanja Barang dan Jasa BLUD	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	52.023.026.193,00	51.898.200.229,66	58.519.408.813,23

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp51.898.200.229,66 atau 99,76% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp52.023.026.193,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.621.208.583,57 atau 11,31% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp58.519.408.813,23. Dengan rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 79 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	544.803.502,00	366.072.277,00
2	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik	251.768.950,00	218.891.200,00
3	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos	30.000.000,00	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
4	Belanja bahan isi Tabung Gas	102.260.000,00	84.440.000,00
5	Belanja obat-obatanObat	9.606.452.820,82	6.542.242.943,24
6	Belanja Natura dan Pakan – Natura(bahan makanan)	1.859.674.752,00	2.046.572.621,00
7	Belanja bahan material lainnya	111.240.000,00	88.309.700,00
8	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	446.504.610,00	625.269.840,00
9	Belanja bahan medis habis pakai	10.373.234.150,84	8.230.645.787,99
10	Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	3.600.000,00	4.200.000,00
11	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak lain	816.381.217,00	1.453.373.218,00
12	Belanja jasa pelayanan	19.049.269.305,00	31.758.882.611,00
13	Belanja pengembalian jasa pelayanan	107.211.100,00	-
14	Belanja jasa tenaga kesehatan	-	18.000.000,00
15	Belanja Pemeliharaan alat angkutan darat bermotor (Service)	29.449.368,00	44.623.143,00
16	Belanja Suku Cadang-suku cadang alat angkutan	154.682.820,00	154.745.537,00
17	Belanja Bahan –bahan bakar dan pelumas	482.885.950,00	333.577.217,00
18	Belanja Perpanjangan Pajak /STNK	23.496.100,00	17.354.900,00
19	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	465.585.581,00	350.527.612,00
20	Belanja penggandaan	247.200.000,00	173.500.000,00
21	Belanja Makanan dan Minuman	550.383.900,00	396.648.000,00
22	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	119.496.273,00	62.373.811,00
23	Belanja Pakaian Batik Tradisional	98.420.000,00	179.725.000,00
24	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.825.295.005,00	896.087.983,00
25	Belanja Bimbingan Teknis	472.798.065,00	598.059.719,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran & kesehatan-alat kedokteran umum	591.113.736,00	643.535.006,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga-alat kantor	493.911.000,00	561.254.037,00
28	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung tempat kerja	2.100.564.750,00	2.490.874.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
29	Belanja hadiah bersifat perlombaan	-	25.928.000,00
30	Belanja Paket/pengiriman	706.000,00	441.400,00
31	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendramata	68.228.900,00	7.320.000,00
32	Belanja pakaian korpri	-	26.250.000,00
33	Belanja peralatan & perlengkapan rumah tangga	871.582.374,00	99.682.500,00
Jumlah		51.898.200.229,66	58.519.408.813,23

5.1.2.1.3	Belanja Hibah	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
		180.582.121.770,00	165.622.074.354,0	47.703.693.560,85

Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah maka Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp165.622.074.354,00 atau 91,72% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp180.582.121.770,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp117.918.380.793,15 atau 247,19% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp47.703.693.560,85 Rincian belanja hibah berdasarkan penerima Hibah dapat dilihat pada Lampiran 3.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 80 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023
serta Realisasi Tahun Anggaran 2022**

Uraian	2023		%	2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.863.500.000,00	5.863.500.000,00	100	-
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	5.863.500.000,00	5.863.500.000,00	100	-
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	174.034.671.770,00	159.074.624.354,00	91,40	47.019.743.560,85
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	48.970.764.160,00	43.206.906.460,00	88,23	15.666.083.722,85
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	78.104.407.610,00	71.705.867.894,00	91,81	10.481.987.838,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	46.959.500.000,00	44.161.850.000,00	94,04	20.871.672.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	683.950.000,00	683.950.000,00	100,00	683.950.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	683.950.000,00	683.950.000,00	100,00	683.950.000,00
Jumlah	180.582.121.770,00	165.622.074.354,00	91,72	47.703.693.560,85

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	5.440.625.737,00	5.226.190.000,00	4.471.225.000,00

Belanja Bantuan Sosial dimaksudkan untuk meningkatkan status sosial masyarakat baik secara langsung kepada anggota masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan dan kelompok sosial lainnya.

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu, kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, belanja ini secara teknis dikelola dan dianggarkan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Pengelolaan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Balangan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Balangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

Realisasi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.226.190.000,00 atau 96,06% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp5.440.625.737,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp754.965.000,00 atau 16,88% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.471.225.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 81 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023
serta Realisasi Tahun Anggaran 2022**

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	741.300.737,00	608.000.000,00	82,02	512.600.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	741.300.737,00	608.000.000,00	82,02	512.600.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	-	226.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	-	226.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	967.200.000,00	886.200.000,00	91,63	-
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	967.200.000,00	886.200.000,00	91,63	-
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.732.125.000,00	3.731.990.000,00	100,00	3.732.125.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.732.125.000,00	3.731.990.000,00	100,00	3.732.125.000,00
Jumlah	5.440.625.737,00	5.226.190.000,00	96,06	4.471.225.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp608.000.000,00 merupakan belanja bantuan uang antara lain Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu untuk UEP, Bantuan Sosial makanan untuk bagi Penyandang Disabilitas Netra, Bantuan Sosial Uang untuk Sarana kamar Lansia dan Disabilitas, biaya transport pemulangan orang terlantar, Uang Saku bagi Klien Panti Sosial, dan Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.

Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sejumlah Rp886.200.000,00 merupakan bantuan Kepada Keluarga, Bantuan Langsung Tunai (BLT APBD) di Kabupaten Balangan dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp3.731.990.000,00 merupakan bantuan yang diberikan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dengan rincian tersaji pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 82 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan
(Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**

No.	SKPD Teknis	Penerima Bantuan Sosial	Nilai Bantuan Sosial (Rp)	Keterangan
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	LKSA Nurul Iman	278.250.000,00	Bantuan Sosial Untuk Makanan dan Minuman pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	LKSA Nurul Muhibin	785.290.000,00	Bantuan Sosial Untuk Makanan dan Minuman pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	LKSA Riyadhul Muhibbin	811.250.000,00	Bantuan Sosial Untuk Makanan dan Minuman pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	LKSA Al Tamar	900.000.000,00	Bantuan Sosial Untuk Makanan dan Minuman pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	LKSA Nurul Yaqin	270.300.000,00	Bantuan Sosial Untuk Makanan dan Minuman pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	LKSA Ikhwaniul Muslimin	266.090.000,00	Bantuan Sosial Untuk Makanan dan Minuman pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	LKSA Ainul Amin	296.725.000,00	Bantuan Sosial Untuk Makanan dan Minuman pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD Teknis	Penerima Bantuan Sosial	Nilai Bantuan Sosial (Rp)	Keterangan
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	LKSA Sirajul Huda	124.085.000,00	Bantuan Sosial Untuk Makanan dan Minuman pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
Jumlah			3.731.990.000,00	

5.1.2.2	Belanja Modal	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
		666.352.162.737,00	580.674.088.157,03	391.771.955.326,03

Belanja Modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp580.674.088.157,03 atau 87,14% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp666.352.162.737,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp188.902.132.831,00 atau 48,22% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp391.771.955.326,03.

Penganggaran Belanja Modal mengikuti Kebijakan Akuntansi mengenai Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap. Nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah batasan besaran minimum belanja per unit barang untuk dianggarkan sebagai Belanja Modal. Pembelian barang yang tidak memenuhi Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dianggarkan dalam Belanja Barang. Realisasi Belanja Modal menurut jenis dan rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel 83 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	1.035.250.000,00	-	-	5.115.127.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.356.943.387,00	161.050.737.928,00	92,90	94.619.742.724,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.951.551.100,00	99.741.722.125,39	85,28	47.238.414.493,82



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	368.065.180.950,00	313.533.424.903,64	85,18	244.145.726.258,21
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.874.358.400,00	5.354.696.000,00	91,15	652.944.850,00
5	Belanja Modal Aset Lainnya	1.068.878.900,00	993.507.200,00	92,95	0,00
Jumlah		666.352.162.737,00	580.674.088.157,03	87,14	391.771.955.326,03

**Tabel 84 Ringkasan Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023
serta Realisasi Tahun Anggaran 2022**

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Tanah	1.035.250.000,00	-	-	5.115.127.000,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.000.000.000,00	-	-	0,00
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	-	-	-	5.115.127.000,00
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	35.250.000,00	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.356.943.387,00	161.050.737.928,00	92,90	94.619.742.724,00
Belanja Modal Grader	-	-	-	2.800.000.000,00
Belanja Modal Excavator	2.950.000.000,00	2.883.570.000,00	97,75	-
Belanja Modal Loader	-	-	-	1.550.000.000,00
Belanja Modal Mesin Proses	71.000.000,00	66.000.000,00	92,96	39.751.475,00
Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	4.801.340.000,00	4.654.500.000,00	96,94	1.400.000.000,00
Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	-	-	-	34.800.000,00
Belanja Modal Pompa	51.720.000,00	49.835.000,00	96,36	-
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	8.000.000,00	7.962.500,00	99,53	-
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	166.060.000,00	158.646.000,00	95,54	295.175.500,00
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	31.681.210.000,00	30.449.366.200,00	96,11	18.170.141.236,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	712.000.000,00	483.960.000,00	67,97	497.100.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.264.680.000,00	2.180.000.000,00	96,26	184.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.136.060.000,00	10.915.750.000,00	98,02	5.381.506.058,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	361.720.000,00	355.400.000,00	98,25	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	11.844.080.000,00	11.788.000.000,00	99,53	3.948.000.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel	-	-	-	2.242.422,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.281.290.000,00	1.237.440.000,00	96,58	198.400.000,00
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	3.842.420,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	312.000.000,00	310.800.000,00	99,62	11.797.968,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	630.000.000,00	204.000.000,00	32,38	28.328.310,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	-	-	-	50.000.000,00
Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	171.000.000,00	169.047.334,00	98,86	196.740.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	-	-	-	8.693.930,00
Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	920.607.100,00	778.604.000,00	84,58	-
Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	-	-	-	50.000.000,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	1.200.000,00	655.000,00	54,58	-
Belanja Modal Alat Ukur Universal	-	-	-	10.260.000,00
Belanja Modal Universal Tester	-	-	-	1.900.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	140.595.500,00	111.520.595,00	79,32	9.558.000,00
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	5.734.200,00	3.020.199,00	52,67	-
Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	151.890.000,00	140.827.000,00	92,72	-
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	-	-	-	278.670.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	34.982.200,00	33.162.000,00	94,80	-
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	34.163.800,00	12.180.000,00	35,65	-
Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	97.720.000,00	97.683.706,00	99,96	99.270.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	150.000.000,00	149.000.000,00	99,33	-
Belanja Modal Mesin Ketik	-	263.350.000,00	-	-
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	32.392.200,00	27.330.000,00	84,37	-
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	39.673.000,00	37.630.000,00	94,85	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.263.721.000,00	3.012.249.571,00	92,29	1.290.176.289,00
Belanja Modal Mebel	10.533.919.300,00	9.495.635.120,00	90,14	293.784.550,00
Belanja Modal Alat Pembersih	125.000.000,00	124.000.000,00	99,20	118.180.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	1.867.726.400,00	1.715.300.110,00	91,84	1.861.781.800,00
Belanja Modal Alat Dapur	16.158.500,00	16.081.100,00	99,52	107.057.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.135.377.895,00	8.353.600.320,00	91,44	8.765.658.269,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	33.150.000,00	10.150.000,00	30,62	1.310.655.000,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	451.500.000,00	448.344.000,00	99,30	468.918.163,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	25.800.000,00	25.760.000,00	99,84	215.611.500,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	350.000.000,00	344.250.000,00	98,36	391.473.367,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	255.250.000,00	249.500.000,00	97,75	26.000.000,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	-	-	-	2.363.454.700,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	75.000.000,00	73.815.000,00	98,42	364.085.500,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.470.200.000,00	2.259.547.413,00	91,47	2.420.468.725,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.814.700.000,00	3.668.700.000,00	96,17	242.813.031,00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	130.280.000,00	129.680.000,00	99,54	77.904.695,00
Belanja Modal Peralatan Cetak	68.000.000,00	67.435.000,00	99,17	36.530.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	50.000.000,00	47.656.250,00	95,31	99.044.180,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	303.000.000,00	291.325.500,00	96,15	223.436.075,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	74.000.000,00	68.974.000,00	93,21	6.990.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	75.000.000,00	74.900.000,00	99,87	16.975.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	11.500.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	9.000.000,00	5.700.000,00	63,33	-
Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	-	0,00	-	47.064.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	363.253.000,00	332.515.104,00	91,54	78.688.975,00
Belanja Modal Switcher Antena	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	-	-	-	3.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	22.605.755.969,00	19.601.531.501,00	86,71	12.273.192.086,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.650.404.350,00	4.471.174.300,00	79,13	4.612.965.605,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal Cat, dan Kimia	10.268.000,00	10.239.860,00	99,73	-
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	85.000.000,00	82.500.000,00	97,06	-
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	90.000.000,00	-	-	-
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika	81.000.000,00	-	-	-
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	804.000.000,00	-	-	-
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	-	-	-	47.850.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPS	90.000.000,00	-	-	-
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Olahraga	705.000.000,00	-	-	-
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	1.176.844.600,00	1.146.139.000,00	97,39	75.330.000,00
Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	-	-	-	47.500.000,00
Belanja Modal Peralatan Umum	312.478.073,00	258.135.000,00	82,61	-
Belanja Modal Komputer Jaringan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	821.390.700,00
Belanja Modal Personal Computer	12.609.970.200,00	12.254.509.750,00	97,18	14.837.177.729,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	529.276.000,00	524.109.500,00	99,02	858.923.554,00
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	9.000.000,00	8.850.000,00	98,33	365.674.200,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	35.000.000,00	34.000.000,00	97,14	518.470.694,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	-	-	-	13.655.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.433.019.800,00	3.159.253.700,00	92,03	2.607.331.418,00
Belanja Modal Elektronik/Electric	-	-	-	6.138.200,00
Belanja Modal Baju Pengaman	-	-	-	33.600.000,00
Belanja Modal Alat Penolong	53.000.000,00	36.750.000,00	69,34	-
Belanja Modal Alat SAR Lainnya	16.000.000,00	10.475.000,00	65,47	--



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Rambu Bersuar	21.161.240.000,00	20.791.253.995,00	98,25	1.406.815.400,00
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	81.000.000,00	78.097.550,00	96,42	-
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	141.720.000,00	138.360.750,00	97,63	-
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	125.312.300,00	50.500.000,00	40,30	1.800.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.951.551.100,00	99.741.722.125,39	85,28	47.238.414.493,82
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	28.596.464.100,00	26.967.433.791,53	94,30	9.169.742.325,00
Belanja Modal Bangunan Gudang	425.840.000,00	420.547.031,00	98,76	398.696.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	2.309.064.000,00	1.971.979.878,00	85,40	395.144.000,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.910.460.000,00	7.997.453.744,00	89,75	12.358.996.750,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	10.952.672.200,00	4.837.344.872,00	44,17	844.095.788,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	302.040.000,00	301.001.850,00	99,66	1.905.105.117,82
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	24.348.043.500,00	23.024.515.679,00	94,56	10.530.581.604,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.660.300.000,00	2.310.878.559,00	86,87	-
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.227.260.000,00	1.221.222.018,00	99,51	99.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	150.000.000,00	149.250.000,00	99,50	148.660.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	-	-	-	119.893.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	245.272.000,00	210.714.000,00	85,91	222.751.000,00
Belanja Modal Bangunan Terbuka	4.926.440.000,00	4.522.049.396,00	91,79	588.458.000,00
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	536.020.000,00	531.442.000,00	99,15	429.686.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.381.195.000,00	1.221.109.916,00	88,41	971.693.000,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	102.500.000,00	102.181.000,00	99,69	583.018.000,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	1.927.780.700,00	1.906.365.214,00	98,89	1.389.776.149,00
Belanja Modal Taman	24.317.419.600,00	19.414.493.010,86	79,84	2.915.706.300,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	-	478.040.000,00
Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	-	-	-	13.900.000,00
Belanja Modal Asrama	302.040.000,00	101.597.000,00	33,64	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Panti Asuhan	-	-	-	1.847.134.160,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	201.360.000,00	199.902.000,00	99,28	-
Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	2.296.000.000,00	1.502.801.465,00	65,45	299.281.000,00
Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	-	-	-	197.169.300,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	-	-	-	49.000.000,00
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	-	-	-	196.800.000,00
Belanja Modal Pagar	732.700.000,00	727.294.701,00	99,26	1.086.087.000,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	100.680.000,00	100.145.000,00	99,47	-
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	368.065.180.950,00	313.533.424.903,64	85,18	244.145.726.258,21
Belanja Modal Jalan Kabupaten	169.951.142.450,00	127.600.976.027,15	75,08	126.024.136.583,81
Belanja Modal Jalan Desa	71.678.298.700,00	69.310.343.210,00	96,70	50.204.045.361,40
Belanja Modal Jalan Lainnya	423.760.000,00	420.006.010,00	99,11	2.990.425.000,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	33.261.860.000,00	25.952.510.735,00	78,02	16.447.303.616,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	6.272.079.000,00	6.247.897.325,08	99,61	1.145.698.000,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	60.543.000,00	59.801.103,07	98,77	-
Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	52.327.000,00	51.547.517,07	98,51	-
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	5.028.020.000,00	4.343.122.000,00	86,38	491.206.500,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	25.925.934.800,00	25.649.047.963,44	98,93	14.402.580.360,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	-	-	-	199.493.960,00
Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	-	-	-	443.661.000,00
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	44.588.436.000,00	44.064.875.852,83	98,83	24.776.770.877,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	-	-	192.550.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	500.000.000,00	492.500.000,00	98,50	-
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	425.000.000,00	415.000.000,00	97,65	-
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	4.500.000.000,00	4.275.000.000,00	95,00	4.492.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	-	-	-	198.000.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	23.880.000,00	-	-	-
Belanja Modal Instalasi Lain	4.474.400.000,00	4.468.188.000,00	99,86	47.700.000,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	60.500.000,00	24.005.510,00	39,68	-
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	839.000.000,00	158.603.650,00	18,90	2.089.655.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.874.358.400,00	5.354.696.000,00	91,15	652.944.850,00
Belanja Modal Buku Umum	2.204.450.000,00	2.197.044.000,00	99,66	144.500.000,00
Belanja Modal Buku Agama	3.000.200.000,00	2.492.670.000,00	83,08	-
Belanja Modal Audio Visual	30.810.000,00	30.676.000,00	99,57	-
Belanja Modal Naskah (Manuskrip)/Asli	480.000.000,00	478.250.000,00	99,64	-
Belanja Modal Alat Musik	50.000.000,00	49.200.000,00	98,40	-
Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	108.898.400,00	106.856.000,00	98,12	-
Belanja Modal Software	-	-	-	508.444.850,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.068.878.900,00	993.507.200,00	92,95	-
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.007.158.900,00	932.387.200,00	92,58	-
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	61.720.000,00	61.120.000,00	99,03	-
Jumlah	666.352.162.737,00	580.674.088.157,03	87,14	391.771.955.326,03

5.1.2.2.1 Belanja Tanah	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	1.035.250.000,00	-	5.115.127.000,00

Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.035.250.000,00 untuk pengadaan tanah rumah potong yang dianggarkan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan pembelian tanah untuk jalan menuju GOR yang dianggarkan pada Kelurahan Paringin Kota sebesar Rp35.250.000,00 namun belanja tanah untuk Tahun Anggaran 2023 tidak terealisasi kondisi ini berbeda dengan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp5.115.127.000,00, adapun rincian belanja tanah tersaji pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 85 Rincian Belanja Modal Tanah Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Tanah	1.035.250.000,00	-	-	5.115.127.000,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.000.000.000,00	-	-	-
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	-	-	-	5.115.127.000,00
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	35.250.000,00	-	-	-

5.1.2.2.2 Belanja	Anggaran TA	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Belanja Modal	2023	(Rp)	(Rp)
Peralatan dan Mesin	173.356.943.387,00	161.050.737.928,00	94.619.742.724,00

Belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp173.356.943.387,00 terealisasi sebesar Rp161.050.737.928,00 atau 92,90% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat peningkatan sebesar Rp66.430.995.204,00 atau meningkat sebesar 70,21%, dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp94.619.742.724,00, adapun rincian belanja Modal Peralatan dan Mesin tersaji pada tabel berikut:

Tabel 86 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.356.943.387,00	161.050.737.928,00	92,90	94.619.742.724,00
Belanja Modal Grader	-	-	-	2.800.000.000,00
Belanja Modal Excavator	2.950.000.000,00	2.883.570.000,00	97,75	-
Belanja Modal Loader	0,00	0,00		1.550.000.000,00
Belanja Modal Mesin Proses	71.000.000,00	66.000.000,00	92,96	39.751.475,00
Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	4.801.340.000,00	4.654.500.000,00	96,94	1.400.000.000,00
Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	-	-	-	34.800.000,00
Belanja Modal Pompa	51.720.000,00	49.835.000,00	96,36	-
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	8.000.000,00	7.962.500,00	99,53	-
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	166.060.000,00	158.646.000,00	95,54	295.175.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	31.681.210.000,00	30.449.366.200,00	96,11	18.170.141.236,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	712.000.000,00	483.960.000,00	67,97	497.100.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.264.680.000,00	2.180.000.000,00	96,26	184.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.136.060.000,00	10.915.750.000,00	98,02	5.381.506.058,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	361.720.000,00	355.400.000,00	98,25	-
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	11.844.080.000,00	11.788.000.000,00	99,53	3.948.000.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel	-	-	-	2.242.422,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.281.290.000,00	1.237.440.000,00	96,58	198.400.000,00
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	3.842.420,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	312.000.000,00	310.800.000,00	99,62	11.797.968,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	630.000.000,00	204.000.000,00	32,38	28.328.310,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	-	-	-	50.000.000,00
Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	171.000.000,00	169.047.334,00	98,86	196.740.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	-	-	-	8.693.930,00
Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	920.607.100,00	778.604.000,00	84,58	-
Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	-	-	-	50.000.000,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	1.200.000,00	655.000,00	54,58	-
Belanja Modal Alat Ukur Universal	-	-	-	10.260.000,00
Belanja Modal Universal Tester	-	-	-	1.900.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	140.595.500,00	111.520.595,00	79,32	9.558.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	5.734.200,00	3.020.199,00	52,67	-
Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	151.890.000,00	140.827.000,00	92,72	-
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	-	-	-	278.670.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	34.982.200,00	33.162.000,00	94,80	-
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	34.163.800,00	12.180.000,00	35,65	-
Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	97.720.000,00	97.683.706,00	99,96	99.270.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	150.000.000,00	149.000.000,00	99,33	-
Belanja Modal Mesin Ketik	-	263.350.000,00	-	-
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	32.392.200,00	27.330.000,00	84,37	-
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	39.673.000,00	37.630.000,00	94,85	-
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.263.721.000,00	3.012.249.571,00	92,29	1.290.176.289,00
Belanja Modal Mebel	10.533.919.300,00	9.495.635.120,00	90,14	293.784.550,00
Belanja Modal Alat Pembersih	125.000.000,00	124.000.000,00	99,20	118.180.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	1.867.726.400,00	1.715.300.110,00	91,84	1.861.781.800,00
Belanja Modal Alat Dapur	16.158.500,00	16.081.100,00	99,52	107.057.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.135.377.895,00	8.353.600.320,00	91,44	8.765.658.269,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	33.150.000,00	10.150.000,00	30,62	1.310.655.000,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	451.500.000,00	448.344.000,00	99,30	468.918.163,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	25.800.000,00	25.760.000,00	99,84	215.611.500,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	350.000.000,00	344.250.000,00	98,36	391.473.367,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	255.250.000,00	249.500.000,00	97,75	26.000.000,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	-	-	-	2.363.454.700,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	75.000.000,00	73.815.000,00	98,42	364.085.500,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.470.200.000,00	2.259.547.413,00	91,47	2.420.468.725,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.814.700.000,00	3.668.700.000,00	96,17	242.813.031,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	130.280.000,00	129.680.000,00	99,54	77.904.695,00
Belanja Modal Peralatan Cetak	68.000.000,00	67.435.000,00	99,17	36.530.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	50.000.000,00	47.656.250,00	95,31	99.044.180,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	303.000.000,00	291.325.500,00	96,15	223.436.075,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	74.000.000,00	68.974.000,00	93,21	6.990.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	75.000.000,00	74.900.000,00	99,87	16.975.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	11.500.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	9.000.000,00	5.700.000,00	63,33	-
Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	-	-		47.064.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	363.253.000,00	332.515.104,00	91,54	78.688.975,00
Belanja Modal Switcher Antena	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	-	-	-	3.500.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	22.605.755.969,00	19.601.531.501,00	86,71	12.273.192.086,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.650.404.350,00	4.471.174.300,00	79,13	4.612.965.605,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal Cat, dan Kimia	10.268.000,00	10.239.860,00	99,73	-
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	85.000.000,00	82.500.000,00	97,06	-
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	90.000.000,00	-	-	-
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika	81.000.000,00	-	-	-
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	804.000.000,00	-	-	-
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	-	-	-	47.850.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPS	90.000.000,00	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	705.000.000,00	-	-	-
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	1.176.844.600,00	1.146.139.000,00	97,39	75.330.000,00
Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	-	-	-	47.500.000,00
Belanja Modal Peralatan Umum	312.478.073,00	258.135.000,00	82,61	0,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	821.390.700,00
Belanja Modal Personal Computer	12.609.970.200,00	12.254.509.750,00	97,18	14.837.177.729,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	529.276.000,00	524.109.500,00	99,02	858.923.554,00
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	9.000.000,00	8.850.000,00	98,33	365.674.200,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	35.000.000,00	34.000.000,00	97,14	518.470.694,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	-	-	-	13.655.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.433.019.800,00	3.159.253.700,00	92,03	2.607.331.418,00
Belanja Modal Elektronik/Electric	-	-	-	6.138.200,00
Belanja Modal Baju Pengaman	-	-	-	33.600.000,00
Belanja Modal Alat Penolong	53.000.000,00	36.750.000,00	69,34	-
Belanja Modal Alat SAR Lainnya	16.000.000,00	10.475.000,00	65,47	-
Belanja Modal Rambu Bersuar	21.161.240.000,00	20.791.253.995,00	98,25	1.406.815.400,00
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	81.000.000,00	78.097.550,00	96,42	-
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	141.720.000,00	138.360.750,00	97,63	-
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	125.312.300,00	50.500.000,00	40,30	1.800.000,00

Dari peningkatan belanja modal peralatan dan mesin terdapat beberapa belanja yang mengalami peningkatan cukup signifikan dikarenakan terdapat beberapa pengadaan sebagai berikut:

1. Pengadaan kendaraan dinas beroda dua untuk Kepala Sekolah dari pagu anggaran sebesar Rp6.579.120.000,00 terealisasi sebesar Rp6.539.824.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

2. Pengadaan Mobil Tangki Damkar Portable dengan pagu anggaran sebesar Rp10.240.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.208.000.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Pengadaan Excavator dari pagu anggaran sebesar Rp2.950.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.883.570.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman.
4. Pengadaan mobil pengangkut alat berat dengan pagu anggaran sebesar Rp1.700.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.629.500.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman.
5. Pengadaan Bulldozer dengan pagu anggaran sebesar Rp3.101.340.000,00 terealisasi sebesar Rp3.025.000.000,00 pada Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup.
6. Pengadaan Mobil operasional (mobil homecare) yang pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.481.400.000,00.
7. Pengadaan Mobil operasional RSUD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dianggarkan sebesar Rp5.225.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.225.000.000,00.
8. Pengadaan Mobil Skylift dengan pagu anggaran sebesar sebesar Rp1.604.080.000,00 terealisasi sebesar Rp1.580.000.000,00 pada Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup
9. Pengadaan Mobil dinas Jabatan/Perorangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dianggarkan sebesar Rp3.480.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.300.600.000,00
10. Pengadaan Mobil dinas Jabatan/Perorangan pada Sekretariat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp14.180.000.000,00 terealisasi sebesar Rp13.366.650.000,00.
11. Pengadaan Mobil dinas beroda dua pada Sekretariat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp1.545.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.464.700.000,00
12. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dianggarkan sebesar Rp3.270.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.212.528.200,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

13. Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan/Angkutan Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dianggarkan sebesar Rp1.320.000.000,00. terealisasi sebesar Rp1.300.000.000,00
14. Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Inspektorat yang dianggarkan sebesar Rp1.410.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.062.300.000,00 .
15. Pengadaan Belanja Modal Rambu Bersuar pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan yang dianggarkan sebesar Rp21.161.240.000,00 terealisasi sebesar Rp20.792.973.995,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan		Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
		116.951.551.100,00	99.741.722.125,39	47.238.414.493,82

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp116.951.551.100,00 terealisasi sebesar Rp99.741.722.125,39 atau 85,28% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat peningkatan sebesar Rp52.503.307.631,57 atau meningkat sebesar 111,15% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp47.238.414.493,82, adapun rincian belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 87 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022**

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.951.551.100,00	99.741.722.125,39	85,28	47.238.414.493,82
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	28.596.464.100,00	26.967.433.791,53	94,30	9.169.742.325,00
Belanja Modal Bangunan Gudang	425.840.000,00	420.547.031,00	98,76	398.696.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	2.309.064.000,00	1.971.979.878,00	85,40	395.144.000,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.910.460.000,00	7.997.453.744,00	89,75	12.358.996.750,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	10.952.672.200,00	4.837.344.872,00	44,17	844.095.788,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	302.040.000,00	301.001.850,00	99,66	1.905.105.117,82
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	24.348.043.500,00	23.024.515.679,00	94,56	10.530.581.604,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.660.300.000,00	2.310.878.559,00	86,87	-
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.227.260.000,00	1.221.222.018,00	99,51	99.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	150.000.000,00	149.250.000,00	99,50	148.660.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	-	-		119.893.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	245.272.000,00	210.714.000,00	85,91	222.751.000,00
Belanja Modal Bangunan Terbuka	4.926.440.000,00	4.522.049.396,00	91,79	588.458.000,00
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	536.020.000,00	531.442.000,00	99,15	429.686.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.381.195.000,00	1.221.109.916,00	88,41	971.693.000,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	102.500.000,00	102.181.000,00	99,69	583.018.000,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	1.927.780.700,00	1.906.365.214,00	98,89	1.389.776.149,00
Belanja Modal Taman	24.317.419.600,00	19.414.493.010,86	79,84	2.915.706.300,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	-	478.040.000,00
Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	-	-	-	13.900.000,00
Belanja Modal Asrama	302.040.000,00	101.597.000,00	33,64	0,00
Belanja Modal Panti Asuhan	-	-	-	1.847.134.160,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	201.360.000,00	199.902.000,00	99,28	-
Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	2.296.000.000,00	1.502.801.465,00	65,45	299.281.000,00
Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	-	-	-	197.169.300,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	-	-	-	49.000.000,00
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	-	-	-	196.800.000,00
Belanja Modal Pagar	732.700.000,00	727.294.701,00	99,26	1.086.087.000,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	100.680.000,00	100.145.000,00	99,47	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Dari belanja modal Gedung dan Bangunan terdapat beberapa belanja yang mengalami peningkatan cukup signifikan dikarenakan terdapat beberapa pembangunan dengan nilai cukup besar antara lain sebagai berikut:

1. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp1.017.917.000,00 terealisasi sebesar Rp996.129.200,00
2. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp1.534.590.000,00 terealisasi sebesar Rp1.531.173.000,00,
3. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp22.453.550.000,00 terealisasi sebesar Rp21.067.448.999,00
4. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan sebesar Rp1.897.383.300,00 terealisasi sebesar Rp1.871.937.560,00
5. Belanja Modal Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp24.348.043.500,00 terealisasi sebesar Rp23.024.575.679,00
6. Belanja Modal Belanja Modal Bangunan Terbuka pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp4.827.310.000,00 terealisasi sebesar Rp4.425.102.896,00.
7. Belanja Modal Taman pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp22.831.150.000,00 terealisasi sebesar Rp18.526.570.750,00
8. Belanja Modal Taman pada Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup sebesar Rp965.996.000,00.terealisasi sebesar Rp342.168.955,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
Jalan,	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Jaringan, dan	368.065.180.950,00	313.533.424.903,64	244.145.726.258,21
Irigasi			

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp368.065.180.950,00 terealisasi sebesar Rp313.533.424.903,64 atau 85,18% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat peningkatan sebesar Rp69.387.698.645,43 atau meningkat sebesar 28,42% dari anggaran Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

2022 sebesar Rp244.145.726.258,21, belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi merupakan belanja modal dengan nilai tertinggi karena merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka pemenuhan infrastruktur yang memadai adapun rincian belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tersaji pada tabel berikut:

Tabel 88 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	368.065.180.950,00	313.533.424.903,64	85,18	244.145.726.258,21
Belanja Modal Jalan Kabupaten	169.951.142.450,00	127.600.976.027,15	75,08	126.024.136.583,81
Belanja Modal Jalan Desa	71.678.298.700,00	69.310.343.210,00	96,70	50.204.045.361,40
Belanja Modal Jalan Lainnya	423.760.000,00	420.006.010,00	99,11	2.990.425.000,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	33.261.860.000,00	25.952.510.735,00	78,02	16.447.303.616,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	6.272.079.000,00	6.247.897.325,08	99,61	1.145.698.000,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	60.543.000,00	59.801.103,07	98,77	-
Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	52.327.000,00	51.547.517,07	98,51	-
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	5.028.020.000,00	4.343.122.000,00	86,38	491.206.500,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	25.925.934.800,00	25.649.047.963,44	98,93	14.402.580.360,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	-	-	-	199.493.960,00
Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	-	-	-	443.661.000,00
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	44.588.436.000,00	44.064.875.852,83	98,83	24.776.770.877,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	-	-	192.550.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	500.000.000,00	492.500.000,00	98,50	-
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	425.000.000,00	415.000.000,00	97,65	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	4.500.000.000,00	4.275.000.000,00	95,00	4.492.500.000,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	-	-	-	198.000.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	23.880.000,00	-	-	-
Belanja Modal Instalasi Lain	4.474.400.000,00	4.468.188.000,00	99,86	47.700.000,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	60.500.000,00	24.005.510,00	39,68	-
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	839.000.000,00	158.603.650,00	18,90	2.089.655.000,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	5.874.358.400,00	5.354.696.000,00	652.944.850,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.874.358.400,00 terealisasi sebesar Rp5.354.696.000,00 atau 91,15% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat peningkatan sebesar Rp4.701.751.150,00 atau meningkat sebesar 720,08% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp652.944.850,00, adapun rincian belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 89 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.204.650.000,00	4.689.714.000,00	90,11	144.500.000,00
Belanja Modal Buku Umum	2.204.450.000,00	2.197.044.000,00	99,66	144.500.000,00
Belanja Modal Buku Agama	3.000.200.000,00	2.492.670.000,00	83,08	-
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	30.810.000,00	30.676.000,00	99,57	-
Belanja Modal Audio Visual	30.810.000,00	30.676.000,00	99,57	-
Belanja Modal Kartografi Naskah, dan Lukisan	480.000.000,00	478.250.000,00	99,64	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Naskah (Manuskrip)/Asli	480.000.000,00	478.250.000,00	99,64	-
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	158.898.400,00	156.056.000,00	98,21	-
Belanja Modal Alat Musik	50.000.000,00	49.200.000,00	98,40	-
Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	108.898.400,00	106.856.000,00	98,12	-
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	508.444.850,00
Belanja Modal Software	-	-	-	508.444.850,00
Jumlah	5.874.358.400,00	5.354.696.000,00	91,15	652.944.850,00

Dari peningkatan belanja modal Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan belanja modal buku pada Dinas Pendidikan yang terdiri dari Belanja Modal Buku Umum sebesar Rp2.204.450.000,00 dan Belanja Modal Buku Agama sebesar Rp3.000.200.000,00.

5.1.2.2.6 Belanja Modal	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
Aset Lainnya	1.068.878.900,00	993.507.200,00	-

Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.068.878.900,00 terealisasi sebesar Rp993.507.200,00 atau 92,95% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat peningkatan sebesar Rp993.507.200,00 atau meningkat sebesar 100% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp0,00, adapun rincian belanja Belanja Modal Aset Lainnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 90 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.068.878.900,00	993.507.200,00	92,95	-
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.007.158.900,00	932.387.200,00	92,58	-
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	61.720.000,00	61.120.000,00	99,03	-
Jumlah	1.068.878.900,00	993.507.200,00	92,95	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.2.3	Belanja Tidak Terduga	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
		5.603.265.908,00	1.602.500.000,00	1.203.971.500,00

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan. Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Kepala Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 2) Penggunaan dana untuk penanganan keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa bisa dilaksanakan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau SKPD teknis sesuai rekomendasi Bupati berdasarkan usulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 3) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk di lakukan reviu oleh APIP.
- 4) Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat kepada PPKD selaku bendahara umum daerah dengan melampirkan hasil reviu oleh APIP, keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat dan surat pernyataan tanggung jawab.
- 5) Pencairan dana kebutuhan belanja dilakukan melalui mekanisme TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD.
- 6) PPKD selaku BUD melakukan pencairan dana keadaan darurat kepada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 3 (tiga) hari



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Bupati dan menandatangani berita acara pengeluaran belanja tidak terduga oleh BPKAD dan SKPD teknis terkait.

- 7) Pencairan dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme langsung dan ditransfer ke rekening pelaksana tanggap darurat bencana/ kejadian luar biasa pada SKPD teknis terkait dan dibuktikan dengan tanda terima uang oleh SKPD teknis terkait.
- 8) Penggunaan dana kebutuhan belanja dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD.
- 9) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja.

Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.602.500.000,00 atau 28,60% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.603.265.908,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 mengalami Kenaikan sebesar Rp398.528.500,00 atau 33,10% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.203.971.500,00.

Tabel 91 Rincian Belanja Tidak Terduga

No.	SKPD Teknis	Keterangan	Nilai Bantuan Sosial (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Pemberian Santunan Kematian di Kabupaten Balangan Bulan Januari Tahun Anggaran 2023.	118.000.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Penyaluran Dana BTT Bantuan Sosial Santunan Kematian Tahap II Bulan April 2023 (yang Meninggal bulan Januari, Februari & Maret Tahun 2023) di Kabupaten Balangan	300.000.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Penyaluran Dana BTT Bantuan Sosial Santunan Kematian Tahap III Bulan April dan Mei Tahun 2023 di Kabupaten Balangan	150.000.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Penyaluran Dana BTT Bantuan Sosial Santunan Kematian Tahap IV Bulan Juni Tahun 2023 di Kabupaten Balangan.	126.000.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Penyaluran Dana BTT Bantuan Sosial Santunan Kematian Tahap V Bulan Juli Tahun 2023 di Kabupaten Balangan.	99.000.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	SPJ TU NIHIL Penyaluran Dana BTT Bantuan Santunan Kematian Tahap VI Bulan Agustus Tahun 2023 di Kabupaten Balangan.	127.500.000,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Penyaluran Dana BTT Bantuan Santunan Kematian Tahap VII Bulan September Tahun 2023 di Kabupaten Balangan.	129.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD Teknis	Keterangan	Nilai Bantuan Sosial (Rp)
8	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Penyaluran Dana BTT Bantuan Santunan Kematian Tahap VIII Bulan Oktober dan NoVember Tahun 2023 di Kabupaten Balangan.	180.000.000,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Penyaluran Dana BTT Bantuan Santunan Kematian Tahap IX Bulan Desember Tahun 2023 di Kabupaten Balangan.	90.000.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Penyaluran Dana BTT Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Balangan.	283.000.000,00
Jumlah			1.602.500.000,00

5.1.2.4 Belanja	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2022 (Rp)
Transfer	306.874.087.467,00	306.086.953.047,00	242.402.786.355,00

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp306.086.953.047,00 atau 99,74% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp306.874.087.467,00. Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp63.684.166.692,00 atau 26,27% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp242.402.786.355,00. Belanja Transfer merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Rincian realisasi dan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 92 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	1.827.921.467,00	1.825.260.947,00	99,85	1.366.693.655,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	305.046.166.000,00	304.261.692.100,00	99,74	241.036.092.700,00
Jumlah		306.874.087.467,00	306.086.953.047,00	99,74	242.402.786.355,00

Belanja Transfer merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah realisasi belanja transfer diakui sebesar nilai yang dikeluarkan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

oleh Pemerintah Daerah untuk Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa (Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa) sedangkan Dana Desa Alokasi Pusat (Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa) diakui sebesar yang disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada Pemerintahan Desa, untuk realisasi belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa tidak dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5.1.2.4.1	Belanja Bagi Hasil	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
		1.827.921.467,00	1.825.260.947,00	1.366.693.655,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.825.260.947,00 atau 99,85% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.827.921.467,00 . Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp458.567.292,00 atau 33,55% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.366.693.655,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 93 Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.605.370.000,00	1.603.105.200,00	99,86	1.176.835.005,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	222.551.467,00	222.155.747,00	99,82	189.858.650,00
Jumlah		1.827.921.467,00	1.825.260.947,00	99,85	1.366.693.655,00

5.1.2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
		1.605.370.000,00	1.603.105.200,00	1.176.835.005,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 Rp1.603.105.200,00 atau 99,85% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp 1.605.370.000,00 . Realisasi Belanja Bagi



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa mengalami kenaikan sebesar Rp426.270.195,00 atau 36,22% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.176.835.005,00. Rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
		222.551.467,00	222.155.747,00	189.858.650,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 Rp222.155.747,00 atau 99,82% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp222.551.467,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa mengalami kenaikan sebesar Rp32.297.097,00 atau 17% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp189.858.650,00. Rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

5.1.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
		305.046.166.000,00	304.261.692.100,00	241.036.092.700,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp304.261.692.100,00 atau 99,74% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp305.046.166.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp63.225.599.400,00 atau 26,23% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp241.036.092.700,00. Belanja Bantuan Keuangan merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBN dan APBD. Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) per desa disajikan pada **Lampiran 6**. Berikut rincian Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 94 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	191.741.509.000,00	191.363.763.800,00	99,80	133.199.915.460,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	113.304.657.000,00	112.897.928.300,00	99,64	107.836.177.240,00
Jumlah		305.046.166.000,00	304.261.692.100,00	99,74	241.036.092.700,00

5.1.2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
		191.741.509.000,00	191.363.763.800,00	133.199.915.460,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun Anggaran 2023 Rp191.363.763.800,00 atau 99,80% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp191.741.509.000,00 . Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa mengalami kenaikan sebesar Rp58.163.848.340,00 atau 43,66% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp133.199.915.460,00.

5.1.2.4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
		113.304.657.000,00	112.897.928.300,00	107.836.177.240,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun Anggaran 2023 Rp112.897.928.300,00 atau 99,64% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp113.304.657.000,00 . Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa mengalami kenaikan sebesar Rp5.061.751.060,00 atau 4,69 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp107.836.177.240,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.2 Surplus/ (Defisit)	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	(172.572.372.307,95)	468.199.163.388,36	140.672.385.965,43

Terdapat surplus pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp468.199.163.388,36, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 maka terdapat kenaikan sebesar Rp327.526.777.422,93. Rincian surplus Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 95 Rincian Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	2.384.594.925.767,05	2.760.543.725.654,01	115,77	1.785.363.522.998,54
2	Belanja	(2.557.167.298.075,00)	(2.292.344.562.265,65)	89,64	(1.644.691.137.033,11)
Jumlah		(172.572.372.307,95)	468.199.163.388,36	(271,31)	140.672.385.965,43

5.1.3 Pembiayaan Netto	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	172.572.372.307,95	172.572.372.613,97	81.899.986.648,54

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan *Netto* adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi Pembiayaan *Netto* Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp172.572.372.613,97 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp172.572.372.307,95. Realisasi Pembiayaan *Netto* Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp90.672.385.965,43 atau 110,71% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp81.899.986.648,54.

Pembiayaan *Netto* terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 96 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	222.572.372.307,95	222.572.372.613,97	100,00	131.899.986.648,54
2	Pengeluaran Pembiayaan	(50.000.000.000,00)	(50.000.000.000,00)	100,00	(50.000.000.000,00)
Jumlah		172.572.372.307,95	172.572.372.613,97	100,00	81.899.986.648,54

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	222.572.372.307,95	222.572.372.613,97	131.899.986.648,54

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp222.572.372.613,97 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp222.572.372.307,95. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp90.672.385.965,43 atau 68,74% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp131.899.986.648,54. Rincian penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 97 Rincian Penerimaan Pembiayaan

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penggunaan SiLPA	222.572.372.307,95	222.572.372.613,97	100,00	131.899.486.648,54
Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	458.698.336,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	-	-	75.894.567.217,81
Penghematan Belanja	194.551.605.315,95	194.551.605.621,97	100,00	781.372.618,00
Sisa Belanja Lainnya	28.020.766.992,00	28.020.766.992,00	100,00	54.764.848.476,73
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	500.000,00
Jumlah	222.572.372.307,95	222.572.372.613,97	100,00	131.899.986.648,54



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
		50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp50.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 98 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00	35.000.000.000,00
PT. Asbaru Dayacipta Lestari (PERSERODA)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	10.000.000.000,00
PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
Jumlah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	50.000.000.000,00

5.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
		-	640.771.536.002,33	222.572.372.613,97

Saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp640.771.536.002,33 dan Rp222.572.372.613,97. Saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 99 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan	2.384.594.925.767,05	2.760.543.725.654,01	115,77	1.785.363.522.998,54
Belanja	2.557.167.298.075,00	2.292.344.562.265,65	89,64	1.644.691.137.033,11
Pembiayaan Netto	172.572.372.307,95	172.572.372.613,97	100,00	5.000.000.000,00
Jumlah	-	640.771.536.002,33		222.572.372.613,97

rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **CaLK No.5.2.4.**



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL Tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2023

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp222.572.372.613,97 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Realisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp222.572.372.613,97 sebagai penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp222.572.372.613,97.

5.2.3. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) Tahun Anggaran 2023

Surplus sebesar Rp468.199.163.388,36 sebagaimana diuraikan pada poin CaLK LRA 5.1.3 dan realisasi Pembiayaan *Netto* sebesar Rp172.572.372.613,97 sebagaimana diuraikan pada poin CaLK 5.1.4 di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp640.771.536.002,33 sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Target Pendapatan sebesar Rp2.384.594.925.767,05 yang terealisasi sebesar Rp2.760.543.725.654,01 sehingga lebih dari target pendapatan sebesar Rp375.948.799.886,96 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Selisih lebih anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp32.486.031.301,52 yang terdiri atas:
 - 1) Selisih lebih anggaran Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp1.463.676.851,00;
 - 2) Selisih lebih anggaran Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp204.440.665,00; dan
 - 3) Selisih lebih anggaran Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp30.817.913.785,52.
 - b. Selisih lebih anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp349.039.478.958,44 yang terdiri atas:
 - 1) Selisih lebih anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp326.593.487.268,00 dengan rincian sebagai



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

berikut:

- a) Selisih lebih anggaran Dana Bagi Hasil sebesar Rp343.439.607.914,00;
 - b) Selisih kurang anggaran Dana Alokasi Umum sebesar Rp30.977.550,00;
 - c) Selisih kurang anggaran Dana Alokasi Khusus - Fisik sebesar Rp2.487.696.691,00; dan
 - d) Selisih kurang anggaran Dana Alokasi Khusus - Non Fisik sebesar Rp14.327.446.405,00.
- 2) Selisih lebih anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp5.312.730.300,00, dikarenakan selisih lebih anggaran dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp5.719.459.000,00 dan selisih kurang anggaran Dana Desa sebesar Rp406.728.700,00.
- 3) Selisih lebih anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp17.133.261.390,44, dikarenakan selisih lebih anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp17.133.261.390,44.
- c. Selisih kurang anggaran Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp5.576.710.373,00 disebabkan oleh selisih kurang anggaran Pendapatan Hibah sebesar Rp5.576.710.373,00.
2. Anggaran Belanja sebesar Rp2.557.167.298.075,00 terealisasi sebesar Rp2.292.344.562.265,65, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp264.822.735.809,35. Rincian sisa anggaran Belanja tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Selisih kurang anggaran Belanja Operasi sebesar Rp174.356.760.901,38 yang terdiri atas:
 - 1) Selisih kurang anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp64.486.410.139,00;
 - 2) Selisih kurang anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp94.695.867.609,38;
 - 3) Selisih kurang anggaran Belanja Hibah sebesar Rp14.960.047.416,00; dan
 - 4) Selisih kurang anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp214.435.737,00.
 - b. Selisih kurang anggaran Belanja Modal sebesar Rp85.678.074.579,97 yang terdiri atas:
 - 1) Selisih kurang anggaran Belanja Modal Tanah sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- Rp1.035.250.000,00;
- 2) Selisih kurang anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.306.205.459,00;
- 3) Selisih kurang anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.209.828.974,61;
- 4) Selisih kurang anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp54.531.756.046,36;
- 5) Selisih kurang anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp519.662.400,00; dan
- 6) Selisih kurang anggaran Belanja Modal Aset lainnya sebesar Rp75.371.700,00.
- c. Selisih kurang anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp4.000.765.908,00.
- d. Selisih kurang anggaran Belanja Transfer sebesar Rp787.134.420,00, dikarenakan selisih kurang anggaran dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp787.134.420,00.
3. Anggaran Pembiayaan sebesar Rp172.572.372.307,95 yang terealisasi sebesar Rp172.572.372.613,97 sehingga terdapat selisih lebih anggaran sebesar Rp306,02, dikarenakan selisih lebih anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp306,02 yang merupakan Selisih Lebih anggaran Penggunaan SiLPA sebesar Rp306,02.

5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir (SAL)

Jumlah SAL per 31 Desember 2023 sebesar Rp640.771.536.002,33 terdiri atas:

Tabel 100 Saldo Anggaran Lebih Akhir

No.	Rekening	Nama Rekening	Jumlah (Rp)
Kas Daerah			
Bank Kalsel			
1	013.00.03.00003.5	Kas Umum Daerah Kabupaten Balangan	624.221.300.103,45
Total Kas Daerah			624.221.300.103,45
Kas di Bendahara Pengeluaran			-
Kas di Bendahara Penerimaan			-
Kas di Bendahara JKN			21.841.033,00
Kas di Bendahara BLUD			13.733.779.326,88
Kas di Bendahara BOS			241.939.226,00
Kas di Bendahara BOP			0,00
Kas di Bendahara BOK			2.552.676.313,00
Jumlah			16.550.235.898,88
Utang PFK			-
Total Kas Bersih			640.771.536.002,33



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1. Aset	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	4.630.374.393.160,05	3.515.220.510.653,10

Saldo Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.630.374.393.160,05 dan Rp3.515.220.510.653,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 101 Rincian Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset Lancar	701.595.000.794,82	325.085.247.306,69
2	Investasi Jangka Panjang	288.958.288.441,29	236.852.826.590,57
3	Aset Tetap	2.496.906.176.173,42	2.286.817.671.552,84
4	Aset Lainnya	1.142.914.927.750,52	666.464.765.203,00
Jumlah		4.630.374.393.160,05	3.515.220.510.653,10

5.3.1.1. Aset Lancar	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	701.595.000.794,82	325.085.247.306,69

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp701.595.000.794,82 dan Rp325.085.247.306,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 102 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	624.221.300.103,45	194.215.215.818,87
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	19.534.949,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
4	Kas di Bendahara BLUD	13.733.779.326,88	28.020.766.992,99
5	Kas di Bendahara BOS	241.939.226,00	187.586.288,00
6	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	21.841.033,00	129.978.981,00
7	Kas di Bendahara BOP	-	164.584,11
8	Kas di Bendahara BOK	2.552.676.313,00	-
9	Kas Lainnya	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
10	Setara Kas	-	-
11	Piutang Pajak	3.561.751.154,00	3.197.076.781,00
12	Piutang Retribusi	74.062.730,00	119.783.070,00
13	Piutang Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.347.732.157,50	4.460.054.973,23
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.600,00	47.366.160.434,00
16	Piutang Transfer Antar Daerah	33.008.029.465,18	33.073.341.442,62
17	Piutang Lainnya	69.095.162,28	738.720.481,00
18	Penyisihan Piutang	(1.785.843.221,02)	(1.691.156.065,77)
19	Beban Dibayar Dimuka	37.598.400,00	-
19	Persediaan	21.511.033.344,55	15.248.018.576,64
Jumlah		701.595.000.794,82	325.085.247.306,69

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	624.221.300.103,45	194.215.215.818,87

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro pada Bank Kalsel Cabang Paringin per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 103 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nomor Rekening	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
		Uraian	Jumlah (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)
Bank Kalsel					
1	013.00.03.00003.5	Kas Umum Daerah Kabupaten Balangan	624.221.300.103,45	Kas Umum Daerah Kabupaten Balangan	194.215.215.818,87
TOTAL			624.221.300.103,45		194.215.215.818,87

Rincian saldo kas di kas daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 104 Rincian SiLPA di Kas Daerah per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Nilai
1	Sisa Saldo Dak Fisik S.D 2023	2.627.397.314,00
2	Sisa Saldo Dak Non Fisik S.D 2023	7.951.643.893,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	1Uraian	Nilai
3	Sisa Saldo Dana Insentif Daerah (DID)	2.497.952.750,00
4	Sisa Saldo Dana Alokasi Umum (DAU-Kelurahan)	69.606.380,00
5	Sisa Saldo Dana Alokasi Umum (DAU-Kesehatan)	1.075.115.391,00
6	Sisa Saldo Dana Alokasi Umum (DAU-Pendidikan)	501.955.015,00
7	Sisa Saldo Dana Alokasi Umum (DAU-Pekerjaan Umum)	697.726.500,00
8	Sisa Saldo Dana Alokasi Umum (DAU-PPPK)	12.423.965.879,00
9	Sisa Saldo Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	37.567.986,00
10	Sisa Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)	306.742.256.345,45
11	Sisa Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat / Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	266.283.796.358,00
12	Sisa Saldo Pendapatan Bukan Milik Pemerintah Daerah (Istana Anak Yatim)	200.000.000,00
13	Pendapatan Transfer Antar Daerah / Bagi Hasil Pajak	23.112.316.292,00
TOTAL		624.221.300.103,45

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	-	19.534.949,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp19.534.949,00.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara BLUD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	13.733.779.326,88	28.020.766.992,99

Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara BLUD yang sumbernya berasal dari penerimaan dan pengeluaran operasional BLUD yang bersangkutan atas Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Non Pelayanan Kesehatan. Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp13.733.779.326,88 dan Rp28.020.766.992,99 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 105 Kas di Bendahara BLUD

No.	Bendahara	Nomor Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Penerimaan	013.00.03.00014.4	13.733.779.326,88	28.020.766.992,99
2	Pengeluaran	013.00.03.00015.4	-	-
Jumlah			13.733.779.326,88	28.020.766.992,99

Mulai Tahun 2013 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan ditetapkan sebagai BLUD dengan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/314/Kum Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013. Pada Tahun 2014, BLUD belum bisa dilaksanakan karena pada Renja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) belum termasuk Tahun Anggaran 2014. Pada tanggal 3 Januari 2014 terbitlah perubahan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/34/Kum Tahun 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola Pejabat Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Mulai Tahun 2015, BLUD sudah dimasukkan dalam Renja dan RKA 2015 sehingga untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dimulai pada 1 Januari 2015 dengan Surat Keputusan Bupati Balangan tersebut, maka Bendahara BLUD membuka rekening pada Bank Kalsel dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/634/Kum Tahun 2014.

5.3.1.1.4. Kas di Bendahara BOS		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
		241.939.226,00	187.586.288,00

Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan saldo kas pada sekolah-sekolah yang menerima Penyaluran Dana BOS dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Saldo kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp241.939.226,00 dan Rp187.586.288,00. Rekapitulasi saldo Kas di Bendahara BOS per sekolah di Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

Tabel 106 Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS

No.	Bendahara	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	SD	113.084.948,00	58.772.183,00
2	SMP	128.854.278,00	128.814.105,00
JUMLAH		241.939.226,00	187.586.288,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.1.5. Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	31 Desember 2023 (Rp) 21.841.033,00	31 Desember 2022 (Rp) 129.978.981,00

Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP) merupakan seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Puskesmas yang sumbernya berasal dari penerimaan dan pengeluaran operasional Puskesmas yang bersangkutan atas Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Saldo Kas di Bendahara Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp21.841.033,00 dan Rp129.978.981,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 107 Daftar Rincian Saldo Kas Bendahara FKTP

No.	Nama Puskesmas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Puskesmas Pirsus	4.448.669,00	4.880,00
2	Puskesmas Lok Batu	141.146,00	56.552.480,00
3	Puskesmas Uren	5.491.910,00	352.866,00
4	Puskesmas Awayan	164.079,00	1.674.407,00
5	Puskesmas Batumandi	23.976,00	81.876,00
6	Puskesmas Juai	56.439,00	31.020,00
7	Puskesmas Lampihong	426.183,00	62.123.602,00
8	Puskesmas Tanah Habang	4.332.307,00	8.182.500,00
9	Puskesmas Halong	144.220,00	59.025,00
10	Puskesmas Paringin Selatan	3.466,00	653,00
11	Puskesmas Tebing Tinggi	9.067,00	370,00
12	Puskesmas Paringin	6.599.571,00	915.302,00
Jumlah		21.841.033,00	129.978.981,00

Mulai Tahun 2014 pemerintah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional dimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan ditingkat dasar dilaksanakan oleh Puskesmas yang diberikan kewenangan mengelola Dana Kapitasi dan Dana Pelayanan Kesehatan yang diterima Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Dana Kapitasi JKN merupakan dana yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ke Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang telah terdaftar di masing-masing fasilitas kesehatan dasar.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 mengharuskan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) membuka Rekening Dana Kapitasi JKN yang digunakan untuk dana kapitasi dari BPJS Kesehatan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Bendahara Puskesmas sebagai FKTP di Kabupaten Balangan membuka rekening pada BRI Kantor Cabang Pembantu Paringin dan telah ditetapkan dengan SK Bupati Balangan Nomor 188.45/347/Kum Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Rekening Puskesmas untuk Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Balangan.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.6. Kas Dana BOP	-	164.584,11

Mulai tahun 2022 pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik yaitu perubahan mekanisme penyaluran yang sebelumnya dari RKUN ke RKUD baru rekening Sekolah menjadi dari RKUN langsung ke rekening Sekolah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana disebutkan bahwa penganggaran Dana BOS pada Kabupaten/Kota bagi Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota dalam bentuk program, sub kegiatan dan belanja sesuai kode rekening berkenaan sedangkan Satdikdas Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, sub kegiatan sesuai kode rekening berkenaan melalui belanja hibah. Dengan adanya perubahan peraturan ini maka Pemerintah Daerah melakukan perubahan mekanisme pencatatan yaitu khusus untuk Satuan Pendidikan Negeri dilakukan pengesahan pendapatan dan belanja dengan SPB/SP2B serta melakukan atas pendapatan, belanja dan posisi keuangan akhir tahun. Sedangkan untuk sekolah swasta Pemerintah Daerah tidak ada melakukan pencatatan baik pendapatan, belanja maupun posisi keuangan akhir tahun sehingga pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak tergambar realisasi baik pendapatan maupun belanjanya.

Kas Dana BOP merupakan saldo yang berasal dari sisa Kas yang ada di Bendahara Bantuan Operasional Pendidikan yang ada disekolah PAUD dan Kesetaraan.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo Dana BOP per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp164.584,11 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 108 Daftar Rincian Saldo Kas Dana BOP

No.	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	KB. Pembina Paringin Selatan	-	3.000,00
2	Paud Terpadu Negeri Pembina Paringin Selatan	-	126.276,11
3	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Balangan	-	35.308,00
Jumlah		-	164.584,11

5.3.1.1.7. Kas Dana BOK	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	2.552.676.313,00	-

Kas Dana BOK merupakan saldo yang berasal dari sisa Kas yang ada di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan yang ada Puskesmas. Saldo Dana BOK per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp2.552.676.313,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 109 Daftar Rincian Saldo Kas Dana BOK

No.	Nama Puskesmas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Puskesmas Pirsus	133.486.606,00	-
2	Puskesmas Lok Batu	217.359.803,00	-
3	Puskesmas Uren	227.819.749,00	-
4	Puskesmas Awayan	284.645.329,00	-
5	Puskesmas Batumandi	243.600.110,00	-
6	Puskesmas Juai	72.588.869,00	-
7	Puskesmas Lampihong	256.902.421,00	-
8	Puskesmas Tanah Habang	66.429.233,00	-
9	Puskesmas Halong	165.194.113,00	-
10	Puskesmas Paringin Selatan	326.762.140,00	-
11	Puskesmas Tebing Tinggi	180.353.167,00	-
12	Puskesmas Paringin	377.534.773,00	-
Jumlah		2.552.676.313,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.1.8. Piutang Pajak	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	3.561.751.154,00	3.197.076.781,00

Piutang Pajak dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 110 Piutang Pajak

No.	Jenis Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Pajak Penerangan Jalan	423.159.315,00	380.370.011,00
2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	2.945.625.177,00	2.636.477.430,00
3	Piutang Pajak Reklame	2.555.000,00	20.768.440,00
4	Piutang Katering	4.198.000,00	665.000,00
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	186.213.662,00	158.795.900,00
Jumlah		3.561.751.154,00	3.197.076.781,00

Mutasi Piutang PBB-P2 dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 111 Mutasi Piutang PBB-P2

Tahun Pajak	Saldo Awal Piutang PBB P2	Ketetapan PBB-P2 2022	Koreksi	Realisasi Tahun 2022	Saldo Akhir Piutang PBB P2
1	2	3	4	5	6=(2+3-4-5)
2023	-	1.014.539.539,00	24.135.071,00	436.651.581,00	553.752.887,00
2022	430.482.285,00	-	16.848.950,00	45.775.966,00	367.857.369,00
2021	318.871.094,00	-	14.722.148,00	10.780.087,00	293.368.859,00
2020	235.670.477,00	-	5.634.397,00	2.629.179,00	227.406.901,00
2019	243.348.175,00	-	19.998.840,00	1.331.330,00	222.018.005,00
2018	190.114.546,00	-	9.577.127,00	1.405.659,00	179.131.760,00
2017	156.243.191,00	-	9.588.300,00	1.320.928,00	145.333.963,00
2016	264.046.404,00	-	25.289.136,00	2.587.199,00	236.170.069,00
2015	272.133.717,00	-	26.572.110,00	6.041.252,00	239.520.355,00
2014	231.877.256,00	-	18.674.374,00	2.333.082,00	210.869.800,00
2013	293.690.285,00	-	22.504.028,00	991.048,00	270.195.209,00
Jumlah	2.636.477.430,00	1.014.539.539,00	193.544.481,00	511.847.311,00	2.945.625.177,00

Untuk Mutasi Piutang Pajak Bukan PBB dan BPHTB Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 112 Mutasi Piutang Pajak Bukan PBB-P2

No.	Uraian Rincian Piutang Pajak	Tahun Pengakuan	Saldo Awal Piutang (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pengurang Piutang, Pembayaran Piutang Tahun Sebelumnya (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4+5-6)
1	Pajak Penerangan Jalan	2023	380.370.011,00	423.159.315,00	380.370.011,00	423.159.315,00
2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	2023	2.636.477.430,00	1.014.539.539,00	705.391.792,00	2.945.625.177,00
3	Pajak Reklame	2023	20.768.440,00	2.555.000,00	20.768.440,00	2.555.000,00
4	Pajak Katering	2023	665.000,00	4.198.000,00	665.000,00	4.198.000,00
5	Pajak Mineral Bukan Logam	2023	158.795.900,00	103.094.413,00	75.676.651,00	186.213.662,00
Jumlah			3.197.076.781,00	1.547.546.267,00	1.182.871.894,00	3.561.751.154,00

5.3.1.1.9. Piutang Retribusi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	74.062.730,00	119.783.070,00

Saldo Piutang Retribusi per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp74.062.730,00 sedangkan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp119.783.070,00, dengan rincian Piutang Retribusi sebagai berikut:

Tabel 113 Piutang Retribusi

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.960.000,00	6.960.000,00
2	Dinas Komunikasi dan informatika	38.942.730,00	88.693.070,00
3	Dinas Koperasi	28.160.000,00	24.130.000,00
Jumlah		74.062.730,00	119.783.070,00

Perhitungan Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 114 Perhitungan Piutang Retribusi

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan	Saldo Awal Piutang (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pengurang Piutang, Pembayaran Piutang Tahun Sebelumnya (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4+5-6)
1	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	2023	13.035.000,00	6.970.000,00	6.150.000,00	13.855.000,00
2	Retribusi Persampahan	2023	18.055.000,00	10.990.000,00	7.780.000,00	21.265.000,00
3	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2023	88.693.070,00	-	49.750.340,00	38.942.730,00
Jumlah Total			119.783.070,00	17.960.000,00	63.680.340,00	74.062.730,00

5.3.1.1.10. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	<u>4.347.732.157,50</u>	<u>4.460.054.973,23</u>

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.347.732.157,50 sedangkan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.460.054.973,23. Saldo Piutang Lain-lain PAD Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 115 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per SKPD

No.	SKPD	2023	2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	1.000.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	172.183.500,00
3	BLUD (RSUD)	4.345.177.839,00	4.095.575.962,03
4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	360.000,00	360.000,00
5	Dinas Komunikasi dan informatika	2.194.318,50	2.194.318,50
6	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-	188.741.192,70
Jumlah		4.347.732.157,50	4.460.054.973,23

1. Rincian Piutang Pelayanan Kesehatan pada BLUD dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 116 Rincian Mutasi Piutang BLUD

No.	Pihak Yang Terhutang	Saldo Piutang Awal	Pengurangan Piutang	Koreksi	Penambahan Piutang	Saldo Piutang Akhir
1	2	3	4	5	6	7 = 3 - 4 - 5 + 6
1	PT. SIS ADMO	21.718.762,00	21.718.762,00	-	169.776.209,00	169.776.209,00
2	PT. SIS SERA	5.396.756,00	5.396.756,00	-	72.559.168,00	72.559.168,00
3	PT. SIS MACO	-	-	-	1.605.764,00	1.605.764,00
4	Asuransi Sinar Mas	9.078.003,00	9.078.003,00	-	65.790.774,00	65.790.774,00
5	PT. Semesta Centra Mas	-	-	-	2.476.308,00	2.476.308,00
6	BRI	-	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00
7	PARKIR	58.000.000,00	12.000.000,00	-	20.000.000,00	66.000.000,00
8	PT. TASPEN	2.242.000,00	-	-	-	2.242.000,00
9	PT. KPP	2.498.000,00	-	-	-	2.498.000,00
10	BPJS	2.190.225.057,00	2.190.225.057,00	-	3.911.924.616,00	3.911.924.616,00
11	KEMENKES	1.638.968.500,00	1.638.968.500,00	-	43.305.000,00	43.305.000,00
12	PT. Borneo Perkasa Medika	19.013.981,00	19.013.981,00	-	-	-
13	PT. Anugrah Argon Medica	8.207.099,30	8.207.099,30	-	-	-
14	PT. Graha Medika Mandiri	49.207.410,00	49.207.410,00	-	-	-
15	PT. Yamhatevy Paran Mandiri	78.338.602,00	78.338.602,00	-	-	-
16	PT. Doa Restu Ibu	10.287.750,00	10.287.750,00	-	-	-
17	PT Afifarma Kediri	2.394.041,73	2.394.041,73	-	-	-
Total		4.095.575.962,03	4.044.835.962,03	-	4.294.437.839,00	4.345.177.839,00

- Rincian piutang pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan danda dari Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp360.000,00;
- Rincian piutang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika merupakan danda dari Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp2.194.318,50.

5.3.1.1.11. Piutang Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	5.600,00	47.366.160.434,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.600,00 dan Rp47.366.160.434,00, saldo per 31 Desember 2023 merupakan Piutang/Kurang Bayar (KB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023 yang penyalurannya dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023, sedangkan saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor (KMK) 46/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Periode Ketiga pada Tahun 2022 dikoreksi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2023, adapun rincian perhitungan Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 117 Perhitungan Transfer Pemerintah Pusat

Jenis DBH	Saldo Akhir KB TA. 2022 (KMK No. 46/KM.7/2022)	Koreksi Saldo Awal KB TA. 2022 (PMK No 90 Tahun 2023)	Penyelesaian KB sesuai KMK Nomor 38/KM.7/2023	Sisa KB s.d Tahun 2023 (Saldo Akhir KB)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
DBH PAJAK	9.810,00	20.770.185.286,00	20.770.183.000,00	2.286,00
Pajak Bumi dan Bangunan	-	19.357.354.257,00	19.357.354.000,00	257,00
Bagian Daerah	-	18.732.783.107,00	18.732.783.000,00	107,00
Biaya Pungut	-	624.571.150,00	624.571.000,00	150,00
PPh	-	1.412.821.219,00	1.412.820.000,00	1.219,00
PPh Pasal 21	-	1.361.026.536,00	1.361.026.000,00	536,00
PPh Pasal 25/29	-	51.794.683,00	51.794.000,00	683,00
CHT	9.810,00	9.810,00	9.000,00	810,00
Cukai Hasil Tembakau (CHT)	9.810,00	9.810,00	9.000,00	810,00
DBH SDA	47.366.150.624,00	827.681.810.314,00	827.681.807.000,00	3.314,00
Migas	-	209.265.645,00	209.265.000,00	645,00
Minyak Bumi 15%	-	202.514.210,00	202.514.000,00	210,00
Minyak Bumi 0,5%	-	6.751.435,00	6.751.000,00	435,00
Minerba	47.293.135.653,00	827.363.486.088,00	827.363.485.000,00	1.088,00
Royalti	47.293.135.653,00	827.363.486.088,00	827.363.485.000,00	1.088,00
Kehutanan	73.014.971,00	109.058.581,00	109.057.000,00	1.581,00
PSDH	73.014.971,00	109.058.581,00	109.057.000,00	1.581,00
Jumlah	47.366.160.434,00	848.451.995.600,00	848.451.990.000,00	5.600,00

5.3.1.1.12. Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2023
(Rp)
33.008.029.465,18

31 Desember 2022
(Rp)
33.073.341.442,62

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.008.029.465,18 sedangkan saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

2022 sebesar Rp33.073.341.442,62. Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 118 Piutang Dana Bagi Hasil

No.	Nama Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.459.524.174,00	1.421.058.604,81
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBnKB)	2.513.572.549,00	2.681.523.036,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	26.826.812.283,18	26.667.882.803,14
4	Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT dan AP)	342.509.549,00	241.918.719,67
5	Pajak Rokok	1.865.610.910,00	2.060.958.279,00
Jumlah		33.008.029.465,18	33.073.341.442,62

5.3.1.1.13. Piutang Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	69.095.162,28	738.720.481,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp69.095.162,28 sedangkan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp738.720.481,00.

5.3.1.1.14. Penyisihan Piutang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	(1.785.843.221,02)	(1.691.156.065,77)

Merupakan Saldo dari Penyisihan Piutang Pajak, Penyisihan Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp1.785.843.221,02) dan (1.691.156.065,77) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 119 Penyisihan Piutang

Piutang	Jenis	2023	2022
Penyisihan Piutang Pajak	Piutang Pajak Penerangan Jalan	(2.115.796,58)	(1.901.850,06)
	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	(1.692.172.689,84)	(1.586.596.973,83)
	Piutang Reklame	(12.775,00)	(103.842,00)
	Pajak Mineral Bukan Logam	(8.836.003,83)	(793.980,00)
	Pajak Katering	(20.990,00)	(3.325,00)
	Jumlah Penyisihan Piutang Pajak	(1.703.158.255,25)	(1.589.399.970,89)



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Piutang	Jenis	2023	2022
Penyisihan Piutang Retribusi	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	(13.297.200,00)	(9.230.775,00)
	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	(38.942.730,00)	(66.262.145,00)
	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	(8.960.075,00)	(3.962.900,00)
	Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi	(61.200.005,00)	(79.455.820,00)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Bunga TDF	-	(943.705,96)
	Jasa Pelayanan Kesehatan	(21.472.189,19)	(20.477.879,83)
	Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	(1.800,00)
	Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	(10.971,59)	(10.971,59)
	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	(1.800,00)	(865.917,50)
	Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain Pad Yang Sah	(21.484.960,78)	(22.300.274,88)
Total Penyisihan Piutang		(1.785.843.221,03)	(1.691.156.065,77)

5.3.1.1.15. Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>37.598.400,00</u>	<u>-</u>

Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp37.598.400,00 dan Rp0,00 yang ada pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja atas pembayaran BPJS ketenagakerjaan.

5.3.1.1.16. Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>21.511.033.344,55</u>	<u>15.248.018.576,64</u>

Merupakan saldo persediaan yang dikuasai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Persediaan tersebut bersifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Balangan serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD. Nilai persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

masing sebesar Rp21.511.033.344,55 dan Rp15.248.018.576,64 dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 120 Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Belanja Bahan-Bahan Bangunan & Konstruksi	443.000,00	170.000,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	535.368.300,00	474.546.963,00
Belanja Bahan-Bahan Baku		
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	247.500,00	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.447.860.485,06	7.830.121.910,87
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	126.730.597,00	167.290.120,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	58.283.500,00	1.105.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	204.658.805,00	216.609.709,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.436.500,00	15.334.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	197.468.400,00	221.426.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	4.518.550,00	760.827,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.841.600,00	12.739.800,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.226.000,00	6.741.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.075.000,00	3.660.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.120.000,00	290.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	6.325.668.514,49	5.498.383.689,87
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	45.276.085,00	217.587.673,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	71.249.700,00	295.972.000,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	4.954.624.000,00	
Belanja Natura dan Pakan-Natura	434.053.200,00	84.689.383,90
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	16.427.500,00	91.850.000,00
Belanja Natura dan Pakan Natura dan Pakan Lainnya	67.456.108,00	108.590.000,00
Belanja Komponen-Komponen Lainnya		150.000,00
Jumlah	21.511.033.344,55	15.248.018.576,64

Perhitungan mutasi persediaan tahun 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 121 Perhitungan Saldo Persediaan tahun 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal Tahun 2023 (Saldo per 31 Desember 2022)	15.248.018.576,64
Mutasi Bertambah Persediaan Tahun 2023	
+/- Belanja	224.734.104.821,59
+/- Dana BOS	5.185.803.993,00
+/- Dana BOP	404.154.100,00
+/- Dana JKN	844.944.885,00
+/- Dana BOK	930.338.873,00
+/- Dana BLUD	24.634.649.239,66
+/- Koreksi	2.247.098.038,81
+/- Hibah	2.643.755.675,00
+/- Reklasifikasi	46.506.979,00
+/- Mutasi Antar SKPD	410.862.067,00
Jumlah Mutasi Bertambah	262.082.218.672,06
Mutasi Berkurang Persediaan Tahun 2023	
-/- Mutasi Antar SKPD	410.862.067,00
-/- Reklasifikasi	46.506.979,00
-/- Koreksi	5.386.736.518,07
-/- Hibah	160.400.310.515,00
-/- Pemakaian	89.574.787.825,08
Jumlah Mutasi Berkurang	255.819.203.904,15
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	21.511.033.344,55

- A. Rekapitulasi Belanja Persediaan Tahun Anggaran 2023 per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 122 Rekapitulasi Belanja Persediaan per SKPD Tahun 2023

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.274.513.341,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.073.003.987,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	88.081.117.525,31
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.061.951.300,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	178.878.100,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	552.758.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Nilai (Rp)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.023.331.705,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	70.190.048.405,28
9	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	2.821.634.860,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	363.232.600,00
11	Dinas Perhubungan	671.788.370,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	559.094.100,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.063.608.800,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.710.896.389,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	8.368.209.462,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	937.202.800,00
17	Sekretariat Daerah	13.843.707.188,00
18	Sekretariat DPRD	3.001.911.679,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	973.757.510,00
20	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.476.983.200,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	182.621.950,00
22	Inspektorat	308.165.750,00
23	Kecamatan Lampihong	187.577.900,00
24	Kecamatan Batumandi	229.239.200,00
25	Kecamatan Awayan	192.855.900,00
26	Kecamatan Halong	84.541.200,00
27	Kecamatan Juai	126.686.500,00
28	Kecamatan Paringin	917.894.300,00
29	Kecamatan Tebing Tinggi	64.235.600,00
30	Kecamatan Paringin Selatan	212.656.300,00
Total		224.734.104.821,59

B. Rincian belanja persediaan Dana BOS sebesar Rp5.185.803.993 yang terdiri dari:

Tabel 123 Rekapitulasi Belanja Persediaan Dana BOS Tahun 2023

No.	Nama Rekening	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan & Konstruksi	378.479.460,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	79.263.316,00
3	Belanja Bahan-Bahan Baku	430.000,00
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	17.070.500,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.536.000,00
6	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	117.343.132,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama Rekening	Nilai (Rp)
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.614.999.478,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.333.000,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	685.217.720,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	82.885.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	393.665.845,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.039.796.488,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	139.038.531,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	480.000,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	420.386.790,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	25.195.400,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	82.426.200,00
18	Belanja Obat-Obatan-Obat	99.267.133,00
19	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.190.000,00
20	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	
21	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	
22	Belanja Natura dan Pakan-Natura	800.000,00
23	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	
Total		5.185.803.993,00

C. Rincian belanja persediaan Dana BOP sebesar Rp404.154.100,00 yang terdiri dari:

Tabel 124 Rekapitulasi Belanja Persediaan Dana BOP Tahun 2023

No.	Nama Rekening	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan & Konstruksi	1.725.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.825.000,00
3	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.304.000,00
4	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	82.556.000,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	154.642.000,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31.474.900,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	63.424.200,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	16.016.000,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	4.400.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	700.000,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.676.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama Rekening	Nilai (Rp)
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.827.000,00
14	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.161.000,00
15	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.055.000,00
16	Belanja Natura dan Pakan-Natura	24.268.000,00
Total		404.154.100,00

- D. Rincian belanja persediaan Dana JKN sebesar Rp844.944.885,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 125 Rekapitulasi Belanja Persediaan Dana JKN Tahun 2023

No.	Nama Rekening	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan & Konstruksi	51.878.100,00
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	349.223.705,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.361.500,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	93.075.500,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	165.927.480,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.020.000,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	62.429.500,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.990.000,00
9	Belanja Obat-Obatan-Obat	42.220.600,00
10	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	10.818.500,00
Total		844.944.885,00

- E. Rincian belanja persediaan Dana BOK sebesar Rp930.338.873,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 126 Rekapitulasi Belanja Persediaan Dana BOK Tahun 2023

No.	Nama Rekening	Nilai (Rp)
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.520.250,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.238.475,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	68.963.200,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5.717.900,00
8	Belanja Natura dan Pakan-Natura	813.899.048,00
Total		930.338.873,00

- F. Rincian belanja persediaan BLUD sebesar Rp24.634.649.239,66 merupakan reklasifikasi dari beban barang Dana BLUD dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 127 Rekapitulasi Belanja Persediaan BLUD Dinkes Tahun 2023

No.	Nama Rekening	Nilai (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	544.803.502,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	465.585.581,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	30.000.000,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	251.768.950,00
5	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.606.452.820,82
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	68.228.900,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	871.582.374,00
8	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.859.674.752,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.936.552.359,84
Total		24.634.649.239,66

G. Koreksi Bertambah sebesar Rp2.247.098.038,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 128 Rekapitulasi Koreksi Bertambah Persediaan Tahun 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Catat Baru	73.561.407,00
2	Utang	1.574.327.505,00
3	Reklasifikasi dari Belanja Modal	181.250.400,00
4	Retur Persediaan	70.013.301,81
5	Pengembalian Pinjaman	30.856.174,00
6	Peminjaman Obat dan BMHP	48.129.779,00
7	Koreksi Satuan Terkecil	5.815.953,00
8	Perbaikan Nama Barang	262.351.519,00
9	Diskon Barang	792.000,00
Total		2.247.098.038,81

Adapun penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Catat Baru sebesar Rp73.561.407,00 terdapat pada:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- a. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp55.368.000,00 pada Persediaan Bibit Ternak berasal dari penjualan hewan ternak.
- b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp5.130.000,00 pada Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat karena kurang catat saldo awal 2023.
- c. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sebesar Rp10.543.998,00 karena kurang catat saldo awal 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 129 Rincian Catat Baru BLUD 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.317.223,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	226.775,00
Total		10.543.998,00

- d. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.519.409,00 pada Belanja Obat-obatan-obat karena kurang catat saldo awal 2023.
2. Utang sebesar Rp1.574.327.505,00 terdapat pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 130 Rincian Utang BLUD 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	458.155.976,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.116.171.529,00
Total		1.574.327.505,00

3. Reklasifikasi dari belanja modal sebesar Rp181.250.400,00 terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer.
4. Retur Persediaan sebesar Rp70.013.301,81 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp116.753,00 pada Belanja Bahan Obat-Obatan-Obat yang berasal dari retur PBF.
- b. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sebesar Rp69.896.548,81 terdiri dari:

Tabel 131 Retur Persediaan BLUD 2023

No.	Keterangan	Retur dari PBF Nilai (Rp)	Retur dari Pasien Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	13.319.381,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.079.718,00	55.497.449,81
Total		1.079.718,00	68.816.830,81

5. Pengembalian Pinjaman pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sebesar Rp30.856.174,00 yaitu pada Belanja Bahan Obat-Obatan-Obat sebesar Rp23.849.765,00 dan Belanja Bahan-bahan Lainnya sebesar Rp7.006.409,00 yang berasal dari Rumah Sakit lain.
 6. Peminjaman obat dan BMHP ke Rumah Sakit lain terdapat pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sebesar Rp1.665.000,00 pada Belanja Bahan-bahan Lainnya dan sebesar Rp46.464.779,00 pada Belanja Bahan Obat-Obatan-Obat.
 7. Koreksi Satuan Terkecil terdapat pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sebesar Rp5.553.733,00 pada Belanja Bahan-bahan Lainnya dan sebesar Rp262.220,00 pada Belanja Bahan Obat-Obatan-Obat.
 8. Perbaikan Nama Barang terdapat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp262.351.519,00 pada Belanja Bahan Obat-Obatan-Obat.
 9. Diskon Barang terdapat pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sebesar Rp792.000,00 pada Belanja Obat-obatan-obat.
- H. Hibah sebesar Rp2.643.755.675,00 terdapat pada SKPD berikut ini:
1. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.492.568.575,00 yang terdiri dari:
 - a. Sumber Dana dari IGFPK Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp2.300.572.784,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 132 Rekapitulasi Hibah Persediaan dari IGFPK Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	533.391.024,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	364.600,00
3	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.766.817.160,00
Total		2.300.572.784,00

- b. Sumber Dana dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp191.232.296,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 133 Rekapitulasi Hibah Persediaan dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	16.336.656,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	174.895.640,00
Total		191.232.296,00

- c. Sumber Dana dari *The Global Fund* (Yayasan KNCV Indonesia / YKI) sebesar Rp763.495,00 pada Belanja Bahan-bahan Lainnya.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp143.057.100,00 merupakan Persediaan Barang Cetak Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang hibahnya bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp101.820.000,00 dan dari Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp41.237.100,00.
3. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sebesar Rp8.130.000,00 pada Belanja Bahan Obat-Obatan-Obat yang berasal dari Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan.
- I. Reklasifikasi bertambah terdapat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp46.506.979,00 pada Belanja Bahan-bahan Lainnya.
- J. Mutasi bertambah antar SKPD sebesar Rp410.862.067,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 134 Mutasi Bertambah Antar SKPD

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.779.000,00
2	BLUD Rumah Sakit Daerah	409.083.067,00
Total		410.862.067,00

- K. Mutasi berkurang antar SKPD sebesar Rp410.862.067,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 135 Mutasi Berkurang Antar SKPD

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	409.083.067,00
2	BLUD Rumah Sakit Daerah	1.779.000,00
Total		410.862.067,00

- L. Reklasifikasi berkurang terdapat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp46.506.979,00 pada Belanja Obat-obatan-obat.

- M. Koreksi Berkurang sebesar Rp5.386.736.518,07 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 136 Rekapitulasi Koreksi Berkurang Persediaan Tahun 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	37.970.000,00
2	Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	335.001.350,00
3	Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	6.064.200,00
4	Utang	773.197.846,00
5	Koreksi Expired	627.622.763,43
6	Lebih Catat	6.677.480,00
7	Koreksi Satuan Terkecil	5.815.953,00
8	Perbaikan Nama Barang	262.351.519,00
9	Koreksi Desimal	42,25
10	Retur	34.905.953,38
11	Barang Persediaan yang Rusak	40.185.404,66
12	Peminjaman Barang Persediaan oleh Rumah Sakit lain	20.400.302,10
13	Pengembalian Pinjaman Barang Persediaan ke Rumah Sakit Lain	93.537.374,25



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
14	Realisasi Belanja yang tidak memenuhi kriteria persediaan	3.143.006.330,00
Total		5.386.736.518,07

1. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp37.970.000,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:
 - a. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp36.720.000,00 pada Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/ Bibit Ikan karena kelahiran alami hewan ternak.
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.250.000,00 pada Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga
2. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp335.001.350,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp106.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

***Tabel 137 Rekapitulasi Reklasifikasi ke aset peralatan dan Mesin
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2023***

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	31.000.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	4.000.000,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	71.100.000,00
Total		106.100.000,00

- b. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp10.000.000,00 pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik.
 - c. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp1.755.200,00 pada Belanja Bahan-bahan Lainnya.
 - d. Inspektorat sebesar Rp11.500.000,00 pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer.
 - e. Kecamatan Lampihong sebesar Rp1.004.900,00 pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik.
 - f. Kecamatan Paringin Selatan sebesar Rp10.000.000,00 pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp117.150.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 138 Rekapitulasi Reklasifikasi ke aset peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.000.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	11.364.000,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	5.615.000,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	95.496.250,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.875.000,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.800.000,00
Total		117.150.250,00

- h. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp40.620.650,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 139 Rekapitulasi Reklasifikasi ke aset peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan & Konstruksi	16.221.100,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.899.550,00
3	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	4.500.000,00
Total		40.620.650,00

- i. BLUD Rumah Sakit Daerah sebesar Rp5.791.250,00 pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya.
- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp31.079.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 140 Rekapitulasi Reklasifikasi ke aset peralatan dan Mesin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.816.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	8.981.600,00
3	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	19.281.500,00
Total		31.079.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

3. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.064.200,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:
 - a. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp2.464.200,00 pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.600.000,00 pada Belanja Bahan-Bahan Bangunan & Konstruksi
4. Utang tahun lalu sebesar Rp773.197.846,00 terdapat pada BLUD Rumah Sakit Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 141 Rekapitulasi Utang Tahun Lalu BLUD Rumah Sakit Daerah

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	768.746.746,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.451.100,00
Total		773.197.846,00

5. Koreksi *Expired* sebesar Rp627.622.763,43 terdapat pada:
 - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp345.297.584,40 yang terdiri dari:

Tabel 142 Rekapitulasi Koreksi Expired Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	201.810.140,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	143.487.444,40
Total		345.297.584,40

- b. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp282.325.179,03 yang terdiri dari:

Tabel 143 Rekapitulasi Koreksi Expired BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	139.793.528,55
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	142.531.650,48
Total		282.325.179,03

6. Lebih catat saldo awal terdapat pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp6.677.480,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 144 Rekapitulasi Lebih Catat Saldo Awal BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	908.480,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.769.000,00
Total		6.677.480,00

7. Koreksi Satuan Terkecil terdapat pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp5.815.953,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 145 Rekapitulasi Koreksi Satuan Terkecil BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.553.733,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	262.220,00
Total		5.815.953,00

8. Perbaikan nama barang terdapat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp262.351.519,00 pada Belanja Obat-Obatan-Obat.
9. Koreksi Desimal sebesar Rp42,25 terdapat pada SKPD sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp2,31 terdiri dari:

Tabel 146 Rekapitulasi Koreksi Desimal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,72
2	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1,59
Total		2,31

- b. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp0,28 pada Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.
- c. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp39,66 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 147 Rekapitulasi Koreksi Desimal BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	18,84
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	20,82
Total		39,66

10. Retur ke PBF sebesar Rp34.905.953,38 terdapat pada:

- a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp606.188,63 pada Belanja Obat-Obatan-Obat.
- b. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp34.299.764,75 pada Belanja Obat-Obatan-Obat.

11. Barang Persediaan yang Rusak sebesar Rp40.185.404,66 terdapat pada:

- a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp953.757,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 148 Rekapitulasi Barang Persediaan Rusak Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	20.040,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	933.717,00
Total		953.757,00

- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp12.994.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 149 Rekapitulasi Barang Persediaan Rusak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.414.000,00
2	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.580.000,00
Total		12.994.000,00

- c. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp26.237.647,66 terdiri dari:

Tabel 150 Rekapitulasi Barang Persediaan yang Rusak BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	25.313.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	924.547,66
Total		26.237.647,66

12. Peminjaman barang persediaan oleh Rumah Sakit Lain sebesar Rp20.400.302,10 terdapat pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:

Tabel 151 Rekapitulasi Peminjaman Barang Persediaan Oleh Rumah Sakit Lain pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.772.754,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	8.627.548,10
Total		20.400.302,10

13. Pengembalian Pinjaman ke Rumah Sakit Lain sebesar Rp93.537.374,25 terdapat pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:

Tabel 152 Rekapitulasi Pengembalian Pinjaman Barang Persediaan ke Rumah Sakit Lain pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.665.000,00
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	91.872.374,25
Total		93.537.374,25

14. Realisasi Belanja Tidak Memenuhi Kriteria Persediaan sebesar Rp3.143.006.330,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 153 Rekapitulasi Belanja Tidak Memenuhi Kriteria Persediaan Tahun 2023

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.774.200,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	41.600.000,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.023.296.130,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	29.250.000,00
5	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	43.086.000,00
Total		3.143.006.330,00

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp5.774.200,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.715.400,00 berasal dari Belanja Fotocopy.
 - 2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp1.558.800,00 berasal dari Belanja Fotocopy.
 - 3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp500.000,00 berasal dari Belanja Fotocopy.
- b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp41.600.000,00 terdapat pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja berasal dari belanja penggandaan.
- c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp3.023.296.130,00 yang terdiri dari:
- 1) Berasal dari Belanja Sewa yang direalisasikan pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp257.658.750,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 2) Berasal dari Belanja Jasa Publikasi yang direalisasikan pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp5.000.000,00 terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
 - 3) Berasal dari Belanja Fotocopy/penjilidan sebesar Rp2.760.637.380,00 terdapat pada:

Tabel 154 Belanja Cetak (Fotocopy/Penjilidan) SKPD

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	452.370.100,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	282.415.600,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	255.746.400,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35.014.000,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	64.438.700,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.688.300,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	150.503.005,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	215.366.600,00
9	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	36.824.300,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.449.600,00
11	Dinas Perhubungan	13.037.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Nilai (Rp)
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	64.592.400,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	41.573.800,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	55.575.400,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	21.940.550,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	83.976.000,00
17	Sekretariat Daerah	305.592.200,00
18	Sekretariat DPRD	77.361.425,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	144.184.400,00
20	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	279.615.700,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.882.200,00
22	Inspektorat	31.863.200,00
23	Kecamatan Lampihong	11.278.000,00
24	Kecamatan Batumandi	19.123.500,00
25	Kecamatan Awayan	10.254.400,00
26	Kecamatan Halong	2.887.300,00
27	Kecamatan Juai	1.992.000,00
28	Kecamatan Paringin	15.621.200,00
29	Kecamatan Tebing Tinggi	2.802.000,00
30	Kecamatan Paringin Selatan	32.668.100,00
Total		2.760.637.380,00

2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik sebesar Rp29.250.000,00 terdapat pada:
 - 1) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp23.700.000,00 karena belanja jasa yang direalisasikan di Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik.
 - 2) Inspektorat sebesar Rp5.550.000,00 karena belanja pemeliharaan yang direalisasikan di Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik.
3. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp43.086.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berasal dari Jasa Tenaga Laboratorium.

N. Rincian Beban Hibah Persediaan per SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 155 Rekapitulasi Beban Hibah Persediaan Tahun 2023

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.272.701.791,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	59.195.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	86.511.719.223,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.946.069.100,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	7.000.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.720.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	898.108.700,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	47.091.078.450,00
9	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	289.071.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	229.102.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.509.596.700,00
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.730.547.689,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7.530.242.862,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.758.000,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.000.000,00
16	Kecamatan Awayan	2.600.000,00
17	Kecamatan Paringin	276.800.000,00
18	Kecamatan Paringin Selatan	1.000.000,00
Total		160.400.310.515,00

O. Rincian Pemakaian Persediaan per SKPD sebagai berikut:

Tabel 156 Rekapitulasi Pemakaian Persediaan per SKPD Tahun 2023

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.782.074.150,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.056.712.395,09
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.324.013.100,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	291.984.173,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	97.907.600,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	510.917.900,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	951.479.100,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	17.742.834.450,00
9	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	2.480.045.044,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	728.565.354,00
11	Dinas Perhubungan	658.857.270,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Nilai (Rp)
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	265.408.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	512.606.300,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	882.933.600,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	811.569.750,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	830.413.700,00
17	Sekretariat Daerah	13.539.583.288,00
18	Sekretariat DPRD	2.930.938.299,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	823.225.610,00
20	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.006.889.200,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	170.128.750,00
22	Inspektorat	257.935.865,00
23	Kecamatan Lampihong	174.946.200,00
24	Kecamatan Batumandi	209.968.900,00
25	Kecamatan Awayan	179.026.500,00
26	Kecamatan Halong	81.692.800,00
27	Kecamatan Juai	124.840.500,00
28	Kecamatan Paringin	625.179.400,00
29	Kecamatan Tebing Tinggi	59.851.600,00
30	Kecamatan Paringin Selatan	168.895.300,00
31	BLUD Rumah Sakit Daerah	23.293.363.726,99
Total		89.574.787.825,08

P. Rincian Persediaan Akhir Tahun 2023 per SKPD sebagai berikut:

Tabel 157 Rekapitulasi Saldo Persediaan Per SKPD Tahun 2023

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83.970.992,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.169.324.941,58
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	750.900,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.032.500,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	688.300,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.084.900,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	51.626.800,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	6.306.181.883,00
9	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	28.773.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Nilai (Rp)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	268.037.405,00
11	Dinas Perhubungan	610.100,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	521.300,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	452.000,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9.546.000,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.585.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	899.000,00
17	Sekretariat Daerah	2.615.700,00
18	Sekretariat DPRD	1.762.955,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	897.500,00
20	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	201.704.900,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.459.000,00
22	Inspektorat	9.222.125,00
23	Kecamatan Lampihong	488.800,00
24	Kecamatan Batumandi	564.800,00
25	Kecamatan Awayan	1.800.000,00
26	Kecamatan Halong	436.100,00
27	Kecamatan Juai	-
28	Kecamatan Paringin	390.600,00
29	Kecamatan Tebing Tinggi	2.107.600,00
30	Kecamatan Paringin Selatan	211.900,00
31	BLUD Rumah Sakit Daerah	8.333.285.542,97
Total		21.511.033.344,55

Rincian persediaan per jenis persediaan dan per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 7.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	288.958.288.441,29	236.852.826.590,57

Jumlah Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp288.958.288.441,29 dan Rp236.852.826.590 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 158 Investasi Jangka Panjang

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Investasi Non Permanen	204.818.000,00	204.818.000,00
2	Investasi Permanen	288.753.470.441,29	236.648.008.590,57
Total		288.958.288.441,29	236.852.826.590,57

5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	204.818.000,00	204.818.000,00

Merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp204.818.000,00 dan Rp204.818.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 159 Investasi Non Permanen

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Investasi Kepada BUMD	204.818.000,00	204.818.000,00
2	Dana Bergulir	-	-
Total		204.818.000,00	204.818.000,00

5.3.1.2.1.1. Investasi Kepada BUMD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	204.818.000,00	204.818.000,00

Investasi Kepada BUMD Kabupaten Balangan berasal dari koperasi-koperasi di Balangan. Saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp204.818.000,00 dan Rp204.818.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 160 Penyertaan Modal Koperasi

No.	Nama Koperasi	Nilai Penyertaan TA 2023 (Rp)	Realisasi Pengembalian Pokok TA 2023 (Rp)	Nilai Penyertaan TA 2022 (Rp)
1	KSU Sanggam Mandiri	100.000.000,00	-	100.000.000,00
2	KUD Kita	15.988.000,00	-	15.988.000,00
3	Koperasi Wanita Sinar	45.000.000,00	-	45.000.000,00
4	Koperasi PNPM Pedesaan	43.830.000,00	-	43.830.000,00
Jumlah		204.818.000,00	-	204.818.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Koperasi, Usaha Kecil/ Mikro dan Menengah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan melakukan Penyertaan Modal kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Penyertaan Modal ditetapkan dalam Surat Perjanjian Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Bupati Balangan dan Ketua Koperasi Penerima Penyertaan Modal. Sesuai perjanjian, Penyertaan Modal tersebut harus dikembalikan oleh Koperasi dengan cara mengangsur selama 54 bulan terhitung tanggal 21 November 2011 sampai dengan 01 Mei 2016.

Atas Penyertaan Modal sebesar Rp100.000.000,00 pada KSU Sanggam Mandiri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Petikan Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bjm tanggal 10 April 2018 telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang berinisial MY (Mantan Ketua KSU SM) dengan:

- a. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; dan
- b. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

5.3.1.2.1.2. Dana Bergulir	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	-	-

Dana Bergulir berupa bibit ternak sapi dan kambing yang digulirkan mulai dari Tahun 2006. Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00. Saldo per 31 Desember 2021 didapat dari nilai Piutang *bruto* sebesar Rp665.500.000,00 dengan penyisihan sebesar Rp665.500.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 161 Dana Bergulir

No.	Tahun	Jenis Ternak	Jenis Kelamin	Nilai Dana Bergulir (Bruto) (Rp)	Penyisihan (Rp)	Not Realizable Value
1	2006	Sapi	Betina	140.400.000,00	140.400.000,00	-
2	2006	Kambing	Jantan	1.150.000,00	1.150.000,00	-
3	2006	Kambing	Betina	1.150.000,00	1.150.000,00	-
4	2007	Sapi	Jantan	100.100.000,00	100.100.000,00	-
5	2007	Sapi	Betina	109.850.000,00	109.850.000,00	-
6	2007	Kambing	Jantan	1.150.000,00	1.150.000,00	-
7	2007	Kambing	Betina	2.300.000,00	2.300.000,00	-
8	2008	Sapi	Jantan	100.100.000,00	100.100.000,00	-
9	2008	Sapi	Betina	77.350.000,00	77.350.000,00	-
10	2010	Sapi	Betina	131.950.000,00	131.950.000,00	-
				665.500.000,00	665.500.000,00	-

Penyajian Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022 tidak berdasarkan harga perolehan ternak, akan tetapi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara peternak dengan Dinas Pertanian. Mutasi sapi mati dan majir/potong paksa belum dilengkapi Surat Keputusan Penghapusan. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8.

Pemerintah Kabupaten Balangan telah menerapkan penyisihan atas saldo dana bergulir sejak Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kebijakan Akuntansi tentang Investasi Non Permanen atas Penggaduhan Hewan Ternak.

5.3.1.2.2. Investasi Permanen	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	288.753.470.441,29	236.648.008.590,57

Merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp288.753.470.441,29 dan Rp236.648.008.590,57.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	288.753.470.441,29	236.648.008.590,57

Merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalsel, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Paringin, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perusahaan Daerah PT. Asabaru Daya Cipta Lestari Balangan per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 162 Penyertaan Modal Bank dan BUMD

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Bank Kalsel	178.397.600.000,00	143.397.600.000,00
2	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Paringin	20.671.697.713,61	15.366.094.535,91
3	PDAM Balangan	69.684.172.727,68	67.884.314.054,66
4	PT. Asabaru Daya Cipta Lestari	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Jumlah		288.753.470.441,29	236.648.008.590,57

a. Bank Kalsel

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan pada Bank Kalsel per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp178.397.600.000,00 dan Rp143.397.600.000,00. Penyajian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan pada Bank Kalsel menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar 9,09%. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Balangan menambahkan penyertaan modal ke Bank Kasel sebesar Rp35.000.000.000,00 pada tanggal 07 Maret 2023 dengan SP2D Nomor 00301/SP2D-LS/BUD/BPKPAD/2023. Penambahan penyertaan modal pada Bank Kalsel didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

b. PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paringin

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan pada PD. BPR Paringin-Balangan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.671.697.713,61 dan Rp15.366.094.535,91. Pada tahun 2023 Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Kabupaten Balangan menambahkan penyertaan modal ke PD. BPR Paringin-Balangan sebesar Rp5.000.000.000,00 pada tanggal 03 Februari 2023 dengan SP2D Nomor 15.12/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/02/2023. Penambahan penyertaan modal pada PD BPR Paringin didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sanggam Cipta Sejahtera, sehingga rincian saldo Penyertaan Modal sebagai berikut:

Tabel 163 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan pada PD BPR

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo awal 1 Januari	15.366.094.535,91	10.061.578.409,33
2	-/- Koreksi Penerimaan Deviden	(343.452.799,00)	(335.814.806,00)
3	-/- Koreksi Saldo Awal	-	-
4	+/- Porsi laba (rugi) Tahun berjalan	649.055.976,70	640.330.932,58
5	+/- Penyertaan Modal	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember		20.671.697.713,61	15.366.094.535,91

Perhitungan Laba (Rugi) Tahun Anggaran 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9.

c. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan pada PDAM Balangan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp69.684.172.727,68 dan Rp67.884.314.054,66. Persentase kepemilikan per 31 Desember 2023 adalah sebesar 87,84%. Penilaian Penyertaan Modal pada PDAM Balangan per 31 Desember 2023 dan 2022 dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 164 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Balangan

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a	Saldo awal 1 Januari	67.884.314.054,66	70.367.830.677,88
b	Mutasi Tahun 2023:		
	+/- Porsi laba (rugi) Tahun berjalan	1.799.858.673,02	(2.483.422.101,99)



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	-/- Koreksi atas saldo <i>Audited</i> per 31 Desember	-	-
	-/- Koreksi atas Saldo Awal	-	(94.521,23)
Saldo Akhir per 31 Desember		69.684.172.727,68	67.884.314.054,66

Perhitungan porsi rugi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Balangan atas rugi Tahun 2023 adalah sesuai persentase kepemilikan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan pada PDAM Balangan sebesar 87,84%, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 165 Porsi Laba yang Diakui Sesuai Persentase Kepemilikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Balangan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a	Laba (rugi) Tahun berjalan (Tahun 2023)	1.799.858.673,02
b	Porsi laba (rugi) yang diakui	
	87,84% x Rp2.049.019.436,50	1.799.858.673,02

Perhitungan laba/rugi lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 10.

d. PT. Asabaru Daya Cipta Lestari

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan pada PT. Asabaru Daya Cipta Lestari per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Rp10.000.000.000,00. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Balangan melakukan penyertaan modal awal ke PT. Asabaru Daya Cipta sebesar Rp10.000.000.000,00 pada tanggal 07 Maret 2023 dengan SP2D Nomor 00302/SP2D-LS/BUD/BPKPAD/2023. Penyertaan modal pada PT. Asabaru Daya Cipta Lestari didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Asabaru Dayacipta Lestari. Adapun rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 166 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan pada PT. Asabaru Daya Cipta Lestari

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo awal 1 Januari	10.000.000.000,00	-
2	-/- Koreksi Penerimaan Deviden	-	-
3	-/- Koreksi Saldo Awal	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4	+/- Porsi laba (rugi) Tahun berjalan	-	-
5	+/- Penyertaan Modal	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember		20.000.000.000,00	10.000.000.000,00

5.3.1.3. Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	2.496.906.176.173,42	2.286.817.671.552,84

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.496.906.176.173,42 dan Rp2.286.817.671.552,84 yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 167 Aset Tetap (Netto) per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Tanah	449.098.118.527,00	462.268.632.239,00
2	Peralatan dan Mesin	669.968.804.651,00	531.210.747.855,00
3	Gedung dan Bangunan	1.084.988.256.210,00	1.016.496.287.826,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.379.190.811.108,40	2.135.209.568.350,00
5	Aset Tetap Lainnya	9.341.290.628,00	9.180.696.428,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.462.602.214,02	5.289.342.748,00
7	Akumulasi Penyusutan	(2.108.143.707.165,00)	(1.872.837.603.893,16)
Saldo akhir per 31 Desember		2.496.906.176.173,42	2.286.817.671.552,84

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp210.088.504.620,58 dari saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 168 Kenaikan/Penurunan Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang	
				(Rp)	%
1	Tanah	449.098.118.527,00	462.268.632.239,00	(13.170.513.712,00)	
2	Peralatan dan Mesin	669.968.804.651,00	531.210.747.855,00	138.758.056.796,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang	
				(Rp)	%
3	Gedung dan Bangunan	1.084.988.256.209,00	1.016.496.287.826,00	68.491.968.383,00	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.379.190.811.108,42	2.135.209.568.350,00	243.981.242.758,42	
5	Aset Tetap Lainnya	9.341.290.628,00	9.180.696.428,00	160.594.200,00	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.462.602.215,00	5.289.342.748,00	7.173.259.467,00	
7	Akumulasi Penyusutan	(2.108.143.707.165,00)	(1.872.837.603.893,16)	(235.306.103.268,84)	
Saldo Akhir per 31 Desember		2.496.906.176.173,42	2.286.817.671.552,84	210.088.504.271,58	

Dari tabel di atas dapat dikemukakan bahwa Tanah mengalami penurunan sebesar Rp13.170.513.712,00 Peralatan dan Mesin meningkat sebesar Rp138.758.056.796,00, Gedung dan Bangunan meningkat sebesar Rp68.491.968.383,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan meningkat sebesar Rp243.981.242.758,42, Aset Tetap Lainnya meningkat sebesar Rp160.594.200,00, Konstruksi Dalam Pengerjaan meningkat sebesar Rp7.173.259.467,00.

5.3.1.3.1. Tanah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	449.098.118.527,00	462.268.632.239,00

Tanah yang termasuk dalam Aset Tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam klasifikasi Tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Saldo Tanah pada posisi per 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp449.098.118.527,00 dan Rp462.268.632.239,00 Saldo Tanah per 31 Desember 2023 mengalami pengurangan sebesar Rp13.170.513.712,00 dari saldo Tanah per 31 Desember 2022, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 169 Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal Tahun 2023 (Saldo per 31 Desember 2022)	462.268.632.239,00
Mutasi Penambahan Tanah Tahun 2023:	
+/- Belanja Modal	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
+/- Hibah	166.260.000,00
+/- Koreksi bertambah	-
+/- Catat Baru	3.721.618.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	3.887.878.000,00
Mutasi Pengurangan Tanah Tahun 2023:	
-/- Reklasifikasi Berkurang	17.058.391.712,00
Jumlah Mutasi Berkurang	17.058.391.712,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	449.098.118.527,00

Rincian mutasi tanah disajikan pada Lampiran 11.

Penambahan dan Pengurangan Nilai Tanah Kabupaten Balangan disebabkan oleh beberapa hal yang diuraikan sebagai berikut:

Penambahan Nilai Tanah Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar Rp3.887.878.000,00 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

A. Penambahan Saldo Tanah Berdasarkan Hibah sebesar Rp166.260.000,00

Rekapitulasi penambahan saldo tanah berdasarkan hibah tanah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 170 Rekapitulasi Penambahan Saldo Tanah dari Hibah

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Kecamatan Paringin	88.000.000,00
2	Kecamatan Paringin Selatan	78.260.000,00
Total		166.260.000,00

Rincian penambahan saldo tanah berdasarkan hibah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan saldo tanah pada kecamatan Paringin yang bersumber dari hibah oleh masyarakat dalam rangka alas pembangunan jalan lingkungan Rp88.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah Jalan RT 08 kelurahan paringin timur dengan nomor register 943012 dan nilai perolehan sebesar Rp44.000.000,00.
 - b. Tanah Jalan RT 10 kelurahan paringin timur dengan nomor register 943013 dan nilai perolehan sebesar Rp44.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

2. Penambahan saldo tanah pada kecamatan Paringin Selatan yang bersumber dari hibah oleh masyarakat dalam rangka alas pembangunan jalan usaha tani dan bronjong sebesar Rp78.260.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jalan Usaha Tani RT.08 dengan nomor register 943007 dan nilai perolehan sebesar Rp26.250.000,00.
 - b. Jalan Usaha Tani RT.09 dengan nomor register 943008 dan nilai perolehan sebesar Rp10.850.000,00.
 - c. Jalan Usaha Tani RT.11 dengan nomor register 943009 dan nilai perolehan sebesar Rp21.000.000,00.
 - d. Jalan Usaha Tani RT.13 dengan nomor register 943010 dan nilai perolehan sebesar Rp14.000.000,00.
 - e. Bronjong Rt 6 dengan nomor register 943014 dan nilai perolehan sebesar Rp6.160.000,00.

B. Penambahan Saldo Tanah Berdasarkan Catat Baru sebesar Rp3.721.618.000,00

Penambahan Tanah yang berasal dari Catat Baru tahun 2023 merupakan merupakan aset yang diperoleh dari masa lampau berdasarkan hasil penelusuran SKPD dan belum tercatat. Dalam rangka pengamanan aset Pemerintah Daerah mengakomodir dan mengakui aset tetap berupa tanah yang belum tercatat dimaksud dalam Kartu Inventaris Barang dengan asal usul catat baru. Selanjutnya Nilai Jual Objek Pajak pada lokasi Aset Tanah dimaksud dikalikan dengan luasan tanah sebagai nilai perolehan wajar untuk dicatat pada Kartu Inventaris Barang SKPD. Rincian penambahan saldo tanah berdasarkan catat baru pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 171 Rekapitulasi Penambahan Saldo Tanah dari Catat Baru

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.721.618.000,00
Total		

Penambahan Saldo Tanah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan bersumber dari catat baru atas hasil identifikasi fisik aset yang belum ditemukan pencatatan pada Kartu Inventarisasi Barang berupa Tanah Kantor BPP Juai dengan nomor register 943006 dan nilai perolehan sebesar Rp3.721.618.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Pengurangan Nilai Tanah Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar Rp17.058.391.712,00 disebabkan karena reklasifikasi berkurang dengan rincian SKPD sebagai berikut:

Rekapitulasi pengurangan saldo tanah berdasarkan reklasifikasi berkurang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 172 Rekapitulasi Pengurangan Saldo Tanah karena Reklasifikasi Berkurang

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	592.998.792,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	15.404.048.000,00
3	Sekretariat Daerah	1.061.344.920,00
	Total	17.058.391.712,00

Rincian reklasifikasi berkurang aset Tanah ke aset lain-lain SKPD pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan saldo Tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disebabkan karena reklasifikasi berkurang Tanah serta bertambah pada Aset Lain-lain golongan Tanah berupa Tanah SLB Paringin dengan nomor register 943011 dan nilai perolehan sebesar Rp592.998.792,00 dalam rangka objek hibah kepada pemerintah provinsi dalam rangka menyelaraskan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
2. Pengurangan Saldo Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman disebabkan karena reklasifikasi berkurang Tanah serta bertambah pada Aset Lain-lain golongan Tanah sebesar Rp15.404.048.000,00.
3. Pengurangan Saldo Tanah pada Sekretariat Daerah bersumber dari reklasifikasi berkurang tanah dan bertambah pada aset lain-lain golongan tanah sebesar Rp1.061.344.920,00 yang menjadi objek hibah kepada instansi vertikal dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah Kantor UKK Migrasi kelas I TPI Banjarmasin Kabupaten balangan (Eks. Dinas Koperasi) dengan nomor register 4156 dan nilai perolehan sebesar Rp944.319.620,00.
 - b. Tanah Perkantoran dengan nomor register 929918 dan nilai perolehan sebesar Rp117.025.300,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	669.968.804.651,00	531.210.747.855,00

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, memenuhi batas nilai kapitalisasi, dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan Mesin pada posisi per 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing adalah sebesar Rp669.968.804.651,00 dan Rp531.210.747.855,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 173 Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal Tahun 2023 (Saldo per 31 Desember 2023)	531.210.747.855,00
Mutasi Bertambah Peralatan dan Mesin Tahun 2023	
• Belanja Modal	161.050.737.928,00
• Hibah	69.500.000,00
• Catat Baru	3.400.000,00
• Reklasifikasi Bertambah	1.018.881.000,00
• Belanja Barang dan Jasa	342.801.350,00
Jumlah Mutasi Bertambah	162.485.320.278,00
Mutasi Berkurang Peralatan dan Mesin Tahun 2023	
○ Reklasifikasi Berkurang	22.947.376.522,00
○ Koreksi Berkurang	779.886.960,00
Jumlah Mutasi Berkurang	23.727.263.482,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	669.968.804.651,00

Perhitungan mutasi Peralatan dan Mesin tahun 2023 selengkapnya dilihat pada Lampiran 12.

Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar Rp162.485.320.278,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

A. Penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp161.050.737.928,00

Rekapitulasi penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Belanja Modal pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 174 Rekapitulasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023

No.	SKPD	Belanja Modal (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.373.214.862,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.082.365.500,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36.723.258.635,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	193.081.500,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.717.785.385,00
6	Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	225.567.500,00
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	1.064.402.000,00
8	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	6.243.826.861,00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	484.545.900,00
10	Dinas Perhubungan	21.286.340.795,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	182.021.800,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	136.545.500,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4.117.118.184,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	207.222.300,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	662.212.550,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.043.291.206,00
17	Sekretariat Daerah	29.290.190.150,00
18	Sekretariat Dprd	3.619.097.900,00
19	Kecamatan Lampihong	10.201.600,00
20	Kecamatan Batumandi	432.884.400,00
21	Kecamatan Awayan	343.083.000,00
22	Kecamatan Halong	160.271.750,00
23	Kecamatan Tebing Tinggi	135.326.500,00
24	Kecamatan Juai	105.035.000,00
25	Kecamatan Paringin	1.086.670.300,00
26	Kecamatan Paringin Selatan	617.562.500,00
27	Inspektorat	2.713.466.000,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.526.080.000,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6.952.441.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Belanja Modal (Rp)
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	315.627.350,00
Total		161.050.737.928,00

B. Penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Hibah sebesar Rp69.500.000,00

Rekapitulasi penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Hibah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Hibah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan hibah bertambah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp20.000.000,00 diperoleh dari Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Reach In Frezzer (Vaccine Carrier RCW2) dengan nomor register 1650195 dan nilai perolehan sebesar Rp10.000.000,00.
 - b. Reach In Frezzer (Vaccine Carrier RCW2) dengan nomor register 1650196 dan nilai perolehan sebesar Rp10.000.000,00.
2. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diterima pemerintah daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Perahu Polyethelene merk Keamen dengan nomor register 1032234 sebesar Rp49.500.000,00

C. Penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Catat Baru sebesar Rp3.400.000,00

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari aset yang memang milik pemerintah daerah namun belum dicatat dalam daftar barang milik daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan status catat baru yang mana berdasarkan identifikasi tahun perolehan 2017 berupa Meja Kerja dengan nomor register 1032194 sebesar Rp3.400.000,00.

D. Penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Reklasifikasi Bertambah sebesar Rp1.018.881.000,00

Rekapitulasi penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Reklasifikasi Bertambah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 175 Rekapitulasi Reklasifikasi Bertambah Peralatan dan Mesin Tahun 2023

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Reklasifikasi Bertambah dari Gedung dan Bangunan	31.425.000,00
2	Reklasifikasi Bertambah dari Aset Lain-lain	49.280.000,00
3	Reklasifikasi Bertambah dari Aset Tetap Lainnya	30.676.000,00
4	Reklasifikasi Bertambah dari Jalan Irigasi dan Jaringan	907.500.000,00
Total		1.018.881.000,00

Rincian penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Reklasifikasi Bertambah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Bertambah dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp31.425.000,00 berdasarkan reklasifikasi bertambah peralatan dan mesin dan berkurang dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp31.425.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133888 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 - b. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133889 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 - c. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133890 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 - d. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133891 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 - e. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133892 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 - f. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133893 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 - g. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133894 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 - h. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133895 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 - i. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133896 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 - j. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133897 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- k. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133898 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
- l. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133899 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
- m. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133900 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
- n. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133901 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
- o. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133902 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
- p. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133903 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
- q. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133904 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.536,00.
- 2. Reklasifikasi bertambah dari Aset Lain-lain pada Kecamatan Paringin Selatan berupa Mesin Pompa Portable dengan nomor register 6282 dan nilai perolehan sebesar Rp49.280.000,00 disebabkan aset tersebut dari kondisi rusak telah berubah menjadi baik dan dapat difungsikan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan.
- 3. Reklasifikasi bertambah dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp30.676.000,00 terdapat pada:
 - a. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp24.900.000,00 berasal dari kesalahan penganggaran berupa Drone (kamera udara) dengan nomor register 1033013.
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa *Loudspeaker (Loudspeaker)* dengan nomor register 1032643 dan nilai perolehan sebesar Rp5.776.000,00.
- 4. Reklasifikasi bertambah dari Jalan Irigasi dan Jaringan terdapat pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp907.500.000,00 disebabkan kesalahan penganggaran terhadap pengadaan sebagai berikut:
 - a. Mesin Pencacah Plastik dengan nomor register 1031859 dan nilai perolehan sebesar Rp39.000.000,00.
 - b. Mesin Pencacah Plastik dengan nomor register 1031860 dan nilai perolehan sebesar Rp39.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- c. Mesin Pencacah Plastik dengan nomor register 1031861 dan nilai perolehan sebesar Rp39.000.000,00.
- d. Mesin Pencacah Plastik dengan nomor register 1031862 dan nilai perolehan sebesar Rp39.000.000,00.
- e. Mesin Pencacah Plastik dengan nomor register 1031863 dan nilai perolehan sebesar Rp39.000.000,00.
- f. Mesin Press Plastik dengan nomor register 1031864 dan nilai perolehan sebesar Rp44.000.000,00.
- g. Mesin Press Plastik dengan nomor register 1031865 dan nilai perolehan sebesar Rp44.000.000,00.
- h. Mesin Press Plastik dengan nomor register 1031866 dan nilai perolehan sebesar Rp44.000.000,00.
- i. Mesin Press Plastik dengan nomor register 1031867 dan nilai perolehan sebesar Rp44.000.000,00.
- j. Mesin Press Plastik dengan nomor register 1031868 dan nilai perolehan sebesar Rp44.000.000,00.
- k. Saringan Besi dengan nomor register 1050230 dan nilai perolehan sebesar Rp98.500.000,00.
- l. Saringan Besi dengan nomor register 1050231 dan nilai perolehan sebesar Rp98.500.000,00.
- m. Saringan Besi dengan nomor register 1050232 dan nilai perolehan sebesar Rp98.500.000,00.
- n. Saringan Besi dengan nomor register 1050233 dan nilai perolehan sebesar Rp98.500.000,00.
- o. Saringan Besi dengan nomor register 1050234 dan nilai perolehan sebesar Rp98.500.000,00.

E. Penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp342.801.350,00

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja barang milik daerah yang dianggarkan dan direalisasikan melalui rekening Belanja Barang dan Jasa, namun memenuhi nilai kriteria aset sehingga harus dicatat dalam daftar aset daerah. Terdapat pada 9 (sembilan) SKPD, adapun rincian penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

1. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklasifikasi Barang dan Jasa disebabkan karena kesalahan penganggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Rp106.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Handy Talky (HT) (Merk : HT X One) dengan nomor register 1034737 dengan nilai perolehan sebesar Rp800.000,00.
 - b. Handy Talky (HT) (Merk : HT X One) dengan nomor register 1034738 dengan nilai perolehan sebesar Rp800.000,00.
 - c. Handy Talky (HT) (Merk : HT X One) dengan nomor register 1034739 dengan nilai perolehan sebesar Rp800.000,00.
 - d. Handy Talky (HT) (Merk : HT X One) dengan nomor register 1034740 dengan nilai perolehan sebesar Rp800.000,00.
 - e. Handy Talky (HT) (Merk : HT X One) dengan nomor register 1034741 dengan nilai perolehan sebesar Rp800.000,00.
 - f. External/ Portable Hardisk (Merk : Extreme) dengan nomor register 1038578 dengan nilai perolehan sebesar Rp3.000.000,00.
 - g. External/ Portable Hardisk (Merk : Extreme) dengan nomor register 1038579 dengan nilai perolehan sebesar Rp3.000.000,00.
 - h. Karpet dengan nomor register 1038992 dengan nilai perolehan sebesar Rp71.100.000,00.
 - i. PC Unit (rakitan) dengan nomor register 1651468 dengan nilai perolehan sebesar Rp25.000.000,00
2. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklasifikasi Barang dan Jasa disebabkan karena kesalahan penganggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp38.879.100,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Papan Visual/Papan Nama (Logo Akrilik Pemkab Balangan dan BPBD Kab. Balangan) dengan nomor register 1041570 dengan nilai perolehan sebesar Rp3.500.000,00.
 - b. Papan Visual/Papan Nama (Logo Akrilik Pemkab Balangan dan BPBD Kab. Balangan) dengan nomor register 1041571 dengan nilai perolehan sebesar Rp3.500.000,00.
 - c. Baterai Drone dengan nomor register 1032118 dengan nilai perolehan sebesar Rp3.900.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- d. Baterai Drone dengan nomor register 1032119 dengan nilai perolehan sebesar Rp3.900.000,00.
 - e. Lemari Es (Kulkas 2 pintu) dengan nomor register 1032061 dengan nilai perolehan sebesar Rp4.490.800,00.
 - f. Lemari Es (Kulkas 2 pintu) dengan nomor register 1032062 dengan nilai perolehan sebesar Rp4.490.800,00.
 - g. Papan Nama Ruangan dengan nomor register 1651405 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.116.500,00
 - h. Papan Nama Ruangan dengan nomor register 1651406 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.116.500,00
 - i. Papan Nama Ruangan dengan nomor register 1651407 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.116.500,00
 - j. Papan Nama Ruangan dengan nomor register 1651408 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.116.500,00
 - k. Papan Nama Ruangan dengan nomor register 1651409 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.116.500,00
 - l. Papan Nama Ruangan dengan nomor register 1651410 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.116.500,00
 - m. Papan Nama Ruangan dengan nomor register 1651411 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.116.500,00
 - n. Papan Nama Ruangan dengan nomor register 1651412 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.116.500,00
 - o. Papan Nama Ruangan dengan nomor register 1651413 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.116.500,00
 - p. Papan Nama Ruangan dengan nomor register 1651414 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.116.500,00
 - q. Papan Nama Ruangan dengan nomor register 1651415 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.116.500,00
 - r. UPS dengan nomor register 1651416 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.816.000,00
3. Penambahan Saldo aset peralatan dan mesin pada Inspektorat Kabupaten bersumber dari pengadaan pada belanja barang dan jasa sebesar Rp11.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Hardisk Sebanyak 5 Unit dengan nomor register 1051872 dan nilai perolehan sebesar Rp2.300.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- b. Hardisk Sebanyak 5 Unit dengan nomor register 1051873 dan nilai perolehan sebesar Rp2.300.000,00.
 - c. Hardisk Sebanyak 5 Unit dengan nomor register 1051874 dan nilai perolehan sebesar Rp2.300.000,00.
 - d. Hardisk Sebanyak 5 Unit dengan nomor register 1051875 dan nilai perolehan sebesar Rp2.300.000,00.
 - e. Hardisk Sebanyak 5 Unit dengan nomor register 1051876 dan nilai perolehan sebesar Rp2.300.000,00
4. Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Kecamatan Paringin Selatan bersumber dari Reklasifikasi dari barang dan jasa karena kesalahan penganggaran berupa CCTV - Camera Control TelevisionSystem dengan nomor register 1147794 dan nilai perolehan sebesar Rp10.000.000,00
 5. Penambahan saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan disebabkan reklasifikasi bertambah peralatan dan mesin yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa karena kesalahan penganggaran berupa Pompa Air dengan nomor register 1649538 dan nilai perolehan sebesar Rp1.755.200,00
 6. Penambahan Saldo Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Lampihong diperoleh dari reklasifikasi barang dan jasa karena kesalahan penganggaran belanja berupa Lampu dengan nomor register 1046559 dan nilai perolehan sebesar Rp1.004.900,00.
 7. Penambahan Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja diperoleh dari reklasifikasi barang dan jasa karena kesalahan penganggaran belanja berupa Neon Box Nama Dinas dengan nomor register 1650518 dan nilai perolehan sebesar Rp10.000.000,00.
 8. Penambahan Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diperoleh dari reklasifikasi barang dan jasa sebesar Rp117.150.250,00 dengan rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran 13.
 9. Penambahan Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diperoleh dari reklasifikasi barang dan jasa Rp46.411.900,00 dengan rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran 14.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar Rp23.727.263.482,00 disebabkan sebagai berikut:

A. Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Reklasifikasi sebesar Rp22.947.376.522,00 dengan rincian diuraikan sebagai berikut:

1. Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan reklasifikasi berkurang dari Peralatan dan Mesin dan bertambah pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp203.057.660,00 terdapat pada 3 (tiga) SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi bertambah pada Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp171.577.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kerangka Baliho (Kerangka untuk space baliho dari besi/baja/logam dengan tiang baja dan pondasi beton) dengan nomor register 1041376 dengan nilai perolehan sebesar Rp48.900.000,00.
 - 2) Ruang Rapat dan Resepsionis (Belanja renovasi ruang rapat dan resepsionis 95%) dengan nomor register 1091962 dengan nilai perolehan sebesar Rp122.677.000,00.
 - b. Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp.30.980.660,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Backdrop dengan nomor register 1031072 dan nilai perolehan sebesar Rp20.740.800,00.
 - 2) Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nomor register 1147621 dan nilai perolehan sebesar Rp10.239.860,00.
 - c. Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin serta bertambah pada Gedung dan Bangunan berupa Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD (1 Paket) Pengadaan Nomor: 24.04.08.01.2024.000847 dan nilai perolehan sebesar Rp500.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

2. Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan reklasifikasi berkurang dari Peralatan dan Mesin dan bertambah pada Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.750.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Seni Gambar, Grafika dengan nomor register 1649247 dan nilai perolehan sebesar Rp450.000,00.
 - b. Seni Gambar, Grafika dengan nomor register 1649248 dan nilai perolehan sebesar Rp450.000,00.
 - c. Seni Gambar, Grafika dengan nomor register 1649249 dan nilai perolehan sebesar Rp450.000,00.
 - d. Seni Gambar, Grafika dengan nomor register 1649250 dan nilai perolehan sebesar Rp450.000,00.
 - e. Seni Gambar, Grafika dengan nomor register 1649251 dan nilai perolehan sebesar Rp450.000,00.
 - f. Lukisan Cat Air dengan nomor register 1628742 dan nilai perolehan sebesar Rp1.500.000,00
3. Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada Aset tidak berwujud pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah karena penambahan nilai terhadap aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah berupa penambahan fitur dengan nomor register 1147876 sebesar Rp99.456.000,00
4. Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada Aset Lain-Lain sebesar Rp15.225.157.892,00 terdapat pada 21 (dua puluh satu) SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp76.295.690,00 karena Reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada Aset Lain-Lain Peralatan Mesin disebabkan rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sepeda Motor (Suzuki / New Smash) dengan nomor register 2977 dengan nilai perolehan sebesar Rp7.500.000,00.
 - 2) Tong Air Stainless (Arwana Stanlish) dengan nomor register 42053 dengan nilai perolehan sebesar Rp5.110.990,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 3) Dispenser (Modena) dengan nomor register 42054 dengan nilai perolehan sebesar Rp3.000.000,00.
 - 4) Mic Wireless (SHURE / UT42) dengan nomor register 44461 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.783.600,00.
 - 5) Mic Wireless (SHURE / UT42) dengan nomor register 44462 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.783.600,00.
 - 6) Proyektor / LCD (SONY DX-100) dengan nomor register 15716 dengan nilai perolehan sebesar Rp7.800.000,00.
 - 7) Laptop / Note Book (Acer Aspire Core i3) dengan nomor register 34496 dengan nilai perolehan sebesar Rp7.700.000,00.
 - 8) Komputer Note Book / Lap top (sony Vaio) dengan nomor register 3172 dengan nilai perolehan sebesar Rp12.250.000,00.
 - 9) Printer Epson (Epson DOT MATRIX LX-50) dengan nomor register 89257 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.700.000,00.
 - 10) Printer Epson PLQ 30 (EPSON PLQ 30) dengan nomor register 98618 dengan nilai perolehan sebesar Rp9.000.000,00.
 - 11) Printer (HP Smart Tank 515 Wireless) dengan nomor register 98931 dengan nilai perolehan sebesar Rp3.000.000,00
 - 12) Printer (HP DESKJET GT 5820 / Printer/Caner/FC) dengan nomor register 50708 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.972.500,00.
 - 13) Printer (Canon G 1000 / Printer/Caner/FC) dengan nomor register 71829 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.850.000,00.
 - 14) Komputer server /CPU (-) dengan nomor register 2142 dengan nilai perolehan sebesar Rp9.845.000,00.
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersumber dari reklasifikasi berkurang ke Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin sebesar Rp111.546.500,00 kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Televisi dengan nomor register 7371 dan nilai perolehan sebesar Rp3.500.000,00.
 - 2) Printer dengan nomor register 7356 dan nilai perolehan sebesar Rp1.900.000,00.
 - 3) Komputer PC dengan nomor register 13622 dan nilai perolehan sebesar Rp12.435.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 4) AC dengan nomor register 6901 dan nilai perolehan sebesar Rp4.375.000,00.
 - 5) Speaker Box dengan nomor register 7389 dan nilai perolehan sebesar Rp8.305.000,00.
 - 6) Notebook dengan nomor register 36537 dan nilai perolehan sebesar Rp14.850.000,00.
 - 7) Kursi_Rapat_Pimpinan dengan nomor register 807564 dan nilai perolehan sebesar Rp1.248.000,00.
 - 8) LAPTOP ASUS VIVOBOK A509FJ dengan nomor register 88916 dan nilai perolehan sebesar Rp14.465.000,00.
 - 9) Priter Brother- MFC-T810W dengan nomor register 88859 dan nilai perolehan sebesar Rp4.983.000,00.
 - 10) Meja Rapat dengan nomor register 13645 dan nilai perolehan sebesar Rp1.843.000,00.
 - 11) Microfone Wireless dengan nomor register 35147 dan nilai perolehan sebesar Rp2.915.000,00.
 - 12) AC dengan nomor register 35114 dan nilai perolehan sebesar Rp6.077.500,00.
 - 13) Laptop dengan nomor register 6947 dan nilai perolehan sebesar Rp9.900.000,00.
 - 14) Komputer dengan nomor register 36535 dan nilai perolehan sebesar Rp9.900.000,00.
 - 15) Notebook dengan nomor register 36538 dan nilai perolehan sebesar Rp14.850.000,00.
- c. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Bertambah pada Aset Lain-lain sebesar Rp50.910.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Selang 1,5 (Selang Untuk Mobil Damkar) dengan nomor register 44572 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.250.000,00.
 - 2) Selang 1,5 (Selang Untuk Mobil Damkar) dengan nomor register 44574 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.250.000,00.
 - 3) Selang 1,5 (Selang Untuk Mobil Damkar) dengan nomor register 44575 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.250.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 4) Selang 1,5 (Selang Untuk Mobil Damkar) dengan nomor register 44576 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.250.000,00.
 - 5) Selang 1,5 (Selang Untuk Mobil Damkar) dengan nomor register 44577 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.250.000,00.
 - 6) Perahu Karet Sedang dengan nomor register 121490 dengan nilai perolehan sebesar Rp19.830.000,00.
 - 7) Perahu Karet Sedang dengan nomor register 121491 dengan nilai perolehan sebesar Rp19.830.000,00.
- d. Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada Aset Lain-Lain Peralatan Mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp327.313.437,00. Reklasifikasi tersebut dalam rangka penjualan terhadap aset-aset yang sudah tidak layak untuk dilakukan pemeliharaan. Dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 15.
- e. Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar disebabkan karena reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin serta bertambah pada Aset Lain-Lain disebabkan aset tersebut merupakan objek penjualan berupa Brankas dengan nomor register 44377 dan nilai perolehan sebesar Rp9.364.885,00.
- f. Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.900.160.025,00 disebabkan karena reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin serta bertambah pada Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin dengan rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran 16.
- g. Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan disebabkan dari reklasifikasi berkurang dari peralatan dan mesin dan bertambah pada aset lain-lain sebesar Rp1.081.843.805,00 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 17.
- h. Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp1.984.764.947,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

yang berasal dari reklasifikasi berkurang ke Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp124.044.287,00 merupakan hasil dari reklasifikasi berkurang pada aset tetap golongan barang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada aset lain-lain dan dengan kondisi rusak berat, rincian dimaksud dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Kulkas dengan nomor register 2100 dan nilai perolehan sebesar Rp1.750.000,00.
 - 2) AC dengan nomor register 2729 dan nilai perolehan sebesar Rp3.875.000,00.
 - 3) TV LED 49 inch dengan nomor register 72021 dan nilai perolehan sebesar Rp6.400.000,00.
 - 4) Microphone Rapat dengan nomor register 72013 dan nilai perolehan sebesar Rp1.980.000,00.
 - 5) Microphone Rapat dengan nomor register 72014 dan nilai perolehan sebesar Rp1.980.000,00.
 - 6) UPS dengan nomor register 89590 dan nilai perolehan sebesar Rp1.300.000,00.
 - 7) UPS dengan nomor register 89382 dan nilai perolehan sebesar Rp2.915.000,00.
 - 8) UPS dengan nomor register 45351 dan nilai perolehan sebesar Rp2.838.571,00.
 - 9) UPS dengan nomor register 45352 dan nilai perolehan sebesar Rp2.838.571,00.
 - 10) Handy Talkie dengan nomor register 2557 dan nilai perolehan sebesar Rp1.200.000,00.
 - 11) Handy Talky dengan nomor register 89378 dan nilai perolehan sebesar Rp1.995.000,00.
 - 12) Handy Talky dengan nomor register 89377 dan nilai perolehan sebesar Rp1.995.000,00.
 - 13) Proyektor dengan nomor register 2507 dan nilai perolehan sebesar Rp13.450.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 14) Laptop dengan nomor register 97872 dan nilai perolehan sebesar Rp11.000.000,00.
 - 15) Note book dengan nomor register 53602 dan nilai perolehan sebesar Rp20.000.000,00.
 - 16) Komputer Notebook dengan nomor register 2283 dan nilai perolehan sebesar Rp13.400.000,00.
 - 17) Laptop dengan nomor register 45339 dan nilai perolehan sebesar Rp8.250.000,00.
 - 18) Monitor dengan nomor register 13660 dan nilai perolehan sebesar Rp2.500.000,00.
 - 19) Printer dot matrix dengan nomor register 45343 dan nilai perolehan sebesar Rp2.738.571,00.
 - 20) Printer multi fungsi dengan nomor register 45344 dan nilai perolehan sebesar Rp9.138.574,00.
 - 21) Printer Laser dengan nomor register 72084 dan nilai perolehan sebesar Rp1.000.000,00.
 - 22) Printer Laser dengan nomor register 72087 dan nilai perolehan sebesar Rp1.000.000,00.
 - 23) Printer Laser dengan nomor register 72088 dan nilai perolehan sebesar Rp1.000.000,00.
 - 24) Printer Brother dengan nomor register 39722 dan nilai perolehan sebesar Rp9.500.000,00.
- 2) Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disebabkan adanya reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada aset Lain-lain sebesar Rp1.860.720.660,00 disebabkan karena aset tersebut merupakan objek hibah kepada instansi vertikal dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 18.
- i. Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp3.434.824.558,00 disebabkan karena reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin serta bertambah pada



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin dengan rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran 19.

- j. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja bersumber dari reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin ke Aset Lain-lain Rp14.500.000,00 kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Papan Pengumuman dengan nomor register 67471 dan nilai perolehan sebesar Rp8.500.000,00.
 - 2) Papan Pengumuman (Baliho) dengan nomor register 5302 dan nilai perolehan sebesar Rp6.000.000,00.
- k. Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada aset lain-lain golongan peralatan dan mesin sebesar Rp216.766.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki/FK110SD DA 629 YA dengan nomor register 25270 dan nilai perolehan sebesar Rp11.515.000,00
 - 2) Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki/FK110SD DA 599 YA dengan nomor register 25177 dan nilai perolehan sebesar Rp11.515.000,00
 - 3) Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki/FK110SD DA 598 YA dengan nomor register 24933 dan nilai perolehan sebesar Rp11.515.000,00
 - 4) Sepeda Motor Yamaha Vega DA 530 YA dengan nomor register 2615 dan nilai perolehan sebesar Rp11.550.000,00
 - 5) Sepeda Motor Yamaha Vega DA 533 YA dengan nomor register 2514 dan nilai perolehan sebesar Rp11.550.000,00
 - 6) Sepeda Motor Yamaha Vega DA 535 YA dengan nomor register 2510 dan nilai perolehan sebesar Rp11.550.000,00
 - 7) Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki/FK110SD DA 603 YA dengan nomor register 25188 dan nilai perolehan sebesar Rp11.515.000,00
 - 8) Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki/FK110SD DA 611 YA dengan nomor register 25218 dan nilai perolehan sebesar Rp11.515.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 9) Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki/FK110SD DA 614 YA dengan nomor register 25226 dan nilai perolehan sebesar Rp11.515.000,00
- 10) Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki/FK110SD DA 616 YA dengan nomor register 25237 dan nilai perolehan sebesar Rp11.515.000,00
- 11) Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki/FK110SD DA 624 YA dengan nomor register 25256 dan nilai perolehan sebesar Rp11.515.000,00
- 12) Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki/FK110SD DA 625 YA dengan nomor register 25258 dan nilai perolehan sebesar Rp11.515.000,00
- 13) Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sepeda Motor Operasional HONDA DA 513 YG dengan nomor register 40750 dan nilai perolehan sebesar Rp17.376.000,00
- 14) Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki DC -CDI DA 569 YC dengan nomor register 5645 dan nilai perolehan sebesar Rp13.855.000,00
- 15) Kendaraan dinas roda dua Kepsek SUZUKI DA 507 YB dengan nomor register 6479 dan nilai perolehan sebesar Rp15.750.000,00.
- 16) Sepeda Motor Suzuki/EN125A DA 786 YA dengan nomor register 24786 dan nilai perolehan sebesar Rp15.750.000,00.
- 17) Sepeda Motor Suzuki/EN125A DA 778 YA dengan nomor register 24775 dan nilai perolehan sebesar Rp15.750.000,00.
- l. Dinas Perhubungan disebabkan adanya reklasifikasi berkurang dari Peralatan dan Mesin dan bertambah pada aset lain-lain sebesar Rp827.836.248,00 disebabkan karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 20.
- m. Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin disebabkan adanya reklasifikasi berkurang Peralatan dan mesin dan bertambah pada aset lain-lain Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp425.932.409,00 disebabkan karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 1) Mobil Dinas / Operasional (Double Cabin) All New Ford Ranger Double Cabin XLT 3,2L 4x4 MT VIN 2014 dengan nomor register 13372 dan nilai perolehan sebesar Rp369.550.000,00.
- 2) Radio HF/FM (Handy Talky) dengan nomor register 49989 dan nilai perolehan sebesar Rp1.435.909,00.
- 3) Radio Mobil dengan nomor register 35087 dan nilai perolehan sebesar Rp2.500.000,00.
- 4) Komputer PC All in1 dengan nomor register 49976 dan nilai perolehan sebesar Rp6.875.000,00.
- 5) Printer Brother DCP dengan nomor register 70687 dan nilai perolehan sebesar Rp3.750.000,00.
- 6) Printer Canon Pixma G3010 dengan nomor register 70688 dan nilai perolehan sebesar Rp2.600.000,00.
- 7) Printer dengan nomor register 44633 dan nilai perolehan sebesar Rp3.813.500,00.
- 8) Printer Canon Pixma G3010 dengan nomor register 70689 dan nilai perolehan sebesar Rp2.600.000,00.
- 9) Printer dengan nomor register 13806 dan nilai perolehan sebesar Rp2.650.000,00.
- 10) Karpet dengan nomor register 5216 dan nilai perolehan sebesar Rp3.500.000,00.
- 11) Lemari Besi dengan nomor register 951 dan nilai perolehan sebesar Rp3.474.250,00.
- 12) Lemari Besi dengan nomor register 899 dan nilai perolehan sebesar Rp3.388.250,00.
- 13) Lemari Besi dengan nomor register 953 dan nilai perolehan sebesar Rp3.474.250,00.
- 14) Mesin Penghancur Kertas dengan nomor register 100849 dan nilai perolehan sebesar Rp1.626.000,00.
- 15) Sofa dengan nomor register 39246 dan nilai perolehan sebesar Rp7.280.000,00.
- 16) Air Conditioner/ AC dengan nomor register 32681 dan nilai perolehan sebesar Rp4.915.250,00.
- 17) Kipas Angin dengan nomor register 49978 dan nilai perolehan sebesar Rp1.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 18) Radio HF/FM (Handy Talkie) dengan nomor register 35068 dan nilai perolehan sebesar Rp1.500.000,00.
- n. Reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada Aset Lain-lain Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp136.966.150,00 disebabkan karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Komputer PC All in One 7 dari 7 dengan nomor register 70860 dan nilai perolehan sebesar Rp16.645.500,00.
 - 2) Komputer PC All in One 4 dari 7 dengan nomor register 70857 dan nilai perolehan sebesar Rp16.645.500,00.
 - 3) Komputer PC dengan nomor register 5343 dan nilai perolehan sebesar Rp4.307.000,00.
 - 4) Komputer PC dengan nomor register 13097 dan nilai perolehan sebesar Rp5.000.000,00.
 - 5) Laptop dengan nomor register 5353 dan nilai perolehan sebesar Rp9.873.000,00.
 - 6) Laptop dengan nomor register 5355 dan nilai perolehan sebesar Rp9.873.000,00.
 - 7) Laptop dengan nomor register 5484 dan nilai perolehan sebesar Rp8.714.400,00.
 - 8) Laptop dengan nomor register 13089 dan nilai perolehan sebesar Rp8.064.000,00.
 - 9) Laptop dengan nomor register 13091 dan nilai perolehan sebesar Rp8.064.000,00.
 - 10) laptop dengan nomor register 52910 dan nilai perolehan sebesar Rp14.979.750,00.
 - 11) laptop dengan nomor register 41323 dan nilai perolehan sebesar Rp13.400.000,00.
 - 12) laptop dengan nomor register 44349 dan nilai perolehan sebesar Rp10.000.000,00.
 - 13) Laptop dengan nomor register 1586 dan nilai perolehan sebesar Rp11.400.000,00.
- o. Pengurangan Saldo Aset peralatan dan mesin pada Inspektorat Kabupaten bersumber dari reklasifikasi berkurang peralatan dan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

mesin dan bertambah pada Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin sebesar Rp155.697.149,00 kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Proyektor infocus EN224 dengan nomor register 44978 dan nilai perolehan sebesar Rp8.925.000,00.
- 2) Proyektor Sony VPL EX 230 dengan nomor register 44977 dan nilai perolehan sebesar Rp7.325.000,00.
- 3) Proyektor dengan nomor register 12235 dan nilai perolehan sebesar Rp14.945.455,00.
- 4) Proyektor dengan nomor register 11782 dan nilai perolehan sebesar Rp9.750.000,00.
- 5) LAPTOP dengan nomor register 12174 dan nilai perolehan sebesar Rp7.024.500,00.
- 6) LAPTOP dengan nomor register 12176 dan nilai perolehan sebesar Rp7.024.500,00.
- 7) notebook dengan nomor register 12177 dan nilai perolehan sebesar Rp7.024.500,00.
- 8) notebook dengan nomor register 12179 dan nilai perolehan sebesar Rp7.024.500,00.
- 9) notebook dengan nomor register 23971 dan nilai perolehan sebesar Rp7.800.561,00.
- 10) notebook dengan nomor register 23975 dan nilai perolehan sebesar Rp7.800.561,00.
- 11) notebook dengan nomor register 23978 dan nilai perolehan sebesar Rp7.800.561,00.
- 12) Note Book dengan nomor register 23983 dan nilai perolehan sebesar Rp13.609.511,00.
- 13) Camera CCTV dengan nomor register 39731 dan nilai perolehan sebesar Rp12.800.000,00.
- 14) CCTV dengan nomor register 12059 dan nilai perolehan sebesar Rp28.867.500,00.
- 15) kamera CCTV perlengkapan ,TV Panasonic 24 INC dengan nomor register 51673 dan nilai perolehan sebesar Rp7.975.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- p. Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin Kecamatan Batumandi disebabkan adanya reklasifikasi berkurang dari Peralatan dan Mesin dan bertambah pada aset lain-lain sebesar Rp.52.450.000,00 disebabkan karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sepeda Motor Thunder dengan nomor register 1308 dan nilai perolehan sebesar Rp14.000.000,00.
 - 2) White Board dengan nomor register 39560 dan nilai perolehan sebesar Rp1.000.000,00.
 - 3) AC dengan nomor register 39552 dan nilai perolehan sebesar Rp6.250.000,00.
 - 4) AC dengan nomor register 39553 dan nilai perolehan sebesar Rp6.250.000,00.
 - 5) AC dengan nomor register 42828 dan nilai perolehan sebesar Rp6.250.000,00.
 - 6) Podium Minimalis dengan nomor register 35159 dan nilai perolehan sebesar Rp5.000.000,00.
 - 7) Mimbar Upacara Minimalis dengan nomor register 42816 dan nilai perolehan sebesar Rp3.750.000,00.
 - 8) Note Book HP Probook dengan nomor register 7580 dan nilai perolehan sebesar Rp9.950.000,00.
- q. Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin Kecamatan Halong disebabkan adanya reklasifikasi berkurang dari Peralatan dan Mesin dan bertambah pada aset lain-lain sebesar Rp143.202.750,00 disebabkan karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 21.
- r. Pengurangan Saldo Aset peralatan dan mesin pada Kecamatan Paringin bersumber dari reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin sebesar Rp50.714.000,00 kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Mesin Cuci dengan nomor register 1622 dan nilai perolehan sebesar Rp2.500.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 2) Mesin cuci dengan nomor register 97757 dan nilai perolehan sebesar Rp3.955.000,00.
 - 3) AC dengan nomor register 39479 dan nilai perolehan sebesar Rp4.300.000,00.
 - 4) AC dengan nomor register 12857 dan nilai perolehan sebesar Rp5.000.000,00.
 - 5) AC dengan nomor register 44685 dan nilai perolehan sebesar Rp4.259.000,00.
 - 6) AC dengan nomor register 15881 dan nilai perolehan sebesar Rp4.850.000,00.
 - 7) AC dengan nomor register 1187 dan nilai perolehan sebesar Rp3.850.000,00.
 - 8) Dispenser dengan nomor register 88735 dan nilai perolehan sebesar Rp1.500.000,00.
 - 9) Dispenser dengan nomor register 852 dan nilai perolehan sebesar Rp1.500.000,00.
 - 10) RECEIVER dengan nomor register 68835 dan nilai perolehan sebesar Rp2.000.000,00.
 - 11) Komputer PC dengan nomor register 88722 dan nilai perolehan sebesar Rp7.000.000,00.
 - 12) Printer Multi Inkjet dengan nomor register 33484 dan nilai perolehan sebesar Rp5.000.000,00.
 - 13) printer dengan nomor register 44781 dan nilai perolehan sebesar Rp5.000.000,00.
- s. Pengurangan Saldo Aset peralatan dan mesin pada Kecamatan Paringin Selatan bersumber dari reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin sebesar Rp129.979.000,00 kondisi rusak berat dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 22.
- t. Pengurangan Saldo Aset peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah bersumber dari reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin sebesar Rp2.127.770.541,00 terdiri dari dua kategori dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 1) Pengurangan Saldo peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah bersumber dari reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin sebesar Rp71.205.750,00 dengan kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sepeda Motor dengan nomor register 2447 dan nilai perolehan sebesar Rp14.250.000,00
 - b. Sepeda Motor dengan nomor register 2445 dan nilai perolehan sebesar Rp14.250.000,00
 - c. Sepeda Motor dengan nomor register 4717 dan nilai perolehan sebesar Rp16.440.000,00
 - d. Sepeda Motor dengan nomor register 4730 dan nilai perolehan sebesar Rp16.440.000,00
 - e. Baliho dengan nomor register 14145 dan nilai perolehan sebesar Rp9.825.750,00
- 2) Pengurangan Saldo peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah bersumber dari reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin sebesar Rp2.056.564.791,00 yang menjadi objek hibah kepada instansi vertikal dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 23.
 - u. Reklasifikasi Berkurang Peralatan dan Mesin dan bertambah pada Aset Lain-lain pada Sekretariat DPRD sebesar Rp966.319.798,00 disebabkan karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan akan ditindaklanjuti dengan usul penghapusan dan usul pemusnahan, dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 24.
5. Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan reklasifikasi berkurang dari Peralatan dan Mesin dan bertambah pada Extracomptable Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.415.954.970,00 terdapat pada 22 (Dua puluh dua) SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin disebabkan adanya reklasifikasi berkurang Peralatan dan mesin dan bertambah pada Extracomptable Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp24.000.000,00 disebabkan karena aset tersebut tidak memenuhi



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- kriteria untuk diakui sebagai aset tetap, dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 25.
- b. Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan reklasifikasi berkurang Peralatan dan Mesin serta bertambah pada Extracomtable karena barang-barang tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset sebesar Rp6.243.243.390,00 dengan rincian sebagaimana tersaji pada Lampiran 26.
 - c. Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp8.794.000,00 disebabkan karena reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin serta bertambah pada Extracomtable dengan rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran 27.
 - d. Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp385.884.376,00 disebabkan karena reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin serta bertambah pada Extracomtable dengan rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran 28.
 - e. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi bertambah pada Extracomtable pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp10.705.000,00 Hal ini disebabkan karena aset tersebut tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam kebijakan akuntansi aset tetap untuk diakui sebagai aset tetap, dengan sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 29.
 - f. Reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada Extracomtable Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa Alat Pemadam/Portable dengan nomor register 1040713 dan nilai perolehan sebesar Rp650.000,00
 - g. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup disebabkan adanya reklasifikasi berkurang dari Peralatan dan Mesin dan bertambah pada extracomtable sebesar Rp18.798.204,00 disebabkan barang tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset tetap dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- a. Hand Sprayer Eliktrik dengan nomor register 1031737 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00.
- b. Hand Sprayer Eliktrik dengan nomor register 1031746 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00.
- c. Hand Sprayer Eliktrik dengan nomor register 1031747 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00.
- d. Traffic Cone dengan nomor register 1052395 dan nilai perolehan sebesar Rp547.300,00.
- e. Traffic Cone dengan nomor register 1052396 dan nilai perolehan sebesar Rp547.300,00.
- f. CCTV - Camera Control TelevisionSystem dengan nomor register 1051542 dan nilai perolehan sebesar Rp987.950,00.
- g. CCTV - Camera Control TelevisionSystem dengan nomor register 1051543 dan nilai perolehan sebesar Rp987.950,00.
- h. CCTV - Camera Control TelevisionSystem dengan nomor register 1051544 dan nilai perolehan sebesar Rp987.950,00.
- i. Camera CCTV dengan nomor register 1051545 dan nilai perolehan sebesar Rp967.950,00.
- j. Camera CCTV dengan nomor register 1051546 dan nilai perolehan sebesar Rp967.951,00.
- k. Camera CCTV dengan nomor register 1051547 dan nilai perolehan sebesar Rp967.951,00.
- l. Hand Sprayer Eliktrik dengan nomor register 1031738 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00.
- m. Camera CCTV dengan nomor register 1051548 dan nilai perolehan sebesar Rp967.951,00.
- n. Camera CCTV dengan nomor register 1051549 dan nilai perolehan sebesar Rp967.951,00.
- o. Hand Sprayer Eliktrik dengan nomor register 1031739 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00.
- p. Hand Sprayer Eliktrik dengan nomor register 1031740 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00.
- q. Hand Sprayer Eliktrik dengan nomor register 1031741 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- r. Hand Sprayer Eliktrik dengan nomor register 1031742 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00.
- s. Hand Sprayer Eliktrik dengan nomor register 1031743 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00.
- t. Hand Sprayer Eliktrik dengan nomor register 1031744 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00.
- u. Hand Sprayer Eliktrik dengan nomor register 1031745 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00.
- h. Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar disebabkan karena reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin serta bertambah pada Extracomtable disebabkan barang tidak memenuhi kriteria untuk akui sebagai aset tetap sebesar Rp7.426.000,00 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 30.
- i. Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan disebabkan dari reklasifikasi berkurang dari peralatan dan mesin dan bertambah pada extracomtable sebesar Rp162.030.000,00 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 31.
- j. Reklasifikasi Berkurang Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD dan bertambah pada Extracomtable sebesar Rp200.251.300,00 disebabkan karena aset tersebut tidak memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset tetap, dengan rincian sebagai dapat dilihat pada Lampiran 32.
- k. Kecamatan Lampihong sebesar Rp1.876.600,00 disebabkan karena reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin serta bertambah pada extracomtable dengan rincian dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Kipas Angin (Kipas Angin) dengan nomor register 1044320 dan nilai perolehan sebesar Rp938.300,00.
 - 2) Kipas Angin (Kipas Angin) dengan nomor register 1044321 dan nilai perolehan sebesar Rp938.300,00.
- l. Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin Kecamatan Batumandi disebabkan adanya reklasifikasi berkurang dari Peralatan dan Mesin dan bertambah pada extracomtable sebesar Rp27.517.500,00 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 33.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- m. Kecamatan Aawayan sebesar Rp39.615.000,00 disebabkan karena reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin serta bertambah pada Extracomtable dengan rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran 34.
- n. Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin Kecamatan Halong disebabkan adanya reklasifikasi berkurang dari Peralatan dan Mesin dan bertambah pada extracomtable sebesar Rp6.500.000,00 disebabkan karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Meja dengan nomor register 1044322 dan nilai perolehan sebesar Rp800.000,00.
 - 2) Meja dengan nomor register 1044323 dan nilai perolehan sebesar Rp800.000,00.
 - 3) Meja dengan nomor register 1044324 dan nilai perolehan sebesar Rp800.000,00.
 - 4) Meja dengan nomor register 1044325 dan nilai perolehan sebesar Rp800.000,00.
 - 5) Meja dengan nomor register 1044326 dan nilai perolehan sebesar Rp800.000,00.
 - 6) Kursi Lipat dengan nomor register 1044329 dan nilai perolehan sebesar Rp500.000,00.
 - 7) Kursi Lipat dengan nomor register 1044330 dan nilai perolehan sebesar Rp500.000,00.
 - 8) Kursi Lipat dengan nomor register 1044331 dan nilai perolehan sebesar Rp500.000,00.
 - 9) Kursi Lipat dengan nomor register 1044332 dan nilai perolehan sebesar Rp500.000,00.
 - 10) Kursi Lipat dengan nomor register 1044333 dan nilai perolehan sebesar Rp500.000,00.
- o. Kecamatan Tebing Tinggi bersumber dari reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada Extracomtable golongan peralatan dan mesin sebesar Rp32.000.000,00 disebabkan barang tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset tetap dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 35.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- p. Kecamatan Juai disebabkan karena reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin serta bertambah pada extracomtable dengan nama barang berupa Tiang Mic dengan register nomor 1049769 dan nilai perolehan sebesar Rp335.000,00
- q. Pengurangan Saldo Aset peralatan dan mesin pada Kecamatan Paringin bersumber dari reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada Extracomptable golongan peralatan dan mesin sebesar Rp67.028.000,00 disebabkan barang tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset tetap dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 36.
- r. Pengurangan Saldo Aset peralatan dan mesin pada Kecamatan Paringin Selatan bersumber dari reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada Extracomptable golongan peralatan dan mesin sebesar Rp6.955.600,00 disebabkan barang tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset tetap dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 37.
- s. Pengurangan Saldo Aset peralatan dan mesin pada Inspektorat Kabupaten bersumber dari reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada extracomptable karena tidak memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset tetap berupa External/ Portable Hardisk dengan nomor register 1051877 dan nilai perolehan sebesar Rp930.000,00.
- t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan bersumber dari reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada Extracomptable golongan peralatan dan mesin sebesar Rp18.500.000,00 disebabkan barang tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset tetap dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Speaker dengan nomor register 1037805 dan nilai perolehan sebesar Rp500.000,00
 - 2) Kursi kerja dengan nomor register 1038310 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00
 - 3) Kursi kerja dengan nomor register 1038311 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 4) Kursi kerja dengan nomor register 1038312 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00
- 5) Kursi kerja dengan nomor register 1038313 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00
- 6) Kursi kerja dengan nomor register 1038314 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00
- 7) Kursi kerja dengan nomor register 1038315 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00
- 8) Kursi kerja dengan nomor register 1038316 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00
- 9) Kursi kerja dengan nomor register 1038317 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00
- 10) Kursi kerja dengan nomor register 1038318 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00
- 11) Kursi kerja dengan nomor register 1038319 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00
- 12) Kursi kerja dengan nomor register 1038302 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00
- 13) Kursi kerja dengan nomor register 1038320 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00
- 14) Kursi kerja dengan nomor register 1038321 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00
- 15) Kursi kerja dengan nomor register 1038303 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00
- 16) Kursi kerja dengan nomor register 1038304 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00
- 17) Kursi kerja dengan nomor register 1038305 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00
- 18) Kursi kerja dengan nomor register 1038306 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00
- 19) Kursi kerja dengan nomor register 1038307 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00
- 20) Kursi kerja dengan nomor register 1038308 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 21) Kursi kerja dengan nomor register 1038309 dan nilai perolehan sebesar Rp900.000,00
- u. Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada extracomptable Peralatan dan Mesin sebesar Rp60.485.000 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran 38.
- v. Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin dan bertambah pada extracomptable Peralatan dan Mesin sebesar Rp92.430.000,00 pada Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran 39.

B. Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin Berdasarkan Koreksi Berkurang sebesar Rp779.886.960,00.

Tabel 176 Rekapitulasi Pengurangan Saldo Peralatan dan Mesin Berdasarkan Koreksi berkurang

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	594.409.560,00
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	181.250.400,00
3	Inspektorat	3.727.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	500.000,00
Total		779.886.960,00

1. Pengurangan saldo Peralatan dan Mesin Berdasarkan Koreksi Berkurang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pengadaan buku untuk pegangan siswa dan guru dalam proses pembelajaran di seluruh sekolah. Alokasi pengadaan buku pegangan dianggarkan dan direalisasikan oleh sekolah melalui belanja modal. Namun berdasarkan kriteria, buku-buku tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset maupun extracomptable sebesar Rp594.409.560,00 Sebagaimana diuraikan pada Lampiran 40.
2. Pengurangan Saldo Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp181.250.400,00 karena koreksi berkurang disebabkan koreksi karena kesalahan penganggaran sebesar Rp181.250.400,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- a. Belanja Pengadaan Ribbon cetak KTP dan Ribbon cetak KIA, cleaning kit dengan nomor register 000017/SPP-LS/DISDUKCAPIL/2023 dan nilai Perolehan sebesar Rp122.314.500,00,
 - b. Belanja Honor Pejabat Pengadaan dengan nomor register 000306/BPK/DISDUKCAPIL/2023 dan nilai Perolehan sebesar Rp500.000,00,
 - c. Belanja Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan dengan nomor register 000307/BPK/DISDUKCAPIL/2023 dan nilai Perolehan sebesar Rp900.000,00,
 - d. Belanja Modal peralatan komputer lainnya Ribbon KTP, Ribbon KIA, Cleaning KIT KIA dan Cleaning KIT dengan nomor register 000043/SPP-LS/DISDUKCAPIL/2023 dan nilai Perolehan sebesar Rp56.135.900,00,
 - e. Belanja Honor Pejabat Pengadaan dengan nomor register 000738/BPK/DISDUKCAPIL/2023 dan nilai Perolehan sebesar Rp500.000,00,
 - f. Belanja Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan dengan nomor register 000308/BPK/DISDUKCAPIL/2023 dan nilai Perolehan sebesar Rp900.000,00
3. Pengurangan Saldo Aset Peralatan dan Mesin pada Inspektorat Kabupaten karena koreksi berkurang disebabkan koreksi karena kesalahan penganggaran sebesar Rp3.727.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Belanja Pemasangan Instalasi Jaringan Internet dengan No. Pel 162228801873, 162228804016, 162228804014, 162228804012 dan 162228804067. dengan nomor register 00103/BPK/INSPEKTORAT/2023 dan nilai perolehan sebesar Rp2.727.000,00.
 - b. Perbaikan Printer sebanyak 5 unit dengan nomor register 00472/BPK/INSPEKTORAT/2023 dan nilai perolehan sebesar Rp1.000.000,00
4. Pengurangan Saldo Aset Peralatan dan Mesin Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp500.000,00 karena koreksi berkurang disebabkan koreksi karena kesalahan penganggaran berupa biaya Service Genset.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.084.988.256.209,00	1.016.496.287.826,00

Merupakan nilai Gedung dan Bangunan pada posisi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.084.988.256.209,00 dan Rp1.016.496.287.826,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 177 Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal Tahun 2023 (Saldo per 31 Desember 2022)	1.016.496.287.826,00
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2023	
+/- Belanja Modal	99.741.722.125,39
+/- Belanja Hibah	2.369.518.000,00
+/- Catat Baru	3.152.348.200,00
+/- Reklasifikasi Bertambah	74.545.938.821,00
+/- Belanja Barang dan Jasa	432.164.200,00
Total Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2023	180.241.691.346,39
Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2022	
-/- Reklasifikasi Berkurang	111.735.722.962,00
-/- Koreksi Berkurang	14.000.001,39
Total Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2023	111.749.722.963,39
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	1.084.988.256.209,00

Perhitungan mutasi Gedung dan Bangunan tahun 2023 selengkapnya dilihat pada Lampiran 41.

Penambahan dan Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan Kabupaten Balangan disebabkan oleh beberapa hal yang diuraikan sebagai berikut:

Penambahan Saldo Gedung dan Bangunan Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar Rp180.241.691.346,39 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

A. Penambahan saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan belanja modal pada tahun 2023 sebesar Rp99.741.722.125,39

Rekapitulasi penambahan saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan Belanja Modal pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 178 Rekapitulasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.932.644.354,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	47.459.786.901,39
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.095.949.744,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	446.319.031,00
5	Dinas Satpol PP	24.979.271,00
6	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.136.998.369,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	149.250.000,00
8	Dinas Perhubungan	470.882.300,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.502.801.465,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	803.696.000,00
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	276.740.850,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	97.600.000,00
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.580.284.476,00
14	Sekretariat Daerah	1.155.804.288,00
15	Sekretariat DPRD	199.893.295,00
16	Kecamatan Paringin	499.374.100,00
17	Inspektorat	687.784.681,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	220.933.000,00
Total		99.741.722.125,39

B. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan berdasarkan Belanja Hibah sebesar Rp2.369.518.000,00

Penambahan nilai Hibah pada golongan Gedung dan Bangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diperoleh dari Hibah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

berupa bangunan Pasar Uren dengan nomor register 1032608 dan nilai perolehan sebesar Rp2.369.518.000,00

C. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan berdasarkan Belanja Catat Baru sebesar Rp3.152.348.200,00

Penambahan nilai Gedung dan Bangunan terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan catat baru atas aset yang dimiliki pemerintah daerah namun belum tercatat dalam laporan aset sebesar Rp3.152.348.200,00 berupa bangunan sekolah dengan rincian sebagai berikut:

1. Gedung 1 SLB dengan nomor register 1033350 dan nilai perolehan sebesar Rp129.582.000,00
2. Gedung 2 SLB dengan nomor register 1033351 dan nilai perolehan sebesar Rp421.423.200,00
3. Gedung 3 SLB dengan nomor register 1033352 dan nilai perolehan sebesar Rp212.840.000,00
4. Gedung 4 SLB dengan nomor register 1033353 dan nilai perolehan sebesar Rp212.840.000,00
5. Gedung 5 SLB dengan nomor register 1033354 dan nilai perolehan sebesar Rp164.262.400,00
6. Gedung 6 SLB dengan nomor register 1033355 dan nilai perolehan sebesar Rp227.238.000,00
7. Gedung 7 SLB dengan nomor register 1033356 dan nilai perolehan sebesar Rp361.828.000,00
8. Gedung 8 SLB dengan nomor register 1033357 dan nilai perolehan sebesar Rp105.168.000,00
9. Gedung 9 SLB dengan nomor register 1033358 dan nilai perolehan sebesar Rp105.168.000,00
10. Gedung 10 SLB dengan nomor register 1033359 dan nilai perolehan sebesar Rp76.685.000,00
11. Gedung 11 SLB dengan nomor register 1033360 dan nilai perolehan sebesar Rp25.540.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

12. Gedung 12 SLB dengan nomor register 1033361 dan nilai perolehan sebesar Rp319.260.000,00

13. Gedung 13 SLB dengan nomor register 1033362 dan nilai perolehan sebesar Rp258.412.800,00

14. Gedung 14 SLB dengan nomor register 1033363 dan nilai perolehan sebesar Rp532.100.000,00

D. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan berdasarkan Reklasifikasi Bertambah sebesar Rp74.545.938.821,00

Rincian penambahan nilai Gedung dan Bangunan berdasarkan Reklasifikasi Bertambah sebesar Rp74.545.938.821,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan berdasarkan Reklasifikasi Bertambah yang bersumber dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp203.057.660,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penambahan saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan reklasifikasi bertambah Gedung dan bangunan serta berkurang pada Peralatan dan Mesin berupa Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD (1 Paket) Pengadaan Nomor: 24.04.08.01.2024.000847 dan nilai perolehan sebesar Rp500.000,00
 - b. Penambahan Saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan reklasifikasi bertambah Gedung dan Bangunan dan berkurang dari Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp.30.980.660,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. *Backdrop* dengan nomor register 1031072 dan nilai perolehan sebesar Rp20.740.800,00.
 2. Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nomor register 1147621 dan nilai perolehan sebesar Rp10.239.860,00.
 - c. Penambahan Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp171.577.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kerangka Baliho (Kerangka untuk space baliho dari besi/baja/logam dengan tiang baja dan pondasi beton) dengan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- nomor register 1041376 dengan nilai perolehan sebesar Rp48.900.000,00.
2. Ruang Rapat dan Resepsionis (Belanja renovasi ruang rapat dan resepsionis) dengan nomor register 1091962 dengan nilai perolehan sebesar Rp122.677.000,00.
2. Penambahan Saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan reklasifikasi bertambah Gedung dan Bangunan dan berkurang dari Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup disebabkan kesalahan penganggaran terhadap pengadaan berupa Dinding pengaman tebing pagar workshop belakang Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dengan nomor register 1146794 dan nilai perolehan sebesar Rp177.368.010,00.
3. Penambahan Saldo Gedung dan Bangunan yang bersumber dari reklasifikasi bertambah pada Gedung dan bangunan dan berkurang pada Konstruksi Dalam Pengerjaan disebabkan aset tersebut telah selesai dan dapat dimanfaatkan sebesar Rp.74.165.513.151,00 dengan uraian sebagai berikut:
- a. Penambahan Saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berasal dari reklasifikasi bertambah Gedung dan bangunan dan berkurang dari Konstruksi dalam pengerjaan berupa Pasar Uren (Pasar Uren) dengan nomor register 1032608 dan nilai perolehan sebesar Rp99.110.000,00.
- b. Penambahan Saldo Gedung dan Bangunan yang bersumber dari reklasifikasi bertambah pada Gedung dan bangunan dan berkurang pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.29.792.462.043,00 dengan rincian sebagaimana tersaji pada Lampiran 42.
- c. Penambahan Saldo Gedung dan Bangunan yang bersumber dari reklasifikasi bertambah pada Gedung dan bangunan dan berkurang pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp44.273.941.108,00 dengan rincian sebagaimana tersaji pada Lampiran 43.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

B. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan berdasarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp432.164.200,00

Penambahan Aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2023 sebesar Rp432.164.200,00 disebabkan karena kesalahan penganggaran belanja oleh SKPD. Adanya pengadaan untuk menambah nilai aset yang dianggarkan di belanja barang. Terdapat pada 3 (tiga) SKPD dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan aset Gedung Bangunan dari belanja barang dan jasa pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berupa pembuatan Lapangan Volly Pasir dengan nomor register 1147046 dan nilai perolehan sebesar Rp2.464.200,00.
2. Penambahan Saldo Aset Gedung dan Bangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berasal dari reklasifikasi bertambah Gedung dan Bangunan yang bersumber dari pengadaan barang dan jasa sebesar Rp426.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Gedung Kantor Bappeda (Gedung Kantor Bappeda) dengan nomor register 196 dan nilai perolehan sebesar Rp213.100.000,00.
 - b. Halaman Kantor Bappeda (Halaman Kantor Bappeda) dengan nomor register 233 dan nilai perolehan sebesar Rp213.000.000,00.
3. Penambahan Saldo Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berasal dari reklasifikasi bertambah Gedung dan Bangunan yang bersumber dari pengadaan barang dan jasa sebesar Rp3.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Gedung Bangunan Pendidikan Permanen dengan nomor register 1651444 dan nilai perolehan sebesar Rp1.200.000,00.
 - b. Gedung Bangunan Pendidikan Permanen dengan nomor register 1651445 dan nilai perolehan sebesar Rp1.200.000,00.
 - c. Gedung Bangunan Pendidikan Permanen dengan nomor register 1651446 dan nilai perolehan sebesar Rp1.200.000,00.

Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar Rp111.749.722.963,39 berasal dari hal-hal sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

A. Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan berdasarkan Reklasifikasi Berkurang sebesar Rp111.735.722.962,00

Rekapitulasi pengurangan saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan Reklasifikasi Berkurang pada tahun 2023 dan bertambah pada beberapa golongan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Peralatan dan mesin Rp31.425.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133888 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 2. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133889 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 3. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133890 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 4. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133891 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 5. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133892 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 6. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133893 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 7. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133894 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 8. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133895 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 9. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133896 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 10. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133897 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 11. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133898 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 12. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133899 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
 13. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133900 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

14. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133901 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
15. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133902 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
16. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133903 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.529,00.
17. Meja Periksa Pasien dengan nomor register 1133904 dan nilai perolehan sebesar Rp1.848.536,00.
2. Pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan reklasifikasi berkurang dari Gedung dan Bangunan serta bertambah Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup disebabkan kesalahan penganggaran terhadap pengadaan berupa Betonisasi jalan workshop dengan nomor register 1146910 dan nilai perolehan sebesar Rp177.745.000,00.
3. Pengurangan saldo Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Aset Lain-Lain Gedung dan bangunan sebesar Rp34.027.140.269,00 pada beberapa SKPD disebabkan karena merupakan usul penghentian status dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengurangan Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Aset Lain-Lain Gedung dan bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah disebabkan rusak berat dengan nama barang Pagar halaman Pasar Paringin nomor register 496 sebesar Rp42.500.000,00.
 - b. Pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Aset Lain-lain Golongan Gedung dan Bangunan sebesar Rp589.962.721,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Poskesdes Juai dengan nomor register 620 dan nilai perolehan sebesar Rp222.059.000,00.
 2. Poskesdes juuh tb. tinggi dengan nomor register 698 dan nilai perolehan sebesar Rp83.346.450,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

3. Poskesdes Bungur dengan nomor register 658 dan nilai perolehan sebesar Rp193.515.333,00.
4. Garasi dan Parkir Puskesmas Awayan dengan nomor register 266 dan nilai perolehan sebesar Rp91.041.938,00.
- c. Pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp496.101.000,00 merupakan hasil dari reklasifikasi berkurang pada aset tetap golongan barang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada aset lain-lain dan dengan kondisi rusak berat, rincian dimaksud dijelaskan sebagai berikut:
 1. Gedung Pujasera 2 dengan nomor register 416 dan nilai perolehan sebesar Rp174.367.000,00.
 2. Gedung Pujasera 3 dengan nomor register 653 dan nilai perolehan sebesar Rp147.367.000,00.
 3. Gedung Pujasera 1 Paringin dengan nomor register 412 dan nilai perolehan sebesar Rp174.367.000,00.
- d. Pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain golongan Gedung dan Bangunan dan berkurang dari aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.282.283.633,00 rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran 44.
- e. Pengurangan saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Aset Lain-lain golongan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.152.348.200,00 merupakan objek hibah kepada pemerintah provinsi dalam rangka menyelaraskan kewenangan antara pemerintah propinsi dan kabupaten dengan rincian sebagai berikut:
 1. Gedung 1 SLB dengan nomor register 1033350 dan nilai perolehan sebesar Rp129.582.000,00.
 2. Gedung 2 SLB dengan nomor register 1033351 dan nilai perolehan sebesar Rp421.423.200,00.
 3. Gedung 3 SLB dengan nomor register 1033352 dan nilai perolehan sebesar Rp212.840.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4. Gedung 4 SLB dengan nomor register 1033353 dan nilai perolehan sebesar Rp212.840.000,00.
 5. Gedung 5 SLB dengan nomor register 1033354 dan nilai perolehan sebesar Rp164.262.400,00.
 6. Gedung 6 SLB dengan nomor register 1033355 dan nilai perolehan sebesar Rp227.238.000,00.
 7. Gedung 7 SLB dengan nomor register 1033356 dan nilai perolehan sebesar Rp361.828.000,00.
 8. Gedung 8 SLB dengan nomor register 1033357 dan nilai perolehan sebesar Rp105.168.000,00.
 9. Gedung 9 SLB dengan nomor register 1033358 dan nilai perolehan sebesar Rp105.168.000,00.
 10. Gedung 10 SLB dengan nomor register 1033359 dan nilai perolehan sebesar Rp76.685.000,00.
 11. Gedung 11 SLB dengan nomor register 1033360 dan nilai perolehan sebesar Rp25.540.800,00.
 12. Gedung 12 SLB dengan nomor register 1033361 dan nilai perolehan sebesar Rp319.260.000,00.
 13. Gedung 13 SLB dengan nomor register 1033362 dan nilai perolehan sebesar Rp258.412.800,00.
 14. Gedung 14 SLB dengan nomor register 1033363 dan nilai perolehan sebesar Rp532.100.000,00.
- f. Pengurangan saldo Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan disebabkan adanya reklasifikasi berkurang dari Gedung dan Bangunan dan bertambah pada aset lain-lain sebesar Rp463.944.715,00 disebabkan karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
1. Musholla Terminal Paringin dengan nomor register 217 dan nilai perolehan sebesar Rp27.000.000,00.
 2. Pos Jaga Terminal Dishubkominfo dengan nomor register 3634 dan nilai perolehan sebesar Rp29.975.000,00.
 3. Kamar Mandi dan Toilet Terminal Paringin dengan nomor register 2704 dan nilai perolehan sebesar Rp112.500.810,00.
 4. terminal Paringin dengan nomor register 4006 dan nilai perolehan sebesar Rp112.650.950,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5. Halte Ojek Terminal Paringin dengan nomor register 200 dan nilai perolehan sebesar Rp59.460.000,00.
 6. Halte Paringin dengan nomor register 197 dan nilai perolehan sebesar Rp89.865.000,00.
 7. Halte terminal paringin dengan nomor register 807467 dan nilai perolehan sebesar Rp32.492.955,00.
4. Pengurangan saldo Gedung dan Bangunan serta bertambah pada Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp77.495.812.693,00 terdapat pada 4 (empat) SKPD dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp165.110.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Perencanaan Pembangunan Poskesdes Lampihong Kanan dengan nilai perolehan sebesar Rp8.500.000,00.
 2. Perencanaan Poskesdes Ambakiang dengan nilai perolehan sebesar Rp8.500.000,00.
 3. Pengawasan Poskesdes Ambakiang dengan nilai perolehan sebesar Rp12.250.000,00.
 4. Perencanaan Penambah Ruang Pkm Uren dengan nilai perolehan sebesar Rp49.480.000,00.
 5. Perencanaan Penambah Ruang Pkm Tanah Habang dengan nilai perolehan sebesar Rp24.650.000,00.
 6. Perencanaan Penyelesaian Puskemas Batumandi dengan nilai perolehan sebesar Rp49.480.000,00.
 7. Pengawasan Poskesdes Lampihong Kanan dengan nilai perolehan sebesar Rp12.250.000,00.
 - b. Pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian merupakan hasil dari reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp51.093.750,00 disebabkan adanya pengadaan yang belum selesai dan belum bisa dimanfaatkan berupa konsultan perencanaan, sedangkan fisik belum dilaksanakan pada tahun berkenaan dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

1. Perencanaan Menara Triangle (Desa Mayanau, Puskesmas Tebing Tinggi, Tangalin, Puskesmas Awayan, Hamparaya) dengan nomor bukti 2.16.03.2.02: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5.2.03.03.01.0003: Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi Pengadaan Nomor: 24.04.06.02.2024.000002 dan nilai perolehan sebesar Rp11.877.000,00.
2. Perencanaan Menara Triangle (Desa Hauwai, Desa Surya Tama, Puskesmas Uren, Desa Mamantang) dengan nomor bukti 2.16.03.2.02: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5.2.03.03.01.0003: Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi Pengadaan Nomor: 24.04.06.02.2024.000004 dan nilai perolehan sebesar Rp13.072.250,00.
3. Perencanaan Menara Triangle (Desa Hauwai, Desa Surya Tama, Puskes Uren, Desa Mamantang) dengan nomor bukti 2.16.03.2.02: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5.2.03.03.01.0003 : Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi Pengadaan Nomor: 24.04.06.02.2024.000004 dan nilai perolehan sebesar Rp13.072.250,00.
4. Perencanaan Menara Triangle (Desa Hauwai, Desa Surya Tama, Puskes Uren, Desa Mamantang) dengan nomor bukti 2.16.03.2.02: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5.2.03.03.01.0003 : Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi Pengadaan Nomor : 24.04.06.02.2024.000004 dan nilai perolehan sebesar Rp13.072.250,00.
- c. Pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berdasarkan reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp47.459.786.900,00 dengan rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran 45.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- d. Pengurangan saldo Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp29.819.822.043,00 dengan rincian sebagaimana tersaji pada Lampiran 46.
5. Pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan serta bertambah pada Extracomptable Gedung dan Bangunan disebabkan barang tersebut memiliki nilai perolehan dibawah nilai kapitalisasi aset tetap terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Gedung Bangunan Pendidikan Permanen dengan nomor register 1651444 dan nilai perolehan sebesar Rp1.200.000,00.
 - b. Gedung Bangunan Pendidikan Permanen dengan nomor register 1651445 dan nilai perolehan sebesar Rp1.200.000,00.
 - c. Gedung Bangunan Pendidikan Permanen dengan nomor register 1651446 dan nilai perolehan sebesar Rp1.200.000,00.

B. Pengurangan saldo Gedung dan Bangunan Berdasarkan Koreksi Berkurang Sebesar Rp14.000.001,39

Rekapitulasi pengurangan saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan Koreksi Berkurang tahun 2023 sebesar Rp14.000.001,39 adalah sebagai berikut:

Tabel 179 Rekapitulasi Pengurangan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Koreksi Berkurang Tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1,39
Total		14.000.001,39

Rincian pengurangan saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan Koreksi Berkurang adalah sebagai berikut:

- a. Koreksi berkurang pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp14.000.000,00 merupakan pengurangan atas hutang belanja modal tahun 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023 melalui APBD berupa Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Jasa



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Konsultan Pengawasan Pembangunan Poskesdes Tanah Habang Tahun 2022.

- b. Koreksi berkurang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp1.39 yang berasal dari akumulasi nilai desimal pencairan SP2D yang tidak bisa diakomodir pencatatannya dalam aplikasi pencatatan aset daerah.

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	2.379.190.811.108,42	2.135.209.568.350,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan /atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan irigasi dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan Pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan jaringan telepon.

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada posisi per 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing adalah sebesar Rp2.379.190.811.108,42 dan Rp2.135.209.568.350,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 180 Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal Tahun 2023 (Saldo per 31 Desember 2022)	2.135.209.568.350,00
Mutasi Bertambah Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023	
• Belanja Modal	313.533.424.903,64
• Catat Baru	-
• Hutang	-
• Reklasifikasi	290.427.055.348,00
• Belanja Barang dan Jasa	-
Jumlah Mutasi Bertambah	603.960.480.251,64



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Mutasi Berkurang Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023	
• Reklasifikasi Berkurang	359.668.315.493,00
• Koreksi Kurang	310.922.000,22
Jumlah Mutasi Berkurang	359.979.237.493,22
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	2.379.190.811.108,42

Perhitungan mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 selengkapnya dilihat pada Lampiran 47.

Penambahan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar Rp603.960.480.251,64 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

A. Penambahan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Belanja Modal tahun 2023 Sebesar Rp313.533.424.903.64

Rekapitulasi penambahan saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan Belanja Modal pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 181 Rekapitulasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.303.700,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	294.323.462.473,42
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.743.188.000,00
4	Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.909.363.015,00
5	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.125.885.960,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	95.700.000,00
7	Sekretariat Daerah	32.000.000,00
8	Kecamatan Paringin	264.704.955,22
9	Kecamatan Paringin Selatan	784.858.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	220.958.000,00
Total		313.533.424.903,64



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

B. Penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Bertambah sebesar Rp290.427.055.348,00

Penambahan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Bertambah sebesar Rp290.427.055.348,00 pada SKPD dengan uraian sebagai berikut:

1. Rincian penambahan saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan Reklasifikasi Bertambah Jalan Irigasi dan Jaringan dan berkurang dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup disebabkan kesalahan penganggaran terhadap pengadaan berupa Betonisasi jalan workshop, dengan nomor register 1146.910 dan nilai perolehan sebesar Rp177.745.000,00
2. Rincian penambahan saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan Reklasifikasi Bertambah Jalan Irigasi dan Jaringan dan berkurang dari Konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sebesar Rp290.249.310.348,00 dengan rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran 48.

Pengurangan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar Rp359.979.237.493,22 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

A. Pengurangan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Reklasifikasi berkurang tahun 2023 Sebesar Rp359.668.315.493,00

1. Reklasifikasi berkurang dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-lain sebesar Rp64.491.177.210,00 terdapat pada:
 - a. Pengurangan Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berdasarkan reklasifikasi berkurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta bertambah pada Aset lain-lain sebesar Rp64.447.770.210,00 dengan rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran 49.
 - b. Pengurangan saldo Jalan Irigasi Jaringan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disebabkan adanya reklasifikasi berkurang dan bertambah pada aset Lain-lain sebesar Rp43.400.000,00 disebabkan karena aset tersebut merupakan objek



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

hibah kepada instansi vertikal dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Instalasi Kabel Jaringan Kantor Pengadilan dengan nomor register 928909 dan nilai perolehan sebesar Rp7.200.000,00.
 - 2) Instalasi Jaringan Kantor Pengadilan dengan nomor register 928910 dan nilai perolehan sebesar Rp8.100.000,00.
 - 3) Jaringan Pelayanan (Customer) Kantor Pengadilan dengan nomor register 928913 dan nilai perolehan sebesar Rp8.100.000,00.
 - 4) Jaringan Kantor Pengadilan dengan nomor register 928917 dan nilai perolehan sebesar Rp20.000.000,00.
2. Pengurangan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp294.092.270.273,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengurangan Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berdasarkan reklasifikasi berkurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta bertambah pada Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp293.992.770.273,00.
 - b. Reklasifikasi berkurang Jalan Irigasi dan Bangunan dan bertambah pada Konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa pekerjaan perencanaan jalan ruuk jajanang dengan Pengadaan Nomor : 24.04.10.02.2024.000002 dan nilai perolehan sebesar Rp99.500.000,00.
3. Pengurangan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup berupa Dinding pengaman tebing pagar workshop belakang DPLH dengan nomor register 1146794 sebesar Rp177.368.010,00
4. Pengurangan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp.907.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Mesin Pencacah Plastik dengan nomor register 1031859 dan nilai perolehan sebesar Rp39.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- b. Mesin Pencacah Plastik dengan nomor register 1031860 dan nilai perolehan sebesar Rp39.000.000,00.
- c. Mesin Pencacah Plastik dengan nomor register 1031861 dan nilai perolehan sebesar Rp39.000.000,00.
- d. Mesin Pencacah Plastik dengan nomor register 1031862 dan nilai perolehan sebesar Rp39.000.000,00.
- e. Mesin Pencacah Plastik dengan nomor register 1031863 dan nilai perolehan sebesar Rp39.000.000,00.
- f. Mesin Press Plastik dengan nomor register 1031864 dan nilai perolehan sebesar Rp44.000.000,00.
- g. Mesin Press Plastik dengan nomor register 1031865 dan nilai perolehan sebesar Rp44.000.000,00.
- h. Mesin Press Plastik dengan nomor register 1031866 dan nilai perolehan sebesar Rp44.000.000,00.
- i. Mesin Press Plastik dengan nomor register 1031867 dan nilai perolehan sebesar Rp44.000.000,00.
- j. Mesin Press Plastik dengan nomor register 1031868 dan nilai perolehan sebesar Rp44.000.000,00.
- k. Saringan Besi dengan nomor register 1050230 dan nilai perolehan sebesar Rp98.500.000,00.
- l. Saringan Besi dengan nomor register 1050231 dan nilai perolehan sebesar Rp98.500.000,00.
- m. Saringan Besi dengan nomor register 1050232 dan nilai perolehan sebesar Rp98.500.000,00.
- n. Saringan Besi dengan nomor register 1050233 dan nilai perolehan sebesar Rp98.500.000,00.
- o. Saringan Besi dengan nomor register 1050234 dan nilai perolehan sebesar Rp98.500.000,00.

B. Pengurangan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Koreksi tahun 2023 Sebesar Rp310.922.000,22

- 1. Pengurangan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan koreksi dari akumulasi nilai desimal pencairan SP2D yang tidak bisa mengakomodir pencatatannya dalam aplikasi pencatatan aset daerah, serta karena pembayaran hutang 2022 sebesar Rp310.922.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

2. Pengurangan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada kecamatan paringin selatan berdasarkan Koreksi berkurang sebesar Rp0,22 yang berasal dari akumulasi nilai desimal pencairan SP2D yang tidak bisa diakomodir pencatatannya dalam aplikasi pencatatan aset daerah.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	9.341.290.628,00	9.180.696.428,00

Merupakan nilai Aset Tetap Lainnya pada posisi per 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing adalah sebesar Rp9.341.290.628,00 dan Rp9.180.696.428,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 182 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal Tahun 2023 (Saldo per 31 Desember 2022)	9.180.696.428,00
Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023	
• Belanja Modal	5.354.696.000,00
• Catat Baru	2.362.050,00
• Belanja Barang dan Jasa	37.970.000,00
• Reklasifikasi Bertambah	3.750.000,00
Jumlah Penambahan	5.398.778.050,00
Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023	
• Reklasifikasi Berkurang	548.469.850,00
• Koreksi	4.689.714.000,00
Jumlah Pengurangan	5.238.183.850,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	9.341.290.628,00

Mutasi Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran 50.

Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar Rp5.398.778.050,00 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- A. Penambahan saldo Aset Tetap Lainnya berdasarkan Belanja Modal sebesar Rp5.354.696.000,00
- Penambahan saldo Aset Tetap Lainnya berdasarkan Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp5.354.696.000,00 bertambah pada SKPD dengan rincian sebagaimana tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 183 Rekapitulasi Belanja Modal Bertambah Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.738.914.000,00
2	Sekretariat DPRD	478.250.000,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	106.856.000,00
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	24.900.000,00
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.776.000,00
Total		5.354.696.000,00

- B. Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya berdasarkan Catat Baru Bertambah sebesar Rp2.362.050,00

Rincian penambahan nilai Catat Baru berdasarkan Catat Baru pada tahun 2023 bertambah pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp2.362.050,00 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 51.

- C. Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Barang dan Jasa sebesar Rp37.970.000,00

Rincian penambahan nilai Aset Tetap Lainnya dari Barang dan Jasa pada tahun 2023 bertambah pada 2 SKPD dengan uraian sebagai berikut:

1. SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp36.720.000,00 yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa berupa indukan ikan sebesar Rp36.720.000 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 52.
2. SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.250.000,00 yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dengan rincian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 184 Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

No.	Nama Barang	Register	Nilai (Rp)
1	Permainan dan Olah Raga (Balogo)	1651239	250.000,00
2	Permainan dan Olah Raga (Balogo)	1651240	250.000,00
3	Permainan dan Olah Raga (Balogo)	1651241	250.000,00
4	Permainan dan Olah Raga (Balogo)	1651242	250.000,00
5	Permainan dan Olah Raga (Balogo)	1651243	250.000,00
TOTAL			1.250.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- D. Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Reklasifikasi Bertambah sebesar Rp3.750.000,00

Rincian penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Reklasifikasi bertambah pada tahun 2023 terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.750.000,00 dengan rincian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 185 Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Reklasifikasi Bertambah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

No.	Nama Barang	Register	Nilai (Rp)
1	Seni Gambar, Grafika	1649247	450.000,00
2	Seni Gambar, Grafika	1649248	450.000,00
3	Seni Gambar, Grafika	1649249	450.000,00
4	Seni Gambar, Grafika	1649250	450.000,00
5	Seni Gambar, Grafika	1649251	450.000,00
6	Lukisan Cat Air	1628742	1.500.000,00
TOTAL			3.750.000,00

Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar Rp5.238.183.850,00 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- A. Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya berdasarkan Reklasifikasi Berkurang sebesar Rp548.469.850,00 adalah sebagai berikut:

1. Reklasifikasi berkurang aset tetap lainnya pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan bertambah pada Aset Lain-lain golongan Aset Tetap Lainnya serta ke *extracomtable* sebesar Rp514.293.850,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengurangan saldo Aset Aset Tetap Lainnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan disebabkan reklasifikasi berkurang aset tetap lainnya dan bertambah pada Aset Lain-lain golongan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp475.211.800,00 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 53.
 - b. Pengurangan saldo Aset Aset Tetap Lainnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan disebabkan reklasifikasi berkurang aset tetap lainnya dan bertambah pada *Extracomtable* sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Rp39.082.050,00 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 54.

2. Reklasifikasi berkurang ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata karena kesalahan penganggaran berupa Drone (kamera udara) dengan nomor register 1033013 dan nilai perolehan sebesar Rp24.900.000,00.
3. Reklasifikasi berkurang ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa *Loudspeaker* dengan nomor register 1032643 dan nilai perolehan sebesar Rp5.776.000,00.
4. Reklasifikasi berkurang ke *Extracomtable* pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 186 Reklasifikasi Berkurang ke Extracomtable pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

No.	Nama Barang	Register	Nilai (Rp)
1	Seni Gambar, Grafika	1649247	450.000,00
2	Seni Gambar, Grafika	1649248	450.000,00
3	Seni Gambar, Grafika	1649249	450.000,00
4	Seni Gambar, Grafika	1649250	450.000,00
5	Seni Gambar, Grafika	1649251	450.000,00
6	Permainan dan Olah Raga (Balogo)	1651239	250.000,00
7	Permainan dan Olah Raga (Balogo)	1651240	250.000,00
8	Permainan dan Olah Raga (Balogo)	1651241	250.000,00
9	Permainan dan Olah Raga (Balogo)	1651242	250.000,00
10	Permainan dan Olah Raga (Balogo)	1651243	250.000,00
TOTAL			3.500.000,00

- B. Pengurangan saldo Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Koreksi Berkurang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pengadaan buku untuk pegangan siswa dan guru dalam proses pembelajaran di seluruh sekolah. Alokasi pengadaan buku pegangan dianggarkan dan direalisasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui belanja modal aset tetap lainnya. Namun berdasarkan kriteria, buku-buku tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

maupun *extracomptable* sebesar Rp4.689.714.000,00 Sebagaimana diuraikan pada Lampiran 55.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	12.462.602.215,00	5.289.342.748,00

Merupakan nilai pekerjaan yang belum selesai pengerjaannya pada posisi per 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing adalah Rp12.462.602.215,00 sebesar dan Rp5.289.342.748,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 187 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal Tahun 2023 (Saldo per 31 Desember 2022)	5.289.342.748,00
Mutasi Bertambah Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023	
• Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	77.495.812.693,00
• Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan	294.092.270.273,00
Jumlah Mutasi Bertambah	371.588.082.966,00
Mutasi Berkurang Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023	
• Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	74.165.513.151,00
• Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan	290.249.310.348,00
Jumlah Mutasi Berkurang	364.414.823.499,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	12.462.602.215,000

Penambahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar Rp371.588.082.966,00 diuraikan sebagai berikut:

A. Penambahan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp77.495.812.693,00 disebabkan karena pembangunan yang belum selesai dan belum dapat dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan Saldo Konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berdasarkan reklasifikasi bertambah Konstruksi dalam pengerjaan dan berkurang dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp47.459.786.900,00 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 56.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

2. Penambahan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan reklasifikasi bertambah Konstruksi Dalam Pengerjaan serta berkurang pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.819.822.043,00 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 57.
3. Penambahan Saldo Konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan reklasifikasi bertambah Konstruksi dalam pengerjaan dan berkurang dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp165.110.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Pembangunan Poskesdes Lampihong Kanan dengan nilai perolehan sebesar Rp8.500.000,00.
 - b. Perencanaan Poskesdes Ambakiang dengan nilai perolehan sebesar Rp8.500.000,00.
 - c. Pengawasan Poskesdes Ambakiang dengan nilai perolehan sebesar Rp12.250.000,00.
 - d. Perencanaan Penambah Ruang Pkm Uren dengan nilai perolehan sebesar Rp49.480.000,00.
 - e. Perencanaan Penambah Ruang Pkm Tanah Habang dengan nilai perolehan sebesar Rp24.650.000,00.
 - f. Perencanaan Penyelesaian Puskemas Batumandi dengan nilai perolehan sebesar Rp49.480.000,00.
 - g. Pengawasan Poskesdes Lampihong Kanan dengan nilai perolehan sebesar Rp12.250.000,00.
4. Penambahan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan hasil dari reklasifikasi bertambah pada Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Berkurang dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp51.093.750,00 disebabkan adanya pengadaan yang belum selesai dan belum bisa dimanfaatkan berupa konsultan perencanaan, sedangkan fisik belum dilaksanakan pada tahun berkenaan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Menara Triangle (Desa Mayanau, Puskesmas Tebing Tinggi, Tangalin, Puskesmas Awayan, Hamparaya) dengan nomor bukti 2.16.03.2.02: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5.2.03.03.01.0003 : Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi Pengadaan Nomor :



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

24.04.06.02.2024.000002 dan nilai perolehan sebesar Rp11.877.000,00.

b. Perencanaan Menara Triangle (Desa Hauwai, Desa Surya Tama, Puskesmas Uren, Desa Mamantang) dengan nomor bukti 2.16.03.2.02: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5.2.03.03.01.0003: Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi Pengadaan Nomor: 24.04.06.02.2024.000004 dan nilai perolehan sebesar Rp13.072.250,00.

c. Perencanaan Menara Triangle (Desa Hauwai, Desa Surya Tama, Puskes Uren, Desa Mamantang) dengan nomor bukti 2.16.03.2.02: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5.2.03.03.01.0003: Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi Pengadaan Nomor: 24.04.06.02.2024.000004 dan nilai perolehan sebesar Rp13.072.250,00.

d. Perencanaan Menara Triangle (Desa Hauwai, Desa Surya Tama, Puskes Uren, Desa Mamantang) dengan nomor bukti 2.16.03.2.02 : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5.2.03.03.01.0003 : Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi Pengadaan Nomor : 24.04.06.02.2024.000004 dan nilai perolehan sebesar Rp13.072.250,00.

B. Penambahan Saldo Konstruksi dalam pengerjaan pada SKPD sebesar Rp294.092.270.273,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi bertambah konstruksi dalam pengerjaan berasal dari Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berdasarkan reklasifikasi bertambah Konstruksi dalam pengerjaan dan berkurang dari Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp293.992.770.273,00 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 58.
2. Reklasifikasi bertambah konstruksi dalam pengerjaan berasal dari Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

pekerjaan perencanaan jalan Ruuk-Jajanang dengan Pengadaan Nomor : 24.04.10.02.2024.000002 dan nilai perolehan sebesar Rp99.500.000,00.

Pengurangan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar Rp364.414.823.499,00 diuraikan sebagai berikut:

- A. Pengurangan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan reklasifikasi berkurang dan bertambah pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp74.165.513.151,00 disebabkan karena pembangunan telah selesai dan dapat dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut:
1. Pengurangan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan reklasifikasi berkurang Konstruksi dalam pengerjaan dan Bertambah pada Gedung dan Bangunan berupa Pasar Uren (Pasar Uren) dengan nomor register 1032608 dan nilai perolehan sebesar Rp99.110.000,00.
 2. Pengurangan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan reklasifikasi berkurang Konstruksi dalam pengerjaan dan Bertambah pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp44.273.941.108,00 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 59.
 3. Pengurangan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan reklasifikasi berkurang Konstruksi dalam pengerjaan dan Bertambah pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.792.462.043,00 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 60.
- B. Pengurangan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan reklasifikasi berkurang dan bertambah pada Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp290.249.310.348,00,00 disebabkan karena pembangunan telah selesai dan dapat dimanfaatkan dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 61.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	(2.108.143.707.165,00)	(1.872.837.603.893,16)

Jumlah Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp2.108.143.707.165,00) dan sebesar (Rp1.872.837.603.893,16) dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 188 Saldo Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal Tahun 2023 (Saldo per 31 Desember 2022)	(1.872.837.603.893,16)
Penambahan Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	
Beban Penyusutan 2023	(284.770.467.273,00)
Koreksi Bertambah	(18.362.747.295,00)
Reklasifikasi Bertambah	
• Peralatan dan Mesin	(49.280.000,00)
Jumlah Penambahan	(303.182.494.568,00)
Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	
Koreksi Berkurang	16.612.034.917,29
Reklasifikasi Berkurang	51.264.356.378,87
• Peralatan dan Mesin	11.935.358.908,00
• Gedung dan Bangunan	7.278.714.745,41
• Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.050.282.725,46
Jumlah Pengurangan	67.876.391.296,16
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	(2.108.143.707.165,00)

Mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2023 dilihat pada **Lampiran 62**.

A. Penambahan nilai Akumulasi Penyusutan tahun 2023 sebesar (Rp303.182.494.568,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar (Rp284.770.467.273,00) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 189 Rekapitulasi Beban Penyusutan Tahun 2023
per Golongan Barang**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Beban Penyusutan 2023:	
• Peralatan dan Mesin	(71.506.466.770,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
• Gedung dan Bangunan	(49.640.707.749,00)
• Jalan, Irigasi dan Jaringan	(163.538.601.527,00)
• Aset Tetap Lainnya	(84.691.227,00)
Jumlah Penambahan Beban Penyusutan 2022	(284.770.467.273,00)

Penambahan Beban Penyusutan 2023 sebesar (Rp284.770.467.273,00) dijabarkan lebih lanjut berdasarkan golongan barang per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 190 Rekapitulasi Beban Penyusutan Tahun 2023 Berdasarkan golongan barang per SKPD

No	SKPD	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	772.744.139,00	467.359.892,00	-	-	1.240.104.031,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	234.947.717,00	54.699.951,00	2.663.566,00	-	292.311.234,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.044.155.262,00	120.351.001,00	3.983.695.314,00	-	6.148.201.577,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.679.782.067,00	1.115.805.664,00	53.652.959,00	-	2.849.240.690,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	489.598.415,00	446.454.676,00	12.502.538,00	-	948.555.629,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	306.579.478,00	559.850.947,00	31.429.323,00	7.100.000,00	904.959.748,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	446.967.045,00	237.358.500,00	11.302.156,00	-	695.627.701,00
8	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.461.277.618,00	5.988.964.582,00	1.316.931.718,00	-	32.767.173.918,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.343.792.425,00	2.139.964.023,00	450.466.577,00	-	3.934.223.025,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	611.556.430,00	257.386.876,00	52.279.329,00	-	921.222.635,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	461.259.491,00	2.574.133.640,00	-	-	3.035.393.131,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Jumlah Total (Rp)
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.866.851.827,00	6.660.379.942,00	155.288.371.466,00	-	164.815.603.235,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.098.385.449,00	1.648.609.194,00	172.013.808,00	-	3.919.008.451,00
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.231.115.077,00	16.051.181.930,00	344.457.953,00	-	25.626.754.960,00
15	Dinas Perhubungan	4.131.055.772,00	347.263.834,00	3.192.134,00	-	4.481.511.740,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	426.192.520,00	297.950.272,00	38.452.717,00	-	762.595.509,00
17	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	3.247.635.186,00	710.365.844,00	166.546.850,00	-	4.124.547.880,00
18	Dinas Satpol Pamong Praja	636.311.708,00	81.267.573,00	159.700,00	-	717.738.981,00
19	Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	521.502.286,00	251.887.133,00	787.451.064,00	-	1.560.840.483,00
20	Inspektorat	791.650.026,00	518.184.785,00	26.237.813,00	-	1.336.072.624,00
21	Kecamatan Awayan	172.602.548,00	208.270.859,00	0,00	-	380.873.407,00
22	Kecamatan Batumandi	208.120.584,00	346.806.899,00	745.800,00	-	555.673.283,00
23	Kecamatan Halong	201.656.271,00	250.466.622,00	301.600,00	-	452.424.493,00
24	Kecamatan Juai	147.858.324,00	314.543.035,00	150.000,00	-	462.551.359,00
25	Kecamatan Lampihong	156.215.412,00	311.421.428,00	243.375,00	-	467.880.215,00
26	Kecamatan Paringin	472.667.552,00	584.556.773,00	384.058.176,00	990.000,00	1.442.272.501,00
27	Kecamatan Paringin Selatan	270.763.696,00	221.778.341,00	272.126.941,00	-	764.668.978,00
28	Kecamatan Tebing Tinggi	214.458.383,00	88.230.612,00	521.842,00	-	303.210.837,00
29	Sekretariat Daerah	10.099.624.029,00	6.169.001.063,00	122.692.296,00	76.601.227,00	16.467.918.615,00
30	Sekretariat DPRD	1.759.140.033,00	616.211.858,00	15.954.512,00	-	2.391.306.403,00
Jumlah		71.506.466.770,00	49.640.707.749,00	163.538.601.527,00	84.691.227,00	284.770.467.273,00

2. Koreksi Bertambah Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 sebesar (Rp18.362.747.295,00) dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 191 Rekapitulasi Koreksi Bertambah Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 per Golongan Barang

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(234.353.107,00)
2	Gedung dan Bangunan	(2.221.257.710,00)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(15.907.136.478,00)
Jumlah		(18.362.747.295,00)

Penambahan Koreksi Bertambah Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 sebesar (Rp18.362.747.295,00) dijabarkan lebih lanjut berdasarkan golongan barang per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 192 Rekapitulasi Koreksi Bertambah Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Berdasarkan Golongan Barang per SKPD

No.	SKPD	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.350.000,00	-	-	8.350.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	44.014.657,00	-	-	44.014.657,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	36.013.600,00	-	15.907.136.478,00	15.943.150.078,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	2.221.257.710,00	-	2.221.257.710,00
5	Dinas Perhubungan	145.974.850,00	-	-	145.974.850,00
Jumlah		234.353.107,00	2.221.257.710,00	15.907.136.478,00	18.362.747.295,00

- Reklasifikasi Bertambah Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 sebesar (Rp49.280.000,00) merupakan penambahan Reklasifikasi Bertambah Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 pada Kecamatan Paringin Selatan sebesar (Rp49.280.000,00) disebabkan aset peralatan mesin dari aset lain-lain dengan kondisi sebelumnya rusak berat berubah kondisi menjadi baik dan dapat dipergunakan.

B. Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp67.876.391.296,16 dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp16.612.034.917,29 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 193 Rekapitulasi Koreksi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 per Golongan Barang

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	252.626.854,77
2	Gedung dan Bangunan	31.234.294,51
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.328.173.767,01
4	Aset Tetap Lainnya	1,00
Jumlah		16.612.034.917,29

Penambahan Koreksi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp16.612.034.917,29 dijabarkan lebih lanjut berdasarkan golongan barang per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 194 Rekapitulasi Koreksi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Berdasarkan golongan barang per SKPD

No.	SKPD	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	164,00	-	-	-	164,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13,00	-	6,00	-	19,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	79,00	-	-	-	79,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	73,34	8,00	9,00	-	90,34
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	52,57	10,00	12,00	-	74,57
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	70,00	32,00	-	-	102,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	43,00	4,00	6,00	-	53,00
8	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.031,52	353,24	114,00	-	2.498,76
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	40.045.697,00	211,00	74,56	-	40.045.982,56
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	99,00	8,00	17,00	-	124,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	70,00	43,00	-	-	113,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	234,00	201,02	16.328.173.142,45	-	16.328.173.577,47
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	340,00	13,00	34,00	-	387,00
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.170.882,00	31.232.920,00	142,00	-	32.403.944,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Jumlah Total (Rp)
15	Dinas Perhubungan	211.405.516,00	68,00	-	-	211.405.584,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	156,00	26,00	15,00	-	197,00
17	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	171,87	25,00	10,00	-	206,87
18	Dinas Satpol Pamong Praja	77,89	5,00	-	-	82,89
19	Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99,00	7,00	6,00	-	112,00
20	Inspektorat	87,43	7,00	3,00	-	97,43
21	Kecamatan Awayan	23,00	9,00	-	-	32,00
22	Kecamatan Batumandi	39,00	1,00	-	-	40,00
23	Kecamatan Halong	35,00	4,00	-	-	39,00
24	Kecamatan Juai	36,00	22,00	-	-	58,00
25	Kecamatan Lampihong	30,00	6,00	-	-	36,00
26	Kecamatan Paringin	122,00	60,00	55,00	-	237,00
27	Kecamatan Paringin Selatan	12,00	14,00	12,00	-	38,00
28	Kecamatan Tebing Tinggi	33,00	12,00	3,00	-	48,00
29	Sekretariat Daerah	473,00	202,00	100,00	1,00	776,00
30	Sekretariat DPRD	95,15	23,25	6,00	-	124,40
Jumlah		252.626.854,77	31.234.294,51	16.328.173.767,01	1,00	16.612.034.917,29

2. Reklasifikasi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp51.264.356.378,87 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 195 Rekapitulasi Reklasifikasi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 per Golongan Barang

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	11.935.358.908,00
2	Gedung dan Bangunan	7.278.714.745,41
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.050.282.725,46
Jumlah		51.264.356.378,87

Penambahan Reklasifikasi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp51.264.356.378,87 dijabarkan lebih lanjut berdasarkan golongan barang per SKPD dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 196 Rekapitulasi Reklasifikasi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2023
Berdasarkan golongan barang per SKPD

No.	SKPD	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	73.295.690,00	-	-	73.295.690,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	106.475.233,00	-	-	106.475.233,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.114.000,00	-	-	27.114.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	327.313.437,00	36.125.000,00	-	363.438.437,00
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.745.954,00	-	-	3.745.954,00
6	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.900.160.025,00	334.438.595,81	-	3.234.598.620,81
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.073.403.372,00	-	-	1.073.403.372,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	529.965.562,00	-	2.170.000,00	532.135.562,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	398.230.800,00	-	398.230.800,00
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.430.285.808,00	4.048.202.530,60	32.048.112.725,46	39.526.601.064,06
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	14.500.000,00	-	-	14.500.000,00
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	216.766.000,00	2.221.257.710,00	-	2.438.023.710,00
13	Dinas Perhubungan	718.139.976,00	240.460.109,00	-	958.600.085,00
14	Dinas Satpol Pamong Praja	425.282.009,00	-	-	425.282.009,00
15	Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	131.417.650,00	-	-	131.417.650,00
16	Inspektorat	155.697.149,00	-	-	155.697.149,00
17	Kecamatan Batumandi	52.450.000,00	-	-	52.450.000,00
18	Kecamatan Halong	139.111.083,00	-	-	139.111.083,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
19	Kecamatan Paringin	46.498.667,00	-	-	46.498.667,00
20	Kecamatan Paringin Selatan	127.927.800,00	-	-	127.927.800,00
21	Sekretariat Daerah	469.489.695,00	-	-	469.489.695,00
22	Sekretariat DPRD	966.319.798,00	-	-	966.319.798,00
Jumlah		11.935.358.908,00	7.278.714.745,41	32.050.282.725,46	51.264.356.378,87

C. Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp2.108.143.707.165,00) dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2023 merupakan hasil perhitungan dari Penambahan dan Pengurangan transaksi tahun berjalan terhadap Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2023. Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2023 pergolongan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 197 Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan per Golongan

No.	Aset Tetap	Nilai Rp
1	Peralatan dan Mesin	(456.878.717.732,00)
2	Gedung dan Bangunan	(475.510.054.989,00)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.175.359.868.422,00)
4	Aset Tetap Lainnya	(395.066.022,00)
Jumlah		(2.108.143.707.165,00)

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp2.108.143.707.165,00) dijabarkan lebih lanjut berdasarkan golongan barang per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 198 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per SKPD per Golongan

No.	SKPD	Nilai (Rp)				
		Peralatan Mesin	Gedung Bangunan	Jalan Irigasi Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.504.510.214,00	2.280.136.372,00	-	-	5.784.646.586,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.507.761.412,00	669.358.589,00	26.635.660,00	-	2.203.755.661,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.420.069.923,00	468.511.801,00	20.729.271.056,00	-	29.617.852.780,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	10.465.434.871,00	18.203.656.772,00	510.311.875,00	-	29.179.403.518,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Nilai (Rp)				
		Peralatan Mesin	Gedung Bangunan	Jalan Irigasi Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4.907.801.473,00	5.246.000.147,00	115.878.642,00	-	10.269.680.262,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.526.723.976,00	5.244.417.300,00	162.887.213,00	45.527.000,00	8.979.555.489,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.644.384.331,00	2.196.098.733,00	23.704.060,00	-	5.864.187.124,00
8	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	166.996.725.763,00	56.216.074.803,00	7.695.743.019,00	-	230.908.543.585,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	15.551.086.453,00	20.875.254.449,00	6.085.172.389,00	-	42.511.513.291,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.357.782.226,00	1.742.185.475,00	620.365.593,00	-	6.720.333.294,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	4.248.716.068,00	26.839.042.967,00	419.197.100,00	-	31.506.956.135,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	16.362.840.167,00	35.730.861.996,00	1.123.047.176.889,00	-	1.175.140.879.052,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12.158.135.037,00	12.544.308.162,00	1.026.090.327,00	-	25.728.533.526,00
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	69.808.195.583,00	159.391.572.096,00	3.140.833.695,00	140.778.568,00	232.481.379.942,00
15	Dinas Perhubungan	12.839.728.651,00	2.616.423.065,00	442.464.981,00	-	15.898.616.697,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.538.485.084,00	2.884.328.322,00	994.123.933,00	6.000.000,00	8.422.937.339,00
17	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	18.882.508.566,00	5.435.688.888,00	2.146.816.045,00	-	26.465.013.499,00
18	Dinas Satpol Pamong Praja	4.202.594.836,00	1.310.377.261,00	24.760.100,00	-	5.537.732.197,00
19	Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.080.321.235,00	2.383.454.768,00	820.835.140,00	-	8.284.611.143,00
20	Inspektorat	4.290.608.147,00	5.867.836.262,00	213.348.247,00	-	10.371.792.656,00
21	Kecamatan Aawayan	1.139.627.744,00	2.143.362.266,00	0,00	-	3.282.990.010,00
22	Kecamatan Batumandi	1.375.827.670,00	2.555.426.798,00	2.983.200,00	-	3.934.237.668,00
23	Kecamatan Halong	1.676.477.062,00	2.441.042.005,00	1.508.000,00	-	4.119.027.067,00
24	Kecamatan Juai	1.365.897.767,00	2.330.577.363,00	1.200.000,00	-	3.697.675.130,00
25	Kecamatan Lampihong	1.373.566.716,00	2.804.416.308,00	2.920.500,00	-	4.180.903.524,00
26	Kecamatan Paringin	2.770.203.019,00	6.275.683.932,00	1.269.640.343,00	2.970.000,00	10.318.497.294,00
27	Kecamatan Paringin Selatan	1.816.419.456,00	2.479.109.888,00	819.177.190,00	-	5.114.706.534,00
28	Kecamatan Tebing Tinggi	1.835.241.682,00	1.374.629.683,00	4.741.052,00	-	3.214.612.417,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Nilai (Rp)				
		Peralatan Mesin	Gedung Bangunan	Jalan Irigasi Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
29	Sekretariat Daerah	55.345.923.061,00	77.266.418.872,00	4.319.145.553,00	173.090.454,00	137.104.577.940,00
30	Sekretariat DPRD	12.885.119.539,00	7.693.799.646,00	692.936.620,00	26.700.000,00	21.298.555.805,00
Total		456.878.717.732,00	475.510.054.989,00	1.175.359.868.422,00	395.066.022,00	2.108.143.707.165,00

5.3.1.4. Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	1.142.914.927.750,52	666.464.765.203,00

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.142.914.927.750,52 dan Rp29.047.483.750,00 dan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 199 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
2	Tuntutan Ganti Rugi	538.784.181,00	19.150.000,00
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
4	Aset Tidak Berwujud	4.740.182.600,00	3.617.219.400,00
5	Aset Lain-Lain	118.279.868.621,00	84.412.936.230,00
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.084.137.630,00)	(2.365.737.720,00)
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(76.217.540.021,48)	(56.979.388.831,00)
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	1.098.657.770.000,00	637.760.586.124,00
Saldo Akhir		1.142.914.927.750,52	666.464.765.203,00

5.3.1.4.1. Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	538.784.181,00	19.150.000,00

Jumlah saldo Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp538.784.181,00 dan Rp19.150.000,00. Saldo Tuntutan Ganti Rugi tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 200 Daftar Tuntutan Ganti Rugi

No.	Uraian	Pihak Yang Bertanggungjawab / Yang Berkewajiban Mengembalikan	Nilai TGR Per 31 Desember 2022	Nilai Pengembalian Selama Tahun 2023	Koreksi atau Penghapusan	Saldo Piutang TGR Tahun 2023
			(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	SKTJM hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap SKPD Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2011	Abdul Hakim, S. Sos	19.150.000,00	-	-	19.150.000,00
2	Penyimpangan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Balangan kepada KONI sesuai LHP BPKP Perwakilan kalimantan Selatan tahun 2021	Samsul Fadli,S.Pd	3.792.500,00	-	-	3.792.500,00
		Drs. Syarifudin	7.585.000,00	-	-	7.585.000,00
		H. Duas	508.256.681,00	-	-	508.256.681,00
Jumah			738.720.481,00	-	-	738.720.481,00

5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	4.740.182.600,00	3.617.219.400,00

Aset Tidak Berwujud (ATB) merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.740.182.600,00 dan Rp3.617.219.400,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 201 Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal Tahun 2022 (Saldo per 31 Desember 2023)	3.617.219.400,00
Mutasi Bertambah Aset Tidak Berwujud Tahun 2023	
• Pengadaan Belanja Modal	993.507.200,00
• Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00
• Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	99.456.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	1.122.963.200,00
Mutasi Berkurang Aset Tidak Berwujud Tahun 2023	
Jumlah Mutasi Berkurang	
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	4.740.182.600,00

Perhitungan mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 63.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Penambahan Saldo Aset Tidak Berwujud Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar Rp1.122.963.200,00 diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

A. Penambahan Saldo Aset Tidak Berwujud Kabupaten Balangan pada Tahun 2023 sebesar Rp993.507.200,00 berasal dari Pengadaan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 202 Pengadaan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun 2023

No.	SKPD	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belanja Modal Upgared Aplikasi Kepegawaian (Silka)	35.000.000,00
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belanja Modal Perangkat Lunak (Software)	99.567.000,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belanja Modal Perangkat Lunak (Softwere)	174.270.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Taxation Map	197.750.000,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	UPGRADE APLIKASI INOVDA	25.000.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Aplikasi RKA	34.876.200,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Survey Geolistrik (Penentuan titik lokasi sumur bor) di BBIL	59.400.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software Berupa Pembuatan Aplikasi Pemetaan oleh CV. BERKAH RAZIQ	64.824.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pembuatan Aplikasi Fisheries Global Data (FGD)	94.850.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Survei Geolistrik Berupa Honorarium Pejabat Pembuat komitmen Kontrak : 020.22/688.1/KAN/DKPPP-BLG/2023 Tanggal 16 November	1.040.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud – Survei Geolistrik Berupa Honorarium Pejabat Pengadaan Kontrak : 020.22/688.1/KAN/DKPPP-BLG/2023 Tanggal 16 Novem	680.000,00
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Pengadaan Aplikasi Pelayanan Kartu Kuning	58.000.000,00
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar (SI-SUKA) Berbasis WEB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Balangan	17.500.000,00
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Update Aplikasi E-BKU	17.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Nama Barang	Nilai (Rp)
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Aplikasi Gaji Atau Tunjangan Insentif Non ASN	17.500.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APlikasi Balangan Membaca	95.750.000,00
Total			993.507.200,00

- B. Penambahan Saldo Aset Tidak Berwujud Kabupaten Balangan pada Tahun 2023 sebesar Rp30.000.000,00 berasal dari Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 203 Penambahan Aset Tidak Berwujud dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

No.	SKPD	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aplikasi / Software SIDIK	15.000.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aplikasi / Software ADIS	15.000.000,00
Total			30.000.000,00

- C. Penambahan Saldo Aset Tidak Berwujud Kabupaten Balangan pada Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp99.456.000,00 berupa Penambahan Fitur SipandaBMD berasal dari reklasifikasi peralatan dan mesin.

5.3.1.4.3. Aset Lain-lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	<u>118.279.868.621,00</u>	<u>84.412.936.230,00</u>

Merupakan pos yang digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tidak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp118.279.868.621,00 dan Rp84.412.936.230,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 204 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 Rp
Saldo Awal Tahun 2023 (Saldo per 31 Desember 2022)	84.412.936.230,00
Penambahan Aset Lain-lain Tahun 2023	
Reklasifikasi Bertambah	
• Tanah	17.058.391.712,00
• Peralatan dan Mesin	15.225.157.892,00
• Gedung dan Bangunan	34.027.140.269,00
• Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.491.177.210,00
• Aset Tetap Lainnya	475.211.800,00
Jumlah Penambahan	131.277.078.883,00
Pengurangan Aset Lain-lain Tahun 2023	
Reklasifikasi Berkurang	
• Peralatan dan Mesin	49.280.000,00
Penghapusan	
• Tanah	13.609.848.412,00
• Peralatan dan Mesin	6.658.328.665,00
• Gedung dan Bangunan	25.471.264.855,00
• Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.117.212.760,00
• Aset Tetap Lainnya	504.211.800,00
Jumlah Pengurangan	97.410.146.492,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	118.279.868.621,00

Rincian Perhitungan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 selengkapnya dapat pada Lampiran 64.

Penambahan Nilai Aset Lain-Lain Kabupaten Balangan sebesar Rp131.277.078.883,00 pada tahun 2023 disebabkan hal-hal sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- A. Penambahan saldo Aset Lain-lain dari Reklasifikasi bertambah dari aset tetap tanah sebesar Rp17.058.391.712,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 205 Rekapitulasi Penambahan Saldo Aset Lain-lain dari Rekalsifikasi Tanah

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	15.404.048.000,00
2	Sekretariat Daerah	1.061.344.920,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	592.998.792,00
Total		17.058.391.712,00

Rincian reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain dari aset tetap tanah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Saldo Aset lain-lain golongan barang Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain golongan tanah dan berkurang dari aset tanah sebesar Rp15.404.048.000,00 dengan rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran 65.
2. Penambahan Saldo saldo aset lain-lain golongan Tanah pada Sekretariat Daerah bersumber dari reklasifikasi bertambah aset lain-lain golongan tanah dan berkurang dari aset tetap tanah sebesar Rp1.061.344.920,00 yang menjadi objek hibah kepada instansi vertikal dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah Kantor UKK Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin Kab. Balangan (Eks. Dinas Koperasi) dengan nomor register 4156 dan nilai perolehan sebesar Rp944.319.620,00
 - b. Tanah Perkantoran dengan nomor register 929918 dan nilai perolehan sebesar Rp117.025.300,00
3. Penambahan saldo Aset Lain-Lain golongan tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan reklasifikasi bertambah pada Aset Lain-lain golongan tanah dan berkurang pada Aset Tanah berupa Tanah SLB Paringin dengan nomor register 943011 dan nilai perolehan sebesar Rp592.998.792,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- B. Penambahan saldo Aset Lain-lain dari Reklasifikasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.225.157.892,00 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 206 Penambahan saldo Aset Lain-lain dari Reklasifikasi Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.434.824.558,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.900.160.025,00
3	Sekretariat Daerah	2.127.770.541,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.984.764.947,00
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.081.843.805,00
6	Sekretariat DPRD	966.319.798,00
7	Dinas Perhubungan	827.836.248,00
8	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	425.932.409,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	327.313.437,00
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	216.766.000,00
11	Inspektorat	155.697.149,00
12	Kecamatan Halong	143.202.750,00
13	Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	136.966.150,00
14	Kecamatan Paringin Selatan	129.979.000,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	111.546.500,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	76.295.690,00
17	Kecamatan Batumandi	52.450.000,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.910.000,00
19	Kecamatan Paringin	50.714.000,00
20	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	14.500.000,00
21	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	9.364.885,00
Total		15.225.157.892,00

Penambahan saldo Aset Lain-lain dari Reklasifikasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.225.157.892,00 karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak dipergunakan Pemerintah Daerah pada tabel diatas diuraikan dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

1. Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain golongan peralatan dan mesin dan berkurang dari aset peralatan dan mesin sebesar Rp3.434.824.558,00 dengan rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran 66.
2. Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain golongan peralatan dan mesin dan berkurang dari aset peralatan dan mesin sebesar Rp2.900.160.025,00 dengan rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran 67.
3. Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah bersumber dari reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain sebesar Rp2.127.770.541,00 dengan kondisi rusak berat dan menjadi objek hibah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah bersumber dari reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain sebesar Rp71.205.750,00 dengan kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sepeda Motor dengan nomor register 2447 dan nilai perolehan sebesar Rp14.250.000,00
 2. Sepeda Motor dengan nomor register 2445 dan nilai perolehan sebesar Rp14.250.000,00
 3. Sepeda Motor dengan nomor register 4717 dan nilai perolehan sebesar Rp16.440.000,00
 4. Sepeda Motor dengan nomor register 4730 dan nilai perolehan sebesar Rp16.440.000,00
 5. Baliho dengan nomor register 14145 dan nilai perolehan sebesar Rp9.825.750,00
 - b. Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah bersumber dari reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain sebesar Rp2.056.564.791,00 yang menjadi objek hibah kepada instansi vertikal dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 68.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4. Penambahan Saldo Aset Lain-lain pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp1.984.764.947,00 merupakan hasil dari reklasifikasi bertambah aset lain-lain dan berkurang pada aset tetap golongan barang Peralatan dan Mesin karena kondisi rusak berat serta beberapa menjadi objek hibah kepada instansi vertikal, rincian dimaksud dijelaskan sebagai berikut
 - a. Penambahan Saldo Aset Lain-lain pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp124.044.287,00 merupakan hasil dari reklasifikasi bertambah aset lain-lain dan berkurang pada aset tetap golongan barang Peralatan dan Mesin dengan kondisi rusak berat, rincian dimaksud dijelaskan sebagai berikut:
 1. Kulkas dengan nomor register 2100 dan nilai perolehan sebesar Rp1.750.000,00.
 2. AC dengan nomor register 2729 dan nilai perolehan sebesar Rp3.875.000,00.
 3. TV LED 49inch dengan nomor register 72021 dan nilai perolehan sebesar Rp6.400.000,00.
 4. Microphone Rapat dengan nomor register 72013 dan nilai perolehan sebesar Rp1.980.000,00.
 5. Microphone Rapat dengan nomor register 72014 dan nilai perolehan sebesar Rp1.980.000,00.
 6. UPS dengan nomor register 89590 dan nilai perolehan sebesar Rp1.300.000,00.
 7. UPS dengan nomor register 89382 dan nilai perolehan sebesar Rp2.915.000,00.
 8. UPS dengan nomor register 45351 dan nilai perolehan sebesar Rp2.838.571,00.
 9. UPS dengan nomor register 45352 dan nilai perolehan sebesar Rp2.838.571,00.
 10. Handy Talkie dengan nomor register 2557 dan nilai perolehan sebesar Rp1.200.000,00.
 11. Handy Talky dengan nomor register 89378 dan nilai perolehan sebesar Rp1.995.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

12. Handy Talky dengan nomor register 89377 dan nilai perolehan sebesar Rp1.995.000,00.
 13. Proyektor dengan nomor register 2507 dan nilai perolehan sebesar Rp13.450.000,00.
 14. LAPTOP dengan nomor register 97872 dan nilai perolehan sebesar Rp11.000.000,00.
 15. Note book dengan nomor register 53602 dan nilai perolehan sebesar Rp20.000.000,00.
 16. Komputer Notebook dengan nomor register 2283 dan nilai perolehan sebesar Rp13.400.000,00.
 17. LAPTOP dengan nomor register 45339 dan nilai perolehan sebesar Rp8.250.000,00.
 18. Monitor dengan nomor register 13660 dan nilai perolehan sebesar Rp2.500.000,00.
 19. PRINTER DOT MATRIX dengan nomor register 45343 dan nilai perolehan sebesar Rp2.738.571,00.
 20. PRINTER MULTI FUNGSI dengan nomor register 45344 dan nilai perolehan sebesar Rp9.138.574,00.
 21. Printer Laser dengan nomor register 72084 dan nilai perolehan sebesar Rp1.000.000,00.
 22. Printer Laser dengan nomor register 72087 dan nilai perolehan sebesar Rp1.000.000,00.
 23. Printer Laser dengan nomor register 72088 dan nilai perolehan sebesar Rp1.000.000,00.
 24. Printer Brother dengan nomor register 39722 dan nilai perolehan sebesar Rp9.500.000,00.
- b. Penambahan saldo aset lain-lain Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disebabkan adanya reklasifikasi bertambah pada aset Lain-lain dan berkurang dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.860.720.660,00 disebabkan karena aset tersebut merupakan objek hibah kepada instansi vertikal dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 69.
5. Penambahan Saldo Aset Lain-lain pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan merupakan hasil dari reklasifikasi



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

bertambah aset lain-lain dan berkurang pada aset tetap golongan Peralatan dan Mesin disebabkan karena rusak berat sebesar Rp1.081.843.805,00.

6. Penambahan saldo aset lain-lain Sekretariat DPRD disebabkan adanya reklasifikasi bertambah dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp966.319.798,00 disebabkan karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan akan ditindaklanjuti dengan usul penghapusan dan usul pemusnahan, dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 70.
7. Penambahan saldo aset lain-lain Dinas Perhubungan disebabkan adanya reklasifikasi bertambah dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp827.836.248,00 disebabkan karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 71.
8. Penambahan saldo aset lain-lain Dinas Satuan Polisi Pamong Praja disebabkan adanya reklasifikasi bertambah dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp425.932.409,00 disebabkan karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Mobil Dinas / Operasional (Double Cabin) All New Ford Ranger Double Cabin XLT 3,2L 4x4 MT VIN 2014 dengan nomor register 13372 dan nilai perolehan sebesar Rp369.550.000,00.
 - b. Radio HF/FM (Handy Talky) dengan nomor register 49989 dan nilai perolehan sebesar Rp1.435.909,00.
 - c. Radio Mobil dengan nomor register 35087 dan nilai perolehan sebesar Rp2.500.000,00.
 - d. Komputer PC All in1 dengan nomor register 49976 dan nilai perolehan sebesar Rp6.875.000,00.
 - e. Printer Brother DCP dengan nomor register 70687 dan nilai perolehan sebesar Rp3.750.000,00.
 - f. Printer Canon Pixma G3010 dengan nomor register 70688 dan nilai perolehan sebesar Rp2.600.000,00.
 - g. Printer dengan nomor register 44633 dan nilai perolehan sebesar Rp3.813.500,00.
 - h. Printer Canon Pixma G3010 dengan nomor register 70689 dan nilai perolehan sebesar Rp2.600.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- i. Printer dengan nomor register 13806 dan nilai perolehan sebesar Rp2.650.000,00.
- j. Karpet dengan nomor register 5216 dan nilai perolehan sebesar Rp3.500.000,00.
- k. Lemari Besi dengan nomor register 951 dan nilai perolehan sebesar Rp3.474.250,00.
- l. Lemari Besi dengan nomor register 899 dan nilai perolehan sebesar Rp3.388.250,00.
- m. Lemari Besi dengan nomor register 953 dan nilai perolehan sebesar Rp3.474.250,00.
- n. Mesin Penghancur Kertas dengan nomor register 100849 dan nilai perolehan sebesar Rp1.626.000,00.
- o. Sofa dengan nomor register 39246 dan nilai perolehan sebesar Rp7.280.000,00.
- p. Air Conditioner/ AC dengan nomor register 32681 dan nilai perolehan sebesar Rp4.915.250,00.
- q. Kipas Angin dengan nomor register 49978 dan nilai perolehan sebesar Rp1.000.000,00.
- r. Radio HF/FM (Handy Talkie) dengan nomor register 35068 dan nilai perolehan sebesar Rp1.500.000,00.
- 9. Penambahan saldo aset lain-lain Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah disebabkan adanya reklasifikasi bertambah dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp327.313.437,00. disebabkan karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagaimana terlampir pada Lampiran 72.
- 10. Penambahan saldo aset lain-lain Badan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disebabkan adanya reklasifikasi bertambah dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp216.766.000,00 disebabkan karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki/FK110SD DA 629 YA dengan nomor register 25270 dan nilai perolehan sebesar Rp11.515.000,00
 - b. Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki/FK110SD DA 599 YA dengan nomor register 25177 dan nilai perolehan sebesar Rp11.515.000,00
 - c. Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki/FK110SD DA 598 YA dengan nomor register 24933 dan nilai perolehan sebesar Rp11.515.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- d. Sepeda Motor Yamaha Vega DA 530 YA dengan nomor register 2615 dan nilai perolehan sebesar Rp11.550.000,00
 - e. Sepeda Motor Yamaha Vega DA 533 YA dengan nomor register 2514 dan nilai perolehan sebesar Rp11.550.000,00
 - f. Sepeda Motor Yamaha Vega DA 535 YA dengan nomor register 2510 dan nilai perolehan sebesar Rp11.550.000,00
 - g. Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki/FK110SD DA 603 YA dengan nomor register 25188 dan nilai perolehan sebesar Rp11.515.000,00
 - h. Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki/FK110SD DA 611 YA dengan nomor register 25218 dan nilai perolehan sebesar Rp11.515.000,00
 - i. Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki/FK110SD DA 614 YA dengan nomor register 25226 dan nilai perolehan sebesar Rp11.515.000,00
 - j. Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki/FK110SD DA 616 YA dengan nomor register 25237 dan nilai perolehan sebesar Rp11.515.000,00
 - k. Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki/FK110SD DA 624 YA dengan nomor register 25256 dan nilai perolehan sebesar Rp11.515.000,00
 - l. Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki/FK110SD DA 625 YA dengan nomor register 25258 dan nilai perolehan sebesar Rp11.515.000,00
 - m. Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sepeda Motor Operasional HONDA DA 513 YG dengan nomor register 40750 dan nilai perolehan sebesar Rp17.376.000,00
 - n. Kendaraan Dinas Roda Dua Suzuki DC -CDI DA 569 YC dengan nomor register 5645 dan nilai perolehan sebesar Rp13.855.000,00
 - o. Kendaraan dinas roda dua Kepsek SUZUKI DA 507 YB dengan nomor register 6479 dan nilai perolehan sebesar Rp15.750.000,00.
 - p. Sepeda Motor Suzuki/EN125A DA 786 YA dengan nomor register 24786 dan nilai perolehan sebesar Rp15.750.000,00.
 - q. Sepeda Motor Suzuki/EN125A DA 778 YA dengan nomor register 24775 dan nilai perolehan sebesar Rp15.750.000,00.
11. Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Inspektorat Kabupaten bersumber dari reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain dan berkurang pada aset peralatan dan mesin sebesar Rp155.697.149,00 kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- a. Proyektor infocus EN224 dengan nomor register 44978 dan nilai perolehan sebesar Rp8.925.000,00.
 - b. Proyektor Sony VPL EX 230 dengan nomor register 44977 dan nilai perolehan sebesar Rp7.325.000,00.
 - c. Proyektor dengan nomor register 12235 dan nilai perolehan sebesar Rp14.945.455,00.
 - d. Proyektor dengan nomor register 11782 dan nilai perolehan sebesar Rp9.750.000,00.
 - e. LAPTOP dengan nomor register 12174 dan nilai perolehan sebesar Rp7.024.500,00.
 - f. LAPTOP dengan nomor register 12176 dan nilai perolehan sebesar Rp7.024.500,00.
 - g. notebook dengan nomor register 12177 dan nilai perolehan sebesar Rp7.024.500,00.
 - h. notebook dengan nomor register 12179 dan nilai perolehan sebesar Rp7.024.500,00.
 - i. notebook dengan nomor register 23971 dan nilai perolehan sebesar Rp7.800.561,00.
 - j. notebook dengan nomor register 23975 dan nilai perolehan sebesar Rp7.800.561,00.
 - k. notebook dengan nomor register 23978 dan nilai perolehan sebesar Rp7.800.561,00.
 - l. Note Book dengan nomor register 23983 dan nilai perolehan sebesar Rp13.609.511,00.
 - m. Camera CCTV dengan nomor register 39731 dan nilai perolehan sebesar Rp12.800.000,00.
 - n. CCTV dengan nomor register 12059 dan nilai perolehan sebesar Rp28.867.500,00.
 - o. kamera CCTV perlengkapan ,TV Panasonic 24 INC dengan nomor register 51673 dan nilai perolehan sebesar Rp7.975.000,00.
12. Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Kecamatan Halong bersumber dari reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain dan berkurang pada aset peralatan dan mesin sebesar Rp143.202.750,00 disebabkan karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 73.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

13. Penambahan saldo aset lain-lain Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disebabkan adanya reklasifikasi bertambah dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp136.966.150,00 disebabkan karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
- a. Komputer PC All in One 7 dari 7 dengan nomor register 70860 dan nilai perolehan sebesar Rp16.645.500,00.
 - b. Komputer PC All in One 4 dari 7 dengan nomor register 70857 dan nilai perolehan sebesar Rp16.645.500,00.
 - c. Komputer PC dengan nomor register 5343 dan nilai perolehan sebesar Rp4.307.000,00.
 - d. Komputer PC dengan nomor register 13097 dan nilai perolehan sebesar Rp5.000.000,00.
 - e. Laptop dengan nomor register 5353 dan nilai perolehan sebesar Rp9.873.000,00.
 - f. Laptop dengan nomor register 5355 dan nilai perolehan sebesar Rp9.873.000,00.
 - g. Laptop dengan nomor register 5484 dan nilai perolehan sebesar Rp8.714.400,00.
 - h. Laptop dengan nomor register 13089 dan nilai perolehan sebesar Rp8.064.000,00.
 - i. Laptop dengan nomor register 13091 dan nilai perolehan sebesar Rp8.064.000,00.
 - j. laptop dengan nomor register 52910 dan nilai perolehan sebesar Rp14.979.750,00.
 - k. laptop dengan nomor register 41323 dan nilai perolehan sebesar Rp13.400.000,00.
 - l. laptop dengan nomor register 44349 dan nilai perolehan sebesar Rp10.000.000,00.
 - m. Laptop dengan nomor register 1586 dan nilai perolehan sebesar Rp11.400.000,00
14. Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Kecamatan Paringin Selatan bersumber dari reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain dan berkurang pada aset peralatan dan mesin sebesar Rp129.979.000,00 kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- a. UPS dengan nomor register 32611 dan nilai perolehan sebesar Rp1.000.000,00.
- b. Receiver+attechment dengan nomor register 32576 dan nilai perolehan sebesar Rp1.200.000,00.
- c. Meja 1/2 biro dengan nomor register 12463 dan nilai perolehan sebesar Rp1.200.000,00.
- d. Meja 1/2 biro dengan nomor register 12464 dan nilai perolehan sebesar Rp1.200.000,00.
- e. Meja 1/2 biro dengan nomor register 12465 dan nilai perolehan sebesar Rp1.200.000,00.
- f. Reserver digital parabola dengan nomor register 7145 dan nilai perolehan sebesar Rp1.250.000,00.
- g. Reserver digital parabola dengan nomor register 7153 dan nilai perolehan sebesar Rp1.250.000,00.
- h. Reserver digital parabola dengan nomor register 7842 dan nilai perolehan sebesar Rp1.250.000,00.
- i. Televisi dengan nomor register 5531 dan nilai perolehan sebesar Rp1.400.000,00.
- j. Penghancur Kertas dengan nomor register 40015 dan nilai perolehan sebesar Rp1.400.000,00.
- k. Wereless dengan nomor register 11830 dan nilai perolehan sebesar Rp1.500.000,00.
- l. Reserver parabola dengan nomor register 15696 dan nilai perolehan sebesar Rp1.750.000,00.
- m. Tangga Alumanuim dengan nomor register 35040 dan nilai perolehan sebesar Rp1.800.000,00.
- n. UPS dengan nomor register 50776 dan nilai perolehan sebesar Rp2.250.000,00.
- o. UPS dengan nomor register 50777 dan nilai perolehan sebesar Rp2.250.000,00.
- p. Televisi dengan nomor register 12457 dan nilai perolehan sebesar Rp2.500.000,00.
- q. AC dengan nomor register 7126 dan nilai perolehan sebesar Rp3.500.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- r. Komputer dengan nomor register 5524 dan nilai perolehan sebesar Rp4.500.000,00.
- s. Komputer dengan nomor register 5528 dan nilai perolehan sebesar Rp5.000.000,00.
- t. Wireless dengan nomor register 52712 dan nilai perolehan sebesar Rp5.000.000,00.
- u. Sofa dengan nomor register 1772 dan nilai perolehan sebesar Rp5.000.000,00.
- v. Alat Pemeriksa Kesehatan dengan nomor register 99713 dan nilai perolehan sebesar Rp5.128.000,00.
- w. laptop dengan nomor register 13738 dan nilai perolehan sebesar Rp7.525.000,00.
- x. lap top dengan nomor register 13739 dan nilai perolehan sebesar Rp7.525.000,00.
- y. Printer dengan nomor register 32606 dan nilai perolehan sebesar Rp8.000.000,00.
- z. Komputer PC dengan nomor register 7321 dan nilai perolehan sebesar Rp8.150.000,00.
- aa. LCD proyektor dengan nomor register 13737 dan nilai perolehan sebesar Rp8.500.000,00.
- bb. Komputer dengan nomor register 5520 dan nilai perolehan sebesar Rp9.845.000,00.
- cc. Komputer untur Server dengan nomor register 1214 dan nilai perolehan sebesar Rp9.845.000,00.
- dd. Sepeda Motor dengan nomor register 5537 dan nilai perolehan sebesar Rp18.061.000,00
- 15. Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersumber dari reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain dan berkurang pada aset peralatan dan mesin sebesar Rp111.546.500,00 kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Televisi dengan nomor register 7371 dan nilai perolehan sebesar Rp3.500.000,00.
 - b. Printer dengan nomor register 7356 dan nilai perolehan sebesar Rp1.900.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- c. Komputer PC dengan nomor register 13622 dan nilai perolehan sebesar Rp12.435.000,00.
 - d. AC dengan nomor register 6901 dan nilai perolehan sebesar Rp4.375.000,00.
 - e. Speaker Box dengan nomor register 7389 dan nilai perolehan sebesar Rp8.305.000,00.
 - f. Notebook dengan nomor register 36537 dan nilai perolehan sebesar Rp14.850.000,00.
 - g. Kursi_Rapat_Pimpinan dengan nomor register 807564 dan nilai perolehan sebesar Rp1.248.000,00.
 - h. LAPTOP ASUS VIVOBOK A509FJ dengan nomor register 88916 dan nilai perolehan sebesar Rp14.465.000,00.
 - i. Priter Brother- MFC-T810W dengan nomor register 88859 dan nilai perolehan sebesar Rp4.983.000,00.
 - j. Meja Rapat dengan nomor register 13645 dan nilai perolehan sebesar Rp1.843.000,00.
 - k. Microfone Wireless dengan nomor register 35147 dan nilai perolehan sebesar Rp2.915.000,00.
 - l. AC dengan nomor register 35114 dan nilai perolehan sebesar Rp6.077.500,00.
 - m. Laptop dengan nomor register 6947 dan nilai perolehan sebesar Rp9.900.000,00.
 - n. Komputer dengan nomor register 36535 dan nilai perolehan sebesar Rp9.900.000,00.
 - o. Notebook dengan nomor register 36538 dan nilai perolehan sebesar Rp14.850.000,00.
16. Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersumber dari reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain dan berkurang pada aset peralatan dan mesin sebesar Rp76.295.690,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sepeda Motor (Suzuki / New Smash) dengan nomor register 2977 dengan nilai perolehan sebesar Rp7.500.000,00.
 - b. Tong Air Stainless (Arwana Stanlish) dengan nomor register 42053 dengan nilai perolehan sebesar Rp5.110.990,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- c. Dispenser (Modena) dengan nomor register 42054 dengan nilai perolehan sebesar Rp3.000.000,00.
 - d. Mic Wireless (SHURE / UT42) dengan nomor register 44461 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.783.600,00.
 - e. Mic Wireless (SHURE / UT42) dengan nomor register 44462 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.783.600,00.
 - f. Proyektor / LCD (SONY DX-100) dengan nomor register 15716 dengan nilai perolehan sebesar Rp7.800.000,00.
 - g. Laptop / Note Book (Acer Aspire Core i3) dengan nomor register 34496 dengan nilai perolehan sebesar Rp7.700.000,00.
 - h. Komputer Note Book / Lap top (sony Vaio) dengan nomor register 3172 dengan nilai perolehan sebesar Rp12.250.000,00.
 - i. Printer Epson (Epson DOT MATRIX LX-50) dengan nomor register 89257 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.700.000,00.
 - j. Printer Epson PLQ 30 (EPSON PLQ 30) dengan nomor register 98618 dengan nilai perolehan sebesar Rp9.000.000,00.
 - k. Printer (HP Smart Tank 515 Wireless) dengan nomor register 98931 dengan nilai perolehan sebesar Rp3.000.000,00
 - l. Printer (HP DESKJET GT 5820 / Printer/Caner/FC) dengan nomor register 50708 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.972.500,00.
 - m. Printer (Canon G 1000 / Printer/Caner/FC) dengan nomor register 71829 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.850.000,00.
 - n. Komputer server /CPU (-) dengan nomor register 2142 dengan nilai perolehan sebesar Rp9.845.000,00.
17. Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Kecamatan Batumandi bersumber dari reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain dan berkurang pada aset peralatan dan mesin sebesar Rp.52.450.000,00 disebabkan karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sepeda Motor Thunder dengan nomor register 1308 dan nilai perolehan sebesar Rp14.000.000,00.
 - b. White Board dengan nomor register 39560 dan nilai perolehan sebesar Rp1.000.000,00.
 - c. AC dengan nomor register 39552 dan nilai perolehan sebesar Rp6.250.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- d. AC dengan nomor register 39553 dan nilai perolehan sebesar Rp6.250.000,00.
 - e. AC dengan nomor register 42828 dan nilai perolehan sebesar Rp6.250.000,00.
 - f. Podium Minimalis dengan nomor register 35159 dan nilai perolehan sebesar Rp5.000.000,00.
 - g. Mimbar Upacara Minimalis dengan nomor register 42816 dan nilai perolehan sebesar Rp3.750.000,00.
 - h. Note Book HP Probook dengan nomor register 7580 dan nilai perolehan sebesar Rp9.950.000,00.
18. Penambahan pada Aset Lain-lain Peralatan Mesin karena reklasifikasi berkurang peralatan dan mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp50.910.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Selang 1,5 (Selang Untuk Mobil Damkar) dengan nomor register 44572 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.250.000,00.
 - b. Selang 1,5 (Selang Untuk Mobil Damkar) dengan nomor register 44574 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.250.000,00.
 - c. Selang 1,5 (Selang Untuk Mobil Damkar) dengan nomor register 44575 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.250.000,00.
 - d. Selang 1,5 (Selang Untuk Mobil Damkar) dengan nomor register 44576 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.250.000,00.
 - e. Selang 1,5 (Selang Untuk Mobil Damkar) dengan nomor register 44577 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.250.000,00.
 - f. Perahu Karet Sedang dengan nomor register 121490 dengan nilai perolehan sebesar Rp19.830.000,00.
 - g. Perahu Karet Sedang dengan nomor register 121491 dengan nilai perolehan sebesar Rp19.830.000,00.
19. Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Kecamatan Paringin bersumber dari reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain dan berkurang pada aset peralatan dan mesin sebesar Rp50.714.000,00 kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
- a. Mesin Cuci dengan nomor register 1622 dan nilai perolehan sebesar Rp2.500.000,00.
 - b. Mesin cuci dengan nomor register 97757 dan nilai perolehan sebesar Rp3.955.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- c. AC dengan nomor register 39479 dan nilai perolehan sebesar Rp4.300.000,00.
 - d. AC dengan nomor register 12857 dan nilai perolehan sebesar Rp5.000.000,00.
 - e. AC dengan nomor register 44685 dan nilai perolehan sebesar Rp4.259.000,00.
 - f. AC dengan nomor register 15881 dan nilai perolehan sebesar Rp4.850.000,00.
 - g. AC dengan nomor register 1187 dan nilai perolehan sebesar Rp3.850.000,00.
 - h. Dispenser dengan nomor register 88735 dan nilai perolehan sebesar Rp1.500.000,00.
 - i. Dispenser dengan nomor register 852 dan nilai perolehan sebesar Rp1.500.000,00.
 - j. RECEIVER dengan nomor register 68835 dan nilai perolehan sebesar Rp2.000.000,00.
 - k. Komputer PC dengan nomor register 88722 dan nilai perolehan sebesar Rp7.000.000,00.
 - l. Printer Multi Inkjet dengan nomor register 33484 dan nilai perolehan sebesar Rp5.000.000,00.
 - m. printer dengan nomor register 44781 dan nilai perolehan sebesar Rp5.000.000,00.
20. Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan peralatan dan mesin pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja bersumber dari reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain dan berkurang pada aset peralatan dan mesin sebesar Rp14.500.000,00 kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
- a. Papan Pengumuman dengan nomor register 67471 dan nilai perolehan sebesar Rp8.500.000,00.
 - b. Papan Pengumuman (Baleho) dengan nomor register 5302 dan nilai perolehan sebesar Rp6.000.000,00.
21. Penambahan Saldo Aset Lain-lain Golongan Peralatan dan mesin pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan hasil dari reklasifikasi bertambah pada aset lain-lain Golongan Peralatan dan mesin dan berkurang pada aset tetap golongan Peralatan dan Mesin disebabkan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

aset tersebut merupakan objek penjualan berupa Brankas dengan nomor register 44377 dan nilai perolehan sebesar Rp9.364.885,00.

- C. Penambahan saldo Aset lain-lain dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp34.027.140.269,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 207 Rekapitulasi Penambahan Reklasifikasi Aset Lain-lain
dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan**

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.152.348.200,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	29.282.283.633,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	589.962.721,00
4	Dinas Perhubungan	463.944.715,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	496.101.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	42.500.000,00
Total		34.027.140.269,00

1. Penambahan saldo Aset Lain-lain golongan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Reklasifikasi bertambah Aset Lain-lain golongan Gedung dan Bangunan dan berkurang pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.152.348.200,00 merupakan objek hibah kepada pemerintah provinsi dalam rangka menyelaraskan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Gedung 1 SLB dengan nomor register 1033350 dan nilai perolehan sebesar Rp129.582.000,00
 - b. Gedung 2 SLB dengan nomor register 1033351 dan nilai perolehan sebesar Rp421.423.200,00
 - c. Gedung 3 SLB dengan nomor register 1033352 dan nilai perolehan sebesar Rp212.840.000,00
 - d. Gedung 4 SLB dengan nomor register 1033353 dan nilai perolehan sebesar Rp212.840.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- e. Gedung 5 SLB dengan nomor register 1033354 dan nilai perolehan sebesar Rp164.262.400,00
- f. Gedung 6 SLB dengan nomor register 1033355 dan nilai perolehan sebesar Rp227.238.000,00
- g. Gedung 7 SLB dengan nomor register 1033356 dan nilai perolehan sebesar Rp361.828.000,00
- h. Gedung 8 SLB dengan nomor register 1033357 dan nilai perolehan sebesar Rp105.168.000,00
- i. Gedung 9 SLB dengan nomor register 1033358 dan nilai perolehan sebesar Rp105.168.000,00
- j. Gedung 10 SLB dengan nomor register 1033359 dan nilai perolehan sebesar Rp76.685.000,00
- k. Gedung 11 SLB dengan nomor register 1033360 dan nilai perolehan sebesar Rp25.540.800,00
- l. Gedung 12 SLB dengan nomor register 1033361 dan nilai perolehan sebesar Rp319.260.000,00
- m. Gedung 13 SLB dengan nomor register 1033362 dan nilai perolehan sebesar Rp258.412.800,00
- n. Gedung 14 SLB dengan nomor register 1033363 dan nilai perolehan sebesar Rp532.100.000,00
- 2. Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain golongan Jalan Irigasi dan Jaringan dan berkurang dari aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp64.145.654.210,00.
- 3. Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain golongan Gedung dan Bangunan dan berkurang dari aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp589.962.721,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Poskesdes Juai dengan nomor register 620 dan nilai perolehan sebesar Rp222.059.000,00.
 - b. Poskesdes juuh tb. tinggi dengan nomor register 698 dan nilai perolehan sebesar Rp83.346.450,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- c. Poskesdes Bungur dengan nomor register 658 dan nilai perolehan sebesar Rp193.515.333,00.
- d. Garasi dan Parkir Puskesmas Awayan dengan nomor register 266 dan nilai perolehan sebesar Rp91.041.938,00.
- 4. Penambahan saldo aset lain-lain Dinas Perhubungan disebabkan adanya reklasifikasi bertambah dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp463.944.715,00 disebabkan karena aset tersebut dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Musholla Terminal Paringin dengan nomor register 217 dan nilai perolehan sebesar Rp27.000.000,00.
 - b. Pos Jaga Terminal Dishubkominfo dengan nomor register 3634 dan nilai perolehan sebesar Rp29.975.000,00.
 - c. Kamar Mandi dan Toilet Terminal Paringin dengan nomor register 2704 dan nilai perolehan sebesar Rp112.500.810,00.
 - d. Terminal Paringin dengan nomor register 4006 dan nilai perolehan sebesar Rp112.650.950,00.
 - e. Halte Ojek Terminal Paringin dengan nomor register 200 dan nilai perolehan sebesar Rp59.460.000,00.
 - f. Halte Paringin dengan nomor register 197 dan nilai perolehan sebesar Rp89.865.000,00.
 - g. Halte terminal paringin dengan nomor register 807467 dan nilai perolehan sebesar Rp32.492.955,00.
- 5. Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan barang Gedung dan Bangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp496.101.000,00 merupakan hasil dari reklasifikasi bertambah aset lain-lain golongan barang Gedung dan Bangunan dan berkurang pada Gedung dan Bangunan kondisi rusak berat, rincian dimaksud dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Gedung Pujasera 2 dengan nomor register 416 dan nilai perolehan sebesar Rp174.367.000,00.
 - b. Gedung Pujasera 3 dengan nomor register 653 dan nilai perolehan sebesar Rp147.367.000,00.
 - c. Gedung Pujasera 1 Paringin dengan nomor register 412 dan nilai perolehan sebesar Rp174.367.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

6. Pengurangan Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi berkurang Gedung dan Bangunan dan bertambah pada Aset Lain-Lain Gedung dan bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah disebabkan rusak berat dengan nama barang Pagar halaman Pasar Paringin nomor register 496 sebesar Rp42.500.000,00
- D. Penambahan saldo Aset lain-lain dari Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp64.491.177.210,00 diuraikan sebagai berikut:
1. Penambahan Saldo Aset Lain-lain golongan Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berdasarkan reklasifikasi bertambah aset lain-lain golongan Jalan Irigasi dan Jaringan dan berkurang dari aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp64.447.777.210,00.
 2. Penambahan saldo aset lain-lain Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disebabkan adanya reklasifikasi bertambah pada aset Lain-lain dan berkurang dari Jalan, Irigasi, dan jaringan sebesar Rp43.400.000,00 disebabkan karena aset tersebut merupakan objek hibah kepada instansi vertikal dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Instalasi Kabel Jaringan Kantor Pengadilan dengan nomor register 928909 dan nilai perolehan sebesar Rp7.200.000,00.
 - b. Instalasi Jaringan Kantor Pengadilan dengan nomor register 928910 dan nilai perolehan sebesar Rp8.100.000,00.
 - c. Jaringan Pelayanan (Customer) Kantor Pengadilan dengan nomor register 928913 dan nilai perolehan sebesar Rp8.100.000,00.
 - d. Jaringan Kantor Pengadilan dengan nomor register 928917 dan nilai perolehan sebesar Rp20.000.000,00.
- E. Penambahan saldo Aset Lain-Lain Golongan Aset Tetap Lainnya terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan disebabkan reklasifikasi bertambah aset lain lain golongan aset tetap lainnya dan berkurang pada Aset Tetap Lainnya berupa indukan hewan ternak yang akan dihapuskan karena menjadi objek penjualan dan berkurang karena mati, dengan total nilai sebesar Rp475.211.800,00 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 74.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Pengurangan Nilai Aset Lain-Lain Kabupaten Balangan sebesar Rp97.410.146.492,00 pada tahun 2023 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Pengurangan Saldo Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin terdapat pada Kecamatan Paringin Selatan bersumber dari reklasifikasi berkurang aset lain-lain peralatan dan Mesin dan bertambah pada peralatan dan mesin berupa Mesin Pompa Portable dengan nomor register 6282 dan nilai perolehan sebesar Rp49.280.000,00 disebabkan aset tersebut dari kondisi rusak telah berubah menjadi baik dan dapat difungsikan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan.
- B. Penghapusan Aset Lain-Lain disebabkan karena Aset Lain-Lain tersebut merupakan Objek Hibah, Pemusnahan, Penjualan langsung, bangunan telah di bongkar, dan tercatat ganda sebesar Rp97.360.866.492,00 Rekapitulasi penghapusan Aset Lain-Lain pada Tahun Anggaran 2023 dikategorikan berdasarkan Golongan Barang Aset Lain-Lain yang dihapuskan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 208 Rekapitulasi dari Penghapusan Aset

No.	SKPD	Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	75.775.750	-	-	-	75.775.750
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	31.645.000	-	-	-	31.645.000
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-	86.135.000	245.367.000	-	-	331.502.000
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	114.775.875	79.727.563	-	475.211.800	669.715.238
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	36.014.700	-	-	-	36.014.700
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	76.945.000	-	16.488.500	-	93.433.500
9	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	1.090.548.672	498.920.783	-	-	1.589.469.455
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	2.033.520.660	-	43.400.000	-	2.076.920.660
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	26.708.000	496.101.000	-	-	522.809.000



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12.072.530.000	-	20.401.848.250	50.929.097.260	-	83.403.475.510
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-	148.216.367	-	-	-	148.216.367
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	592.998.792	276.868.600	3.152.348.200	-	-	4.022.215.592
15	Dinas Perhubungan	-	24.375.000	463.944.715	-	-	488.319.715
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	38.967.500	-	-	-	38.967.500
17	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	-	150.869.200	133.007.344	-	-	283.876.544
18	Dinas Satpol Pp	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000
19	Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	82.324.050	-	-	-	82.324.050
20	Inspektorat	-	2.620.250	-	-	-	2.620.250
21	Kecamatan Awayan	-	-	-	-	-	-
22	Kecamatan Batumandi	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000
23	Kecamatan Halong	-	16.252.000	-	-	-	16.252.000
24	Kecamatan Juai	-	-	-	-	-	-
25	Kecamatan Lampihong	-	18.180.000	-	-	-	18.180.000
26	Kecamatan Paringin	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000
27	Kecamatan Paringin Selatan	-	75.128.500	-	-	-	75.128.500
28	Kecamatan Tebing Tinggi	-	30.343.000	-	-	-	30.343.000
29	Sekretariat Daerah	944.319.620	2.066.390.541	-	-	-	3.010.710.161
30	Sekretariat DPRD	-	142.925.000	-	128.227.000	29.000.000	300.152.000
	Total	13.609.848.412	6.658.328.665	25.471.264.855	51.117.212.760	504.211.800	97.360.866.492

Saldo Akhir Aset Lain-Lain Kabupaten Balangan sebesar Rp118.279.868.621,00 pada tahun 2023 merupakan kumpulan Aset Lain-Lain yang ditampung untuk ditindak lanjuti pada tahun berikutnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 209 Rekapitulasi Saldo Akhir dari Aset Lain-lain

No.	SKPD	Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	172.356.190	-	-	-	172.356.190
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	486.888.500	-	-	-	486.888.500



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	102.595.000	-	-	-	102.595.000
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-	605.812.417	-	-	-	605.812.417
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	410.239.400	30.150.000	-	782.920.500	1.223.309.900
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	20.000	1.355.152.805	23.000.000	358.900.000	-	1.737.072.805
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	140.517.385	-	-	167.044.200	307.561.585
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	124.786.650	-	-	-	124.786.650
9	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	4.355.666.317	91.041.938	-	-	4.446.708.255
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	233.825.467	-	92.840.000	-	326.665.467
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	31.234.400	-	-	-	31.234.400
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	16.857.242.922	3.864.404.200	9.088.132.807	27.208.915.341	-	57.018.695.270
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-	100.000.000	-	-	-	100.000.000
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	8.846.231.884	33.381.354.794	425.354.927	910.696.138	43.563.637.743
15	Dinas Perhubungan	-	843.291.248	-	-	-	843.291.248
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	91.943.250	-	-	-	91.943.250
17	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	-	1.353.874.086	-	-	-	1.353.874.086
18	Dinas Satpol Pp	-	495.427.409	-	-	-	495.427.409



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)
19	Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	433.438.105	-	-	-	433.438.105
20	Inspektorat	-	204.565.410	-	-	-	204.565.410
21	Kecamatan Awayan	-	8.500.000	-	-	50.310.000	58.810.000
22	Kecamatan Batumandi	-	58.950.000	-	-	-	58.950.000
23	Kecamatan Halong	-	143.202.750	-	-	-	143.202.750
24	Kecamatan Juai	-	55.462.000	-	-	-	55.462.000
25	Kecamatan Lampihong	30.500.000	16.800.000	252.400.000	-	-	299.700.000
26	Kecamatan Paringin	-	61.214.000	-	-	-	61.214.000
27	Kecamatan Paringin Selatan	-	162.996.000	-	-	-	162.996.000
28	Kecamatan Tebing Tinggi	130.972.000	61.935.000	-	-	-	192.907.000
29	Sekretariat Daerah	117.025.300	2.376.433.083	-	-	4.000.000	2.497.458.383
30	Sekretariat Dprd	-	1.079.304.798	-	-	-	1.079.304.798
	Total	17.135.760.222	28.277.047.754	42.866.079.539	28.086.010.268	1.914.970.838	118.279.868.621

5.3.1.4.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	(3.084.137.630,00)	(2.365.737.720,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan akumulasi penyusutan dari aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp3.084.137.630,00) dan (Rp2.365.737.720,00). Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel 210 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023

No.	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Kepegawaian	49.300.000,00
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	UPGRADE LAYANAN KEPEGAWIAN (SILKA)	18.450.000,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	WEB BKPPD	8.430.000,00
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat	6.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belanja Modal Upgared Aplikasi Kepegawaian (Silka)	7.000.000,00
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belanja Modal Perangkat Lunak (Software)	19.913.400,00
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belanja Modal Perangkat Lunak (Softwere)	34.854.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aplikasi Sistem Informasi Kewaspadaan Dini di Daerah (SIKANDA)	21.420.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aplikasi / Softwere SIDIK	12.000.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aplikasi / Softwere ADIS	12.000.000,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Aplikasi E-BPHTB	158.400.000,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sipanda BMD	39.754.000,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	APLIKASI E - TAX	79.076.400,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	APLIKASI SIMANDOR	19.524.800,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	APLIKASI SICAPER	39.671.400,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	APLIKASI SATU DATA	23.798.400,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	APLIKASI OBJEK PAJAK DAREAH	6.000.000,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Taxation Map	39.550.000,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Penambahan Fitur SipandaBMD	19.891.200,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Aplikasi Data Website	21.000.000,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Aplikasi e-monev	98.609.500,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Software Aplikasi Server	17.800.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Software Aplikasi / Web	39.840.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	UPGRADE APLIKASI INOVDA	5.000.000,00
25	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	Aplikasi Pendaftaran dan Pelaporan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.610.800,00
26	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	Survey IKM	20.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
27	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	Aplikasi ACIL LANGKAR (Layanan Dukcatpil Langsung Kelar)	37.741.600,00
28	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	modul simpus terpadu kab	18.315.000,00
29	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	modul simpus web based	11.715.000,00
30	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	modul simpus web based	11.715.000,00
31	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	modul simpus web based	11.715.000,00
32	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	modul simpus web based	11.715.000,00
33	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Software Aplikasi SIMRS	198.250.000,00
34	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Software Aplikasi SIMRS	199.550.000,00
35	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Software Aplikasi SIM RS	199.800.000,00
36	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Software Aplikasi / Web	159.240.000,00
37	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Aplikasi Database	65.480.000,00
38	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran	49.995.000,00
39	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Aplikasi Sistem Administrasi Pelaporan	49.500.000,00
40	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pembuatan Website	29.348.000,00
41	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Aplikasi Berbasis Pemetaan	157.784.000,00
42	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Aplikasi E-Poktan	39.996.000,00
43	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Aplikasi Inovasi Peternakan dan Pengembangan Aplikasi E-Bapaktani	35.535.540,00
44	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Software Pengembangan E-Ketapang dan Website Ketahanan Pangan	7.947.600,00
45	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Aplikasi RKA	6.975.240,00
46	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pembuatan Aplikasi Fisheries Global Data (FGD)	18.970.000,00
47	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Survey Geolistrik (Penentuan titik lokasi sumur bor) di BBIL	-
48	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Survei Geolistrik Berupa Honorarium Pejabat Pembuat komitmen Kontrak : 020.22/688.1/KAN/DKPPP-BLG/2023 Tanggal 16 November	-
49	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Survei Geolistrik Berupa Honorarium Pejabat Pengadaan Kontrak : 020.22/688.1/KAN/DKPPP-BLG/2023 Tanggal 16 Novem	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
50	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software Berupa Pembuatan Aplikasi Pemetaan oleh CV. BERKAH RAZIQ	12.964.800,00
51	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Software Aplikasi / Web (E-Office)	79.920.000,00
52	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Aplikasi Software / Aplikasi Web	8.140.000,00
53	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Sistem Informasi Bidang Jasa Konstruksi Kabupaten Balangan	77.560.000,00
54	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Software SMS Center	49.000.000,00
55	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Software aplikasi Sistem Penyimpanan Arsip Digital	45.250.000,00
56	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Software Aplikasi SAKIP	44.231.000,00
57	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Aplikasi Start Up berbasis Kemitraan dan UMKM pada Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Dan	103.415.200,00
58	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Pengadaan Aplikasi Pelayanan Kartu Kuning	11.600.000,00
59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Software dan pengelolaan/ perawatan/ update data.....	24.750.000,00
60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Software web Dinas Pendidikan (ICT)	24.686.750,00
61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Software Aplikasi	16.000.000,00
62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Microsoft (Office Standard)OfficeStd 2019 SNGL OLP NL Acdmc(Pendidikan) (16 Piece)	15.200.000,00
63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Microsoft (Office Standart) OfficeStd 2019 SNGL OLP NL Acdmc (Pendidikan) SMPN 1 Juai (21 Piece)	18.900.000,00
64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Microsoft (Office Standart) OfficeStd 2019 SNGL OLP NL Acdmc (Pendidikan) SMPN 3 Halong (21 Piece)	18.900.000,00
65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Microsoft (Windows Server CAL) WinSVRCAL 2019 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL (Pendidikan) SMPN 1 Juai (1 P	3.750.000,00
66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Microsoft (Windows Server CAL) WinSVRCAL 2019 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL (Pendidikan) SMPN 3 Halong (1	3.750.000,00
67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Microsoft (Windows Server STD CORE) WinSVRSTDCore 2019 SNGL OLP 16 Lic NL Acdmc CoreLic (Pendidikan)	2.570.000,00
68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Microsoft (Windows Server STD CORE) WinSVRSTDCore 2019 SNGL OLP 16 Lic NL Acdmc CoreLic (Pendidikan)	2.570.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	MICROSOFT Windows Server 2016 Device CAL (Hanya Untuk Pendidikan -License Only) (63 Piece)	7.245.000,00
70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Microsoft Windows Server 2016 Standard Maksimal 16 core - License Only (3 Piece)	10.050.000,00
71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Microsoft Office 2016 (66 Piece)	56.067.000,00
72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Aplikasi BKU	6.000.000,00
73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Aplikasi Beasiswa Berbasis WEB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Balangan	6.000.000,00
74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Biaya Pembuatan Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala (SIMKGB) Berbasis WEB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Balangan	6.000.000,00
75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Biaya Pembuatan Aplikasi Absen Guru Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Balangan	10.800.000,00
76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja pembuatan/pembaruan aplikasi administrasi pangkat bagi JFT (guru)	6.000.000,00
77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Update Aplikasi E-BKU	3.500.000,00
78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Aplikasi Gaji Atau Tunjangan Insentif Non ASN	3.500.000,00
79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar (SI-SUKA) Berbasis WEB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Balangan	3.500.000,00
80	Dinas Perhubungan	Software Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat Pengujian Kendaraan Bermotor	4.200.000,00
81	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Website Layanan Umum Informasi	9.900.000,00
82	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Website	6.000.000,00
83	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APlikasi Balangan Membaca	19.150.000,00
84	Sekretariat Daerah	Software Aplikasi / Web Aplikasi Manajemen Kinerja (SAKIP)	31.856.000,00
85	Sekretariat Daerah	Aplikasi E-KINO	29.700.000,00
86	Sekretariat Daerah	Aplikasi Manajemen Jabatan	29.700.000,00
87	Sekretariat DPRD	Software Aplikasi	99.330.000,00
Total			3.102.137.630,00

5.3.1.4.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	31 Desember 2023 (Rp) (76.217.540.021,48)	31 Desember 2022 (Rp) (56.979.388.831,00)

Akumulasi penyusutan aset lain-lain merupakan nilai akumulasi dari penyusutan aset tetap yang dimutasikan ke Aset Lain-lain, sehingga hal ini bukan merupakan penyusutan dari aset-aset yang berada dalam daftar Aset Lain-lain. Akumulasi



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar (Rp76.217.540.021,48) dan (Rp56.979.388.831,00) dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 211 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal Tahun 2023 (Saldo per 31 Desember 2022)	(56.979.388.831,00)
Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023	
Reklasifikasi Bertambah	
• Peralatan dan Mesin	(11.935.358.908,00)
• Gedung dan Bangunan	(7.278.714.745,41)
• Jalan, Irigasi dan Jaringan	(32.050.282.725,46)
Jumlah Penambahan	(51.264.356.378,87)
Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023	
Reklasifikasi Berkurang	
• Peralatan Mesin	49.280.000,00
Penghapusan	31.976.925.188,39
Jumlah Pengurangan	32.026.205.188,39
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	(76.217.540.021,48)

Rincian Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 75.

A. Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Kabupaten Balangan sebesar (Rp51.264.356.378,87) pada tahun 2023 berasal dari reklasifikasi bertambah dari akumulasi penyusutan aset tetap golongan barang peralatan dan mesin, golongan barang Gedung dan Bangunan, dan golongan barang jalan, irigasi, dan jaringan yang dijabarkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 212 Rekapitulasi Bertambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per SKPD Tahun 2023

No.	SKPD	Reklasifikasi Bertambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain			Total (Rp)
		Peralatan Mesin (Rp)	Gedung Bangunan (Rp)	Jalan Irigasi Jaringan (Rp)	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	73.295.690,00	-	-	73.295.690,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Reklasifikasi Bertambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain			Total (Rp)
		Peralatan Mesin (Rp)	Gedung Bangunan (Rp)	Jalan Irigasi Jaringan (Rp)	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	106.475.233,00	-	-	106.475.233,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.114.000,00	-	-	27.114.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	327.313.437,00	36.125.000,00	-	363.438.437,00
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.745.954,00	-	-	3.745.954,00
6	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.900.160.025,00	334.438.595,81	-	3.234.598.620,81
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.073.403.372,00	-	-	1.073.403.372,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	529.965.562,00	-	2.170.000,00	532.135.562,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	398.230.800,00	-	398.230.800,00
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.430.285.808,00	4.048.202.530,60	32.048.112.725,46	39.526.601.064,06
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	14.500.000,00	-	-	14.500.000,00
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	216.766.000,00	2.221.257.710,00	-	2.438.023.710,00
13	Dinas Perhubungan	718.139.976,00	240.460.109,00	-	958.600.085,00
14	Dinas Satpol Pamong Praja	425.282.009,00	-	-	425.282.009,00
15	Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	131.417.650,00	-	-	131.417.650,00
16	Inspektorat	155.697.149,00	-	-	155.697.149,00
17	Kecamatan Batumandi	52.450.000,00	-	-	52.450.000,00
18	Kecamatan Halong	139.111.083,00	-	-	139.111.083,00
19	Kecamatan Paringin	46.498.667,00	-	-	46.498.667,00
20	Kecamatan Paringin Selatan	127.927.800,00	-	-	127.927.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Reklasifikasi Bertambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain			Total (Rp)
		Peralatan Mesin (Rp)	Gedung Bangunan (Rp)	Jalan Irigasi Jaringan (Rp)	
21	Sekretariat Daerah	469.489.695,00	-	-	469.489.695,00
22	Sekretariat DPRD	966.319.798,00	-	-	966.319.798,00
TOTAL		11.935.358.908,00	7.278.714.745,41	32.050.282.725,46	51.264.356.378,87

B. Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar Rp31.976.925.188,39 disebabkan karena Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain karena Reklasifikasi dan Penghapusan yang dijabarkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Berkurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp49.280.000,00 merupakan penambahan pada Kecamatan Paringin Selatan Rp49.280.000,00 disebabkan aset peralatan mesin dari aset lain-lain dengan kondisi sebelumnya rusak berat berubah kondisi menjadi baik dan dapat dipergunakan.
2. Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp32.026.205.188,39 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 213 Rekapitulasi Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per SKPD Tahun 2023

No.	SKPD	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023			Total (Rp)
		Peralatan Mesin (Rp)	Gedung Bangunan (Rp)	Jalan Irigasi Jaringan (Rp)	
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	73.495.750,00	-	-	73.495.750,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.046.667,00	-	-	14.046.667,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	80.373.750,00	159.999.180,00	-	240.372.930,00
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	32.103.403,00	-	-	32.103.403,00
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	72.740.000,00	-	4.377.800,00	77.117.800,00
6	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	988.932.746,00	266.157.142,31	-	1.255.089.888,31
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	91.690.075,00	79.727.563,00	-	171.417.638,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	517.582.275,00	-	2.170.000,00	519.752.275,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023			Total (Rp)
		Peralatan Mesin (Rp)	Gedung Bangunan (Rp)	Jalan Irigasi Jaringan (Rp)	
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	26.270.500,00	398.230.800,00	-	424.501.300,00
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	1.145.923.662,50	24.121.427.640,58	25.267.351.303,08
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	137.888.986,00	-	-	137.888.986,00
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	276.868.600,00	2.221.257.710,00	-	2.498.126.310,00
13	Dinas Perhubungan	24.375.000,00	240.460.109,00	-	264.835.109,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37.295.500,00	-	-	37.295.500,00
15	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	146.250.600,00	25.096.067,00	-	171.346.667,00
16	Dinas Satpol Pamong Praja	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
17	Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	79.873.467,00	-	-	79.873.467,00
18	Inspektorat	2.620.250,00	-	-	2.620.250,00
19	Kecamatan Batumandi	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
20	Kecamatan Halong	11.132.800,00	-	-	11.132.800,00
21	Kecamatan Lampihong	16.879.000,00	-	-	16.879.000,00
22	Kecamatan Paringin	1.120.000,00	-	-	1.120.000,00
23	Kecamatan Paringin Selatan	72.228.500,00	-	-	72.228.500,00
24	Kecamatan Tebing Tinggi	26.153.700,00	-	-	26.153.700,00
25	Sekretariat Daerah	408.109.695,00	-	-	408.109.695,00
26	Sekretariat DPRD	133.009.500,00	-	32.056.750,00	165.066.250,00
TOTAL		3.280.040.764,00	4.536.852.233,81	24.160.032.190,58	31.976.925.188,39



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

C. Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Kabupaten Balangan
sebesar (Rp76.217.540.021,48) pada tahun 2023 rincian sebagai berikut:

Tabel 214 Rekapitulasi Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per SKPD Tahun 2023

No.	SKPD	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023			Total (Rp)
		Peralatan Mesin (Rp)	Gedung Bangunan (Rp)	Jalan Irigasi Jaringan (Rp)	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	167.140.990,00	-	-	167.140.990,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	481.817.233,00	-	-	481.817.233,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	46.206.500,00	-	-	46.206.500,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	605.812.417,00	-	-	605.812.417,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	395.896.900,00	22.455.000,00	-	418.351.900,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	120.783.371,00	-	-	120.783.371,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	118.592.363,00	-	-	118.592.363,00
8	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.108.090.672,00	68.281.453,50	-	4.176.372.125,50
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.329.125.525,00	13.800.000,00	358.900.000,00	1.701.825.525,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	224.633.523,00	-	27.852.000,00	252.485.523,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	22.073.900,00	-	-	22.073.900,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan	3.859.865.450,00	2.913.443.368,10	25.801.284.833,88	32.574.593.651,98



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023			Total (Rp)
		Peralatan Mesin (Rp)	Gedung Bangunan (Rp)	Jalan Irigasi Jaringan (Rp)	
	Kawasan Pemukiman				
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.114.498.225,00	20.418.983.548,00	97.554.980,00	28.631.036.753,00
15	Dinas Perhubungan	733.594.976,00	-	-	733.594.976,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	76.050.500,00	-	-	76.050.500,00
17	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.278.918.151,00	-	-	1.278.918.151,00
18	Dinas Satpol Pamong Praja	483.680.342,00	-	-	483.680.342,00
19	Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	415.274.943,00	-	-	415.274.943,00
20	Inspektorat	201.863.423,00	-	-	201.863.423,00
21	Kecamatan Awayan	8.500.000,00	-	-	8.500.000,00
22	Kecamatan Batumandi	58.950.000,00	-	-	58.950.000,00
23	Kecamatan Halong	139.111.083,00	-	-	139.111.083,00
24	Kecamatan Juai	46.221.143,00	-	-	46.221.143,00
25	Kecamatan Lampihong	16.800.000,00	-	-	16.800.000,00
26	Kecamatan Paringin	56.998.667,00	-	-	56.998.667,00
27	Kecamatan Paringin Selatan	154.476.800,00	-	-	154.476.800,00
28	Kecamatan Tebing Tinggi	49.701.000,00	-	-	49.701.000,00
29	Sekretariat Daerah	2.005.995.943,00	-	-	2.005.995.943,00
30	Sekretariat DPRD	1.074.310.798,00	-	-	1.074.310.798,00
TOTAL		26.494.984.838,00	23.436.963.369,60	26.285.591.813,88	76.217.540.021,48



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.4.6. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	31 Desember 2023 (Rp) 1.098.657.770.000,00	31 Desember 2022 (Rp) 637.760.586.124.00

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.098.657.770.000,00 dan Rp637.760.586.124.00. Sesuai dengan Pasal Pasal 47 Ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus disebutkan bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (termasuk DBH) dalam bentuk non Tunai dicatat sebagai pendapatan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sesuai dengan nota dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor : ND-67/PB.6/2023 tanggal 25 Januari 2023 hal Kebijakan Akuntansi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) dan nota dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor : ND-226/PB.3/2023 tanggal 10 Februari 2023 hal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 bahwa pendapatan TDF Pemerintah Kabupaten Balangan ditempatkan dalam Rek Lain BI TDF TKD Kab Balangan nomor rekening 519000456980 sejumlah Rp1.098.657.770.000,00 dengan rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 215 Pendapatan Transfer Ke Daerah Dalam Bentuk Non Tunai

No.	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)
1	DBH PPh Pasal 21	2.059.518.000
2	DBH PPh Pasal 25/29 OP	5.446.000
3	DBH PBB Migas Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	479.607.000
4	DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	119.644.000
5	DBH PBB Perhutanan Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	6.467.000
6	DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	7.121.681.000
7	DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	11.675.000
8	DBH SDA Minyak Bumi	32.512.000
9	DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	181.874.000
10	DBH SDA Minerba - Royalti	1.088.607.075.000
11	DBH SDA Kehutanan - PSDH	32.271.000
Jumlah		1.098.657.770.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.2. Kewajiban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>16.606.946.096,15</u>	<u>179.071.884.405,77</u>

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.606.946.096,15 dan Rp179.071.884.405,77 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek, sedangkan Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>16.606.946.096,15</u>	<u>179.071.884.405,77</u>

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.606.946.096,15 dan Rp179.071.884.405,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 216 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	875.000,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	246.232.442,35	227.852.638,85
3	Utang Belanja	16.343.257.090,80	14.314.626.877,92
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	17.456.563,00	164.528.529.889,00
Jumlah		16.606.946.096,15	179.071.884.405,77

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>-</u>	<u>875.000,00</u>

Utang Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp875.000,00.

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>246.232.442,35</u>	<u>227.852.638,85</u>

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan penerimaan pendapatan yang dicatat sebagai kewajiban yang akan menjadi pendapatan dikemudian hari. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp246.232.442,35 dan Rp227.852.638,85.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 217 Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Nama SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	97.080.817,53	65.051.691,23
2	Sekretariat Daerah	18.681.457,79	59.227.730,20
3	Dinas Perhubungan	15.429.791,28	28.758.807,14
4	Kecamatan Lampihong	26.823.382,76	14.482.163,61
5	Kecamatan Awayan	12.782.000,00	5.939.001,05
6	RSUD (BLUD)	46.520.547,95	27.211.123,14
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (UPT.DISDIK)	11.685.623,26	3.689.021,80
8	Dinas Komunikasi & Informatika	11.799.979,19	18.069.252,04
9	Kecamatan Juai	5.428.842,59	5.423.848,64
Jumlah		246.232.442,35	227.852.638,85

Rincian pendapatan diterima dimuka tahun 2023 lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 76 .

5.3.2.1.3. Utang Belanja	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	16.343.257.090,80	14.314.626.877,92

Utang Belanja merupakan Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dan Utang Belanja Modal yang belum dibayar pada Tahun 2023 dan akan dibayarkan pada Tahun 2024 sebesar Rp16.343.257.090,80 yang terdiri dari Utang Beban Pegawai sebesar Rp10.828.914.450,00, Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp5.463.457.350,30 dan Utang Belanja Modal sebesar Rp50.885.290,50. Sedangkan Utang Belanja tahun 2022 sebesar Rp14.314.626.877,92. Saldo Utang Belanja Tahun 2023 dengan rincian per SKPD dan per jenis belanja tersaji pada tabel berikut:

Tabel 218 Utang Beban atas Belanja Tahun 2023 Per SKPD

No.	Nama SKPD	Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal	Jumlah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	475.082.088,00	18.334.100,00	-	493.416.188,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.998.693.098,00	300.502.890,00	-	3.299.195.988,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	419.688.739,00	-	50.885.290,50	470.574.029,50



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama SKPD	Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal	Jumlah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	178.997.639,00	6.672.891,00	-	185.670.530,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	268.181.658,00	6.783.000,00	-	274.964.658,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	139.553.284,00	47.000,00	-	139.600.284,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	369.480.905,00	748.000,00	-	370.228.905,00
8	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	288.857.476,00	1.231.600,00	-	290.089.076,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	166.167.287,00	332.000,00	-	166.499.287,00
10	Dinas Perhubungan	189.995.792,00	1.667.700,00	-	191.663.492,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	190.722.563,00	30.984.316,00	-	221.706.879,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	256.184.408,00	1.259.000,00	-	257.443.408,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	321.029.481,00	442.500,00	-	321.471.981,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	199.541.163,00	4.177.500,00	-	203.718.663,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	197.814.851,00	1.576.500,00	-	199.391.351,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	806.537.922,00	3.255.000,00	-	809.792.922,00
17	Sekretariat Daerah	767.650.473,00	-	-	767.650.473,00
18	Sekretariat DPRD	149.537.064,00	1.462.500,00	-	150.999.564,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	273.505.109,00	4.185.463,00	-	277.690.572,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan,	467.136.978,00	952.000,00	-	468.088.978,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama SKPD	Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal	Jumlah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Pendapatan dan Aset Daerah				
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	251.341.470,00	10.267.456,00	-	261.608.926,00
22	Inspektorat	377.378.765,00	47.000,00	-	377.425.765,00
23	Kecamatan Lampihong	144.958.655,00	193.900,00	-	145.152.555,00
24	Kecamatan Batumandi	137.333.361,00	530.940,00	-	137.864.301,00
25	Kecamatan Awayan	123.898.380,00	502.500,00	-	124.400.880,00
26	Kecamatan Halong	129.754.508,00	397.900,00	-	130.152.408,00
27	Kecamatan Juai	101.327.091,00	1.799.600,00	-	103.126.691,00
28	Kecamatan Paringin	185.957.282,00	3.178.106,00	-	189.135.388,00
29	Kecamatan Tebing Tinggi	96.543.034,00	808.000,00	-	97.351.034,00
30	Kecamatan Paringin Selatan	156.063.926,00	986.500,00	-	157.050.426,00
31	RSUD	-	5.060.131.488,30	-	5.060.131.488,30
JUMLAH		10.828.914.450,00	5.463.457.350,30	50.885.290,50	16.343.257.090,80

5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	17.456.563,00	164.528.529.889,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada posisi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp17.456.563,00 dan Rp164.528.529.889,00. dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 219 Utang Jangka Pendek Lainnya

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Utang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil	8.272,00.	164.528.529.889,00
2.	Utang Lain-Lain BLUD	17.448.291,00	-
Jumlah		17.456.563,00	164.528.529.889,00

1. Utang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.272,00, dengan rincian sebagaimana berikut:

Berdasarkan PMK Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 dan KMK Nomor 38/KM.7/2023



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023. Sesuai dengan PMK Nomor 90 Tahun 2023 terdapat koreksi saldo Utang Jangka Pendek Lainnya dengan rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 220 Koreksi Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya

Jenis DBH	Saldo Lebih Bayar Tahun 2022 (Rp)	Koreksi Saldo Akhir Lebih Bayar Sampai Dengan Tahun 2023 (PMK No 90 Tahun 2023) (Rp)
Pajak	1.375.911.186,00	3.912.990.086,00
Pajak Bumi dan Bangunan	1.375.911.186,00	3.912.984.859,00
Bagian Daerah	1.331.527.051,00	3.719.301.717,00
Biaya Pungut	44.384.135,00	124.309.590,00
Bagi rata	-	69.373.552,00
CHT	-	5.227,00
Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	5.227,00
SDA	163.152.618.703,00	165.263.300.186,00
Minerba	162.965.992.076,00	164.781.412.938,00
Iuran Tetap	14.305.503,00	1.829.726.365,00
Royalti	162.951.686.573,00	162.951.686.573,00
Kehutanan	13.153.703,00	13.153.703,00
PSDH	13.153.703,00	13.153.703,00
Perikanan	173.472.924,00	468.733.545,00
Perikanan	173.472.924,00	468.733.545,00
Grand Total	164.528.529.889,00	169.176.290.272,00

Sesuai dengan KMK Nomor 38/KM.7/2023 telah melakukan koreksi atas Lebih Salur pada tanggal 29 Desember 2023 dengan cara melakukan pemotongan penyaluran dari kurang salur sebesar Rp169.176.282.000,00 sehingga sisa utang jangka pendek sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.272,00, adapun rincian pemotongan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 221 Penyelesaian Utang Jangka Pendek Lainnya

Jenis DBH	Pemotong Penyaluran Pengurang LB (KMK Nomor 38/KM.7/2023) (Rp)
Pajak	20.770.183.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan	19.357.354.000,00
Bagian Daerah	18.732.783.000,00
Biaya Pungut	624.571.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis DBH	Pemotong Penyaluran Pengurang LB (KMK Nomor 38/KM.7/2023) (Rp)
PPh	1.412.820.000,00
PPh Pasal 21	1.361.026.000,00
PPh Pasal 25/29	51.794.000,00
CHT	9.000,00
Cukai Hasil Tembakau (CHT)	9.000,00
SDA	148.406.099.000,00
Migas	209.265.000,00
Minyak Bumi 15%	202.514.000,00
Minyak Bumi 0,5%	6.751.000,00
Minerba	148.120.048.000,00
Royalti	148.120.048.000,00
Kehutanan	76.786.000,00
PSDH	76.786.000,00
Grand Total	169.176.282.000,00

Pemerintah Pusat dalam melakukan pemotongan atas lebih salur tidak didasarkan pada masing-masing jenis pendapatan melainkan dari total seluruh yang akan disalurkan sehingga nilai sisa utang jangka pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.272,00.

- Utang Lain-Lain BLUD RSUD Datu Kandang Haji Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.448.291,00 merupakan utang obat-obatan dari BLUD RSUD lain dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 222 Rincian Utang Lain-Lain Obat-obatan

No.	Uraian	Nilai
1.	BLUD RSUD Pambalah Batung Amuntai	2.274.945,00
2.	BLUD RSUD H. Damanhuri Barabai	15.173.346,00
Jumlah		17.448.291,00

5.3.3. Ekuitas

31 Desember 2023
(Rp)
4.613.767.447.063,90

31 Desember 2022
(Rp)
3.336.148.626.247,33

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.613.767.447.063,90 berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.336.148.626.247,33 ditambah Surplus-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp57.018.986.162,78 ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan sebesar Rp1.220.599.834.653,79.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional.

5.4.1. Pendapatan	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	<u>2.017.640.784.378,71</u>	<u>2.330.761.069.421,77</u>

Pendapatan Laporan Operasional (LO) adalah hak Pemerintah Kabupaten Balangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi pada Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp2.017.640.784.378,71 dan Rp2.330.761.069.421,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 223 Ringkasan perbandingan Pendapatan LO dengan Pendapatan LRA

No	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	139.579.251.082,96	137.007.880.082,01	2.571.371.000,95	96.729.920.032,66
2	Pendapatan Transfer	1.872.212.499.620,56	2.622.936.320.422,00	(750.723.820.801,44)	2.219.986.861.769,11
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.849.033.675,19	600.000.000,00	5.249.033.675,19	14.044.287.620,00
Jumlah		2.017.640.784.378,71	2.760.544.200.504,01	(742.903.416.125,30)	2.330.761.069.421,77

Realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	<u>139.579.251.082,96</u>	<u>96.729.920.032,66</u>

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp139.579.251.082,96 dan Rp96.729.920.032,66 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 224 Ringkasan Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO dengan Pendapatan LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Pendapatan Pajak Daerah	14.428.704.624,59	13.907.799.569,00	520.905.055,59	12.857.174.177,27
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.358.539.692,70	2.366.139.331,00	(7.599.638,30)	1.898.533.760,31
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.979.829.622,72	14.874.367.772,00	2.105.461.850,72	13.877.791.605,58
4	Lain-lain PAD yang Sah	105.812.177.142,95	105.859.573.410,01	(47.396.267,06)	68.096.420.489,50
Jumlah		139.579.251.082,96	137.007.880.082,01	2.571.371.000,95	96.729.920.032,66

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	14.428.704.624,59	12.857.174.177,27

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp14.428.704.624,59 dan Rp12.857.174.177,27 adalah sebagai berikut:

Tabel 225 Rincian Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA

No	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Pajak Hotel	10.955.453,00	10.955.453,00	-	12.252.950,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	298.975.249,00	298.975.249,00	-	3.860.670.383,50
3	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.923.578.421,00	4.920.045.421,00	3.533.000,00	-
4	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	785.000,00	785.000,00	-	645.000,00
5	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	38.331.982,59	93.736.503,00	(55.404.520,41)	71.904.853,77
6	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	4.781.651.483,00	4.738.862.179,00	42.789.304,00	4.408.158.901,00
7	Pajak Parkir	12.801.000,00	12.801.000,00	-	14.298.680,00
8	Pajak Air Tanah	2.818.600,00	2.818.600,00	-	2.374.400,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	2.066.400,00	2.066.400,00	-	850.000,00
10	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.749.551.337,00	1.722.133.575,00	27.417.762,00	2.241.521.684,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
11	PBBP2	1.015.964.049,00	513.271.821,00	502.692.228,00	977.725.425,00
12	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.591.225.650,00	1.591.225.650,00	-	1.266.771.900,00
	Jumlah	14.428.704.624,59	13.907.676.851,00	521.027.773,59	12.857.174.177,27

Penjelasan atas perbedaan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya

Tabel 226 Kertas Kerja Perbandingan Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya – LRA	4.920.045.421,00
-/- Pembayaran Piutang Pajak Katering TA 2022	(665.000,00)
+/- Penambahan Piutang Pajak Katering TA 2023	4.198.000,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya – LO	4.923.578.421,00

- ❖ Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp665.000,00 berasal dari Piutang Pajak Reklame bulan Desember Tahun Anggaran 2022 yang pembayarannya diterima pada Tahun Anggaran 2023;
- ❖ Penambahan Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.198.000,00 berasal dari Piutang Pajak Katering yang pembayarannya belum diterima Tahun Anggaran 2023.

2. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron

Tabel 227 Kertas Kerja Perbandingan Pajak Reklame LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron – LRA	93.736.503,00
-/- Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022	(114.504.943,00)
-/- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2023	(86.742.771,63)
+/- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2022	49.551.691,22
+/- Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023	96.291.503,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron – LO	38.331.982,59



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- ❖ Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp114.504.943,00 berasal dari Piutang Pajak Reklame bulan Desember Tahun Anggaran 2022 yang pembayarannya diterima pada Tahun Anggaran 2023;
- ❖ Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp86.742.771,63 merupakan Pendapatan Reklame Tahun Anggaran 2023 yang pendapatannya diakui pada tahun berikutnya;
- ❖ Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp49.551.691,22 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka dari Pajak Reklame Tahun Anggaran 2022 yang pendapatannya diakui pada Tahun Anggaran 2023;
- ❖ Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp96.291.503,00 berasal dari Piutang Pajak Reklame bulan Desember Tahun Anggaran 2023 yang pembayarannya belum diterima pada Tahun Anggaran 2023.

3. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri

Tabel 228 Kertas Kerja Perbandingan Pajak Pajak Penerangan Jalan LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Pajak Penerangan Jalan – LRA	4.738.862.179,00
-/- Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022	(380.370.011,00)
+/- Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023	423.159.315,00
Pajak Penerangan Jalan – LO	4.781.651.483,00

- ❖ Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp380.370.011,00 berasal dari Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Tahun Anggaran 2022;
- ❖ Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp423.159.315,00 berasal dari Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Tahun Anggaran 2023.

4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya

Tabel 229 Kertas Kerja Perbandingan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya – LRA	1.722.133.575,00
-/- Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022	(75.676.651,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
+/- Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023	103.094.413,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya – LO	1.749.551.337,00

- ❖ Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp75.676.651,00 berasal dari Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Tahun Anggaran 2022;
- ❖ Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp103.094.413,00 berasal dari Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 yang pembayarannya belum diterima pada Tahun Anggaran 2023.

5. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

**Tabel 230 Kertas Kerja Perbandingan Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan LO dengan LRA**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA	513.271.821,00
-/- Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022	(511.847.311,00)
+/- Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023	1.014.539.539,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	1.015.964.049,00

- a. Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp511.847.311,00 merupakan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2022 dan pembayarannya diterima pada Tahun Anggaran 2023;
- b. Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.014.539.539,00 berasal dari Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Tahun Anggaran 2023 yang pembayarannya belum diterima pada Tahun Anggaran 2023.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah	2.358.539.692,70	1.898.533.760,31

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD pemungut. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp2.358.539.692,70 dan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Rp1.898.533.760,31. Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2023 untuk masing-masing jenis Retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 231 Rincian Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah LO dengan LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan	TA 2022
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	(Rp)	(Rp)
1	Pelayanan Kesehatan	421.656.000,00	421.656.000,00	-	285.062.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	262.913.000,00	259.703.000,00	3.210.000,00	258.795.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	78.400.000,00	78.400.000,00	-	75.500.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	66.191.000,00	66.191.000,00	-	65.800.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	82.284.015,86	68.955.000,00	13.329.015,86	140.594.216,96
6	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	7.534.600,00	7.534.600,00	-	6.834.100,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	68.954.325,00	118.704.665,00	(49.750.340,00)	67.680.470,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	421.753.651,84	396.961.966,00	24.791.685,84	357.172.054,35
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	234.465.000,00	233.645.000,00	820.000,00	204.135.000,00
10	Retribusi Terminal	56.480.000,00	56.480.000,00	-	48.800.000,00
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	88.754.000,00	88.754.000,00	-	74.465.250,00
12	Retribusi Perizinan Tertentu	569.154.100,00	569.154.100,00	-	313.695.169,00
	Jumlah	2.358.539.692,70	2.366.139.331,00	(7.599.638,30)	1.898.533.760,31

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Tabel 232 Kertas Kerja Perbandingan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	259.703.000,00
-/- Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022	(7.780.000,00)
+/- Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023	10.990.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	262.913.000,00

- a. Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.780.000,00 berasal dari Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan pada



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tahun Anggaran 2022 yang pembayarannya diterima pada Tahun Anggaran 2023;

- b. Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.990.000,00 berasal dari Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan pada Tahun Anggaran 2023 yang pembayarannya belum diterima pada Tahun Anggaran 2023.

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Tabel 233 Kertas Kerja Perbandingan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor– LRA	68.955.000,00
-/- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2023	(15.429.791,28)
+/- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2022	28.758.807,14
Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	82.284.015,86

- a. Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.429.791,28 merupakan Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2023 yang tidak diakui sebagai pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan akan diakui pada tahun anggaran berikutnya;
- b. Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp28.758.807,14 merupakan Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2022 yang diakui pendapatan pada Tahun Anggaran 2023.

3. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Tabel 234 Kertas Kerja Perbandingan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LRA	118.704.665
-/- Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2023	(49.750.340,00)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	68.954.325,00

Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp49.750.340,00 berasal dari Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Tahun Anggaran 2022 yang pembayarannya diterima pada Tahun Anggaran 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Tabel 235 Kertas Kerja Perbandingan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	396.961.966,00
-/- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2023	(63.288.135,68)
+/- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2022	88.079.821,52
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	421.753.651,84

- a. Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp63.288.135,68 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang pembayarannya diterima pada Tahun Anggaran 2024;
- b. Penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp88.079.821,52 merupakan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang diakui pendapatan pada Tahun Anggaran 2023.

5. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Tabel 236 Kertas Kerja Perbandingan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LRA	233.645.000,00
-/- Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022	(6.150.000,00)
+/- Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023	6.970.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	234.465.000,00

- Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.150.000,00 berasal dari Piutang Retribusi Grosir dan/ atau Pertokoan pada Tahun Anggaran 2022 yang pembayarannya diterima pada Tahun Anggaran 2023;
- Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.970.000,00 berasal dari Piutang Retribusi Grosir dan/ atau Pertokoan pada Tahun Anggaran 2023 yang pembayarannya belum diterima pada Tahun Anggaran 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	16.979.829.622,72	13.877.791.605,58

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan dividen dan hasil investasi atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Dividen diperoleh dari Penyertaan Modal pada Bank Kalsel dengan kepemilikan saham minoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya. Realisasi Bagi Hasil Penyertaan Modal pada Bank Kalsel pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.979.829.622,72 dan Rp13.877.791.605,58. Rincian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 237 Rincian Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dengan LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.979.829.622,72	14.874.367.772,00	2.105.461.850,72	13.877.791.605,58
	Jumlah	16.979.829.622,72	14.874.367.772,00	2.105.461.850,72	13.877.791.605,58

Penjelasan atas Perbedaan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 238 Kertas Kerja Perbandingan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LRA	14.874.367.772,00
-/- Penerimaan Dividen BPR Tahun Anggaran 2022	(343.452.799,00)
+/- Bagian Laba BPR Tahun Anggaran 2023	649.055.976,70
+/- Bagian Laba PDAM Tahun Anggaran 2023	1.799.858.673,02
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	16.979.829.622,72



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	105.812.177.142,95	68.096.420.489,50

Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp105.812.177.142,95 dan Rp68.096.420.489,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 239 Rincian Perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO dengan LRA

No	Uraian	TA 2023 (Rp)		Selisih	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Hasil Penjualan Hewan	324.485.000,00	324.485.000,00	-	1.056.563.400,00
2	Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	55.368.000,00	-	55.368.000,00	-
3	Jasa Giro pada Kas Daerah	18.619.506.109,86	18.619.506.109,86	-	41.050.000,00
4	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-	21.918.082,25	21.918.082,25	-	18.080.000,00
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	7.707.534.246,59	7.707.534.246,59	-	-
6	Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain	77.953,00	77.953,00	-	7.341.097.669,17
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.356.984.180,42	1.529.167.680,42	(172.183.500,00)	36.831.372,66
8	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.264.533,98	1.264.533,98	-	188.741.192,70
9	Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	37.567.412,20	37.567.412,20	-	-
10	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.500,00	1.500,00	-	748.580.683,92
11	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	86.505,00	86.505,00	-	2.400.035.894,95
12	Pendapatan Denda Pajak Parkir	154.276,00	154.276,00	-	994.909,00
13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	48.384,00	48.384,00	-	25.925.900,00
14	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan	19.567.949,68	19.567.949,68	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	TA 2023 (Rp)		Selisih	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
	Logam dan Batuan Lainnya				
15	Pendapatan Denda PBBP2	19.984.175,00	19.984.175,00	-	-
16	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.000,00	80.000,00	-	-
17	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	1.360.477.067,00	1.360.477.067,00	-	-
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	30.166.358,00	30.166.358,00	-	-
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN	886.359.200,00	886.359.200,00	-	32.650.867,00
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Bahan-Bahan Lainnya	15.672.987,00	15.672.987,00	-	40.000,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.265.430,00	7.265.430,00	-	758.137.000,00
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	474.455.766,00	474.455.766,00	-	-
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	20.042.000,00
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	32.970.922,52	32.970.922,52	-	752.637.800,00
25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi	197.628.653,74	197.628.653,74	-	-
26	Pendapatan dari Pengembalian	23.645.100,00	23.645.100,00	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	TA 2023 (Rp)		Selisih	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
	Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan				
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan- Jalan Kabupaten	2.748.165.678,37	2.748.165.678,37	-	-
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan- Jalan Lainnya	61.053.968,85	61.053.968,85	-	-
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	7.509.790,00	7.509.790,00	-	-
30	Pendapatan dari BLUD	48.939.422.576,77	48.679.897.247,55	259.525.329,22	48.311.588.487,25
31	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.280.885.312,00	7.280.885.312,00	-	6.054.549.989,00
32	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	15.581.882.796,31	15.770.623.989,00	(188.741.192,69)	308.873.323,85
33	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	(12.771,59)	-	(12.771,59)	-
Jumlah		105.812.177.142,95	105.859.221.278,01	(47.044.135,06)	68.096.420.489,50

Penjelasan atas perbedaan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya.

Tabel 240 Kertas Kerja Perbandingan Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya – LRA	-
+/- Penjualan Ikan Budidaya (Kelahiran Alami) TA 2023	55.368.000,00
Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya – LO	55.368.000,00

Penerimaan pendapatan LO Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan senilai Rp55.368.000,00 atas Hasil Penjualan Ikan Budidaya.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

2. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal

**Tabel 241 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan dari Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Belanja Modal LO dengan LRA**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal – LRA	3.064.464.323,48
-/- Pembayaran piutang Tahun Anggaran 2022	(173.183.500,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal – LO	2.891.280.823,48

- Penerimaan piutang Tahun Anggaran 2022 atas Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp172.183.500,00 merupakan kelebihan pembayaran dari belanja modal pelaksanaan pekerjaan penambahan ruangan Puskesmas Awayan Tahun Anggaran 2022 pelaksana CV. Mandiri Sukses Abadi.
- Penerimaan piutang Tahun Anggaran 2022 atas Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.000.000,00 merupakan kelebihan pembayaran dari belanja honorarium pengadaan mebel sekolah.

3. Pendapatan BLUD

**Tabel 242 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD
LO dengan LRA**

Uraian	31 Desember 2023
	(Rp)
Pendapatan dari BLUD – LRA	48.679.897.247,55
-/- Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022	(4.028.751.549,00)
-/- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2023	(46.520.547,94)
+/+Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023	4.278.353.425,97
+/+Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2022	27.211.123,14
+/+Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023	29.232.877,05
Pendapatan dari BLUD – LO	48.939.422.576,77

- Pembayaran atas Piutang BLUD RSUD Datuk Kandang Haji Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.028.751.549,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- Saldo akhir Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.520.547,94 berasal dari sewa ATM Bank Kalsel dan Kantor Kas Bank Kalsel pada BLUD RSUD Datuk Kandang Haji;
 - Penambahan nilai piutang BLUD RSUD Datuk Kandang Haji Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.278.353.425,97;
 - Penerimaan atas Pendapatan Diterima Dimuka BLUD RSUD Datuk Kandang Haji Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.211.123,15;
 - Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023 BLUD RSUD Datuk Kandang Haji sebesar Rp29.232.877,05.
4. Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Tabel 243 Kertas Kerja Perbandingan Penerimaan atas Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Penerimaan atas Jasa Giro pada Kas Daerah – LRA	18.619.506.109,86
-/- Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022	(188.741.192,70)
Penerimaan atas Jasa Giro pada Kas Daerah– LO	18.430.764.917,16

Penerimaan Piutang Tahun Anggaran 2022 atas Atas pendapatan non tunai tersebut terdapat Remunerasi atas *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai dengan surat Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S-214/WPB.19/2023, tanggal 13 Februari 2023 perihal Kebijakan Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dalam Bentuk Non Tunai Melalui *Treasury Deposit Facility* yaitu sebesar Rp188.741.192,70.

5. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya

Tabel 244 Kertas Kerja Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan dari Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	0
-/- Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2022	(12.771,59)
Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya – LO	(12.771,59)

Pencatatan atas penyisihan piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya Tahun Anggaran 2022 (Saldo Awal Tahun Anggaran 2023) sebesar Rp12.771,59.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.1.2. Pendapatan Transfer	1.872.212.499.620,56	2.219.986.861.769,11

Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp1.872.212.499.620,56 dan Rp2.219.986.861.769,11 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 245 Ringkasan Perbandingan Pendapatan Transfer LO dengan LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.743.099.590.456,00	2.380.860.170.980,00	(637.760.580.524,00)	2.100.345.087.916,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	16.166.958.000,00	129.064.886.300,00	(112.897.928.300,00)	13.333.129.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	112.945.951.164,56	113.011.263.142,00	(65.311.977,44)	106.308.644.853,11
Jumlah		1.872.212.499.620,56	2.622.936.320.422,00	(750.723.820.801,44)	2.219.986.861.769,11

Penjelasan atas perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 246 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA	2.380.860.170.980,00
-/- Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022	(637.760.586.124,00)
+/- Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023	5.600,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	1.743.099.590.456,00

- a. Realisasi Penerimaan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) atas DBH yang telah disalurkan secara non Tunai melalui fasilitas TDF sesuai dengan surat Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S-214/WPB.19/2023, tanggal 13 Februari 2023 perihal Kebijakan Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dalam Bentuk Non Tunai Melalui *Treasury Deposit Facility* yaitu sebesar Rp637.760.586.124,00;



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- b. Penambahan piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.600,00 berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur terdiri atas :
- Bagi Hasil Pph Pasal 25 Dan 29 Wajib Pajak Pribadi PPh Pasal 21 sebesar Rp1.219,00;
 - DBH CHT sebesar Rp810,00;
 - DBH Pajak Bumi Dan Bangunan sebesar Rp257,00;
 - DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp645,00;
 - DBH SDA Mineral Dan Batubaru (Royalti) sebesar Rp1.088,00;
 - DBH SDA Kehutanan(PSDH) sebesar Rp1.581,00.

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	16.166.958.000,00	13.333.129.000,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp16.166.958.000,00 dan Rp13.333.129.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 247 Rincian Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO dengan LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Dana Insentif Daerah (DID)	16.166.958.000,00	16.166.958.000,00	-	13.333.129.000,00
2	Dana Desa	-	112.897.928.300,00	(112.897.928.300,00)	-
Jumlah		16.166.958.000,00	129.064.886.300,00	(112.897.928.300,00)	13.333.129.000,00

5.4.1.2.1.1. Dana Desa	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	-	-

Penerimaan Desa untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

Tabel 248 Rincian Perbandingan Dana Desa LO dengan LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Dana Desa	-	112.897.928.300,00	-	-
Jumlah			112.897.928.300,00	-	-

Pendapatan Dana Desa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp112.897.928.300,00 tidak dicatat Pendapatan pada Laporan Operasional.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	112.945.951.164,56	106.308.644.853,11

Penerimaan Transfer Antar Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp112.945.951.164,56 dan Rp106.308.644.853,11 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 249 Rincian Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah LO dengan LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan	TA 2022
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.455.371.825,19	5.416.906.256,00	38.465.569,19	5.196.519.066,34
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.279.592.307,78	10.447.542.794,78	(167.950.487,00)	8.469.056.332,67
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	85.070.848.317,26	84.911.918.837,22	158.929.480,04	80.723.660.768,81
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.121.497.805,33	1.020.906.976,00	100.590.829,33	605.697.251,29
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok/Tembakau	11.018.640.909,00	11.213.988.278,00	(195.347.369,00)	11.313.711.434,00
Jumlah		112.945.951.164,56	113.011.263.142,00	(65.311.977,44)	106.308.644.853,11

Penjelasan atas perbedaan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 250 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023
	(Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LRA	5.416.906.256,00
-/- Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022	(1.421.058.604,81)
+/- Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023	1.459.524.174,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	5.455.371.825,19

- Penerimaan pembayaran piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.421.058.604,81 berasal dari Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2022 yang pembayarannya diterima Tahun Anggaran 2023;



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- Penambahan piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.421.058.604,81 berasal dari Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang pembayarannya belum diterima Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tabel 251 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Berdasarkan LRA Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.447.542.794,78
-/- Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022	(2.681.523.036,00)
+/- Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023	2.513.572.549,00
Berdasarkan LO Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.279.592.307,78

- a. Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.681.523.036,00 berasal dari Piutang Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2022 yang pembayarannya diterima Tahun Anggaran 2023;
- b. Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.513.572.549,00 berasal dari Piutang Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2023 yang pembayarannya belum diterima Tahun Anggaran 2023.

3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tabel 252 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	84.911.918.837,22
-/- Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022	(26.667.882.803,14)
+/- Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023	26.826.812.283,18
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	85.070.848.317,26

- Pembayaran piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp26.667.882.803,14 berasal dari Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang pembayarannya diterima pada Tahun Anggaran 2023;



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- Penambahan piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.826.812.283,18 berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2023 yang belum diterima pada Tahun Anggaran 2023.
4. Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Tabel 253 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LRA	1.020.906.976,00
-/- Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022	(241.918.719,67)
+/- Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023	342.509.549,00
Pendapatan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LO	1.121.497.805,33

- a. Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp241.918.719,67 berasal dari Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan tahun 2022 yang pembayarannya diterima pada Tahun Anggaran 2023;
- b. Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp342.509.549,00 berasal dari Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang pembayarannya belum diterima pada Tahun Anggaran 2023.
5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok/Tembakau

Tabel 254 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok/Tembakau LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok/Tembakau – LRA	11.213.988.278,00
-/- Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022	(2.060.958.279,00)
+/- Penambahan Piutang Tahun Anggaran 2023	1.865.610.910,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok/Tembakau – LO	11.018.640.909,00

- a. Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.060.958.279,00 berasal dari Piutang Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2022 yang pembayarannya diterima Tahun Anggaran 2023;



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- b. Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.865.610.910,00 berasal dari Piutang Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang pembayarannya belum diterima Tahun Anggaran 2023.

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	5.849.033.675,19	14.044.287.620,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp5.849.033.675,19 dan Rp14.044.287.620,00. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 255 Rincian Perbandingan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dengan LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Pendapatan Hibah	5.849.033.675,19	600.000.000,00	5.249.033.675,19	14.041.952.420,00
2	Pendapatan Lainnya	-	-	-	2.335.200,00
	Jumlah	5.849.033.675,19	600.000.000,00	5.249.033.675,19	14.044.287.620,00

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	5.849.033.675,19	14.041.952.420,00

Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp5.849.033.675,19 dan Rp14.041.952.420,00. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 256 Rincian Perbandingan Pendapatan Hibah LO dengan LRA

No.	Uraian	TA. 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA. 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.353.307.396,00	600.000.000,00	2.753.307.396,00	1.550.024.978,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	2.329.466.279,19	-	2.329.466.279,19	5.163.879.408,00
3	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	-	-	7.075.218.034,00
4	Pendapatan Hibah dari Kelompok Perorangan	166.260.000,00	-	166.260.000,00	252.830.000,00
	Jumlah	5.849.033.675,19	600.000.000,00	5.249.033.675,19	14.041.952.420,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Penjelasan atas perbedaan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Tabel 257 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LRA	600.000.000,00
+/- Pendapatan Hibah Persediaan Tahun Anggaran 2023	334.289.396,00
+/- Pendapatan Hibah Aset Tetap Tahun Anggaran 2023	2.419.018.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	3.353.307.396,00

A. Penambahan Pendapatan Hibah Persediaan terdiri atas :

- Pendapatan Hibah Persediaan dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan senilai Rp191.232.296,00 berupa persediaan Obat-obatan dan Bahan-bahan lainnya (Bahan Medis Habis Pakai);
- Pendapatan Hibah Persediaan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp143.057.100,00 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan berupa persediaan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

B. Penambahan Pendapatan Hibah Aset Tetap terdiri atas :

- Pendapatan Hibah Aset Tetap dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia senilai Rp2.369.518.000,00 kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan berupa Bangunan Pasar Rakyat Uren;
- Pendapatan Hibah Aset Tetap dari Bidang Logistik dan Peralatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp49.500.000,00 kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan berupa Perahu *Polyethylene*.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya

Tabel 258 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	-
+/- Pendapatan Hibah Persediaan Tahun Anggaran 2023	2.329.466.279,19
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	2.329.466.279,19

- a. Pendapatan Hibah Persediaan dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp8.130.000,00 kepada BLUD RSUD Kandang Haji berupa persediaan obat-obatan;
 - b. Pendapatan Hibah Persediaan dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp2.300.572.784,00 kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan berupa persediaan Obat-obatan dan Bahan-bahan lainnya (Bahan Medis Habis Pakai);
 - c. Pendapatan Hibah Persediaan dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp763.495,19 kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan berupa persediaan Bahan-bahan lainnya (Bahan Medis Habis Pakai);
 - d. Pendapatan Hibah Aset Tetap dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp20.000.000,00 kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan berupa Alat Kesehatan.
3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Perorangan:

Tabel 259 Kertas Kerja Perbandingan Pendapatan Hibah dari Kelompok Perorangan LO dengan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Perorangan – LRA	-
+/- Penambahan Pendapatan Hibah	166.260.000,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Perorangan – LO	166.260.000,00

- a. Pendapatan Hibah Aset dari kelompok masyarakat Kelurahan Batu Piring senilai Rp26.250.000,00 kepada Kelurahan Batu Piring berupa tanah untuk



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

pengadaan jalan usaha tani RT. 08 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan;

- b. Pendapatan Hibah Aset dari kelompok masyarakat senilai Rp10.850.000,00 kepada Kelurahan Batu Piring berupa Tanah Untuk Pengadaan Jalan Usaha Tani RT. 09 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan;
- c. Pendapatan Hibah Aset dari kelompok masyarakat senilai Rp14.000.000,00 kepada Kelurahan Batu Piring berupa Tanah Untuk Pengadaan Jalan Usaha Tani RT. 13 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan;
- d. Pendapatan Hibah Aset dari kelompok masyarakat senilai Rp21.000.000,00 kepada Kelurahan Batu Piring berupa Tanah untuk Tanah Untuk Pengadaan Jalan Produksi / Usaha Tani RT. 11 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan;
- e. Pendapatan Hibah Aset dari kelompok masyarakat Kelurahan Paringin Timur senilai Rp88.000.000,00 kepada Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin berupa tanah yang terletak di RT. 10 Kelurahan Paringin Timur Tanah untuk pengadaan drainase;
- f. Pendapatan Hibah Aset dari kelompok masyarakat senilai Rp6.160.000,00 kepada Kelurahan Batu Piring berupa Tanah untuk Tanah Untuk Tanah Untuk Pengadaan Beronjong RT. 06 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.1.3.2. Pendapatan Lainnya	-	2.335.200,00

Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.335.200,00. Perbandingan Pendapatan Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 260 Rincian Perbandingan Pendapatan Lainnya LO dengan LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA. 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	1.850.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA. 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik	-	-	-	485.200,00
Jumlah		-	-	-	2.335.200,00

5.4.2. Beban	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	<u>1.894.570.048.744,23</u>	<u>1.381.614.788.928,27</u>

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.894.570.048.744,23 dan Rp1.381.614.788.928,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 261 Rincian Perbandingan Beban LO dengan Belanja LRA

No.	Beban/ Belanja	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Beban Operasi	1.414.165.749.553,52	1.403.981.021.061,62	10.184.728.491,90	996.541.796.174,17
2	Beban Penyisihan Piutang	123.907.260,71	-	123.907.260,71	195.799.887,35
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	285.488.867.183,00	-	285.488.867.183,00	249.106.612.251,75
4	Beban Transfer	193.189.024.747,00	306.086.953.047,00	(112.897.928.300,00)	134.566.609.115,00
5	Beban Tak Terduga	1.602.500.000,00	1.602.500.000,00	-	1.203.971.500,00
Jumlah		1.894.570.048.744,23	1.711.670.474.108,62	182.899.574.635,61	1.381.614.788.928,27

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

5.4.2.1. Beban Operasi	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	<u>1.414.165.749.553,52</u>	<u>996.541.796.174,17</u>

Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.414.165.749.553,52 dan Rp996.541.796.174,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 262 Rincian Perbandingan Beban Operasi LO dengan Belanja Operasi LRA

No.	Beban/ Belanja	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Pegawai	438.541.458.214,00	437.938.657.742,00	602.800.472,00	390.657.940.188,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Beban/ Belanja	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
2	Barang dan Jasa	631.629.455.890,52	795.194.098.965,62	(163.564.643.075,10)	454.553.214.051,32
3	Hibah	326.022.384.869,00	165.622.074.354,00	160.400.310.515,00	144.927.600.044,85
4	Bantuan Sosial	5.226.190.000,00	5.226.190.000,00	-	4.471.225.000,00
5	Beban Lain-lain	12.746.260.580,00	-	12.746.260.580,00	1.931.816.890,00
Jumlah		1.414.165.749.553,52	1.403.981.021.061,62	10.184.728.491,90	996.541.796.174,17

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

5.4.2.1.1. Beban Pegawai	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	438.541.458.214,00	390.657.940.188,00

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp438.541.458.214,00 dan Rp390.657.940.188,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 263 Rincian Perbandingan Beban Pegawai LO dengan Belanja Pegawai LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	207.333.434.813,00	207.600.751.527,00	(267.316.714,00)	203.764.853.193,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	170.536.973.372,00	169.666.856.186,00	870.117.186,00	124.706.626.881,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	45.532.044.000,00	45.532.044.000,00	-	48.149.763.124,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.957.569.852,00	13.957.569.852,00	-	13.118.015.141,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	264.335.493,00	264.335.493,00	-	164.435.673,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	687.280.000,00	687.280.000,00	-	600.700.000,00
7	Beban Pegawai BLUD	229.820.684,00	229.820.684,00	-	153.546.176,00
JUMLAH		438.541.458.214,00	437.938.657.742,00	602.800.472,00	390.657.940.188,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Perbedaan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 264 Kertas Kerja Perbandingan Beban Pegawai LO dengan Belanja Pegawai LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Berdasarkan LRA Belanja Pegawai	437.938.657.742,00
+/- Penambahan Utang Beban Pegawai 2023	10.828.914.450,00
-/- Pembayaran Utang Beban Pegawai 2022	(10.226.113.978,00)
Berdasarkan LO Beban Pegawai	438.541.458.214,00

- a. Penambahan Beban Pegawai bersumber dari Utang Belanja Tahun 2023 sebesar Rp10.828.914.450,00 merupakan Beban Pegawai Bulan Desember Tahun Anggaran 2023 yang akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024, terdiri atas:

- 1) Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp342.464.593,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 265 Rincian Beban iuran Jaminan Kesehatan PNS Per SKPD Tahun 2023

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.863.150,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	89.398.897,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	14.727.473,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.768.163,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	8.729.454,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.151.350,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.661.837,00
8	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	9.786.106,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.392.430,00
10	Dinas Perhubungan	6.246.198,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.202.793,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	8.580.217,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	10.632.838,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6.764.661,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.495.069,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	23.472.894,00
17	Sekretariat Daerah	21.351.056,00
18	Sekretariat DPRD	4.755.813,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8.590.842,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	14.448.980,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.348.197,00
22	Inspektorat	11.207.580,00
23	Kecamatan Lampihong	5.082.844,00
24	Kecamatan Batumandi	4.856.926,00
25	Kecamatan Awayan	4.308.778,00
26	Kecamatan Halong	4.539.968,00
27	Kecamatan Juai	3.498.830,00
28	Kecamatan Paringin	6.764.511,00
29	Kecamatan Tebing Tinggi	3.293.947,00
30	Kecamatan Paringin Selatan	5.542.791,00
JUMLAH		342.464.593,00

- 2) Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK tahun 2023 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp11.174.904,00;
- 3) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Tahun 2023 sebesar Rp3.933.456.825,00, terdiri atas:

Tabel 266 Rincian Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Per SKPD Tahun 2023

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	155.937.881,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.149.361.326,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	159.781.648,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62.831.509,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	94.813.210,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	52.680.348,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	140.822.870,00
8	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	109.320.345,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	58.363.694,00
10	Dinas Perhubungan	72.203.431,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	71.960.067,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	96.732.120,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	122.021.076,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	76.294.503,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	75.000.094,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	256.659.216,00
17	Sekretariat Daerah	253.223.468,00
18	Sekretariat DPRD	55.936.128,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	93.685.770,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	146.526.765,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	94.760.581,00
22	Inspektorat	137.520.457,00
23	Kecamatan Lampihong	54.604.675,00
24	Kecamatan Batumandi	50.935.674,00
25	Kecamatan Awayan	45.310.882,00
26	Kecamatan Halong	47.887.893,00
27	Kecamatan Juai	35.742.593,00
28	Kecamatan Paringin	69.573.707,00
29	Kecamatan Tebing Tinggi	35.419.112,00
30	Kecamatan Paringin Selatan	57.545.782,00
JUMLAH		3.933.456.825,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 4) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Tahun 2023 sebesar Rp347.268.166,00, terdiri atas:

Tabel 267 Rincian Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Per SKPD Tahun 2023

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	85.049.082,00
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	211.234.305,00
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	50.984.779,00
JUMLAH		347.268.166,00

- 5) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Tahun 2023 sebesar Rp1.376.265.258,00 terdiri atas:

Tabel 268 Rincian Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Per SKPD Tahun 2023

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.050.174,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	999.710.851,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.507.153,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.150.703,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	22.419.182,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.391.476,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.761.893,00
8	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	2.820.800,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.865.620,00
10	Dinas Perhubungan	3.241.017,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.619.603,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	4.263.497,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.343.951,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.040.242,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.509.957,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	6.387.986,00
17	Sekretariat Daerah	97.938.377,00
18	Sekretariat DPRD	3.670.628,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	30.699.843,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	86.371.085,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.091.818,00
22	Inspektorat	22.370.043,00
23	Kecamatan Lampihong	3.364.125,00
24	Kecamatan Batumandi	-
25	Kecamatan Awayan	3.693.220,00
26	Kecamatan Halong	2.891.346,00
27	Kecamatan Juai	3.269.267,00
28	Kecamatan Paringin	3.746.607,00
29	Kecamatan Tebing Tinggi	4.708.709,00
30	Kecamatan Paringin Selatan	3.366.085,00
JUMLAH		1.376.265.258,00

- 6) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK Tahun 2023 sebesar Rp70.487.039,00, terdiri atas:

Tabel 269 Rincian Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PPPK Per SKPD Tahun 2023

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	66.861.682,00
2	Kecamatan Batumandi	3.625.357,00
JUMLAH		70.487.039,00

- 7) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS tahun 2023 sebesar Rp395.104.173,00, terdiri atas:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 270 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan
Kelangkaan Profesi PNS Per SKPD Tahun 2023**

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	62.175.970,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	278.791.534,00
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.309.589,00
4	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	2.949.708,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.309.589,00
6	Sekretariat Daerah	26.577.477,00
7	Kecamatan Batumandi	1.511.895,00
8	Kecamatan Halong	2.603.463,00
9	Kecamatan Juai	5.202.508,00
10	Kecamatan Paringin	1.511.895,00
11	Kecamatan Paringin Selatan	3.290.595,00
12	Kecamatan Aawayan	2.619.178,00
13	Sekretariat DPRD	1.270.301,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.511.895,00
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.468.576,00
JUMLAH		395.104.173,00

- 8) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Tahun 2023 sebesar Rp4.276.216.321,00, terdiri atas:

**Tabel 271 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan
Prestasi Kerja PNS Per SKPD Tahun 2023**

No.	Nama SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	233.054.913,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	323.443.296,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	239.672.465,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	94.247.264,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	142.219.812,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79.020.521,00
7	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	163.980.517,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama SKPD	Nilai
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87.545.543,00
9	Dinas Perhubungan	108.305.146,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	107.940.100,00
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	183.031.616,00
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	114.441.757,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	112.500.142,00
14	Sekretariat Daerah	368.560.095,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	140.528.654,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	219.790.148,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	142.140.874,00
18	Inspektorat	206.280.685,00
19	Kecamatan Lampihong	81.907.011,00
20	Kecamatan Batumandi	76.403.509,00
21	Kecamatan Awayan	67.966.322,00
22	Kecamatan Halong	71.831.838,00
23	Kecamatan Juai	53.613.893,00
24	Kecamatan Paringin	104.360.562,00
25	Kecamatan Tebing Tinggi	53.121.266,00
26	Kecamatan Paringin Selatan	86.318.673,00
27	Sekretariat DPRD	83.904.194,00
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	145.096.679,00
29	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	384.988.826,00
JUMLAH		4.276.216.321,00

9) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Tahun 2023 sebesar Rp76.477.171,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

b. Pengurangan Beban Pegawai bersumber dari Pembayaran Utang Belanja Tahun 2022 sebesar Rp10.226.113.978,00 adalah Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 yang merupakan pengurang beban pegawai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual. Adapun rincian utang beban tersebut adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 1) Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tahun 2022 sebesar Rp608.899.245,00;
- 2) Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Tahun 2022 sebesar Rp3.327.512,00;
- 3) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Tahun 2022 sebesar Rp3.827.939.090,00;
- 4) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Tahun 2022 sebesar Rp16.994.692,00;
- 5) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Tahun 2022 sebesar Rp5.743.461.400,00;
- 6) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Tahun 2022 Rp25.492.039,00.

5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	631.629.455.890,52	454.553.214.051,32

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp631.629.455.890,52 dan Rp454.553.214.051,32. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 272 Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO dengan Belanja Barang dan Jasa LRA

No.	Beban/ Belanja	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Beban Barang	104.260.770.835,74	268.441.885.586,59	(164.181.114.750,85)	104.283.401.181,68
2	Beban Jasa	304.472.404.508,01	304.271.758.182,26	200.646.325,75	188.881.313.859,00
3	Beban Pemeliharaan	33.035.287.269,00	32.636.291.919,00	398.995.350,00	32.328.914.377,00
4	Beban Perjalanan Dinas	111.224.336.108,00	111.217.496.108,00	6.840.000,00	75.505.934.127,00
5	Beban Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	13.369.384.600,00	13.359.394.600,00	9.990.000,00	6.477.068.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Beban/ Belanja	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.369.072.340,11	13.369.072.340,11	-	7.053.025.674,64
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	51.898.200.229,66	51.898.200.229,66	-	40.023.556.832,00
Jumlah		631.629.455.890,52	795.194.098.965,62	(163.564.643.075,10)	454.553.214.051,32

5.4.2.1.2.1. Beban Barang	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	<u>104.260.770.835,74</u>	<u>104.283.401.181,68</u>

Beban barang berupa konsumsi atas barang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp104.260.770.835,74 dan Rp104.283.401.181,68, adapun penjelasan perbedaan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 273 Rincian Perbandingan Beban Barang LO dengan Belanja Barang LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Beban Barang Pakai Habis	100.298.127.935,74	264.455.611.186,59	(164.157.483.250,85)	102.327.256.201,68
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	3.962.642.900,00	3.986.274.400,00	(23.631.500,00)	1.956.144.980,00
Jumlah		104.260.770.835,74	268.441.885.586,59	(164.181.114.750,85)	104.283.401.181,68

Perbedaan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 274 Kertas Kerja Perbandingan Beban Barang LO dengan Belanja Barang LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Berdasarkan LRA Belanja Barang	268.441.885.586,59
Mutasi Bertambah:	
+/- Persediaan Awal Barang Tahun 2022	15.248.018.576,64
+/- Utang Beban Barang Tahun 2023	1.585.852.511,55



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
+/- Koreksi Saldo Awal	18.193.407,00
+/- Reklasifikasi Bertambah	181.250.400,00
+/- Reklasifikasi Beban Hibah Barang Persediaan	2.643.755.675,19
+/- Pengembalian Pinjaman dari RS Lain	30.856.174,00
+/- Peminjaman Obat dan BMHP Ke RS Lain	48.129.779,00
+/- Catat baru atas Penjualan Bibit Ternak	55.368.000,00
+/- Retur Pembelian	70.013.301,81
Jumlah Mutasi Bertambah	19.881.437.825,19
Mutasi Berkurang:	
-/- Persediaan Akhir Barang 2023	(21.511.033.344,55)
-/- Utang Beban Barang Tahun 2022	(941.043.846,42)
-/- Koreksi Saldo Awal (-)	(6.677.480,00)
-/- Reklasifikasi Barang Jasa ke Hibah	(160.400.310.515,00)
-/- Reklasifikasi Aset Tetap	(386.835.550,00)
-/- Peminjaman Obat dan BMHP oleh RS Lain	(20.400.302,10)
-/- Pengembalian Obat dan BMHP oleh RS Lain	(93.537.374,25)
-/- Obat <i>Expired</i>	(627.622.763,43)
-/- Persediaan Rusak	(40.185.404,66)
-/- Retur Pembelian	(34.905.953,38)
-/- Pembulatan	(42,25)
Jumlah Mutasi Berkurang	(184.062.552.576,04)
Berdasarkan LO Beban Barang	104.260.770.835,74

A. Total yang menjadi penambah nilai beban barang sebesar Rp19.881.437.825,19, terdiri atas:

- 1) Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Persediaan Awal Barang Tahun 2022 sebesar Rp15.248.018.576,64 yang tersebar pada SKPD terdiri atas:

Tabel 275 Rincian Persediaan Awal Barang Tahun Anggaran 2023

No.	Nama SKPD	Nilai Persediaan Awal Tahun 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	110.019.999,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.062.023.701,70
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11.112.100,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	284.221.573,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama SKPD	Nilai Persediaan Awal Tahun 2023
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	1.156.500,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	652.200,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.755.900,00
8	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	13.079.284,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	320.512.259,00
10	Dinas Perhubungan	716.000,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	529.600,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	620.000,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9.306.300,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	592.900,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	843.900,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.150.078.978,00
17	Sekretariat Daerah	4.084.000,00
18	Sekretariat DPRD	8.151.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	550.000,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	146.026.600,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.848.000,00
22	Inspektorat	7.905.440,00
23	Kecamatan Lampihong	140.000,00
24	Kecamatan Batumandi	418.000,00
25	Kecamatan Awayan	825.000,00
26	Kecamatan Halong	475.000,00
27	Kecamatan Juai	146.000,00
28	Kecamatan Paringin	96.900,00
29	Kecamatan Tebing Tinggi	525.600,00
30	Kecamatan Paringin Selatan	119.000,00
31	RSUD	6.084.486.841,94
JUMLAH		15.248.018.576,64



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 2) Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Utang Beban Barang Tahun 2023 sebesar Rp1.585.852.511,55 terdiri atas:
 - a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp6.000.000,00 pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b) Beban Obat-Obatan – Obat sebesar Rp1.116.171.535,27 pada RSUD (BLUD).
 - c) Beban Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp458.155.976,28 pada RSUD (BLUD).
 - d) Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya sebesar Rp5.525.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 3) Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Saldo Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.193.407,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Beban Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp10.317.223,00 pada RSUD.
 - b) Beban Obat-Obatan-Obat sebesar Rp2.746.184,00. Beban Obat-Obatan – Obat terdapat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.519.409,00 dan RSUD sebesar Rp226.775,00.
 - c) Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp5.130.000,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 4) Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Reklasifikasi Bertambah sebesar Rp181.250.400,00 merupakan Peralatan dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang direklasifikasi ke persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer.
- 5) Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Reklasifikasi Beban Hibah Barang Persediaan sebesar Rp2.643.755.675,19 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Beban Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp544.382.664,19 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - b) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp143.057.100,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- c) Beban Obat-Obatan-Obat sebesar Rp1.949.814.606,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.941.684.606,00 dan RSUD sebesar Rp8.130.000,00.
- d) Beban Obat-Obatan-Obatan Lainnya sebesar Rp6.501.305,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 6) Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Pengembalian Pinjaman Persediaan dari Rumah Sakit lain sebesar Rp30.856.174,00 pada RSUD berupa Beban Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp7.006.409,00 dan Beban Obat-Obatan-Obat sebesar Rp23.849.765,00.
- 7) Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Peminjaman Obat dan BMHP ke RS Lain sebesar Rp48.129.779,00 pada RSUD berupa Beban Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp1.665.000,00 dan Beban Obat-Obatan-Obat Rp46.464.779,00.
- 8) Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Catat baru atas Penjualan Bibit Ternak sebesar Rp55.368.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- 9) Penambahan Beban Barang yang bersumber dari Retur Barang sebesar Rp70.013.301,81 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Beban Obat-Obatan-Obat sebesar Rp56.693.920,81 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp116.753,00 dan RSUD sebesar Rp56.577.167,81.
 - b) Beban Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp13.319.381,00 pada RSUD.
- B. Total yang menjadi pengurang nilai beban barang sebesar Rp184.062.552.576,04, terdiri atas:
 - 1) Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Persediaan Akhir Barang 2023 sebesar Rp21.511.033.344,55.
 - 2) Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Utang Beban Barang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp941.043.846,42 terdiri atas:
 - a) Utang Beban Tahun 2022 pada RSUD sebesar Rp773.197.846,42 berupa Utang Beban Obat-Obatan-Obat sebesar Rp4.451.100,00 dan Utang Beban Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp768.746.746,42.
 - b) Utang Beban Tahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp167.846.000,00 merupakan Utang Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 3) Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Koreksi Saldo Awal sebesar Rp6.677.480,00 pada RSUD berupa Beban Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp908.480,00 dan Beban Obat-Obatan – Obat sebesar Rp5.769.000,00.
- 4) Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Reklasifikasi Barang Jasa ke Hibah sebesar Rp160.400.310.515,00, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp129.653.142.058,00. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yang direklasifikasi ke Beban Hibah per SKPD disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 276 Rincian Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yang direklasifikasi ke Beban Hibah per SKPD

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	295.800.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	59.195.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	63.034.850.557,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.652.671.100,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	7.000.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.720.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	898.108.700,00
8	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	289.071.000,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	229.102.000,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	2.509.596.700,00
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.730.547.689,00
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7.530.242.862,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.758.000,00
14	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	47.091.078.450,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.000.000,00
16	Kecamatan Awayan	2.600.000,00
17	Kecamatan Paringin	276.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
18	Kecamatan Paringin Selatan	1.000.000,00
JUMLAH		129.653.142.058,00

- b) Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp30.747.168.457,00. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain yang direklasifikasi ke Beban Hibah per SKPD disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 277 Rincian Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain yang direklasifikasi ke Beban Hibah per SKPD

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.976.901.791,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	23.476.868.666,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	293.398.000,00
JUMLAH		30.747.168.457,00

- 5) Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Reklasifikasi Aset Tetap sebesar Rp386.835.550,00, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp19.821.100,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.600.000,00 dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp16.221.100,00.
 - b) Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebesar Rp36.720.000,00, pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
 - c) Beban Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp2.755.200,00 Beban Bahan-Bahan Lainnya terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp1.755.200,00 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.000.000,00.
 - d) Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp7.800.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - e) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp53.864.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp11.364.000,00, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- Aset Daerah sebesar Rp31.000.000,00 dan Inspektorat sebesar Rp11.500.000,00.
- f) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp95.496.250,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- g) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp24.677.500,00, dengan rincian sebagai berikut:
- Dinas Pendidikan sebesar Rp1.875.000,00;
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp11.797.600,00;
 - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp10.000.000,00; dan
 - Kecamatan Lampihong sebesar Rp1.004.900,00.
- h) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebesar Rp4.000.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- i) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga sebesar Rp3.050.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- j) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp112.405.800,00, dengan rincian sebagai berikut:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.615.000,00;
 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp19.899.550,00;
 - RSUD sebesar Rp5.791.250,00;
 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp71.100.000,00; dan
 - Kecamatan Paringin Selatan sebesar Rp10.000.000,00.
- k) Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp2.464.200 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- l) Beban Komponen-Komponen Lainnya sebesar Rp23.781.500,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp4.500.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp19.281.500,00.
- 6) Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Peminjaman Obat dan BMHP oleh Rumah Sakit lain sebesar Rp20.400.302,10 pada RSUD



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

berupa Beban Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp11.772.754,00 dan Beban Obat-Obatan – Obat sebesar Rp8.627.548,00.

- 7) Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Pengembalian Obat dan BMHP oleh Rumah Sakit lain sebesar Rp93.537.374,25 pada RSUD berupa Beban Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp1.665.000,00 dan Beban Obat-Obatan – Obat sebesar Rp91.872.374,25.
- 8) Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Obat *Expired* sebesar Rp627.622.763,43, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Beban Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp341.603.668,55 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp201.810.140,00 dan RSUD sebesar Rp139.793.528,55.
 - b) Beban Obat-Obatan – Obat sebesar Rp286.019.094,88 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp143.487.444,40 dan RSUD sebesar Rp142.531.650,48.
- 9) Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Persediaan Rusak sebesar Rp40.185.404,66 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Beban Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp25.333.140,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp20.040,00 dan RSUD sebesar Rp25.313.100,00.
 - b) Beban Obat-Obatan – Obat sebesar Rp4.272.264,66, dengan rincian sebagai berikut:
 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp933.717,00;
 - RSUD sebesar Rp924.547,66; dan
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.414.000,00.
 - c) Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp10.580.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 10) Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Retur/ Pengembalian Barang sebesar Rp34.905.953,38 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp606.188,63 dan RSUD sebesar Rp34.299.764,75.
- 11) Pengurangan Beban Barang yang bersumber dari Pembulatan sebesar Rp42,25.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 278 Rincian Beban Barang karena Pembulatan

No.	Nama SKPD	Beban	Nilai (Rp)
1	RSUD	Beban Bahan-Bahan Lainnya	18,84
		Beban Obat-Obatan – Obat	20,82
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,72
		Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1,59
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,28
JUMLAH			42,25

5.4.2.1.2.2. Beban Jasa

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<u>304.472.404.508,01</u>	<u>188.881.313.859,00</u>

Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp304.472.404.508,01 dan Rp188.881.313.859,00 terdiri atas Beban sebagai berikut:

Tabel 279 Rincian Perbandingan Beban Jasa LO dengan Beban Jasa LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Beban Jasa Kantor	181.941.030.510,01	181.528.358.184,26	412.672.325,75	118.590.817.624,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	36.351.753.460,00	36.504.779.460,00	(153.026.000,00)	32.052.173.406,00
3	Beban Sewa Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	51.600.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.853.457.750,00	2.853.457.750,00	-	934.263.300,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	494.960.950,00	494.960.950,00	-	238.200.000,00
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	180.000.000,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	419.389.700,00	419.389.700,00	-	331.900.000,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	7.077.705.386,00	7.106.705.386,00	(29.000.000,00)	5.766.282.300,00
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.101.556.645,00	9.131.556.645,00	(30.000.000,00)	5.034.911.160,00
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	150.000.000,00	150.000.000,00	-	300.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	66.035.716.107,00	66.035.716.107,00	-	25.348.220.069,00
12	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	40.834.000,00	40.834.000,00	-	52.946.000,00
Jumlah		304.472.404.508,01	304.271.758.182,26	200.646.325,75	188.881.313.859,00

Perbedaan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 280 Kertas Kerja Perbandingan Beban Jasa LO dengan Beban Jasa LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Berdasarkan LRA Belanja Jasa	304.271.758.182,26
Mutasi Bertambah:	
+/- Utang Beban Jasa Tahun 2023	3.051.478.488,75
Jumlah Mutasi Bertambah	307.323.236.671,01
Mutasi Berkurang:	
-/- Utang Beban Jasa Tahun 2022	(2.754.233.763,00)
-/- Beban Dibayar Dimuka	(37.598.400,00)
-/- Reklasifikasi Berkurang	(59.000.000,00)
Jumlah Mutasi Berkurang	(2.850.832.163,00)
Berdasarkan LO Beban Jasa	304.472.404.508,01

a. Penambahan Beban Jasa yang bersumber dari Utang Belanja Jasa tahun 2023 yang akan dibayar pada Tahun 2024 sebesar Rp3.051.478.488,75 terdiri:

- 1) Beban Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp2.810.425.626,75 merupakan utang beban pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp150.748.000,00 dan pada RSUD sebesar Rp2.659.677.626,75.
- 2) Beban Jasa Tenaga Administrasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp15.600.000,00.
- 3) Beban Tagihan Air sebesar Rp86.299.400,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 281 Rincian Utang Beban Tagihan Air per SKPD Tahun 2023

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.334.100,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	40.385.100,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.935.000,00
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	783.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	748.000,00
7	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.231.600,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	332.000,00
9	Dinas Perhubungan	1.667.700,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	47.000,00
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	442.500,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.576.500,00
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.255.000,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	4.177.500,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	1.259.000,00
16	Sekretariat DPRD	1.462.500,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	612.000,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	952.000,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	872.500,00
20	Inspektorat	47.000,00
21	Kecamatan Lampihong	193.900,00
22	Kecamatan Batumandi	390.000,00
23	Kecamatan Awayan	502.500,00
24	Kecamatan Halong	397.900,00
25	Kecamatan Juai	1.799.600,00
26	Kecamatan Paringin	1.054.000,00
27	Kecamatan Tebing Tinggi	808.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
28	Kecamatan Paringin Selatan	986.500,00
JUMLAH		86.299.400,00

- 4) Beban Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar Rp114.399.772,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 282 Rincian Utang Beban Tagihan Listrik per SKPD Tahun 2023

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	79.232.040,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.737.891,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiran	15.337.316,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.573.463,00
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.394.956,00
6	Kecamatan Paringin	2.124.106,00
JUMLAH		114.399.772,00

- 5) Beban Paket/ Pengiriman sebesar Rp3.642.750,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 6) Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp140.940,00 pada Kecamatan Batumandi.
- 7) Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp20.970.000,00.
- b. Pengurangan Beban Jasa Tahun 2022 sebesar Rp2.850.832.163,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pengurangan Beban Jasa Tahun 2023 yang bersumber dari Pembayaran Utang Belanja Jasa Tahun 2022 yang dibayar pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.754.233.763,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 283 Rincian Utang Beban per SKPD Tahun 2022

No.	Nama Rekening	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Beban Jasa Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	135.447.200,00
2		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiran	220.176,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama Rekening	Nama SKPD	Nilai (Rp)
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	202.224,00
3	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	275.220,00
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	252.780,00
4	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4.995.180,00
5	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	166.835.000,00
		RSUD	2.342.334.093,00
6	Beban Tagihan Air	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.049.500,00
		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.818.500,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.989.000,00
		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	773.500,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.500,00
		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1.008.400,00
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.731.000,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	425.500,00
		Dinas Perhubungan	1.357.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	45.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5.669.000,00
		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.155.900,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	553.000,00
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	852.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	4.826.400,00
		Sekretariat Daerah	17.221.000,00
		Sekretariat DPRD	3.839.300,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	618.500,00
		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.011.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama Rekening	Nama SKPD	Nilai (Rp)
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.054.500,00
		Inspektorat	47.000,00
		Kecamatan Lampihong	167.700,00
		Kecamatan Batumandi	390.000,00
		Kecamatan Awayan	1.446.600,00
		Kecamatan Halong	340.100,00
		Kecamatan Juai	3.862.400,00
		Kecamatan Paringin	10.332.600,00
		Kecamatan Tebing Tinggi	391.500,00
		Kecamatan Paringin Selatan	382.000,00
7	Beban Tagihan Listrik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.381.944,00
		Kecamatan Juai	8.884.046,00
		JUMLAH	2.754.233.763,00

- 2) Pengurangan Beban Jasa Tahun 2022 yang bersumber dari Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp37.598.400,00 merupakan Kelebihan Pembayaran BPJS Jamsos Ketenagakerjaan Pekerja Rentan untuk bulan November dan desember 2023.
- 3) Pengurangan Beban Jasa Tahun 2022 yang bersumber dari reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp59.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp30.000.000,00.
 - b) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp20.000.000,00.
 - c) Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp9.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.2.1.2.3. Beban Pemeliharaan	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	33.035.287.269,00	32.328.914.377,00

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp33.035.287.269,00 dan Rp32.328.914.377,00 terdiri atas Beban sebagai berikut:

Tabel 284 Rincian Perbandingan Beban Pemeliharaan LO dengan Beban Pemeliharaan LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Beban Pemeliharaan Tanah	-	-	-	1.042.597.000,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.071.908.375,00	4.067.681.375,00	4.227.000,00	3.465.586.869,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.881.261.221,00	9.477.924.871,00	403.336.350,00	19.291.636.570,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.082.117.673,00	19.090.685.673,00	(8.568.000,00)	8.527.093.938,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	2.000.000,00
Jumlah		33.035.287.269,00	32.636.291.919,00	398.995.350,00	32.328.914.377,00

Perbedaan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 285 Kertas Kerja Perbandingan Beban Pemeliharaan LO dengan Belanja Pemeliharaan LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Berdasarkan LRA Belanja Pemeliharaan	32.636.291.919,00
Mutasi Bertambah:	
+/- Utang Beban Pemeliharaan Tahun 2023	809.296.350,00
+/- Reklasifikasi Bertambah dari Aset Tetap	4.227.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	813.523.350,00
Mutasi Berkurang:	
-/- Utang Beban Pemeliharaan Tahun 2022	(17.428.000,00)
-/- Reklasifikasi Berkurang ke Aset Tetap	(397.100.000,00)
Jumlah Mutasi Berkurang	(414.528.000,00)
Berdasarkan LO Beban Pemeliharaan	33.035.287.269,00

- a. Penambahan Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp813.523.350,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

- 1) Penambahan Beban Pemeliharaan Tahun 2023 yang bersumber dari Utang Beban Pemeliharaan Tahun 2023 yang dibayar pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp809.296.350,00 merupakan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada RSUD.
- 2) Penambahan Beban Pemeliharaan Tahun 2023 yang bersumber dari Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp4.227.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik sebesar Rp500.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
 - Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya pada Inspektorat sebesar Rp1.000.000,00.
 - Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan pada Inspektorat sebesar Rp2.727.000,00.
- b. Pengurangan Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp414.528.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pengurangan Beban Pemeliharaan Tahun 2023 yang bersumber dari Utang Beban Pemeliharaan Tahun 2022 yang dibayar pada tahun 2023 sebesar Rp17.428.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp8.568.000,00 berupa Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya dan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp8.860.000,00 berupa Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.
 - 2) Pengurangan Beban Pemeliharaan Tahun 2023 yang bersumber dari Reklasifikasi Berkurang sebesar Rp397.100.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp198.600.000,00 dan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman sebesar Rp198.500.000,00 yang direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.2.1.2.4. Beban Perjalanan Dinas

TA 2023	TA 2022
(Rp)	(Rp)
111.224.336.108,00	75.505.934.127,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp111.224.336.108,00 dan Rp75.505.934.127,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 286 Rincian Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO dengan Belanja Pemeliharaan Dinas LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	87.766.183.177,00	87.759.343.177,00	6.840.000,00	60.718.464.215,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.521.244.515,00	19.521.244.515,00	-	14.774.549.912,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35.800.000,00	35.800.000,00	-	-
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.723.250.000,00	2.723.250.000,00	-	12.920.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	1.177.858.416,00	1.177.858.416,00	-	-
Jumlah		111.224.336.108,00	111.217.496.108,00	6.840.000,00	75.505.934.127,00

Perbedaan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 287 Kertas Kerja Perhitungan Beban Perjalanan Dinas LO dengan Belanja Perjalanan Dinas LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Berdasarkan LRA Belanja Perjalanan Dinas	111.217.496.108,00
Mutasi Bertambah:	
+/- Utang Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023	6.840.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	6.840.000,00
Berdasarkan LO Beban Perjalanan Dinas	111.224.336.108,00

Penambahan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp6.840.000,00 disebabkan karena terdapat Utang Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 yang akan dibayarkan pada tahun 2024 dari RSUD.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.2.1.2.5. Beban Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	TA 2023 (Rp) 13.369.384.600,00	TA 2022 (Rp) 6.477.068.000,00

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.369.384.600,00 dan Rp6.477.068.000,00. Beban tersebut merupakan merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kelompok masyarakat Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 288 Rincian Perbandingan Beban Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat LO dengan Belanja LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.999.956.300,00	5.999.956.300,00	-	730.418.000,00
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	33.850.000,00	33.850.000,00	-	87.000.000,00
3	Beban Beasiswa	6.037.250.000,00	6.037.250.000,00	-	5.659.650.000,00
4	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-
5	Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	7.742.000,00	7.742.000,00	-	-
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.080.596.300,00	1.080.596.300,00	-	-
7	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	9.990.000,00	-	9.990.000,00	-
Jumlah		13.369.384.600,00	13.359.394.600,00	9.990.000,00	6.477.068.000,00

Perbedaan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 289 Kertas Kerja Perhitungan Beban Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat LO dengan Belanja LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Berdasarkan LRA Belanja Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	13.359.394.600,00
Mutasi Bertambah:	
+/- Utang Beban Tahun 2023	9.990.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	9.990.000,00
Berdasarkan LO Beban Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	13.369.384.600,00

Penambahan Beban Beban Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat Tahun 2023 sebesar Rp9.990.000,00 disebabkan karena terdapat Utang Beban tahun 2023 yang akan dibayarkan pada tahun 2024 dari RSUD.

5.4.2.1.2.6. Beban Barang dan Jasa BOS/BOP	TA 2023 (Rp) 13.369.072.340,11	TA 2022 (Rp) 7.053.025.674,64

Beban Barang dan Jasa BOS/BOP Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp13.369.072.340,11 dan Rp7.053.025.674,64 adapun penjelasan perbedaan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 290 Perbandingan Beban Barang dan Jasa BLUD LO dengan Beban Barang dan Jasa BLUD LRA

No.	Beban/ Belanja	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Beban Barang dan Jasa BOS/ BOP	13.369.072.340,11	13.369.072.340,11	-	7.053.025.674,64
	Jumlah	13.369.072.340,11	13.369.072.340,11	-	7.053.025.674,64

5.4.2.1.2.7. Beban Barang dan Jasa BLUD	TA 2023 (Rp) 51.898.200.229,66	TA 2022 (Rp) 40.023.556.832,00

Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp51.898.200.229,66 dan Rp40.023.556.832,00 adapun penjelasan perbedaan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 291 Perbandingan Beban Barang dan Jasa BLUD LO dengan Belanja Barang dan Jasa BLUD

No.	Belanja/ Beban	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Barang dan Jasa BLUD	51.898.200.229,66	51.898.200.229,66	-	40.023.556.832,00
	Jumlah	51.898.200.229,66	51.898.200.229,66	-	40.023.556.832,00

5.4.2.1.3. Beban Hibah	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	326.022.384.869,00	144.927.600.044,85

Beban Hibah merupakan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Balangan atas pemberian hibah. Pengelolaan Hibah diatur melalui Peraturan Bupati Balangan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Balangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

Beban Hibah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp326.022.384.869,00 dan Rp144.927.600.044,85, adapun penjelasan perbedaan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 292 Rincian Perbandingan Beban Hibah LO dengan Beban Hibah LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA. 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	5.863.500.000,00	5.863.500.000,00	-	-
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	43.206.906.460,00	43.206.906.460,00	-	15.666.083.722,85
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.216.000.000,00	2.216.000.000,00	-	4.311.193.000,00
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	69.489.867.894,00	69.489.867.894,00	-	6.170.794.838,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	44.116.400.000,00	44.116.400.000,00	-	20.539.500.000,00
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	160.445.760.515,00	45.450.000,00	160.400.310.515,00	97.556.078.484,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA. 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
7	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	683.950.000,00	683.950.000,00	-	683.950.000,00
Jumlah		326.022.384.869,00	165.622.074.354,00	160.400.310.515,00	144.927.600.044,85

Perbedaan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 293 Kertas Kerja Perbandingan Beban Hibah LO dengan Belanja Hibah LRA

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Berdasarkan LRA Belanja Hibah	165.622.074.354,00
Mutasi Bertambah:	
+/- Reklasifikasi Bertambah	160.400.310.515,00
Berdasarkan LO Beban Pemeliharaan	326.022.384.869,00

Penambahan Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp160.400.310.515,00 merupakan reklasifikasi bertambah dari Beban Barang ke Beban Hibah.

5.4.2.1.4. Beban Bantuan Sosial	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	5.226.190.000,00	4.471.225.000,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.226.190.000,00 dan Rp4.471.225.000,00 terdiri atas Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan Kelompok Masyarakat. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pengelolaan Bantuan Sosial diatur melalui Peraturan Bupati Balangan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Balangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beban Daerah Kabupaten Balangan. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 294 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Rekening	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	608.000.000,00	512.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	Rekening	2023 (Rp)	2022 (Rp)
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	-	226.500.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	886.200.000,00	-
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.731.990.000,00	3.732.125.000,00
Jumlah		5.226.190.000,00	4.471.225.000,00

5.4.2.1.5. Beban Lain-lain	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	12.746.260.580,00	1.931.816.890,00

Beban Lain-lain merupakan klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp12.746.260.580,00 dan Rp1.931.816.890,00. Beban Lain-lain di atas merupakan nilai koreksi barang ekstrakomptabel.

Tabel 295 Rincian Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2023

No.	SKPD	2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.534.466.950,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	385.884.376,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.794.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.705.000,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	24.000.000,00
6	Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	650.000,00
7	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	18.798.204,00
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7.426.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	201.112.050,00
10	Sekretariat Daerah	92.430.000,00
11	Sekretariat DPRD	200.251.300,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	18.500.000,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	60.485.000,00
14	Inspektorat Kabupaten	930.000,00
15	Kecamatan Lampihong	1.876.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	2023
16	Kecamatan Batumandi	27.517.500,00
17	Kecamatan Awayan	39.615.000,00
18	Kecamatan Halong	6.500.000,00
19	Kecamatan Juai	335.000,00
20	Kecamatan Paringin	67.028.000,00
21	Kecamatan Tebing Tinggi	32.000.000,00
22	Kecamatan Paringin Selatan	6.955.600,00
Jumlah		12.746.260.580,00

5.4.2.2. Beban Penyisihan Piutang	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	123.907.260,71	195.799.887,35

Beban Penyisihan Piutang adalah Beban dari Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp123.907.260,71 dan Rp195.799.887,35 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 296 Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Rekening	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	113.849.351,35	158.507.616,49
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	9.063.600,00	20.293.237,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	994.309,36	16.999.033,86
4	Beban Penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)	-	-
Jumlah		123.907.260,71	195.799.887,35

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

5.4.2.2.1. Beban Penyisihan Piutang Pajak	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	113.849.351,35	158.507.616,49

Beban Penyisihan Piutang Pajak adalah Beban dari Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Beban Penyisihan Piutang Pajak tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp113.849.351,35 dan Rp158.507.616,49 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 297 Rincian Beban Penyisihan Piutang Pajak

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	105.575.716,01	157.411.034,10
2	Beban Penyisihan Piutang Reklame	-	-
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	213.946,52	299.277,39
4	Beban Penyisihan Pajak Katering	17.665,00	3.325,00
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	8.042.023,83	793.980,00
Jumlah		113.849.351,35	158.507.616,49

5.4.2.2.2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	9.063.600,00	20.293.237,00

Beban Penyisihan Piutang Retribusi adalah Beban dari Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.063.600,00 dan Rp20.293.237,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 298 Rincian Beban Penyisihan Piutang Retribusi

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	14.175.237,00
2	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	4.997.175,00	3.911.075,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4.066.425,00	2.206.925,00
Jumlah		9.063.600,00	20.293.237,00

5.4.2.2.3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	994.309,36	16.999.033,86

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah Beban dari Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp994.309,36 dan Rp16.999.033,86. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan penyisihan piutang dari Pendapatan dari BLUD.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.2.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	<u>285.488.867.183,00</u>	<u>249.106.612.251,75</u>

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Beban Penyusutan merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp285.488.867.183,00 dan Rp249.106.612.251,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 299 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin	71.506.466.770,00	58.220.287.442,49
2	Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	49.640.707.749,00	46.560.533.573,66
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi Dan Jaringan	163.538.601.527,00	143.682.714.137,60
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	84.691.227,00	102.793.628,00
6	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	718.399.910,00	540.283.470,00
Jumlah		285.488.867.183,00	249.106.612.251,75

5.4.2.3.1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	<u>71.506.466.770,00</u>	<u>58.220.287.442,49</u>

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp71.506.466.770,00 dan Rp58.220.287.442,49 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 300 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	2023	2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.231.115.077,00	10.915.500.741,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.461.277.618,00	21.684.306.479,84
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.866.851.827,00	2.234.599.804,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	234.947.717,00	220.548.314,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.044.155.262,00	960.662.211,00
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	636.311.708,00	499.854.279,68



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	2023	2022
7	Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	521.502.286,00	604.744.895,00
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.098.385.449,00	1.338.940.239,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.343.792.425,00	1.291.437.106,00
10	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	3.247.635.186,00	2.377.247.789,24
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	446.967.045,00	439.281.678,00
12	Dinas Perhubungan	4.131.055.772,00	1.434.894.525,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	611.556.430,00	1.070.683.788,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	461.259.491,00	510.968.850,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	306.579.478,00	323.589.138,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	426.192.520,00	418.406.254,00
17	Sekretariat Daerah	10.099.624.029,00	6.774.425.453,00
18	Sekretariat DPRD	1.759.140.033,00	1.373.765.387,40
19	Kecamatan Lampihong	156.215.412,00	163.861.137,00
20	Kecamatan Batumandi	208.120.584,00	125.477.831,00
21	Kecamatan Awayan	172.602.548,00	111.201.696,00
22	Kecamatan Halong	201.656.271,00	195.324.189,00
23	Kecamatan Juai	147.858.324,00	133.424.626,00
24	Kecamatan Paringin	472.667.552,00	308.261.826,00
25	Kecamatan Tebing Tinggi	214.458.383,00	196.415.029,00
26	Kecamatan Paringin Selatan	270.763.696,00	165.683.070,00
27	Inspektorat Kabupaten	791.650.026,00	379.753.729,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	489.598.415,00	271.258.234,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.679.782.067,00	924.648.210,33
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	772.744.139,00	771.120.933,00
Jumlah		71.506.466.770,00	58.220.287.442,49

5.4.2.3.2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

TA 2023
(Rp)

49.640.707.749,00

TA 2022
(Rp)

46.560.533.573,66

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp49.640.707.749,00, dan Rp46.560.533.573,66, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 301 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

No	SKPD	2023	2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.051.181.930,00	14.776.177.099,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.988.964.582,00	6.158.892.962,33
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.660.379.942,00	5.520.728.571,75
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	54.699.951,00	54.699.951,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	120.351.001,00	89.456.200,00
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	81.267.573,00	251.887.135,00
7	Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	251.887.133,00	86.188.478,00
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.648.609.194,00	575.624.579,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.139.964.023,00	229.896.001,00
10	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	710.365.844,00	346.916.968,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	237.358.500,00	208.996.624,00
12	Dinas Perhubungan	347.263.834,00	2.434.984.997,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	257.386.876,00	1.648.609.197,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.574.133.640,00	545.890.701,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	559.850.947,00	296.607.690,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	297.950.272,00	1.960.949.824,00
17	Sekretariat Daerah	6.169.001.063,00	6.131.175.867,00
18	Sekretariat DPRD	616.211.858,00	606.217.195,58
19	Kecamatan Lampihong	311.421.428,00	311.421.429,00
20	Kecamatan Batumandi	346.806.899,00	221.110.550,00
21	Kecamatan Awayan	208.270.859,00	208.270.861,00
22	Kecamatan Halong	250.466.622,00	250.466.622,00
23	Kecamatan Juai	314.543.035,00	88.230.613,00
24	Kecamatan Paringin	584.556.773,00	314.543.038,00
25	Kecamatan Tebing Tinggi	88.230.612,00	514.597.776,00
26	Kecamatan Paringin Selatan	221.778.341,00	221.778.344,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	2023	2022
27	Inspektorat Kabupaten	518.184.785,00	492.403.630,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	446.454.676,00	439.566.763,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.115.805.664,00	1.106.884.015,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	467.359.892,00	467.359.892,00
Jumlah		49.640.707.749,00	46.560.533.573,66

5.4.2.3.3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
163.538.601.527,00	143.682.714.137,60

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp163.538.601.527,00 dan Rp143.682.714.137,60, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 302 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	SKPD	2023	2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	344.457.953,00	367.372.045,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.316.931.718,00	822.039.600,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	155.288.371.466,00	136.442.303.253,60
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.663.566,00	2.663.567,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.983.695.314,00	3.983.695.314,00
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	159.700,00	159.700,00
7	Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	787.451.064,00	361.668.765,00
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	172.013.808,00	172.013.812,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	450.466.577,00	472.443.985,00
10	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	166.546.850,00	146.093.087,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.302.156,00	11.302.157,00
12	Dinas Perhubungan	3.192.134,00	3.192.134,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	52.279.329,00	55.399.335,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	37.508.500,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	31.429.323,00	31.429.323,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	2023	2022
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	38.452.717,00	40.462.218,00
17	Sekretariat Daerah	122.692.296,00	141.712.308,00
18	Sekretariat DPRD	15.954.512,00	15.954.513,00
19	Kecamatan Lampihong	243.375,00	243.375,00
20	Kecamatan Batumandi	745.800,00	745.800,00
21	Kecamatan Halong	301.600,00	301.600,00
22	Kecamatan Juai	150.000,00	150.000,00
23	Kecamatan Paringin	384.058.176,00	331.495.128,00
24	Kecamatan Tebing Tinggi	521.842,00	521.843,00
25	Kecamatan Paringin Selatan	272.126.941,00	193.641.063,00
26	Inspektorat	26.237.813,00	26.237.813,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12.502.538,00	12.502.539,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	53.652.959,00	9.461.360,00
Jumlah		163.538.601.527,00	143.682.714.137,60

5.4.1.1.1. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

TA 2023
(Rp)
84.691.227,00

TA 2022
(Rp)
102.793.628,00

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp84.691.227,00 dan Rp102.793.628,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 303 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

No	SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7.100.000,00	7.100.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	16.902.400,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	1.200.000,00
4	Kecamatan Paringin	990.000,00	990.000,00
5	Sekretariat Daerah	76.601.227,00	76.601.228,00
Jumlah		84.691.227,00	102.793.628,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.1.1.2. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	718.399.910,00	540.283.470,00

Beban Amortisasi merupakan Beban Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp718.399.910,00, dan Rp540.283.470,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 304 Rincian Beban Amortisasi per SKPD

No.	SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55.700.400,00	45.200.400,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	79.770.000,00	79.770.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	19.390.000,00	19.390.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.535.400,00	13.535.400,00
5	Dinas Perhubungan	840.000,00	840.000,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	19.980.000,00	19.980.000,00
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	37.453.800,00	34.700.000,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20.350.000,00	3.180.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	135.865.210,00	96.955.170,00
10	Sekretariat Daerah	27.764.000,00	27.764.000,00
11	Sekretariat DPRD	-	19.866.000,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	14.960.000,00	13.520.000,00
13	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	201.953.700,00	142.512.500,00
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	74.127.400,00	12.360.000,00
15	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.710.000,00	10.710.000,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.000.000,00	-
Jumlah		718.399.910,00	540.283.470,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.1.1. Beban Transfer	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	193.189.024.747,00	134.566.609.115,00

Transfer merupakan Beban Bagi Hasil dan Beban Bantuan Keuangan. Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp193.189.024.747,00 dan Rp134.566.609.115,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 305 Rincian Perbandingan Beban Transfer LO dengan Belanja Transfer LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Beban Bagi Hasil	1.825.260.947,00	1.825.260.947,00	-	1.366.693.655,00
2	Beban Bantuan Keuangan	191.363.763.800,00	304.261.692.100,00	(112.897.928.300,00)	133.199.915.460,00
Jumlah		193.189.024.747,00	306.086.953.047,00	(112.897.928.300,00)	134.566.609.115,00

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

5.4.1.1.1. Beban Bagi Hasil	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	1.825.260.947,00	1.366.693.655,00

Beban Bagi Hasil merupakan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa, Realisasi Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.825.260.947,00 dan Rp1.366.693.655,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 306 Rincian Perbandingan Beban Bagi Hasil LO dengan Belanja Bagi Hasil LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah	1.603.105.200,00	1.603.105.200,00	-	1.176.835.005,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah	222.155.747,00	222.155.747,00	-	189.858.650,00
Jumlah		1.825.260.947,00	1.825.260.947,00	-	1.366.693.655,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.1.1.2. Beban Bantuan Keuangan	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	191.363.763.800,00	133.199.915.460,00

Beban Bantuan Keuangan merupakan Beban Bantuan Alokasi Dana Desa. Beban Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp191.363.763.800,00 dan Rp133.199.915.460,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 307 Rincian Perbandingan Beban Bantuan Keuangan LO dengan Belanja Bantuan Keuangan LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota ke Desa	191.363.763.800,00	191.363.763.800,00	-	133.199.915.460,00
2	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota ke Desa	-	112.897.928.300,00	(112.897.928.300,00)	-
Jumlah		191.363.763.800,00	304.261.692.100,00	(112.897.928.300,00)	133.199.915.460,00

Penjelasan atas perbedaan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 308 Kertas Kerja Perbandingan Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi LO dengan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi LRA

Uraian	31-Des-23 (Rp)
Transfer Bantuan Keuangan – LRA	304.261.692.100,00
-/- Koreksi Beban	(112.897.928.300,00)
Beban Transfer Bantuan Keuangan – LO	191.363.763.800,00

Pengurangan Beban Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) APBN sebesar Rp112.897.928.300,00 disebabkan karena tidak termasuk dalam Beban Laporan Operasional, sejak tahun 2021 Alokasi Dana Desa (ADD) APBN di transfer langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung yang wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan.

5.4.1.2. Beban Tak Terduga	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	1.602.500.000,00	1.203.971.500,00

Beban Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Beban Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.602.500.000,00 dan Rp1.203.971.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 309 Rincian Perbandingan Beban Tak Terduga LO dan LRA

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Operasional (LO)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Beban Tak Terduga	1.602.500.000,00	1.602.500.000,00	-	1.203.971.500,00
Jumlah		1.602.500.000,00	1.602.500.000,00	-	1.203.971.500,00

5.4.2. Jumlah Beban	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	1.894.570.048.744,23	1.381.614.788.928,27

Jumlah Beban adalah pengeluaran yang menjadi beban untuk tahun 2023 dan 2022. Beban Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.894.570.048.744,23 dan Rp1.381.614.788.928,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 310 Rincian Jumlah Beban

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Beban Operasi	1.414.165.749.553,52	996.541.796.174,17
2	Beban Penyisihan Piutang	123.907.260,71	195.799.887,35
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	285.488.867.183,00	249.106.612.251,75
4	Beban Transfer	193.189.024.747,00	134.566.609.115,00
5	Beban Tak Terduga	1.602.500.000,00	1.203.971.500,00
Jumlah		1.894.570.048.744,23	1.381.614.788.928,27

5.4.3. Surplus/ Defisit dari Operasi	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	123.070.735.634,48	949.146.280.493,50

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional adalah hasil dari selisih Pendapatan dikurangi Beban tahun berjalan. Surplus/ Defisit Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp123.070.735.634,48 dan Rp949.146.280.493,50.

Tabel 311 Surplus/Defisit dari Operasi

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Pendapatan	2.017.640.784.378,71	2.330.761.069.421,77
2	Beban	1.894.570.048.744,23	1.381.614.788.928,27
Jumlah		123.070.735.634,48	949.146.280.493,50



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.4. Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	TA 2023 (Rp) (66.051.749.471,70)	TA 2022 (Rp) (37.482.653.429,99)

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp66.051.749.471,70) dan (Rp37.482.653.429,99) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 312 Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

No	Keterangan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Nilai Buku dari Aset yang Dihapus	(66.051.749.471,70)	(34.999.231.328,00)
2	Rugi PDAM tahun 2022	-	(2.483.422.101,99)
Jumlah		(66.051.749.471,70)	(37.482.653.429,99)

Nilai Buku dari Aset yang dihapus sebesar Rp66.051.749.471,70 terdiri dari:

1. Penghapusan Aset Lain-lain sebesar Rp97.360.866.492,00. Penghapusan Aset Lain-lain Tahun 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 313 Rincian Penghapusan Aset Lain-lain per SKPD

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.022.215.592,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	83.403.475.510,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.589.469.455,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75.775.750,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.645.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	82.324.050,00
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	6.000.000,00
8	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	283.876.544,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93.433.500,00
10	Dinas Perhubungan	488.319.715,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.076.920.660,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	522.809.000,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	148.216.367,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	36.014.700,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	38.967.500,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	669.715.238,00
17	Sekretariat Daerah	3.010.710.161,00
18	Sekretariat DPRD	300.152.000,00
19	Kecamatan Lampihong	18.180.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
20	Kecamatan Batumandi	4.000.000,00
21	Kecamatan Halong	16.252.000,00
22	Kecamatan Tebing Tinggi	30.343.000,00
23	Kecamatan Paringin	2.800.000,00
24	Kecamatan Paringin Selatan	75.128.500,00
25	Inspektorat	2.620.250,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	331.502.000,00
Jumlah		97.360.866.492,00

2. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp31.976.925.188,39. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 314 Rincian Penghapusan Aset Lain-lain per SKPD

No.	Nama SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.498.126.310,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	25.267.351.303,08
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.255.089.888,31
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	73.495.750,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.046.667,00
6	Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	79.873.467,00
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	6.000.000,00
8	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	171.346.667,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77.117.800,00
10	Dinas Perhubungan	264.835.109,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	519.752.275,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	424.501.300,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	137.888.986,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	32.103.403,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37.295.500,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	171.417.638,00
17	Sekretariat Daerah	408.109.695,00
18	Sekretariat Dprd	165.066.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama SKPD	Nilai
19	Kecamatan Lampihong	16.879.000,00
20	Kecamatan Batumandi	3.000.000,00
21	Kecamatan Halong	11.132.800,00
22	Kecamatan Tebing Tinggi	26.153.700,00
23	Kecamatan Paringin	1.120.000,00
24	Kecamatan Paringin Selatan	72.228.500,00
25	Inspektorat	2.620.250,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	240.372.930,00
Jumlah		31.976.925.188,39

3. Penghapusan Persediaan karena Persediaan *expired* dan rusak Rp667.808.168,09. Persediaan *expired* sebesar Rp627.622.763,43 dan Persediaan rusak sebesar Rp40.185.404,66.

5.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	57.018.986.162,78	911.663.627.063,51

Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah hasil dari selisih Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dikurangi Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional tahun berjalan. Surplus/ (Defisit) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp57.018.986.162,78 dan Rp911.663.627.063,51.

5.4.6. Surplus/ Defisit LO	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	57.018.986.162,78	911.663.627.063,51

Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp57.018.986.162,78 dan Rp911.663.627.063,51 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 315 Ringkasan Perhitungan Surplus/ Defisit LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan	2.017.640.784.378,71	2.330.761.069.421,77
Beban	1.894.570.048.744,23	1.381.614.788.928,27
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(66.051.749.471,70)	(37.482.653.429,99)
Surplus/(Defisit) LO	57.018.986.162,78	911.663.627.063,51



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan terhadap Kas dan Setara Kas selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dan saldo Kas dan Setara Kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.048.548.766.545,39	531.346.727.891,46

Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai Aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Aktivitas Operasi untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.048.548.766.545,39 dan Rp531.346.727.891,46. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022, maka Arus Kas dari Aktivitas Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp517.202.038.653,93 atau 97,34%. Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi untuk Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 316 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	2.760.219.240.654,01	1.784.265.909.598,54
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.711.670.474.108,62	1.252.919.181.707,08
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.048.548.766.545,39	531.346.727.891,46

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	2.760.219.240.654,01	1.784.265.909.598,54

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi merupakan kas yang diterima dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Jumlah Masuk Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.760.219.240.654,01 dan Rp1.784.265.909.598,54. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 maka Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp975.953.331.055,47 atau 54,70%. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.760.219.240.654,01 dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.760.543.725.654,01 maka terdapat perbedaan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Rp324.485.000,00 yang merupakan hasil dari penjualan aset tetap. Rincian dan perbandingan Arus Kas Masuk dari Aktifitas Operasi Tahun Anggaran 2023 dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 serta Arus Kas Masuk dari Aktifitas Operasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 317 Perbandingan Arus Masuk Kas dari Aktifitas Operasi dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 serta Arus Kas Masuk dari Aktifitas Operasi Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Arus Kas (LAK)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		Laporan Arus Kas (LAK)
1	Penerimaan Pajak Daerah	13.907.676.851,00	13.907.676.851,00	-	12.308.860.393,50
2	Penerimaan Retribusi Daerah	2.366.139.331,00	2.366.139.331,00	-	1.908.662.405,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.874.367.772,00	14.874.367.772,00	-	13.573.275.479,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	105.534.736.278,01	105.859.221.278,01	324.485.000,00	63.878.621.843,04
5	Penerimaan Bagi Hasil	1.899.001.975.914,00	1.899.001.975.914,00	-	994.362.274.685
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	361.821.744.450,00	361.821.744.450	-	345.185.535.241,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	46.040.531.309,00	46.040.531.309,00	-	52.704.154.259,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	73.995.919.307,00	73.995.919.307,00	-	70.332.537.607,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	16.166.958.000,00	16.166.958.000,00	-	13.333.129.000,00
10	Penerimaan Dana Desa	112.897.928.300,00	112.897.928.300,00	-	107.836.177.240,00
11	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	113.011.263.142,00	113.011.263.142,00	-	102.303.271.167,00
12	Penerimaan Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	-	6.537.075.079,00
13	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	-	-	-	2.335.200,00
Jumlah		2.760.219.240.654,01	2.760.543.725.654,01	324.485.000,00	1.784.265.909.598,54

5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	1.711.670.474.108,62	1.252.919.181.707,08

Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi dan tidak menambah ekuitas. Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.711.670.474.108,62 dan Rp1.252.919.181.707,08. Jika dibandingkan dengan Arus Keluar Kas pada Aktifitas Operasi Tahun Anggaran 2022 maka Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp458.751.292.401,54 atau 36,61%. Sedangkan perbandingan antara Arus Keluar



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp1.711.670.474.108,62 dengan Realisasi Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.711.670.474.108,62 maka tidak terdapat perbedaan. Dengan rincian dan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 318 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	TA 2023 (Rp)		Perbedaan (Rp)	TA 2022 (Rp)
		Laporan Arus Kas (LAK)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		Laporan Arus Kas (LAK)
1	Pembayaran Pegawai	437.938.657.742,00	437.938.657.742,00	-	386.952.974.398,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	795.194.098.965,62	795.194.098.965,62	-	570.184.530.893,23
3	Pembayaran Hibah	165.622.074.354,00	165.622.074.354,00	-	47.703.693.560,85
4	Pembayaran Bantuan Sosial	5.226.190.000,00	5.226.190.000,00	-	4.471.225.000,00
5	Pembayaran Tak Terduga	1.602.500.000,00	1.602.500.000,00	-	1.203.971.500,00
6	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	306.086.953.047,00	306.086.953.047	-	242.402.786.355,00
Jumlah		1.711.670.474.108,62	1.711.670.474.108,62	-	1.252.919.181.707,08

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

TA 2023
(Rp)

TA 2022
(Rp)

(630.349.603.157,03)

(440.673.841.926,03)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi merupakan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi dalam satu periode akuntansi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp630.349.603.157,03) dan (Rp440.673.841.926,03). Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022, maka Arus Kas dari Aktivitas Investasi mengalami kenaikan sebesar (Rp189.675.761.231,00) atau 43,04%. Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi untuk Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 319 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	324.485.000,00	1.098.113.400,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	(630.674.088.157,03)	(441.771.955.326,03)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(630.349.603.157,03)	(440.673.841.926,03)



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	324.485.000,00	1.098.113.400,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi merupakan kas yang diterima dari pelepasan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi untuk Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp324.485.000,00 dan Rp1.098.113.400,00. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebesar Rp324.485.000,00 merupakan penerimaan atas hasil penjualan aset tetap (Aset Tetap Lainnya).

5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	630.674.088.157,03	441.771.955.326,03

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi merupakan kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi untuk Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp630.674.088.157,03 dan Rp441.771.955.326,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 320 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Perolehan Tanah	-	5.115.127.000,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	161.050.737.928,00	94.619.742.724,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	99.741.722.125,39	47.238.414.493,82
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	313.533.424.903,64	244.145.726.258,21
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.354.696.000,00	652.944.850,00
6	Perolehan Aset Lainnya	993.507.200,00	-
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
Jumlah		630.674.088.157,03	441.771.955.326,03

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	-	-

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali, yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, serta bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas selama satu periode akuntansi yang perlu dibayar kembali di masa yang akan datang. Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.5.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas pengeluaran kas selama satu periode akuntansi. Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(875.000,00)	875.000,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris untuk Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp875.000,00) dan Rp875.000,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp875.000,00 atau 100% jika dibandingkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp875.000,00. Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris untuk Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 321 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	140.064.189.631,01	95.837.029.923,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	(140.065.064.631,01)	(95.836.154.923,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(875.000,00)	875.000,00

5.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

TA 2023	TA 2022
(Rp)	(Rp)
<u>140.064.189.631,01</u>	<u>95.837.029.923,00</u>

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris untuk Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp140.064.189.631,01 dan Rp95.837.029.923,00. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp44.227.159.708,01 atau 46,15% jika dibandingkan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp95.837.029.923,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 322 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Potongan Iuran Wajib Pegawai	13.586.464.767,00	13.168.517.850,00
2	Potongan Taperum	-	4.712.893,00
3	Potongan PPh Pasal 21	16.143.243.513,00	12.168.535.112,00
4	Potongan PPh Pasal 22	3.408.821.387,00	1.750.864.134,00
5	Potongan PPh Pasal 23	534.153.373,00	490.701.936,00
6	Potongan PPh Pasal 4 (2)	11.640.170.296,00	7.971.815.522,00
7	Potongan PPN	82.966.608.192,01	52.815.999.530,00
8	Potongan Lain-lain	-	897.382,00
9	BPJS Kesehatan	10.518.391.064,00	6.238.705.595,00
10	Jaminan Kecelakaan Kerja	316.596.366,00	307.300.549,00
11	Jaminan Kematian	949.740.673,00	918.104.420,00
12	SPJ yang Belum Terbayarkan	-	875.000,00
Jumlah		140.064.189.631,01	95.837.029.923,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Transitoris	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	<u>140.065.064.631,01</u>	<u>95.836.154.923,00</u>

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktifitas Transitoris untuk Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp140.065.064.631,01 dan Rp95.836.154.923,00. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp44.228.909.708,01 atau 46,15% jika dibandingkan Arus Keluar Kas dari Aktifitas Transitoris Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp95.836.154.923,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 323 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Transitoris

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Potongan Iuran Wajib Pegawai	13.586.464.767,00	13.168.517.850,00
2	Potongan Taperum	-	4.712.893,00
3	Potongan PPh Pasal 21	16.143.243.513,00	12.168.535.112,00
4	Potongan PPh Pasal 22	3.408.821.387,00	1.750.864.134,00
5	Potongan PPh Pasal 23	534.153.373,00	490.701.936,00
6	Potongan PPh Pasal 4 (2)	11.640.170.296,00	7.971.815.522,00
7	Potongan PPN	82.966.608.192,01	52.815.999.530,00
8	Potongan Lain-lain	-	897.382,00
9	BPJS Kesehatan	10.518.391.064,00	6.238.705.595,00
10	Jaminan Kecelakaan Kerja	316.596.366,00	307.300.549,00
11	Jaminan Kematian	949.740.673,00	918.104.420,00
12	SPJ yang Belum Terbayarkan	875.000,00	-
Jumlah		140.065.064.631,01	95.836.154.923,00

5.5.5. Kenaikan/ (Penurunan) Kas	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	<u>418.198.288.388,36</u>	<u>90.673.760.965,43</u>

Kenaikan/ (Penurunan) Kas merupakan penjumlahan dari Arus Kas Bersih Aktifitas Operasi, Aktifitas Investasi, Aktifitas Pendanaan dan Aktifitas Transitoris. Jumlah Kenaikan/ (Penurunan) Kas Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp418.198.288.388,36 dan Rp90.673.760.965,43 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 324 Kenaikan/ (Penurunan) Kas Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.048.548.766.545,39	531.346.727.891,46
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(630.349.603.157,03)	(440.673.841.926,03)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(875.000,00)	875.000,00
Kenaikan/ (Penurunan) Kas		418.198.288.388,36	90.673.760.965,43

5.5.6. Saldo Awal Kas	1 Januari 2023	1 Januari 2022
	(Rp)	(Rp)
	<u>222.573.247.613,97</u>	<u>131.899.486.648,54</u>

Saldo awal kas 1 Januari 2023 sebesar Rp222.573.247.613,97 dan saldo awal kas 1 Januari 2022 sebesar Rp131.899.486.648,54. Saldo awal Kas terdiri dari Kas di BUD, Kas Bendahara Penerimaan, Kas Bendahara Pengeluaran, Kas Bendahara BLUD, Kas Bendahara JKN, Kas Bendahara BOK, Kas Bendahara BOP, dan Kas Bendahara BOS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 325 Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, FKTP, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, Kas di Bendahara BOP dan Setara Kas

No	Nomor Rekening	1 Januari 2023		1 Januari 2022	
		Nama Rekening	Jumlah (Rp)	Nama Rekening	Jumlah (Rp)
Kas					
Bank Kalsel					
1	013.00.03.00003.5	Kas Umum Daerah Kabupaten Balangan	194.215.215.818,87	Kas Umum Daerah Kabupaten Balangan	75.760.132.461,81
Total Kas di BUD			194.215.215.818,87		75.760.132.461,81
Total			194.215.215.818,87		75.760.132.461,81
1	Kas di Bendahara BLUD		28.020.766.992,99		54.764.848.476,73
2	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)		129.978.981,00		458.698.336,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran		19.534.949,00		271,00
4	Kas di Bendahara BOS		187.586.288,00		915.807.103,00
5	Kas di Bendahara BOP		164.584,11		
Total			222.573.247.613,97		131.899.486.648,54



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.5.7. Saldo Akhir Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	640.771.536.002,33	222.573.247.613,97

Saldo akhir kas 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp640.771.536.002,33 dan Rp222.573.247.613,97. Saldo Akhir Kas terdiri dari Kas di BUD, Kas Bendahara Penerimaan, Kas Bendahara Pengeluaran, Kas Bendahara BLUD, Kas Bendahara JKN, Kas Bendahara BOK, Kas Bendahara BOP, dan Kas Bendahara BOS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 326 Rincian Saldo Akhir Kas

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Kas di Kas Daerah	624.221.300.103,45	194.215.215.818,87
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	19.534.949,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
4	Kas di Bendahara BLUD	13.733.779.326,88	28.020.766.992,99
5	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	21.841.033,00	129.978.981,00
6	Kas di Bendahara Puskesmas (BOK)	2.552.676.313,00	-
7	Kas di Bendahara BOP	-	164.584,11
8	Kas di Bendahara BOS	241.939.226,00	187.586.288,00
Total		640.771.536.002,33	222.573.247.613,97

5.5.7.1. Saldo Akhir Kas di BUD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	624.221.300.103,45	194.215.215.818,87

Saldo akhir kas di BUD yang ada di rekening giro Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp624.221.300.103,45 dan Rp194.215.215.818,87.

Tabel 327 Saldo Akhir Kas di BUD

No.	Nomor Rekening	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
		Nama Rekening	Jumlah (Rp)	Nama Rekening	Jumlah (Rp)
Bank Kalsel					
1	013.00.03.00003.5	Kas Umum Daerah Kabupaten Balangan	624.221.300.103,45	Kas Umum Daerah Kabupaten Balangan	194.215.215.818,87
TOTAL			624.221.300.103,45		194.215.215.818,87



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.5.7.2. Saldo Akhir Kas di	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Bendahara BLUD	(Rp)	(Rp)
	13.733.779.326,88	28.020.766.992,99

Kas di Bendahara BLUD merupakan Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.733.779.326,88 dan Rp28.020.766.992,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 328 Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD

No.	Bendahara	Nomor Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Penerimaan	013.00.03.00014.4	13.733.779.326,88	28.020.766.992,99
2	Pengeluaran	013.00.03.00015.4	-	-
Jumlah			13.733.779.326,88	28.020.766.992,99

5.5.7.3. Saldo Akhir Kas di	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Bendahara Puskesmas	(Rp)	(Rp)
(FKTP)	21.841.033,00	129.978.981,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp21.841.033,00 dan Rp129.978.981,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 329 Saldo Akhir Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)

No.	Nama Puskesmas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Puskesmas Pirsus	4.448.669,00	4.880,00
2	Puskesmas Lok Batu	141.146,00	56.552.480,00
3	Puskesmas Uren	5.491.910,00	352.866,00
4	Puskesmas Awayan	164.079,00	1.674.407,00
5	Puskesmas Batumandi	23.976,00	81.876,00
6	Puskesmas Juai	56.439,00	31.020,00
7	Puskesmas Lampihong	426.183,00	62.123.602,00
8	Puskesmas Tanah Habang	4.332.307,00	8.182.500,00
9	Puskesmas Halong	144.220	59.025,00
10	Puskesmas Paringin Selatan	3.466,00	653,00
11	Puskesmas Tebing Tinggi	9.067,00	370,00
12	Puskesmas Paringin	6.599.571,00	915.302,00
Jumlah		21.841.033,00	129.978.981,00

5.5.7.4. Saldo Akhir Kas di	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Bendahara BOS	(Rp)	(Rp)
	241.939.226,00	187.586.288,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp241.939.226,00 dan Rp187.586.288,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 330 Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS

No.	Bendahara	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	SD	113.084.948,00	128.814.105,00
2	SMP	128.854.278,00	58.772.183,00
Jumlah		241.939.226,00	187.586.288,00

5.5.7.5. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOP	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	-	164.584,11

Saldo Akhir Kas di Bendahara BOP per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp164.584,11.

Tabel 331 Saldo Akhir Kas di Bendahara BOP

No.	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kb Pembina Paringin Selatan	-	3.000,00
2	Paud Terpadu Negeri Pembina Paringin Selatan	-	126.276,11
3	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Balangan	-	35.308,00
Jumlah		-	164.584,11

5.5.7.6. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	2.552.676.313,00	-

Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.552.676.313,00 dan Rp0,00.

Tabel 332 Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK

No.	Nama Puskesmas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Puskesmas Pirsus	133.486.606,00	-
2	Puskesmas Lok Batu	217.359.803,00	-
3	Puskesmas Uren	227.819.749,00	-
4	Puskesmas Awayan	284.645.329,00	-
5	Puskesmas Batumandi	243.600.110,00	-
6	Puskesmas Juai	72.588.869,00	-
7	Puskesmas Lampihong	256.902.421,00	-
8	Puskesmas Tanah Habang	66.429.233,00	-
9	Puskesmas Halong	165.194.113,00	-
10	Puskesmas Paringin Selatan	326.762.140,00	-
11	Puskesmas Tebing Tinggi	180.353.167,00	-
12	Puskesmas Paringin	377.534.773,00	-
Jumlah		2.552.676.313,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun Anggaran 2023. Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.613.767.447.063,90 jika dibandingkan dengan Ekuitas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.336.148.626.247,33 mengalami peningkatan sebesar Rp1.277.618.820.816,57 atau 38,30%.

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.613.767.447.063,90 berasal dari Saldo Awal Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.336.148.626.247,33 ditambah Surplus/ Defisit LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp57.018.986.162,78 dan ditambah Koreksi Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.220.599.834.653,79.

5.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 1 Januari 2023 sebesar Rp3.336.148.626.247,33 terdiri dari Ekuitas per 1 Januari 2022 sebesar Rp2.324.220.723.617,10 ditambah Surplus/ Defisit LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp911.663.627.063,51 dan ditambah Koreksi Ekuitas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp100.264.275.566,72.

5.6.2. Surplus/ Defisit LO

Surplus/ Defisit LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp57.018.986.162,78 berasal dari pendapatan dikurangi beban Tahun Anggaran 2023 dan mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Operasional pada CaLK 5.4.7.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Merupakan dampak dari perubahan kebijakan akuntansi dari berbasis kas menjadi kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga mengakibatkan banyak terdapat Koreksi Ekuitas.

Koreksi Ekuitas Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.220.599.864.653,79 dan Rp100.264.275.566,72. Koreksi Ekuitas tersebut terdiri atas:

Tabel 333 Koreksi Ekuitas Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA 2023 Rp	TA 2022 Rp
1	Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	6.879.728.248,39	2.852.103.216,97
2	Koreksi Ekuitas – Penyusutan	(1.750.712.377,71)	226.684.884,59



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA 2023 Rp	TA 2022 Rp
3	Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang	-	170.820,50
4	Koreksi Ekuitas – Piutang	1.220.124.355.947,28	47.331.248.622,05
5	Koreksi Ekuitas – Utang	(4.665.208.674,00)	(215.238.788.446,00)
6	Koreksi Ekuitas – Investasi Jangka Panjang	-	(94.521,23)
7	Koreksi Ekuitas – Lainnya	11.671.509,83	265.092.950.989,84
Jumlah		1.220.599.834.653,79	100.264.275.566,72

5.6.3.1. Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	6.879.728.248,39	2.852.103.216,97

Koreksi Ekuitas – Aset Tetap merupakan Koreksi Ekuitas yang diakibatkan kesalahan pencatatan pengakuan Aset Tetap atau catat baru, tukar menukar dan koreksi pencatatan. Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.879.728.248,39 dan Rp2.852.103.216,97. Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 334 Rincian Koreksi Ekuitas - Aset Tetap

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Koreksi Catat Baru – Tanah	3.721.618.000,00
2.	Koreksi Catat Baru - Peralatan dan Mesin	3.400.000,00
3.	Koreksi Catat Baru - Gedung dan Bangunan	3.152.348.200,00
4.	Koreksi Catat Baru - Aset Tetap Lainnya	2.362.050,00
5.	Koreksi karena pembulatan	(1,61)
Total		6.879.728.248,39

Rincian atas koreksi ekuitas aset tetap diatas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Catat Baru pada Tanah sebesar Rp3.721.618.000,00,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berupa Tanah Kantor BPP Juai yang terletak di RT 01 Desa Mungkur Uyam Kec. Juai dengan no register 943006.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

2. Koreksi Catat Baru Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.400.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Meja kerja pejabat (Kabid 2) pada Ruang Kabid Kedaruratan dan Logistik dengan no register 1032194.
3. Koreksi Catat Baru Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.152.348.200,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 335 Koreksi Ekuitas atas Koreksi Catat Baru – Gedung dan Bangunan

Register	Nilai (Rp)	NILAI
1033350	Gedung 1 SLB	129.582.000,00
1033351	Gedung 2 SLB	421.423.200,00
1033352	Gedung 3 SLB	212.840.000,00
1033353	Gedung 4 SLB	212.840.000,00
1033354	Gedung 5 SLB	164.262.400,00
1033355	Gedung 6 SLB	227.238.000,00
1033356	Gedung 7 SLB	361.828.000,00
1033357	Gedung 8 SLB	105.168.000,00
1033358	Gedung 9 SLB	105.168.000,00
1033359	Gedung 10 SLB	76.685.000,00
1033360	Gedung 11 SLB	25.540.800,00
1033361	Gedung 12 SLB	319.260.000,00
1033362	Gedung 13 SLB	258.412.800,00
1033363	Gedung 14 SLB	532.100.000,00
Jumlah		3.152.348.200,00

4. Koreksi Catat Baru Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.362.050,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 336 Koreksi Ekuitas atas Koreksi Catat Baru – Aset Tetap Lainnya

Register	Uraian	NILAI
1030055	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030056	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030057	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030058	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030059	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030060	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030061	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030062	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030063	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Register	Uraian	NILAI
1030064	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030065	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030066	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030067	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030068	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030069	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030070	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030071	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030072	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030073	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030074	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030075	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030076	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030077	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030078	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030079	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030080	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030081	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030082	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030083	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030084	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030085	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030086	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030087	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030088	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030089	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030090	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030091	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030092	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	52.950,00
1030093	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Betina)	46.300,00
1030094	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030095	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030096	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030097	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030098	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030099	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030100	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030101	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
1030102	Ikan Air Tawar Budidaya (Baung Jantan)	46.300,00
Jumlah		2.362.050,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.6.3.2. Koreksi Ekuitas – Penyusutan	(1.750.712.377,71)	226.684.884,59

Koreksi Ekuitas – Penyusutan merupakan Koreksi Ekuitas yang diakibatkan Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Koreksi Ekuitas – Penyusutan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp1.750.712.377,71) dan Rp226.684.884,59. saldo koreksi ekuitas – penyusutan berasal dari pembulatan decimal, perubahan kode barang dan pemecahan kode barang.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.6.3.3. Koreksi Ekuitas –Penyisihan Piutang	-	170.820,50

Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp170.820,50. Saldo Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang tahun 2022 berasal dari Penyisihan Piutang yang sudah lunas pada Piutang Reklame sebesar Rp170.820,50.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.6.3.4. Koreksi Ekuitas – Piutang	1.220.124.355.947,28	47.331.248.622,05

Koreksi Ekuitas – Piutang merupakan saldo atas penghapusan saldo piutang, saldo koreksi ekuitas – piutang tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.220.124.355.947,28 dan Rp47.331.248.622,05. Saldo Koreksi Ekuitas – Piutang Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 337 Rincian Koreksi Ekuitas - Piutang

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi atas Piutang Pemerintah Pusat	1.220.467.891.566,00
2	Koreksi atas Penghapusan Piutang PBB	(193.544.481,00)
3	Koreksi atas Piutang TGR	(219.086.300,00)
4	Koreksi atas piutang Obat dan BMHP	69.095.162,28
		1.220.124.355.947,28

Rincian atas koreksi ekuitas - piutang diatas adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

1. Koreksi atas Piutang Pemerintah Pusat merupakan selisih antara Saldo Akhir KB TA 2022 dengan penerimaan yang tidak disalurkan oleh pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 338 Koreksi Saldo Piutang

Jenis DBH	Saldo Akhir KB TA. 2022 (Rp)	Koreksi Penambahan Piutang Berdasarkan Data Simtrada (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4 = 3 - 2
Pajak	9.810,00	30.574.221.000,00	30.574.211.190,00
Pajak Bumi dan Bangunan	-	27.096.428.000,00	27.096.428.000,00
Bagian Daerah	-	26.471.857.000,00	26.471.857.000,00
Biaya Pungut	-	624.571.000,00	624.571.000,00
PPh	-	3.477.784.000,00	3.477.784.000,00
PPh Pasal 21	-	3.420.544.000,00	3.420.544.000,00
PPh Pasal 25/29	-	57.240.000,00	57.240.000,00
CHT	9.810,00	9.000,00	-810,00
Cukai Hasil Tembakau (CHT)	9.810,00	9.000,00	-810,00
Bukan Pajak	47.366.150.624,00	1.237.259.831.000,00	1.189.893.680.376,00
Migas	-	241.777.000,00	241.777.000,00
Minyak Bumi 15%	-	235.026.000,00	235.026.000,00
Minyak Bumi 0,5%	-	6.751.000,00	6.751.000,00
Minerba	47.293.135.653,00	1.236.908.997.000,00	1.189.615.861.347,00
Iuran Tetap	-	181.874.000,00	181.874.000,00
Royalti	47.293.135.653,00	1.236.727.123.000,00	1.189.433.987.347,00
Kehutanan	73.014.971,00	109.057.000,00	36.042.029,00
PSDH	73.014.971,00	109.057.000,00	36.042.029,00
Grand Total	47.366.160.434,00	1.267.834.052.000,00	1.220.467.891.566,00

2. Koreksi atas Penghapusan Piutang PBB sesuai dengan Surat Keputusan bupati Balangan Nomor 188.45/800/Kum TAHUN 2023 sebesar Rp193.544.481,00.
3. Koreksi atas Piutang TGR sebesar Rp219.086.300,00 merupakan koreksi atas LHP BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan tahun 2021 an. Mardiah dikarenakan SKTJM belum ada yang bersangkutan telah meninggal dunia.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4. Koreksi atas piutang obat dan BMHP sebesar Rp69.095.162,28 merupakan hasil dari pinjam meminjam obat dan BMHP antar Rumah Sakit dengan rincian sebagai berikut:

5. Tabel 339 Rincian Koreksi Ekuitas – Piutang RSUD

Uraian		Nilai
Piutang Vendor Farmasi Double Bayar		
	PT. Graha Medika Mandiri	5.421.875,00
	PT. Yamhatevy Paran Mandiri	8.268.516,00
Piutang Lainnya - Penarikan Obat		
	PT Afifarma Kediri	2.394.041,73
Piutang Lainnya - Piutang Obat Retur PBF		32.307.948,75
Piutang Lainnya - Piutang Lain-lain BMHP		6.238.960,00
Piutang Lainnya - Piutang Lain-lain Obat-obatan		14.463.820,80
Jumlah Piutang Lainnya		69.095.162,28

5.6.3.5. Koreksi Ekuitas – Utang	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
	(4.665.208.674,00)	(215.238.788.446,00)

Koreksi utang merupakan saldo atas penghapusan utang, saldo koreksi ekuitas – utang tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp4.665.208.674,00) dan (Rp215.238.788.446,00). Saldo Koreksi Ekuitas – Utang tahun 2023 berasal dari Lebih Bayar Pemerintah Pusat sesuai dengan PMK No 90 Tahun 2023.

Tabel 340 Rincian Koreksi Ekuitas - Utang

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi atas Utang Pemerintah Pusat	(4.647.760.383,00)
2	Koreksi atas Utang Peminjaman Obat dan BMHP Dari RS Lain	(17.448.291,00)
		(4.665.208.674,00)

Rincian atas koreksi ekuitas - piutang diatas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas utang Pemerintah Pusat merupakan koreksi saldo awal dengan menyesuaikan dengan PM 90 Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 341 Koreksi Piutang Kurang Salur sesuai dengan PMK No 90 Tahun 2023

Jenis DBH	Saldo Lebih Bayar Tahun 2022	Koreksi Saldo Akhir Lebih Bayar Sampai Dengan Tahun 2023 (PMK No 90 Tahun 2023)	Selisih
Pajak	1.375.911.186,00	3.912.990.086,00	(2.537.078.900,00)
Pajak Bumi dan Bangunan	1.375.911.186,00	3.912.984.859,00	(2.537.073.673,00)
Bagian Daerah	1.331.527.051,00	3.719.301.717,00	(2.387.774.666,00)
Biaya Pungut	44.384.135,00	124.309.590,00	(79.925.455,00)
Bagi rata	-	69.373.552,00	(69.373.552,00)
CHT	-	5.227,00	(5.227,00)
Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	5.227,00	(5.227,00)
SDA	163.152.618.703,00	165.263.300.186,00	(2.110.681.483,00)
Minerba	162.965.992.076,00	164.781.412.938,00	(1.815.420.862,00)
Iuran Tetap	14.305.503,00	1.829.726.365,00	(1.815.420.862,00)
Royalti	162.951.686.573,00	162.951.686.573,00	-
Kehutanan	13.153.703,00	13.153.703,00	-
PSDH	13.153.703,00	13.153.703,00	-
Perikanan	173.472.924,00	468.733.545,00	(295.260.621,00)
Perikanan	173.472.924,00	468.733.545,00	(295.260.621,00)
Grand Total	164.528.529.889,00	169.176.290.272,00	(4.647.760.383,00)

2. Koreksi atas Utang Peminjaman Obat dan BMHP dari RS Lain merupakan pencatatan dari peminjaman obat antar rumah sakit sebesar Rp17.448.291,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 342 Koreksi Utang Pinjaman Obat dari RSUD

NO	RSUD	TANGGAL	NAMA BARANG	SATUAN	SATUAN HARGA	JUMLAH
1	RS Amuntai	23/03/2021	NOVERON INJ	4	87.412,50	349.650,00
		27/09/2021	INFUS AMINOSTERIL INFANT 6%	5	51.615,00	258.075,00
		27/09/2021	PHENITTOIN INJ	10	4.440,00	44.400,00
Jumlah						652.125,00
2	RS Tanjung	30/09/2023	BACTESYN 750MG INJ (picyn 750mg Inj)	40	27.750,00	1.110.000,00
		11/10/2023	SIRUP CEFADROXIL 125MG/5ML	60	8.547,00	512.820,00
Jumlah						1.622.820,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

NO	RSUD	TANGGAL	NAMA BARANG	SATUAN	SATUAN HARGA	JUMLAH
3	RSUD H. Damanhuri Barabai	29/09/2018	COTRIMOXAZOL SYR	100	3.850,00	385.000,00
		23/11/2018	CATAPRES INJ	50	48.146,00	2.407.300,00
		20/12/2018	FARSORBID INJ	45	64.350,00	2.895.750,00
		07/05/2019	MP 125 MG INJ	360	16.873,00	6.074.280,00
		12/07/2023	LORAZEPAM 2MG TAB	500	694,00	347.000,00
		18/10/2023	SABU INJ (biosave)	2	521.833,00	1.043.666,00
		31/10/2023	PYRAZINAMIDA 500MG TAB	300	3.296,00	988.800,00
		31/10/2023	MORPHIN INJ	20	34.385,00	687.700,00
		07/12/2023	MORPHIN INJ	10	34.385,00	343.850,00
Jumlah						15.173.346,00
Total						17.448.291,00

5.6.3.6. Koreksi Ekuitas – Investasi Jangka Panjang

TA 2023
(Rp)

TA 2022
(Rp)

-

(94.521,23)

Koreksi Ekuitas – Investasi Jangka Panjang merupakan Koreksi Ekuitas yang diakibatkan karena pencatatan biaya yang tidak dibebankan pada BPR dan PDAM. Koreksi Ekuitas – Investasi Jangka Panjang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp94.521,23)

5.6.3.7. Koreksi Ekuitas – Lainnya

TA 2023
(Rp)

TA 2022
(Rp)

11.671.509,83

265.092.950.989,84

Koreksi Ekuitas – Lainnya merupakan Koreksi Ekuitas selain Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Ekuitas – Aset Tetap, Koreksi Ekuitas – Penyusutan, Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang, Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang Dana Bergulir, Koreksi Ekuitas – *Extra Comptable*, Koreksi Ekuitas – Utang Belanja, Koreksi Ekuitas – Amortisasi, Koreksi Ekuitas – Piutang. Koreksi Ekuitas – Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp11.671.509,83 dan Rp265.092.950.989,84.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 343 Rincian Saldo Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2022

NO	URAIAN	NILAI
1	koreksi saldo awal tahun 2023	14.855.736,00
2	pengembalian obat-obatan dan BMHP dan Retur ke Distributor	155.625,08
3	Pembulatan nilai persediaan Tahun 2023	(42,25)
4	koreksi nilai saldo awal tahun 2023	(3.339.809,00)
Jumlah		11.671.509,83

5.6.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari Ekuitas Awal, Surplus/ Defisit LO dan Dampak Kumulatif dari Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar. Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 344 Saldo Ekuitas Akhir

No.	Uraian	2023	2022
1	Ekuitas Awal	3.336.148.626.247,33	2.324.220.723.617,10
2	Surplus/ Defisit LO	57.018.986.162,78	911.663.627.063,51
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	1.220.599.834.653,79	100.264.275.566,72
Total		4.613.767.447.063,90	3.336.148.626.247,33



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

BAB VI

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

6.1. Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi

Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil Pajak) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB), Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT/AP) dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Besaran alokasi bagi hasil diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan untuk periode tiga bulanan (triwulan) ditetapkan setelah tanggal Neraca. Realisasi penyaluran pada tahun berjalan tidak sepenuhnya penerimaan atas potensi tahun berjalan akan tetapi juga merupakan penerimaan atas potensi tahun sebelumnya pada umumnya merupakan potensi Triwulan IV.

Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil Pajak) yang diterima pada Tahun 2023 sebesar Rp113.011.263.142,00 yang terdiri dari penerimaan dari bagi hasil Tahun 2022 atau penyelesaian piutang Tahun 2022 sebesar Rp34.664.929.133,00 dan sebesar Rp78.346.334.009,00 merupakan penerimaan bagi hasil tahun 2023, dengan rincian tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 345 Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Provinsi Selama Tahun 2023

No	Tanggal Penyaluran	Jenis Penerimaan					Jumlah
		PBB-KB (Rp)	PKB (Rp)	BBN-KB (Rp)	P. Air Permukaan (Rp)	Pajak Rokok (Rp)	
Penerimaan Tahun 2023 atas Realisasi Potensi Tahun 2022							
1	06 Januari 2023	3.590.124.016,00	-	-	-	-	3.590.124.016,00
2	28 Februari 2023	23.077.758.788,00	1.421.058.604,00	2.681.523.036,00	241.918.720,00	2.060.958.279,00	29.483.217.427,00
3	07 Juni 2023	-	-	-	-	1.591.587.690,00	1.591.587.690,00
Jumlah Realisasi Penerimaan Atas Realisasi Potensi Tahun 2022		26.667.882.804,00	1.421.058.604,00	2.681.523.036,00	241.918.720,00	3.652.545.969,00	34.664.929.133,00
Penerimaan 2023 atas Realisasi Potensi Tahun 2023							
1	07 Juni 2023	22.106.734.991,00	1.266.082.478,00	2.592.787.035,00	100.775.237,00	2.887.493.711,00	28.953.873.452,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No	Tanggal Penyaluran	Jenis Penerimaan					Jumlah
		PBB-KB (Rp)	PKB (Rp)	BBN-KB (Rp)	P. Air Permukaan (Rp)	Pajak Rokok (Rp)	
2	08 September 2023	9.691.800.628,00	-	-	-	2.472.544.817,00	12.164.345.445,00
3	25 Oktober 2023	10.015.002.660,00	1.212.496.052,00	2.590.537.865,00	297.762.243,00	-	14.115.798.820,00
4	10 November 2023	16.430.497.754,00	1.517.269.122,00	2.582.694.859,00	380.450.776,00	2.201.403.781,00	23.112.316.292,00
Jumlah Realisasi Penerimaan Atas Realisasi Potensi Tahun 2023		58.244.036.033,00	3.995.847.652,00	7.766.019.759,00	778.988.256,00	7.561.442.309,00	78.346.334.009,00
Jumlah Total Realisasi Penerimaan Tahun 2023		84.911.918.837,00	5.416.906.256,00	10.447.542.795,00	1.020.906.976,00	11.213.988.278,00	113.011.263.142,00

Untuk penerimaan atas potensi bagi hasil tahun 2023 tidak seluruhnya diterima pada tahun 2023 sebagian diterima pada awal tahun 2024. Adapun dasar penetapan Penerimaan Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Desember 2022 dan Periode Penerimaan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2023.
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Maret 2023.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Maret 2023.
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 068 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Maret 2023.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan April Sampai Dengan Bulan Juni 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 091 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan April Sampai Dengan Bulan Juni 2023.
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan April Sampai Dengan Bulan Juni 2023.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 093 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan April Sampai Dengan Bulan Juni 2023.
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0101 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Juli Sampai Dengan Bulan September 2023.
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0102 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Juli Sampai Dengan Bulan September 2023.
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0103 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Juli Sampai Dengan Bulan September 2023.
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Juli Sampai Dengan Bulan September 2023.
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0150/KUM/2024 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan Desember 2023.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur total bagi hasil Tahun 2023 sebesar Rp111.354.363.474,18 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp78.346.334.009,00 sehingga piutang Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.008.029.465,18 dari nilai piutang tersebut telah disalurkan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

seluruhnya pada Tahun 2024 sebesar Rp33.008.029.465,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp0,18 yang merupakan pembulatan dari penyaluran, adapun rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 346 Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Provinsi Pada Tahun 2023

No.	Uraian	Pagu Alokasi (Rp)	Penyaluran Tahun 2023 (Rp)	Penyaluran Tahun 2024 (Rp)	Selisih (+ / -)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				
		1.266.082.478,39	1.266.082.478,00	-	(0,39)
		1.212.496.051,82	1.212.496.052,00	-	0,18
		1.517.269.122,41	1.517.269.122,00	-	(0,41)
		1.459.524.173,64	-	1.459.524.174,00	0,36
	Jumlah	5.455.371.826,26	3.995.847.652,00	1.459.524.174,00	(0,26)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				
		2.592.787.034,78	2.592.787.035,00	-	0,22
		2.590.537.865,08	2.590.537.865,00	-	(0,08)
		2.582.694.858,72	2.582.694.859,00	-	0,28
		2.513.572.549,01	-	2.513.572.549,00	(0,01)
	Jumlah	10.279.592.307,59	7.766.019.759,00	2.513.572.549,00	0,41
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)				
		22.106.734.991,23	22.106.734.991,00	-	(0,23)
		19.706.803.288,27	19.706.803.288,00	-	(0,27)
		19.938.882.589,18	16.430.497.754,00	3.508.384.835,00	(0,18)
		23.318.427.448,00	-	23.318.427.448,00	-
	Jumlah	85.070.848.316,68	58.244.036.033,00	26.826.812.283,00	(0,68)
4	Pajak Air Permukaan (PAP)				
		100.775.237,08	100.775.237,00	-	(0,08)
		297.762.242,75	297.762.243,00	-	0,25
		380.450.775,82	380.450.776,00	-	0,18
		342.509.549,00	-	342.509.549,00	-
	Jumlah	1.121.497.804,65	778.988.256,00	342.509.549,00	0,35
5	Pajak Rokok				
		2.887.493.711,00	2.887.493.711,00	-	-
		2.472.544.817,00	2.472.544.817,00	-	-
		2.201.403.781,00	2.201.403.781,00	-	-
		1.865.610.910,00	-	1.865.610.910,00	-
	Jumlah	9.427.053.219,00	7.561.442.309,00	1.865.610.910,00	-
	Jumlah Total	111.354.363.474,18	78.346.334.009,00	33.008.029.465,00	(0,18)



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

6.2. Potensi Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Pada Tahun 2023 BPK Perwakilan Kalimantan Selatan melakukan pemeriksaan Kepatuhan Terkait Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan Periode 2022-2023 dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP. Dari hasil pemeriksaan tersebut masih terdapat sisa temuan yang belum ditindak lanjuti sampai dengan tahun 2024 dan ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sehingga Pemerintah Daerah belum bisa mencatat sebagai piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan hanya mengelompokkannya sebagai sumber potensi piutang pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 347 Penyelesaian Utang Belanja Belanja Kepada Pihak Ke Tiga

No.	Dasar	Uraian	Pelaksan a	Nilai Temuan	Nilai Pengembalian	Sisa Yang Belum Dikembalikan
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	LHP BPK RI atas LKPD Tahun 2022 (24/LHP/XI X.BJM/12/2023 Tanggal 22 Desember 2023)	Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Gunung Batu - Iyam	CV. HRS	233.051.950,35	110.000.000,00	123.051.950,35
		Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sumber Agung	CV. BRP	245.366.932,32	30.000.000,00	215.366.932,32
		Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. 4 Gunung Pandau - Haur Batu	CV. An	431.761.721,58	210.000.000,00	221.761.721,58
		Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lajar - Mundar	CV. BRP	91.013.293,95	30.000.000,00	61.013.293,95
		Kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. 4 Muara Pitap - Simp. 4 Gunung Pandau	CV. SB	881.043.396,94	200.000.000,00	681.043.396,94
Jumlah				1.882.237.295,14	580.000.000,00	1.302.237.295,14

6.3. Penyelesaian Utang Belanja Kepada Pihak Ke Tiga

Pada akhir Tahun Anggaran 2022 terdapat pembayaran kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan dengan nilai total sebesar Rp510.196.000,00 dan telah diselesaikan pembayarannya pada tahun 2023 sedangkan sisa hutang pihak ketiga sebesar Rp50.885.290,50 yang merupakan hutang pihak ketiga tahun 2021 atas kekurangan pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Mauya - Binuang Santang yang dilaksanakan oleh CV. Azm Husna dengan kontrak Nomor 03/KPA/JL-26/2021 tanggal 12 November 2021. Namun sampai dengan akhir tahun 2023 tidak ada mengajukan permintaan pembayaran sehingga Pemerintah Kabupaten Balangan tidak



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

bisa melakukan pelunasan hutang tersebut, adapun rincian dimaksud tersaji pada tabel berikut:

Tabel 348 Penyelesaian Utang Belanja Belanja Kepada Pihak Ke Tiga

No.	Nama SKPD	Nomor Kontrak dan tanggal Kontrak	Uraian Kontrak	Nama Rekanan	Saldo Awal Utang Belanja Pihak Ketiga Tahun 2023 (Rp)	Nilai (Rp)	Saldo Akhir Utang Belanja Pihak Ketiga Tahun 2023 (Rp)	Keterangan
1	DISPUPR & PERKIM	57/SPK/PSU-DISPUPR-PERKIM/APBD/BLG/2022 (23 Agustus 2022)	Pembangunan/peningkatan Jalan Lingkungan SMKN 1 Desa Mantimin Kec. Batumandi	CV. Bawan Permai	113.945.000,00	113.945.000,00	-	SP2D Nomor 08145, tanggal 16 November 2023
2	DISPUPR & PERKIM	011/PWS.100/A PBD-P/PERKIM-PSU/2022 (24 Oktober 2022)	Pengawasan Pembangunan Drainase RT.04 Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan	CV. Fiazta Matrix Consultant	4.298.000,00	4.298.000,00	-	SP2D Nomor 08784, tanggal 24 November 2023
3	DISPUPR & PERKIM	011/PWS.98/APBD-P/PERKIM-PSU/2022 (24 Oktober 2022)	Pengawasan Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Binuang Santang, Halong	CV. Fiazta Matrix Consultant	8.674.000,00	8.674.000,00	-	SP2D Nomor 08780, tanggal 24 November 2023
4	DISPUPR & PERKIM	89/SPK/SDA/2022 (1 September 2022)	Pemeliharaan 5% Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Lingsir Kec. Paringin Selatan	CV. Abimanyu	8.568.000,00	8.568.000,00	-	SP2D Nomor 08092, tanggal 16 November 2023
5	DISPUPR & PERKIM	13/PWS.67/APBD-P/PERKIM-PSU/2022 (24 Oktober 2022)	Pengawasan Pembuatan/Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Riwa Batumandi	CV. Bizplan Rekadimensia	8.730.000,00	8.730.000,00	-	SP2D Nomor 08093, tanggal 16 November 2023
6	DISPUPR & PERKIM	157/SPK/SDA.A PBDP/2022 (8 November 2022)	Perkuatan Tebing Sungai Kelurahan Paringin Timur RT. 7	CV. Lentera Bumi Sanggam	175.275.000,00	175.275.000,00	-	SP2D Nomor 08058, tanggal 16 November 2023
7	DINKES PPKB	03/PPK/APBDP/Pws-Poskesdes-THB/DinkesPPK B-Blg/2022 (20/10/2022)	Pengawasan Pembangunan Poskesdes Tanah Habang	CV. Berkah Desain Konsultan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	SP2D Nomor 03593, tanggal 01 Agustus 2023
8	DKPPP	520/972/DKPPP_Blg/XI/2022	JUT Sungai Ketapi RT.01 (Pembayaran 95%)	CV. Adreana Sejahtera	167.846.000,00	167.846.000,00	-	SP2D Nomor 03413, tanggal 01 Juli 2023
9	DKPPP	521/151.4/SEKRE/DKPP3-BLG/2022	Rehab Ruang Arsip DKPPP (Pembayaran 5%)	CV. Usaha Bersama	8.860.000,00	8.860.000,00	-	SP2D Nomor 03868, tanggal 08 Agustus 2023
10	DISPUPR & PERKIM	03/KPA/JL-26/2021 12 November 2021	Peningkatan Jalan Mauya - Binuang Santang	CV. Azm Husna	50.885.290,50	-	50.885.290,50	Tidak Ada Pengajuan Dari Pihak Ke Tiga
Jumlah					561.081.290,50	510.196.000,00	50.885.290,50	



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

6.4. Pendapatan Lainnya

Sesuai dengan Pasal Pasal 47 Ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus disebutkan bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (termasuk DBH) dalam bentuk non Tunai dicatat sebagai pendapatan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 hal Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF disebutkan bahwa:

1. Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF maka Pemerintah Daerah mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer – Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO). Namun dalam hal terdapat DBH kurang bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer – Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari piutang Dana Transfer Umu (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).
2. Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dari Rekening TDF dan telah disalurkan ke RKUD maka Pemerintah Daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Aset Lainnya (Neraca) dan mengakui pendapatan dengan mencatat estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer – Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).

Sesuai dengan nota dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor : ND-67/PB.6/2023 tanggal 25 Januari 2023 hal Kebijakan Akuntansi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Rekening *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD) dan nota dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor : ND-226/PB.3/2023 tanggal 10 Februari 2023 hal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 bahwa pendapatan TDF Pmerintah Kabupaten Balangan ditempatkan dalam Rek Lain BI TDF TKD Kab Balangan nomor rekening 519000456980 sejumlah Rp637.760.586.124,00 telah dibayarkan seluruhnya dalam dua tahap yaitu tahap 1 pada tanggal 14 April 2023 sebesar Rp318.880.275.000,00 dan tahap 2 pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp318.880.311.124,00 dengan rincian tersaji pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 349 Realisasi Pendapatan TDF Sampai Dengan Tahun 2023

No	Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahap 1 (Rp)	Realisasi Tahap 2 (Rp)	Saldo
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	621.942.628.173,00	310.971.314.850,00	310.971.313.323,00	-
2	DBH PPh Pasal 21	1.153.272.895,00	576.636.500,00	576.636.395,00	-
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	9.638.215,00	4.819.100,00	4.819.115,00	-
4	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	12.934.719.851,00	6.467.360.000,00	6.467.359.851,00	-
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.474.621.993,00	737.311.000,00	737.310.993,00	-
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	8.748.300,00	4.374.150,00	4.374.150,00	-
7	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	25.165.511,00	12.582.800,00	12.582.711,00	-
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	211.753.211,00	105.876.600,00	105.876.611,00	-
9	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	37.975,00		37.975,00	-
Jumlah		637.760.586.124,00	318.880.275.000,00	318.880.311.124,00	-

Sedangkan untuk Tahun 2023 sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S-74/WPB.19/2024 Perihal Penyampaian Rekening Koran TDF TKD Pemda di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan TDF Pemerintah Kabupaten Balangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 350 Rincian TDF Sampai Dengan Desember 2023

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	DBH PPh Pasal 21	2.059.518.000,00
2	DBH PPh Pasal 25/29 OP	5.446.000,00
3	DBH PBB Migas Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	479.607.000,00
4	DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	119.644.000,00
5	DBH PBB Perhutanan Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	6.467.000,00
6	DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	7.121.681.000,00
7	DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	11.675.000,00
8	DBH SDA Minyak Bumi	32.512.000,00
9	DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	181.874.000,00
10	DBH SDA Minerba - Royalti	1.088.607.075.000,00
11	DBH SDA Kehutanan - PSDH	32.271.000,00
Jumlah		1.098.657.770.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

BAB VII

PENUTUP

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2023 realisasi penerimaan pendapatan daerah telah mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, LKPD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan tersebut tetap mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dari segi pendapatan ditargetkan sebesar Rp2.384.594.925.767,05 terealisasi sebesar Rp2.760.543.725.654,01 atau mencapai 115,77%, sehingga melebihi dari target anggaran Pendapatan sebesar Rp375.949.274.736,96 atau 15,77% dari target yang telah ditetapkan. Belanja dianggarkan sebesar Rp2.557.167.298.075,00 terealisasi sebesar Rp2.292.344.562.265,65 atau hanya mencapai 89,64%, sehingga anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp264.822.735.809,35 atau 10,36%. Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar Rp172.572.372.307,95 terealisasi sebesar Rp172.572.372.307,95 atau 100% yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp222.572.372.307,95 terealisasi sebesar Rp222.572.372.307,95 atau 100% sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp50.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 100,00%.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Balangan bertekad meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut, baik dari segi penyempurnaan regulasi/aturan dan segi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 kami sajikan dengan mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang konstruktif, sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di masa mendatang akan semakin meningkat. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPD secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom